



dirdukcapil
Jabar



PROFIL PERKEMBANGAN **KEPENDUDUKAN**

Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat



Tim Penyusun

Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Pengarah

Gubernur Jawa Barat

Pembina

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat

Ketua

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Wakil Ketua

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Sekretaris

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Anggota

Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait, Instansi Vertikal Terkait dan Pakar/Tenaga Ahli

Sambutan Gubernur

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sampurasun,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025* dapat disusun dan diterbitkan dengan baik.

Sebagaimana diketahui, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyajikan data kependudukan dalam skala provinsi. Kewajiban tersebut bukan



semata-mata bentuk pemenuhan amanat regulasi, melainkan juga merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang tertib, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Penyusunan *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025* ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak, baik instansi pemerintah, dunia usaha, lembaga penelitian, maupun masyarakat umum, terhadap ketersediaan data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yang telah menunjukkan dedikasi dan kerja keras dalam menyusun serta



menerbitkan buku ini sebagai bagian dari upaya memperkuat basis data pembangunan daerah.

Kita memahami bahwa dalam pengumpulan dan penyusunan data kependudukan masih dapat ditemukan perbedaan angka sebagai akibat dari perbedaan konsep, metodologi, maupun teknik pengumpulan data. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, data kependudukan yang telah dikonsolidasikan secara nasional dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan data yang sah dan wajib digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, serta pencegahan kriminalitas.

Data kependudukan memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Ketersediaan data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan publik yang responsif, meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat perencanaan pembangunan, serta mendorong pertumbuhan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan data kependudukan harus terus diperkuat melalui sinergi antarlembaga, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kualitas tata kelola data yang berkesinambungan.

Saya berharap data statistik kependudukan yang disajikan dalam buku profil ini dapat dimanfaatkan secara luas oleh seluruh pemangku kepentingan, baik sebagai dasar perencanaan, evaluasi, maupun pengambilan keputusan di berbagai sektor pembangunan. Ke depan, kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan seluruh instansi terkait perlu terus diperkuat agar kualitas data yang dihasilkan semakin informatif, akurat, dan faktual, serta mampu mendukung perumusan kebijakan yang tepat sasaran dalam rangka mewujudkan **Jabar Istimewa: Lembur Diurus, Kota Ditata**.



Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, serta memberikan kekuatan dalam melanjutkan ikhtiar bersama untuk mewujudkan **Jabar Istimewa: Lembur Diurus, Kota Ditata** melalui pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, inovasi yang berkelanjutan, dan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Bandung, Juni 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
GUBERNUR JAWABARAT,

DEDI MULYADI

Kata Pengantar Kepala Dinas

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan hidayah-Nya, ***Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025*** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan buku ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.



Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini disusun dengan menggunakan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025 yang bersumber dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Data Konsolidasi Bersih (DKB) ini merupakan satu-satunya data yang digunakan untuk semua keperluan pelayanan publik dan pembangunan.

Data kependudukan yang valid, akurat, dan mutakhir memiliki peran penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), merancang program pembangunan yang tepat sasaran, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tingkat daerah. Pengelolaan data kependudukan yang optimal juga



menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat penyelenggaraan pembangunan daerah.

Penyusunan buku profil ini bertujuan untuk menyediakan data kependudukan yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan komprehensif mengenai kuantitas, kualitas, mobilitas penduduk, serta kepemilikan dokumen kependudukan. Buku profil ini secara umum menyajikan dinamika penduduk, termasuk pertumbuhan kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk di wilayah Jawa Barat.

Data kependudukan yang terangkum dalam buku profil ini memiliki fungsi strategis dalam pengambilan kebijakan di lembaga bidang perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, dan pembangunan demokrasi di Jawa Barat.

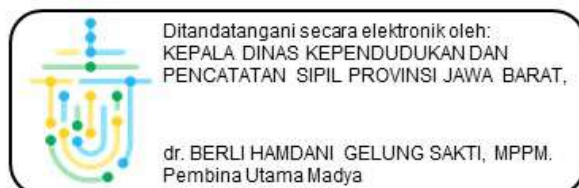
Saya mengapresiasi kerja keras tim penyusun dan berharap buku ini bermanfaat bagi instansi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ini hadir dengan formasi, pola, dan kerangka yang berbeda tanpa mengurangi substansi maupun tujuan strategisnya. Diharapkan dengan perbedaan tersebut, buku profil ini menjadi lebih menarik, analitis, dan informatif.

Aamiin yaa Rabbal 'Aalamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandung, Juni 2025





Daftar Isi

Tim Penyusun	i
Sambutan Gubernur	ii
Kata Pengantar Kepala Dinas	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Ruang Lingkup	3
1.4. Pengertian Umum	3
BAB 2 GAMBARAN UMUM DAERAH	9
2.1. Letak Geografis Daerah	9
2.2. Kondisi Demografis Daerah	11
2.3. Gambaran Ekonomi Daerah	13
2.3.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha	14
2.3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 (c-to-c)	14
2.3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Triwulan IV-2025 Terhadap Triwulan IV- 2023 (y-on-y)	15
2.3.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Triwulan IV-2025 Terhadap Triwulan III-2025 (q-to-q)	16
2.3.2. PDRB Menurut Pengeluaran	17
2.3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 (c-to-c)	17
2.3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2025 Terhadap Triwulan IV-2024 (y-on-y)	18
2.3.2.3. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2025 Terhadap Triwulan III-2025 (q-to-q)	19
2.4. Potensi Daerah	20
BAB 3 SUMBER DATA	24
3.1. Registrasi	24
3.2. Non Registrasi	24



3.3. Data Dari Lintas Sektor	24
BAB 4 PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN	26
4.1. Kuantitas Penduduk.....	26
4.1.1. Jumlah Dan Sebaran Penduduk	26
4.1.1.1. Jumlah Dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	27
4.1.1.2. Kepadatan Penduduk.....	30
4.1.1.3. Laju Pertumbuhan Penduduk	34
4.1.2. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi.....	35
4.1.2.1. Jumlah Dan Proporsi Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin	35
4.1.2.1.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	35
4.1.2.1.2. Penduduk Usia Median.....	37
4.1.2.1.3. Rasio Jenis Kelamin.....	39
4.1.2.1.4. Piramida Penduduk.....	43
4.1.2.1.5. Rasio Ketergantungan.....	45
4.1.2.2. Jumlah Dan Proporsi Penduduk Menurut Status Kawin	48
4.1.2.2.1. Angka Perkawinan Kasar.....	52
4.1.2.2.2. Angka Perkawinan Umum	54
4.1.2.2.3. Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur	56
4.1.2.2.4. Rata-Rata Umur Kawin Pertama (SMAM).....	57
4.1.2.2.5. Angka Perceraian Kasar	59
4.1.2.2.6. Angka Perceraian Umum	61
4.1.2.3. Keluarga	63
4.1.2.3.1. Jumlah Keluarga Dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga	63
4.1.2.3.2. Hubungan Dengan Kepala Keluarga.....	65
4.1.2.3.3. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur	66
4.1.2.3.4. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin.....	67
4.1.2.3.5. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin.....	69
4.1.2.3.6. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan.....	69
4.1.2.3.7. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Pekerjaan.....	71
4.1.2.4. Penduduk Menurut Karakteristik Sosial	72
4.1.2.4.1. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	72
4.1.2.4.2. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	73



4.1.2.4.3. Jumlah Penduduk Menurut Agama	74
4.1.2.4.4. Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan.....	75
4.1.2.5. Kelahiran.....	76
4.1.2.5.1. Jumlah Kelahiran	77
4.1.2.5.2. Angka Kelahiran Kasar	79
4.1.2.6. Kematian.....	80
4.1.2.6.1. Jumlah Kematian	81
4.1.2.6.2. Angka Kematian Kasar	82
4.2. Kualitas Penduduk	84
4.2.1. Kesehatan	85
4.2.1.1. Kelahiran.....	85
4.2.1.1.1. Angka Kelahiran Menurut Umur	85
4.2.1.1.2. Angka Kelahiran Total	87
4.2.1.1.3. Rasio Anak Perempuan.....	88
4.2.1.2. Kematian.....	90
4.2.1.2.1. Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/ IMR/ AKB)	91
4.2.1.2.2. Angka Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/NNDR)	94
4.2.1.2.3. Angka Kematian Post Neonatal (Angka Kematian Lepas Baru Lahir/PNNDR)	96
4.2.1.2.4. Angka Kematian Anak.....	97
4.2.1.2.5. Angka Kematian Balita.....	99
4.2.1.2.6. Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate/AKI).....	101
4.2.2. Pendidikan	103
4.2.2.1. Angka Melek Huruf.....	103
4.2.2.2. Angka Partisipasi Kasar	105
4.2.2.3. Angka Partisipasi Murni	111
4.2.2.4. Angka Penduduk Putus Sekolah	117
4.2.3. Ekonomi.....	122
4.2.3.1. Proporsi Dan Jumlah Tenaga Kerja Dan Angkatan Kerja.....	122
4.2.3.1.1. Jumlah Dan Proporsi Tenaga Kerja	123
4.2.3.1.2. Jumlah Dan Proporsi Penduduk Bekerja Dan Menganggur.....	127
4.2.3.2. Angka Partisipasi Angkatan Kerja	131



4.2.3.3. Jumlah Dan Proporsi Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan	132
4.2.4. Sosial	134
4.2.4.1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	135
4.2.4.2. Proporsi Penduduk Penyandang Cacat	137
4.2.4.3. Proporsi Penduduk Miskin Penerima Askeskin	139
4.3. Mobilitas Penduduk	142
4.3.1. Mobilitas Permanen	142
4.3.1.1. Migrasi Masuk	143
4.3.1.2. Migrasi Keluar	145
4.3.1.3. Migrasi Neto	147
4.3.1.4. Migrasi Bruto	149
4.3.2. Mobilitas Non Permanen	151
4.3.3. Urbanisasi	153
4.3.3.1. Persentase Penduduk Kota	153
4.3.3.2. Rasio Kota Dan Desa	155
BAB 5 KEPEMILIKAN DOKUMEN	156
5.1. Kepemilikan Kartu Keluarga	156
5.2. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	158
5.3. Kepemilikan Akta	160
5.3.1. Akta Kelahiran	160
5.3.2. Akta Perkawinan	162
5.3.3. Akta Perceraian	164
5.3.4. Akta Kematian	166
5.3.5. Akta Pengakuan Anak	168
5.4. Kepemilikan Surat Keterangan Orang Terlantar	171
BAB 6 KESIMPULAN	172
LAMPIRAN	176



Daftar Tabel

Tabel 2-1 Laju Pertumbuhan Penduduk dari Tahun 2015-2025	12
Tabel 4-1 Jumlah dan Proporsi Penduduk berdasarkan Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin	27
Tabel 4-2 Proporsi Penduduk Kabupaten/Kota Penyangga Ibu Kota	29
Tabel 4-3 Proporsi Penduduk Kabupaten/Kota Bandung Raya	29
Tabel 4-4 Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kabupaten/Kota	31
Tabel 4-5 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2015-2025	35
Tabel 4-6 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	36
Tabel 4-7 Jumlah Penduduk dan Usia Median di Kabupaten/Kota	37
Tabel 4-8 Rasio Jenis Kelamin berdasarkan Kabupaten/Kota	40
Tabel 4-9 Rasio Jenis Kelamin berdasarkan Kelompok Umur	42
Tabel 4-10 Rasio Ketergantungan berdasarkan Kabupaten/Kota	46
Tabel 4-11 Jumlah Penduduk berdasarkan Status Kawin	49
Tabel 4-12 Jumlah Penduduk berdasarkan Status Kawin dan Kelompok Umur	49
Tabel 4-13 Jumlah Penduduk berdasarkan Status Perkawinan Belum Kawin dan Kawin	50
Tabel 4-14 Jumlah Penduduk berdasarkan Status Perkawinan Cerai Hidup dan Cerai Mati	51
Tabel 4-15 Angka Perkawinan Kasar berdasarkan Kabupaten/Kota	52
Tabel 4-16 Angka Perkawinan Umum berdasarkan Kabupaten/Kota	54
Tabel 4-17 Angka Perkawinan menurut Kelompok Umur	56
Tabel 4-18 Rata-Rata Umur Kawin Pertama berdasarkan Kabupaten/Kota	58
Tabel 4-19 Angka Perceraian Kasar berdasarkan Kabupaten/Kota	60
Tabel 4-20 Angka Perceraian Umum berdasarkan Kabupaten/Kota	61
Tabel 4-21 Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga berdasarkan Kabupaten/Kota	63
Tabel 4-22 Hubungan Dengan Kepala Keluarga	65
Tabel 4-23 Kepala Keluarga berdasarkan Kelompok Umur	66
Tabel 4-24 Kepala Keluarga berdasarkan Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin	67
Tabel 4-25 Kepala Keluarga berdasarkan Status Perkawinan	69
Tabel 4-26 Kepala Keluarga berdasarkan Pendidikan	70
Tabel 4-27 Kepala Keluarga berdasarkan Kelompok Pekerjaan	71
Tabel 4-28 Jumlah Penduduk menurut Pendidikan	72
Tabel 4-29 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	73
Tabel 4-30 Jumlah Penduduk menurut Agama	75
Tabel 4-31 Jumlah Penduduk menurut Kecacatan	76
Tabel 4-32 Jumlah Kelahiran berdasarkan Kabupaten/Kota	77
Tabel 4-33 Angka Kelahiran Kasar (CBR) berdasarkan Kabupaten/Kota	79
Tabel 4-34 Jumlah Kematian berdasarkan Kabupaten/Kota	81



Tabel 4-35 Angka Kematian Kasar berdasarkan Kabupaten/Kota.....	83
Tabel 4-36 Angka Kelahiran Menurut Umur	86
Tabel 4-37 Angka Kelahiran Total.....	87
Tabel 4-38 Rasio Anak dan Perempuan berdasarkan Kabupaten/Kota	89
Tabel 4-39 Data Kematian dalam Indikator Kesehatan.....	91
Tabel 4-40 Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/ IMR/ AKB).....	92
Tabel 4-41 Angka Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/NNDR).....	94
Tabel 4-42 Angka Kematian Post Neonatal (Angka Kematian Lepas Baru Lahir/PNNDR)	96
Tabel 4-43 Angka Kematian Anak	98
Tabel 4-44 Angka Kematian Balita	100
Tabel 4-45 Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate/ AKI)	102
Tabel 4-46 Angka Melek Huruf	104
Tabel 4-47 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar	106
Tabel 4-48 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama	107
Tabel 4-49 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah (SMA, SMK, dan pendidikan lainnya yang setara)	108
Tabel 4-50 Angka Partisipasi Kasar di Provinsi Jawa Barat.....	110
Tabel 4-51 Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar	112
Tabel 4-52 Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama	113
Tabel 4-53 Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah (SMA, SMK, dan pendidikan lainnya yang setara)	114
Tabel 4-54 Angka Partisipasi Murni di Provinsi Jawa Barat.....	116
Tabel 55 Angka Putus Sekolah Tingkat SD/MI dan SMP/MTs Sederajat	117
Tabel 56 Angka Putus Sekolah Tingkat SMA/SMK/MA Sederajat	119
Tabel 57 Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan Khusus/SLB	121
Tabel 4-58 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Pekerjaan	123
Tabel 4-59 Proporsi Tenaga Kerja.....	124
Tabel 4-60 Proporsi Angkatan Kerja.....	127
Tabel 4-61 Proporsi Bukan Angkatan Kerja.....	129
Tabel 4-62 Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)	131
Tabel 4-63 Jumlah dan Proporsi Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan ...	133
Tabel 4-64 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	135
Tabel 4-65 Proporsi Penduduk Penyandang Cacat	137
Tabel 4-66 Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Provinsi Jawa Barat.....	140
Tabel 4-67 Migrasi Masuk.....	143
Tabel 4-68 Migrasi Keluar	145
Tabel 4-69 Migrasi Neto.....	147
Tabel 4-70 Migrasi Bruto.....	149
Tabel 4-71 Persentase Penduduk Kota.....	154



Tabel 4-72 Rasio Kota dan Desa.....	155
Tabel 5-1 Kepemilikan Kartu Keluarga	156
Tabel 5-2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	159
Tabel 5-3 Akta Kelahiran	161
Tabel 5-4 Akta Perkawinan	163
Tabel 5-5 Akta Perceraian	165
Tabel 5-6 Akta Kematian	167
Tabel 5-7 Perbedaan Pengesahan, Pengangkatan dan Pengakuan Anak	169
Tabel 5-8 Data Pengesahan, Pengangkatan dan Pengakuan Anak	169



Daftar Gambar

Gambar 2-1 Peta Provinsi Jawa Barat.....	9
Gambar 2-2 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat	13
Gambar 2-3 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c/persen)	15
Gambar 2-4 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y/persen)	16
Gambar 2-5 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q/persen)	17
Gambar 2-6 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c/persen)...	18
Gambar 2-7 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y/persen) ..	19
Gambar 2-8 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q/persen) ..	20
Gambar 4-1 Kurva Sebaran Penduduk.....	32
Gambar 4-2 Kabupaten/Kota dengan Kepadatan Penduduk Tertinggi.....	32
Gambar 4-3 Kabupaten/Kota dengan Kepadatan Penduduk Terendah	33
Gambar 4-4 Usia Median Penduduk Kabupaten/Kota	39
Gambar 4-5 Rasio Jenis Kelamin.....	41
Gambar 4-6 Rasio Jenis Kelamin berdasarkan Kelompok Umur.....	43
Gambar 4-7 Piramida Penduduk Provinsi Jawa Barat.....	45
Gambar 4-8 Rasio Ketergantungan Kabupaten/Kota.....	48



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan

Salah satu isu strategis dari pembangunan suatu wilayah adalah isu kependudukan. Isu kependudukan bersifat lintas sektor, bukan saja berkaitan dengan kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk saja, isu kependudukan juga berhubungan dengan pengintegrasian berbagai aspek kedalam perencanaan pembangunan dan pencapaian pembangunan kependudukan itu sendiri. Upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan, sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar kedepan pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas dan kualitas penduduk serta pengarahan mobilitas penduduk dan penataan persebarannya yang didukung oleh upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan penduduk dan peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang wawasan kependudukan bahkan sejak usia dini.

Dengan demikian data kependudukan memegang peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan publik, pengalokasian anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, pencegahan kriminal dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi Pemerintah maupun pihak lain termasuk dunia usaha. Oleh karena itu ketersediaan data perkembangan kependudukan sampai pada data by name by address menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program-program kependudukan. Untuk itu pengembangan sistem informasi kependudukan yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk tujuan intervensi yang berbeda-beda merupakan kebutuhan utama untuk segera diaplikasikan, sehingga makin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia, maka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan semakin mudah dan tepat sasaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi sumber daya daerah maupun informasi tentang kewilayahan lainnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi kependudukan dan keluarga. Data dan informasi tersebut wajib digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah



Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan dan pembangunan (Pasal 49).

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan (Pasal 83). Pentingnya penyajian data perkembangan kependudukan tersebut kemudian diperkuat dalam pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa “Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan seperti pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal”. Hal tersebut yang mendasari pentingnya penyajian data perkembangan kependudukan dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai data kependudukan ini perlu disusun Profil Perkembangan Kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dibuat untuk memberikan gambaran kondisi kependudukan di Daerah, serta prospek kependudukan di masa yang akan datang. Di sisi lain penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini merupakan wujud pemanfaatan data kependudukan yang tersebar diberbagai instansi.

Data dan informasi kependudukan yang diperlukan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan mengacu kepada hasil registrasi penduduk yang bersumber dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang merupakan salah satu subtransi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Elemen data hasil registrasi kependudukan yang dipergunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan meliputi data yang berhubungan dengan kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk dan kepemilikan dokumen kependudukan.

1.2. Tujuan

Menyajikan Profil Perkembangan Kependudukan skala Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sebagai salah satu informasi yang digunakan sebagai perencanaan pembangunan khususnya bagi stakeholder di Provinsi Jawa Barat, dan umumnya bagi

seluruh pihak yang memerlukan data terkait dengan perkembangan kependudukan di Jawa Barat dalam bentuk ikhtisar meliputi kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk.

1.3. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pembahasan dalam Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah:

1. Kuantitas penduduk, meliputi komposisi dan persebaran penduduk;
2. Kualitas penduduk meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial;
3. Mobilitas penduduk meliputi mobilitas permanen, mobilitas non permanen dan urbanisasi; dan
4. Kepemilikan dokumen kependudukan.

1.4. Pengertian Umum

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat;
3. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hal lainnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
4. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
5. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
6. Data Kependudukan adalah data perorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
7. Data Konsolidasi Bersih (DKB) adalah data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia setiap semester, yang bersumber dari data kependudukan Kabupaten/Kota yang telah



- dikonsolidasikan atau dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
8. Proporsi penduduk adalah jumlah dan informasi penduduk menurut pengelompokan tertentu seperti umur dan jenis kelamin;
 9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan (Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013);
 10. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
 11. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
 12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
 13. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan atau nama lainnya (Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013);
 14. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
 15. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal (Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1992);
 16. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia



yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak (UU No 52 Tahun 2009);

17. Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010);
18. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006);
19. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
20. Kematian atau mortalitas menurut World Health Organization (WHO) adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup (Badan Pusat Statistik);
21. Rasio Jenis Kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis kelamin antara banyaknya penduduk laki-laki dan penduduk perempuan disuatu daerah pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita;
22. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja);
23. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009);
24. Mobilitas Penduduk Permanen (migrasi) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional);
25. Mobilitas Penduduk Non Permanen (circulation/sirkuler) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tempat ke tempat

- lain melewati batas administratif. Mobilitas penduduk non permanen dibagi menjadi dua yaitu ulang-alik melaju (commuting) dan menginap/mondok;
26. Penduduk Musiman merupakan salah satu jenis mobilitas penduduk non permanen yang bekerja tidak pada daerah domisilinya dan menetap dalam kurun waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari satu tahun dan dilakukan secara berulang;
 27. Mobilitas Penduduk Ulang Alik atau nglaju (commuting) adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama;
 28. Migrasi Kembali (return migration) adalah banyaknya penduduk yang pada waktu pendataan bertempat tinggal di daerah yang sama dengan tempat lahir dan pernah bertempat tinggal di daerah yang berbeda;
 29. Migrasi Semasa Hidup (life time migration) adalah bentuk migrasi di mana pada waktu diadakan pendataan tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat kelahirannya;
 30. Migrasi risen (recent migration) adalah bentuk migrasi melewati batas wilayah administrasi (Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi) dimana pada waktu diadakan pendataan bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu;
 31. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi;
 32. Urbanisasi adalah suatu proses bertambahnya konsentrasi penduduk diperkotaan dan atau proses perubahan suatu daerah perdesaan menjadi perkiraan, baik secara fisik maupun ukuran-ukuran spasial dan/atau bertambahnya fasilitas perkotaan, serta lembaga-lembaga sosial, maupun perilaku masyarakatnya;
 33. Penduduk Usia Kerja (Produktif) adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun;
 34. Penduduk Yang Termasuk Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15-64 Tahun) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari kerja atau mempersiapkan suatu usaha;
 35. Angka Partisipasi Angkatan Kerja adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja;
 36. Pengangguran adalah orang yang termasuk angkatan kerja, namun pada saat pendataan/ survey atau sensus tidak berkerja dan sedang mencari kerja;
 37. Angka Pengangguran adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja;



38. Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan penduduk berusia 64 tahun keatas;
39. Lahir Hidup adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya didalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda- tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot. Banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya;
40. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan;
41. Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR) adalah banyaknya kelahiran hidup pada tahun tertentu tiap 1000 penduduk;
42. Angka Kelahiran Umum (General Fertility Rate/GFR) banyaknya kelahiran setiap 1000 Wanita yang berusia 15- 49 tahun dalam satu tahun;
43. Angka Kematian Bayi Baru Lahir adalah banyaknya kematian baru lahir, usia kurang dari satu bulan (0-28) hari pada suatu periode per 1000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
44. Angka Kematian Bayi Lepas Baru Lahir adalah banyaknya kematian bayi lepas baru lahir (usia 1-11 bulan) pada suatu periode per 1000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
45. Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/IMR) adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
46. Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate/MMR) adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya;
47. Pengeluaran Untuk Makanan adalah proporsi pengeluaran yang dipergunakan untuk mengkonsumsi makanan dibandingkan dengan total pengeluaran (makanan dan bukan makanan);
48. Angka Partisipasi Kasar /APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu;
49. Angka Partisipasi Murni/APM adalah persentase jumlah peserta didik Sekolah Dasar usia 7-12 tahun, jumlah peserta didik Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama usia 13-15 tahun, jumlah peserta didik Sekolah Lanjutan Tingkat Atas usia 16-18 tahun dan jumlah peserta didik Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi



Swasta usia 19-24 tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia dari masing-masing jenjang pendidikan;

50. Pemanfaatan Data Kependudukan adalah pemanfaatan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan seperti: pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025



1. LATAR BELAKANG

- Isu kependudukan merupakan isu strategis dan lintas sektor yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, mobilitas, serta keterkaitannya dengan perencanaan pembangunan.
- Data kependudukan memegang peranan penting dalam pelayanan publik, pengalokasian anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, pencegahan kriminal, dan evaluasi hasil pembangunan.
- Ketersediaan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi kunci agar kebijakan dan program pembangunan lebih tepat sasaran.
- Profil Perkembangan Kependudukan disusun untuk memberikan gambaran kondisi serta prospek kependudukan di Provinsi Jawa Barat secara berkelanjutan.
- Data yang digunakan bersumber dari hasil registrasi penduduk, pencatatan sipil, dan pemanfaatan data kependudukan lintas instansi.



2. MAKSUD DAN TUJUAN

- Menyajikan Profil Perkembangan Kependudukan skala Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
- Menjadi salah satu sumber informasi bagi perencanaan pembangunan, khususnya bagi para pemangku kepentingan di Provinsi Jawa Barat.
- Menyediakan ikhtisar data perkembangan kependudukan bagi seluruh pihak yang memerlukan.
- Memuat gambaran mengenai kuantitas, kualitas, mobilitas penduduk, serta kepemilikan dokumen kependudukan.



3. RUANG LINGKUP

- 1 Kuantitas penduduk: komposisi dan persebaran penduduk.
- 2 Kualitas penduduk: kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial.
- 3 Mobilitas penduduk: mobilitas permanen, non permanen, dan urbanisasi.
- 4 Kepemilikan dokumen kependudukan.



4. LANDASAN HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Pasal 49).
- 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 83 dan Pasal 58 ayat (4)).
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

BAB 2

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Letak Geografis Daerah

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang memiliki posisi strategis dari aspek geografis, ekonomi, sosial, maupun konektivitas antarwilayah. Secara geografis, batas wilayah Provinsi Jawa Barat terletak pada 106°22'13" Bujur Timur sampai dengan 108°50'1,4" Bujur Timur, serta 5°54'49,58" Lintang Selatan sampai dengan 7°49'15,52" Lintang Selatan, dengan batas wilayahnya meliputi:

1. Sebelah Utara: berbatasan dengan Laut Jawa;
2. Sebelah Timur: berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah;
3. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
4. Sebelah Barat: berbatasan dengan Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 2-1 Peta Provinsi Jawa Barat

Kondisi morfologi wilayah Provinsi Jawa Barat sangat beragam. Di wilayah sebelah Utara terdiri dari dataran rendah dan pesisir pantai yang relatif landai. Wilayah Tengah didominasi oleh dataran tinggi yang bergunung dan berbukit yang membujur dari Barat hingga ke Timur Pulau Jawa. Titik tertingginya adalah Gunung Ciremai, yang berada di sebelah Barat Daya Kota Cirebon. Sedangkan untuk wilayah Selatan, didominasi oleh daerah berbukit-bukit dengan pesisir pantai yang memiliki kontur terjal.



Wilayah Jawa Barat terletak pada jalur Circum Pacific dan Mediteran, sehingga sebagian besar wilayahnya termasuk daerah labil yang ditandai dengan masih banyaknya gunung berapi aktif sehingga memiliki resiko gempa bumi. Iklim daerah Jawa Barat termasuk tropis dengan suhu udara rata-rata antara 16°C-34°C dan curah hujan yang beragam. Curah hujan di Jawa Barat menurut data BMKG berada pada rentang curah hujan 1.000 - 4.000 mm per tahun. Rata-rata hujan setiap bulan menunjukkan perbedaan yang jelas antara periode musim kemarau dengan curah hujan kurang dari 150 mm, dan periode musim hujan dengan curah hujan lebih dari 150 mm.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi dan Pulau Tahun 2022, secara administrasi pemerintahan wilayah Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah 37.044,858 km² dan terbagi dalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten dan 9 kota, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Pangandaran, serta Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar. Wilayah Provinsi Jawa Barat juga terdiri atas 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa. Masyarakat Provinsi Jawa Barat sebagian besar berasal dari Suku Sunda, sehingga dalam kehidupan sehari-hari penduduk umumnya berkomunikasi menggunakan Bahasa Sunda dengan berbagai ragam dialek daerah, selain Bahasa Indonesia. Sebagian kecil penduduk menggunakan Bahasa Jawa Cirebonan dan Jawa Dermayon sebagai bahasa sehari-hari, terutama di wilayah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon.

Provinsi Jawa Barat memiliki karakteristik topografi wilayah pegunungan curam di selatan, wilayah lereng bukit yang landai di tengah, wilayah dataran luas di utara, dan wilayah aliran sungai. Wilayah pegunungan curam (9,5 persen) terletak di bagian selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut, dan wilayah lereng bukit yang landai (36,48 persen) terletak di bagian tengah dengan ketinggian 10-1.500 mdpl, serta wilayah daratan landai (54,02 persen) terletak di bagian utara dengan ketinggian 0-10 mdpl.

Kondisi topografi Pesisir Utara Jawa Barat yang terdiri atas dataran pantai dan rawa alluvial pantai dengan kemiringan lereng 0–5 persen, merupakan daerah yang bertopografi landai, perairan dangkal, memiliki substrat lumpur, berpasir dan berawa, pola arus yang dipengaruhi arus Laut Jawa, serta bervegetasi mangrove dan terumbu karang. Adapun, kondisi topografi wilayah Pantai Selatan Jawa Barat merupakan pegunungan dan perbukitan terjal, perairan dalam dengan banyak batu karang dan

pantai berpasir, pola arus laut yang kuat yang dipengaruhi keberadaan Samudera Indonesia.

Aktivitas geologi di wilayah Provinsi Jawa Barat menghasilkan beberapa zona fisiografi yang satu sama lain dapat dibedakan berdasarkan morfologi, petrologi, dan struktur geologinya. Van Bemmelen (1949), membagi daerah Jawa Barat ke dalam 4 (empat) besar zona fisiografi, masing-masing dari utara ke selatan adalah Zona Dataran Pantai Jakarta, Zona Bogor, Zona Bandung, dan Zona Pegunungan Selatan.

Di Provinsi Jawa Barat terdapat banyak pola kelurusan bentang alam yang diduga merupakan hasil proses pensesaran. Jalur sesar tersebut umumnya berarah barat-timur, utara-selatan, timur laut-barat daya, dan barat laut-tenggara. Secara regional, struktur sesar berarah timurlaut-baratdaya dikelompokkan sebagai Pola Meratus, sesar berarah utara-selatan dikelompokkan sebagai Pola Sunda, dan sesar berarah barat-timur dikelompokkan sebagai Pola Jawa. Struktur sesar dengan arah barat-timur umumnya berjenis sesar naik, sedangkan struktur sesar dengan arah lainnya berupa sesar mendatar. Sesar normal umum terjadi dengan arah bervariasi.

Dari sekian banyak struktur sesar yang berkembang di Provinsi Jawa Barat, ada 3 (tiga) struktur regional yang memegang peranan penting, yaitu Sesar Cimandiri, Sesar Baribis, dan Sesar Lembang. Ketiga sesar tersebut untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh van Bemmelen (1949) dan diduga ketiganya masih aktif hingga sekarang.

Kondisi morfologi wilayah Provinsi Jawa Barat sangat beragam, di wilayah sebelah utara terdiri dari dataran rendah dan pesisir pantai yang relatif landai. Wilayah tengah didominasi oleh dataran tinggi yang bergunung dan berbukit yang membujur dari barat hingga timur Pulau Jawa. Titik tertingginya adalah Gunung Ciremai, yang berada di sebelah barat daya Kota Cirebon, sedangkan untuk wilayah selatan didominasi oleh daerah berbukit-bukit dengan pesisir pantai yang memiliki kontur terjal. Wilayah Jawa Barat terletak pada jalur Circum Pacific dan Mediteran, sehingga sebagian besar wilayahnya termasuk daerah labil yang ditandai dengan masih banyaknya gunung berapi aktif sehingga memiliki resiko gempa bumi.

2.2. Kondisi Demografis Daerah

Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia. Pada Tahun 2024 jumlah penduduk Jawa Barat tercatat sebanyak **51.316.378** jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah **25.997.794** jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah **25.318.584** jiwa. Pada Tahun 2025 terjadi peningkatan jumlah penduduk Jawa barat menjadi **52.211.020** jiwa terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah **25.997.794** jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah



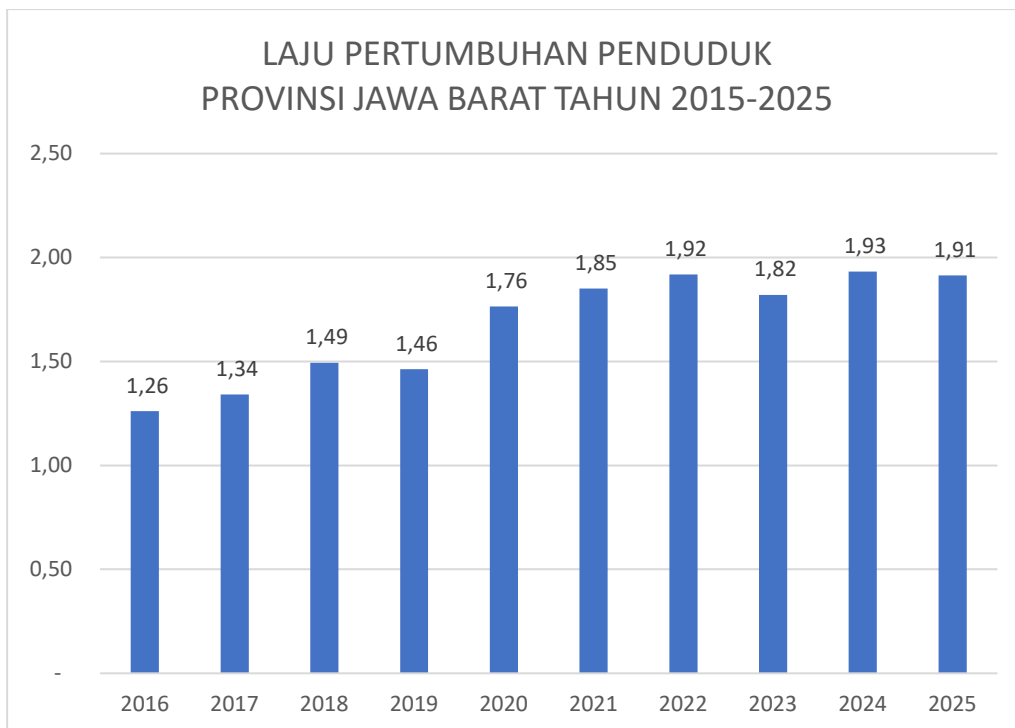
25.318.584 jiwa. Adapun perkembangan penduduk dalam 11 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2-1 Laju Pertumbuhan Penduduk dari Tahun 2015-2025

NO	TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LPP
1	2015	21.976.271	21.219.417	43.195.688	-
2	2016	22.275.690	21.464.469	43.740.159	1,26
3	2017	22.590.755	21.771.384	44.362.139	1,34
4	2018	22.915.986	22.245.339	45.161.325	1,49
5	2019	23.223.993	22.555.604	45.779.597	1,46
6	2020	23.893.514	23.249.109	47.142.623	1,76
7	2021	24.423.410	23.796.684	48.220.094	1,85
8	2022	24.987.540	24.352.130	49.339.670	1,92
9	2023	25.268.145	24.631.847	49.899.992	1,82
10	2024	25.997.794	25.318.584	51.316.378	1,93
11	2025	26.440.489	25.770.531	52.211.020	1,91

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan pada Tabel 2-1 jumlah penduduk Jawa Barat dalam kurun waktu sepuluh tahun terus mengalami peningkatan baik dianalisis berdasarkan jenis kelamin atau pun berdasarkan jumlah total keseluruhan penduduk Jawa Barat. Adapun laju peningkatan jumlah penduduk Jawa Barat dalam selama sembilan tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2-2 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat

Gambar 2.2 menunjukkan tren kenaikan jumlah penduduk selama sembilan tahun terakhir. Dilihat berdasarkan grafik di atas persentase laju penduduk pada Tahun 2025 sebesar 1,93%. Peningkatan penduduk harus ditangani dengan baik dan komprehensif, pemerintah melalui Dinas/Instansi terkait perlu melakukan upaya pengendalian jumlah penduduk secara terpadu dan berkesinambungan serta diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Selain itu pertambahan jumlah penduduk, akan menimbulkan permasalahan baru bagi Pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup penduduknya. Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain: fasilitas perumahan, pendidikan, lapangan pekerjaan, sarana sosial, kesehatan dan sebagainya. Keadaan sosial budaya Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan terlihat sebagai masyarakat yang ramah, memiliki toleransi yang tinggi dan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, diliputi semangat gotong royong yang tinggi serta masih mempertahankan adat istiadat yang ada.

2.3. Gambaran Ekonomi Daerah

Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 13/02/Th. XXVII, 5 Februari 2026 tentang Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Triwulan IV-2025, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa

Barat. berikut adalah Gambaran Umum tentang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat :

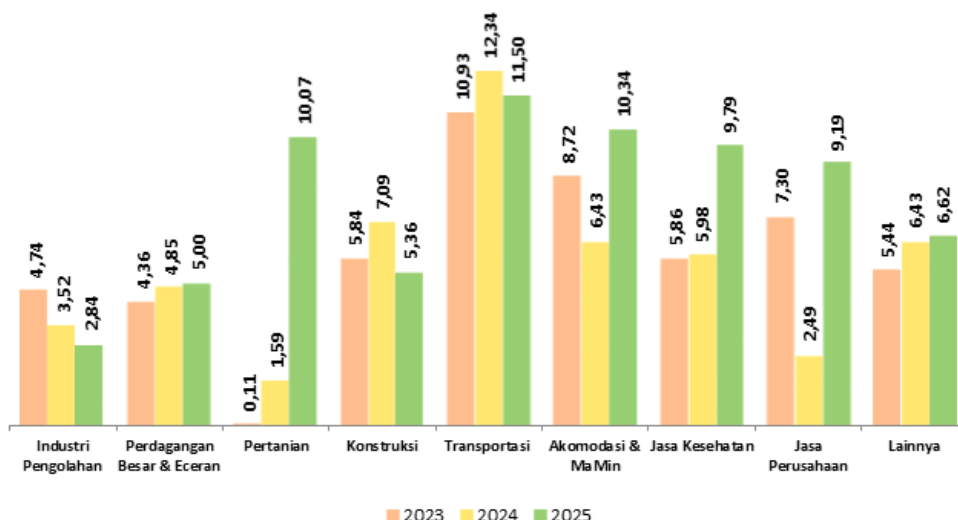
1. Perekonomian Jawa Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan IV-2025 mencapai Rp 786,47 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 474,28 triliun.
2. Ekonomi Jawa Barat triwulan IV-2025 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 2,68 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 27,92 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 54,51 persen.
3. Ekonomi Jawa Barat triwulan IV-2025 terhadap triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,85 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,69 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,18 persen.
4. Ekonomi Jawa Barat tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,32 persen meningkat dibanding capaian tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 4,95 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,50 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto mengalami pertumbuhan sebesar 5,29 persen.
5. Sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2025 dari sisi lapangan usaha disumbang oleh Industri Pengolahan dengan andil sebesar 1,20 persen. Adapun dari sisi pengeluaran, sumbangan terbesar berasal dari Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 2,97 persen.

2.3.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha

2.3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 (c-to-c)

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat sepanjang tahun 2025 menunjukkan kinerja yang positif. Menguatnya ekonomi Jawa Barat didorong oleh pertumbuhan positif pada sebagian besar sektor ekonomi. Secara kumulatif, ekonomi Jawa Barat tahun 2025 tumbuh sebesar 5,32 persen (c-to-c). Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian kembali bergerak dan menguat pada berbagai sektor. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,50 persen, sejalan dengan meningkatnya aktivitas distribusi barang dan mobilitas

masyarakat sepanjang tahun 2025. Pertumbuhan tinggi juga tercatat pada Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,34 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,07 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,79 persen; serta Jasa Perusahaan sebesar 9,19 persen. Sementara itu, lapangan usaha yang memiliki peran dominan terhadap perekonomian Jawa Barat, yaitu Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, tetap menunjukkan pertumbuhan positif masing-masing sebesar 2,83 persen dan 5,00 persen.

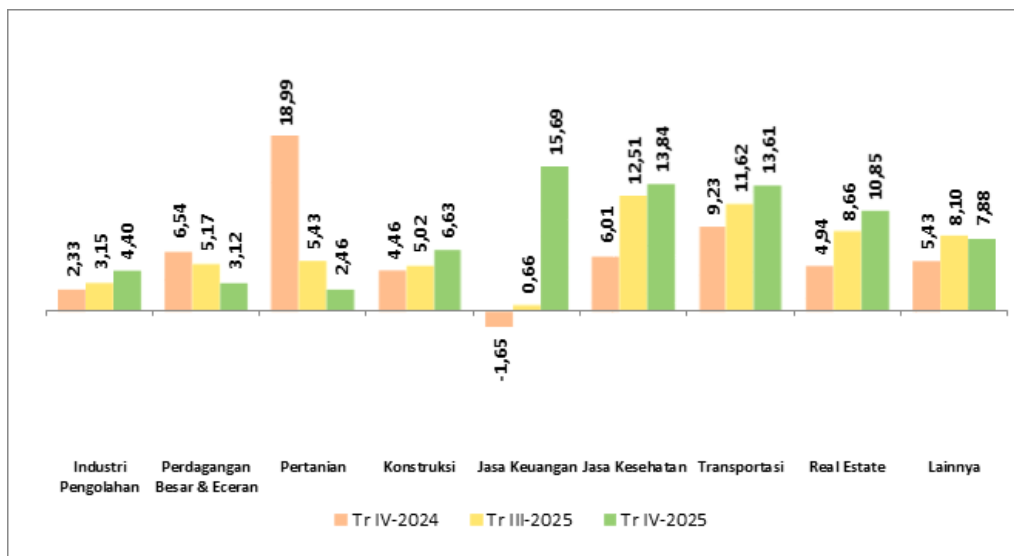


Gambar 2-3 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c/persen)

2.3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Triwulan IV-2025 Terhadap Triwulan IV-2023 (y-on-y)

Ekonomi Jawa Barat pada triwulan IV-2025 dibanding triwulan IV-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,85 persen. Pertumbuhan ini menunjukkan penguatan aktivitas ekonomi Jawa Barat pada akhir tahun 2025, yang ditopang oleh kinerja positif berbagai lapangan usaha. Dari sisi struktur perekonomian, beberapa lapangan usaha utama yang berperan dominan tetap menjadi motor pertumbuhan. Industri Pengolahan tumbuh sebesar 4,40 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,12 persen, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,46 persen. Kinerja positif pada lapangan usaha dominan tersebut mencerminkan tetap terjaganya aktivitas produksi, distribusi, dan pasokan komoditas di Jawa Barat. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 15,69 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 13,84 persen;

Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,61 persen; serta Real Estate sebesar 10,85 persen.



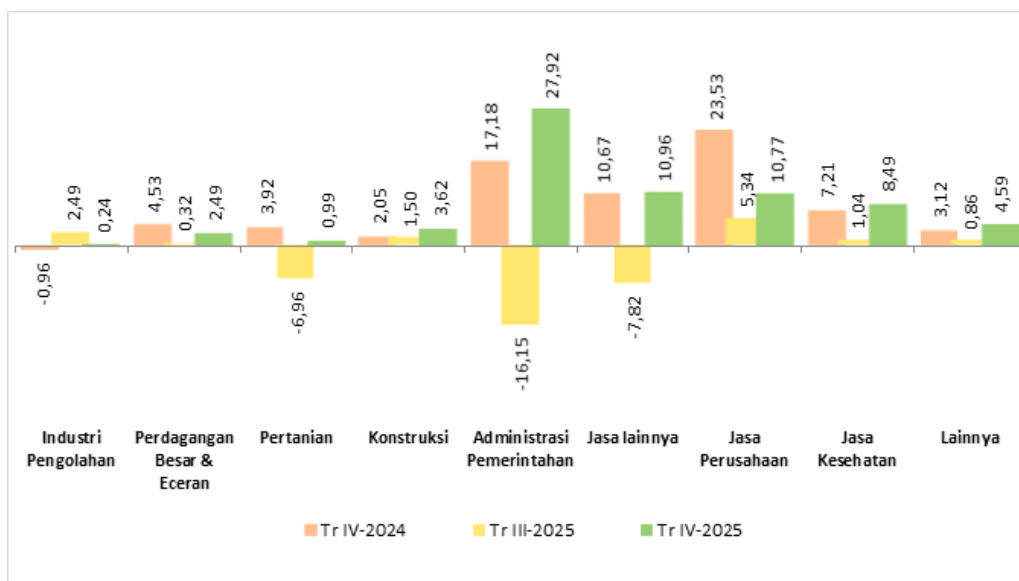
Gambar 2-4 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y/persen)

2.3.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Triwulan IV-2025 Terhadap Triwulan III-2025 (q-to-q)

Perekonomian Jawa Barat semakin baik dengan peningkatan mobilitas masyarakat pada triwulan IV-2025. Ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 2,68 persen dibandingkan triwulan III-2025. Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha, kecuali di beberapa kategori yaitu Pertambangan dan Penggalian yang turun sebesar -2,55 persen; dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar -0,04 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 27,92 persen; Jasa lainnya sebesar 10,96 persen; Jasa Perusahaan sebesar 10,77 persen dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,49 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai salah satu lapangan usaha dominan mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 0,24 persen dan 2,49 persen.

Struktur PDRB Jawa Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2025 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 40,41 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,41 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

sebesar 8,81 persen ; dan Konstruksi sebesar 8,35 persen; dan. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Barat mencapai 71,98 persen.

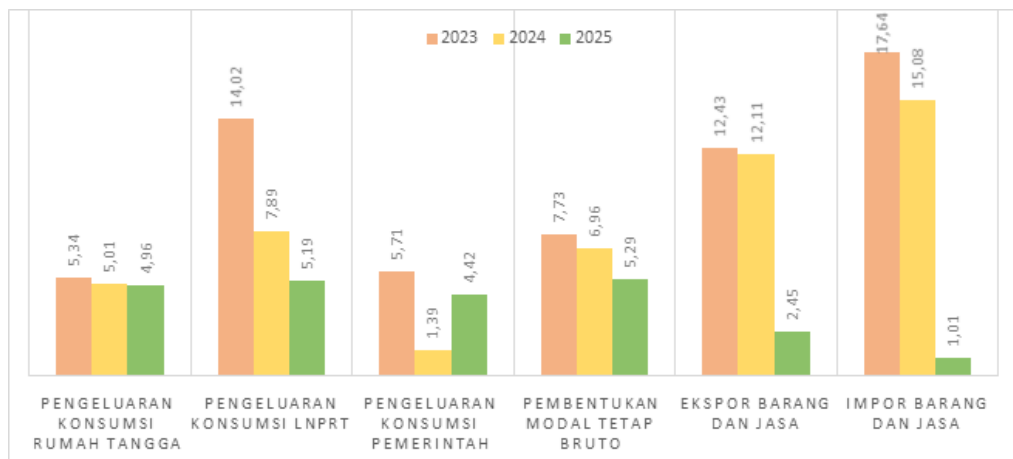


Gambar 2-5 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q/persen)

2.3.2. PDRB Menurut Pengeluaran

2.3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 (c-to-c)

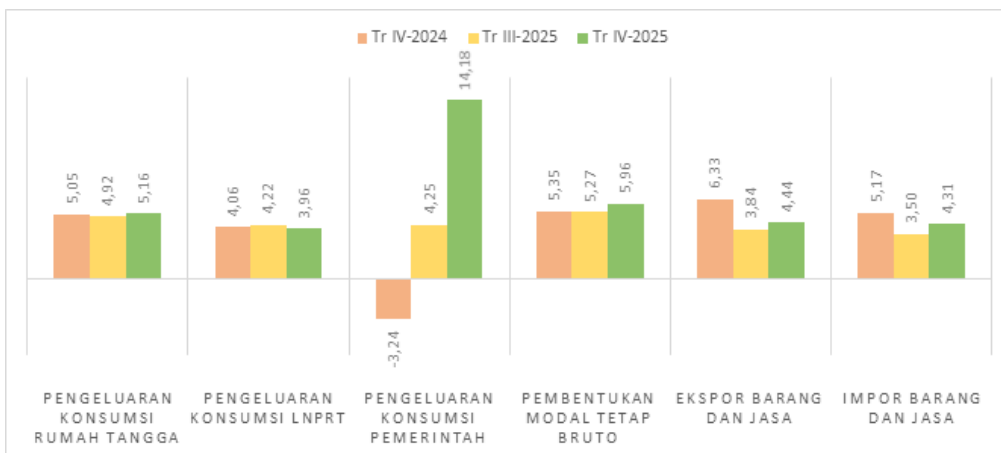
Sepanjang tahun 2025 perekonomian Jawa Barat mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,32 persen. Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan seluruh komponen pengeluaran. Pada sisi pengeluaran, kinerja tertinggi ditunjukkan oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,29 persen. Komponen Pengeluaran dengan kinerja tertinggi selanjutnya adalah Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 5,19 persen; diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,96 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 4,42 persen; selanjutnya Komponen Ekspor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 2,45 persen namun terkoreksi oleh Komponen Impor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 1,01 persen, sehingga ekspor neto tumbuh sebesar 7,87 persen.



Gambar 2-6 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c/persen)

2.3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2025 Terhadap Triwulan IV-2024 (y-on-y)

Sepanjang tahun 2025 perekonomian Jawa Barat mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,85 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada triwulan IV-2024 (y-on-y). Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan seluruh komponen pengeluaran. Pada sisi pengeluaran, kinerja tertinggi ditunjukkan oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 14,18 persen. Komponen Pengeluaran dengan kinerja tertinggi selanjutnya adalah Komponen Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 5,96 persen; diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,16 persen; selanjutnya Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 4,44 persen namun hal itu terkoreksi oleh Komponen Impor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 4,31 persen, sehingga ekspor neto tumbuh sebesar 5,03 persen. Sementara itu, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) tumbuh sebesar 3,96 persen.

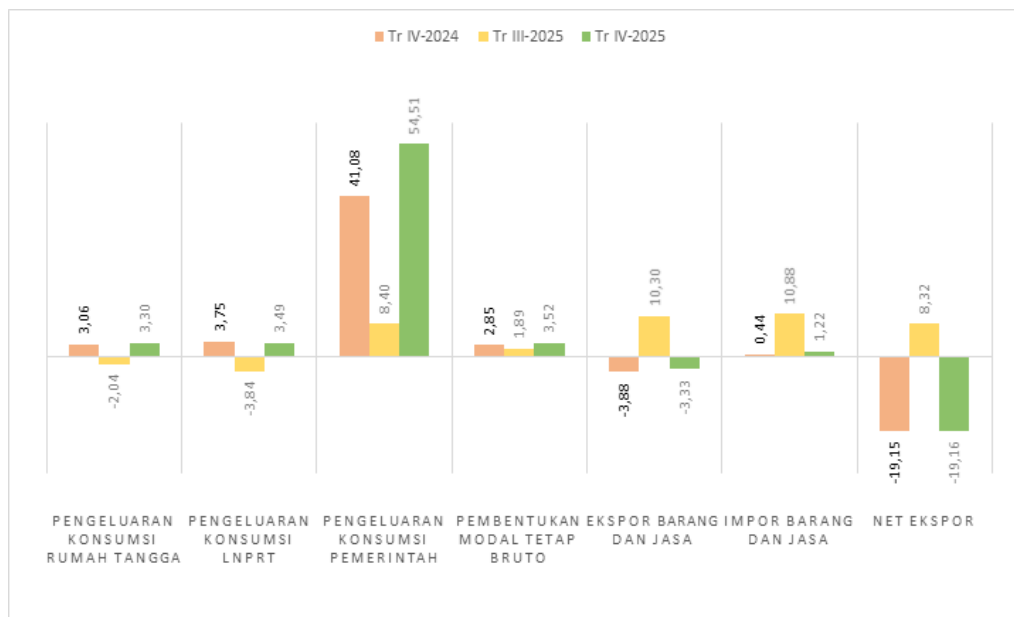


Gambar 2-7 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y/persen)

2.3.2.3. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2025 Terhadap Triwulan III-2025 (q-to-q)

Perkonomian Jawa Barat triwulan IV-2025 dibanding triwulan III-2025 tumbuh sebesar 2,68 persen (q-to-q). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 54,51 persen; diikuti oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,52 persen; lalu Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 3,49 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 3,30 persen. Sementara itu kontraksi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 3,33 persen, sedangkan Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 1,22 persen sehingga menyebabkan ekspor neto mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 19,16 persen.

Struktur PDRB Jawa Barat menurut pengeluaran triwulan IV-2025 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Jawa Barat masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Barat yaitu 65,18 persen; diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 58,99 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 24,87 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 6,79 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi lembaga Nonprofit (PK-LNPRT) sebesar 0,67 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 56,54 persen.



Gambar 2-8 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q/persen)

2.4. Potensi Daerah

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2026, Provinsi Jawa Barat memiliki potensi daerah yang terdiri atas pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan, pertambangan dan energi, industri manufaktur, pariwisata, serta transportasi dan komunikasi. Dalam konteks tersebut, sektor pertanian di Indonesia merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional. Meskipun kontribusinya terhadap produk domestik bruto nasional telah menurun secara signifikan dalam setengah abad terakhir, sektor ini masih menjadi sumber pendapatan bagi sebagian besar rumah tangga di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi di sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional di bidang pertanian, yaitu peningkatan produksi pangan menuju surplus beras, stabilisasi harga pangan, pemantapan penganeekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal, perlindungan dan pemberdayaan petani, serta peningkatan kesejahteraan petani. Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut antara lain melalui program intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi.

Provinsi Jawa Barat memiliki lahan yang dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Karakteristik lahan pertanian tersebut sangat menentukan naik turunnya produksi hasil pertanian serta keragamannya.

Pada subsektor tanaman pangan, pada tahun 2025 tercatat luas panen padi sebesar 1.755.300 hektare dengan produksi mencapai 10.226.654 ton (angka sementara). Adapun produksi beras tercatat sebesar 5.905.710 ton.

Pada subsektor hortikultura, produksi tanaman hias terbesar pada tahun 2025 adalah krisan, yaitu sebanyak 189.736.017 tangkai. Sementara itu, produksi sayur-sayuran di Jawa Barat didominasi oleh tomat dengan jumlah sebesar 2.729.614,63 kuintal. Untuk tanaman biofarmaka, produksi terbesar adalah kapulaga sebesar 110.501.601 kilogram, disusul jahe sebesar 37.032.419 kilogram.

Pada subsektor perkebunan, hingga saat ini masih memiliki peranan yang cukup besar dalam pengembangan sektor pertanian. Peluang usaha perkebunan di Jawa Barat masih dapat terus ditingkatkan. Hal ini terlihat dari produksi perkebunan yang secara umum masih menunjukkan peningkatan, meskipun tidak terjadi pada seluruh komoditas. Di Provinsi Jawa Barat, perkebunan dikelola oleh perkebunan besar milik negara, swasta, serta perkebunan rakyat, dengan komoditas potensial antara lain teh, kelapa, kelapa sawit, tebu, dan karet. Pada tahun 2025, luas areal perkebunan rakyat terluas adalah tanaman kelapa deres seluas 104.055,07 hektare, sedangkan luas areal terkecil adalah tanaman tebu seluas 10 hektare. Sementara itu, produksi hasil perkebunan rakyat terbesar juga berasal dari kelapa deres, yaitu sebanyak 104.055,07 ton.

Pada subsektor kehutanan, Indonesia memiliki sumber daya alam berupa hutan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai penghasil oksigen dan hasil hutan, tetapi juga memiliki manfaat penting sebagai penyeimbang lingkungan dan pelindung dari kerusakan alam. Luas kawasan hutan di Jawa Barat terdiri atas tiga jenis, yaitu hutan lindung, suaka alam dan pelestarian alam, serta hutan produksi. Pada tahun 2025, luas hutan lindung tercatat sebesar 230.122,22 hektare, luas suaka alam dan pelestarian alam sebesar 172.179,78 hektare, sedangkan luas hutan produksi sebesar 180.009,43 hektare. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, produksi kayu bulat pada tahun 2025 mencapai 41.275,30 meter kubik.

Pada subsektor peternakan, jenis ternak yang diusahakan di Jawa Barat meliputi ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Pada tahun 2025, jumlah ternak sapi potong tercatat sebanyak 325.465 ekor, sapi perah 101.166 ekor, kerbau 44.556 ekor, kuda 5.402 ekor, kambing 851.052 ekor, domba 5.561.197 ekor, dan babi 1.912 ekor. Adapun produksi daging ternak terbesar di Provinsi Jawa Barat adalah daging sapi, yaitu sebesar 80.333.698,85 kilogram. Sementara itu, produksi daging unggas terbesar berasal dari ayam broiler atau ayam pedaging, yaitu sebesar 935.839.816,32 kilogram.

Pada subsektor perikanan, pada tahun 2025 produksi perikanan tangkap di laut tercatat sebanyak 268.077,41 ton, sedangkan produksi perikanan tangkap di perairan darat mencapai 17.858,98 ton.

Kebutuhan energi listrik terus meningkat seiring dengan berkembangnya pembangunan ekonomi, khususnya di sektor perindustrian, serta bertambahnya jumlah pengguna listrik rumah tangga. Pada tahun 2024, jumlah pelanggan listrik di Jawa Barat mencapai 18.143.215 pelanggan, dengan daya terpasang sebesar 33.685,75 MVA dan energi listrik terjual sebesar 63,01 GWh.

Jumlah perusahaan air bersih di Provinsi Jawa Barat hingga tahun 2024 tercatat sebanyak 24 perusahaan. Jumlah pelanggan air bersih menunjukkan pola fluktuatif, namun secara umum terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, jumlah pelanggan PAM tercatat sebanyak 2 juta pelanggan. Berdasarkan kelompok pelanggan, distribusi terbesar masih ditempati oleh sektor nonniaga, yang meliputi rumah tangga, instansi pemerintah, dan pelanggan khusus, dengan jumlah mencapai 2,04 juta pelanggan pada tahun 2024. Sementara itu, volume air bersih yang disalurkan juga menunjukkan pola yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, volume air bersih yang disalurkan tercatat sebesar 541,1 ribu meter kubik. Berdasarkan kelompok pengguna, sektor nonniaga masih menjadi pengguna air PAM terbesar, dengan volume tersalurkan meningkat dari 473,49 ribu meter kubik pada tahun 2023 menjadi 541,11 ribu meter kubik pada tahun 2024.

Pada sektor industri besar dan sedang, hingga akhir tahun 2023 terdapat 8.699 perusahaan/usaha dengan jumlah tenaga kerja sekitar 2.070.895 orang di Jawa Barat. Jumlah tersebut terdiri atas tenaga kerja sektor produksi, yaitu pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi, serta tenaga kerja administrasi dan penunjang lainnya, seperti pimpinan perusahaan, staf direksi, pegawai administrasi, keuangan, pemasaran, kebersihan, dan lainnya. Pada tahun 2023, nilai output industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Barat mencapai 1.978.958,563 miliar rupiah. Adapun biaya investasi merupakan seluruh biaya yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, seperti bahan baku dan penolong, bahan bakar dan pelumas, listrik, serta pengeluaran lainnya, namun tidak termasuk upah/gaji, pajak tidak langsung, dan sewa tanah.

Pada sektor industri mikro dan kecil, jumlah usaha di Jawa Barat pada tahun 2024 menurun menjadi 640.316 perusahaan. Meskipun demikian, jumlah tenaga kerja yang terserap justru meningkat menjadi 1.714.395 orang. Dalam mendukung pembangunan ekonomi wilayah, sektor pariwisata memiliki kontribusi yang sangat besar. Melalui pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal, suatu daerah dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk

berkunjung. Pertumbuhan sektor pariwisata dapat dilihat dari perkembangan jumlah kunjungan wisatawan, perkembangan hotel atau penginapan, serta perkembangan fasilitas akomodasi lainnya.

Pada tahun 2025, jumlah akomodasi hotel berbintang di Jawa Barat tercatat sebanyak 654 akomodasi, dengan 61.560 kamar dan 106.035 tempat tidur. Sementara itu, hotel nonbintang dan akomodasi lainnya tercatat sebanyak 3.000 akomodasi, dengan 55.047 kamar dan 81.417 tempat tidur. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang di Jawa Barat pada Desember 2025 tercatat sebesar 58,13 persen, atau naik 4,59 poin dibandingkan November 2025 yang sebesar 53,54 persen. Adapun TPK hotel nonbintang pada Desember 2025 sebesar 27,51 persen, naik 4,03 poin dibandingkan November 2025 yang sebesar 23,48 persen.

Pada sektor perhubungan darat, keberadaan sarana transportasi darat, udara, dan laut sangat penting dalam memperlancar kegiatan perekonomian. Meningkatnya pembangunan akan mendorong kebutuhan peningkatan infrastruktur jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar distribusi barang dari satu daerah ke daerah lain. Selain itu, perhubungan darat memiliki peran penting dalam membuka keterisolasian wilayah guna mewujudkan pemerataan pembangunan. Di Jawa Barat, perhubungan darat memegang peranan dominan, terutama dalam mendukung distribusi produk industri antarwilayah di Pulau Jawa serta pengangkutan bahan baku melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Di samping itu, sektor ini juga sangat dibutuhkan untuk melayani kebutuhan masyarakat, terutama dalam menggerakkan perekonomian di wilayah perdesaan. Pada akhir tahun 2025, panjang jalan di Jawa Barat tercatat sebesar 2.362,183 kilometer. Sebagian besar jalan di Provinsi Jawa Barat merupakan jalan beraspal, dengan proporsi mencapai 85,24 persen.

Pada sektor kendaraan bermotor, kendaraan didefinisikan sebagai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik dan digunakan untuk angkutan orang atau barang di jalan raya, selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor yang dicatat mencakup kendaraan pribadi, kendaraan dinas, dan kendaraan umum. Pada tahun 2025, populasi kendaraan di Provinsi Jawa Barat masih didominasi oleh kendaraan roda dua atau sepeda motor, yaitu sebanyak 14.347.989 unit atau 82,71 persen dari total populasi kendaraan. Di urutan kedua adalah mobil penumpang, yang merupakan gabungan dari sedan, jip, dan station wagon, sebanyak 2.384.174 unit. Sementara itu, jumlah bus/mikrobus tercatat sebanyak 29.227 unit. Untuk moda angkutan kota/desa, pada tahun 2025 jumlahnya mencapai 81.679 unit, dengan sebaran tertinggi di Kabupaten Bogor sebanyak 55.688 unit dan terendah di Kabupaten Pangandaran sebanyak 50 unit.

GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT



LETAK GEOGRAFIS

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang memiliki posisi strategis dari aspek geografis, ekonomi, sosial, maupun konektivitas antarwilayah.



Secara geografis, Provinsi Jawa Barat terletak pada:

Bujur Timur

106° 22' 13" – 108° 50' 1,4" BT

Lintang Selatan

5° 54' 49,58" – 7° 49' 15,52" LS

dengan batas wilayahnya meliputi:



1. Sebelah Utara:
berbatasan dengan Laut Jawa



2. Sebelah Timur:
berbatasan dengan
Provinsi Jawa Tengah



3. Sebelah Selatan:
berbatasan dengan
Samudera Hindia



4. Sebelah Barat:
berbatasan dengan Provinsi Banten
dan Provinsi DKI Jakarta



WILAYAH ADMINISTRATIF DAN LUAS WILAYAH

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi dan Pulau Tahun 2022



27

Kabupaten/Kota



627

Kecamatan



5.957

Desa/Kelurahan



35.377,76 km²
(3.537.776 hektare)

TAHUN 2024



Total Penduduk
51.316.378 jiwa



Laki-laki
25.997.794 jiwa



Perempuan
25.318.584 jiwa



TAHUN 2025



Total Penduduk
52.211.020 jiwa



Laki-laki
26.440.489 jiwa



Perempuan
25.770.531 jiwa



Naik
894.642 jiwa
dibanding tahun 2024

BAB 3

SUMBER DATA

3.1. Registrasi

Registrasi kependudukan adalah proses pencatatan resmi oleh pemerintah terhadap peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, serta perubahan alamat. Data yang diperoleh melalui registrasi ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan publik, perencanaan pembangunan, serta layanan administratif lainnya. Di Indonesia, registrasi kependudukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang bertanggung jawab dalam penerbitan dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran. Keakuratan dan keterbaruan data registrasi sangat penting untuk memastikan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah, seperti program bantuan sosial, pemilu, dan layanan kesehatan.

3.2. Non Registrasi

Non-registrasi dalam data kependudukan mengacu pada metode pengumpulan data yang tidak bergantung pada pencatatan administratif langsung dari individu. Pendekatan ini sering kali dilakukan melalui survei sampel, sensus penduduk, atau metode statistik lainnya yang bertujuan untuk melengkapi data registrasi kependudukan. Sensus penduduk, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 10 tahun sekali, adalah contoh utama dari metode non-registrasi. Meskipun tidak memberikan data individu secara real-time, pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih luas mengenai karakteristik demografi, sosial, dan ekonomi suatu wilayah. Data non-registrasi sering digunakan untuk menganalisis tren populasi, distribusi penduduk, serta kebutuhan pembangunan di berbagai sektor.

3.3. Data Dari Lintas Sektor

Data kependudukan tidak hanya dikumpulkan melalui sistem registrasi atau non-registrasi, tetapi juga dapat diperoleh dari berbagai sektor yang berhubungan dengan pelayanan publik. Data dari lintas sektor mencakup informasi yang diperoleh dari lembaga kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan sektor lainnya yang secara langsung atau tidak langsung mencatat informasi penduduk. Misalnya, data siswa yang terdaftar di sekolah dapat memberikan gambaran mengenai tingkat partisipasi pendidikan, sedangkan data pasien di fasilitas kesehatan membantu dalam pemantauan kondisi kesehatan masyarakat. Integrasi data dari berbagai sektor ini memungkinkan



pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih akurat dalam perencanaan kebijakan, alokasi anggaran, serta peningkatan pelayanan publik yang berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

Dengan mengombinasikan ketiga metode ini—registrasi, non-registrasi, dan data lintas sektor pemerintah dapat menyusun basis data kependudukan yang lebih komprehensif dan akurat untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

SUMBER DATA

BUKU PERKEMBANGAN PROFIL KEPENDUDUKAN



1. REGISTRASI

Data diperoleh melalui pencatatan resmi oleh pemerintah terhadap peristiwa penting yang dialami penduduk seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan perubahan alamat.



Sumber Data:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Jawa Barat

CONTOH DATA YANG DIHASILKAN



KELAHIRAN



KEMATIAN



PERKAWINAN



PERCERAIAN



PERUBAHAN
ALAMAT



Dokumen yang diterbitkan:

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian



2. NON REGISTRASI

Data diperoleh melalui metode pengumpulan data yang tidak bergantung pada pencatatan administratif langsung, seperti sensus penduduk, survei sampel, atau metode statistik lainnya.



Sumber Data:

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat

CONTOH DATA YANG DIHASILKAN



KUANTITAS PENDUDUK
(JUMLAH, LAJU PERTUMBUHAN)



DISTRIBUSI PENDUDUK
(WILAYAH, KEPADATAN)



KARAKTERISTIK PENDUDUK
(UMUR, JENIS KELAMIN,
PENDIDIKAN, PEKERJAAN, DLL)



Contoh Kegiatan:

Sensus Penduduk (SP) setiap 10 tahun sekali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan survei lainnya.



3. DATA DARI LINTAS SEKTOR

Data diperoleh dari berbagai sektor yang berhubungan dengan pelayanan publik, yang secara langsung atau tidak langsung mencatat informasi penduduk.



Sumber Data:

Dari berbagai instansi lintas sektor

SUMBER DATA



DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT



DINAS PENDIDIKAN
JAWA BARAT



DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT

BAB 4

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

4.1. Kuantitas Penduduk

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan, Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.

4.1.1. Jumlah Dan Sebaran Penduduk

Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia. Jumlah penduduk Jawa Barat pada Tahun 2025 tercatat sebanyak **52.211.020** jiwa, yang terbagi atas penduduk laki-laki sebanyak **26.440.489** jiwa (**50,64%**) dan perempuan sebanyak **25.770.531** jiwa (**49,36%**). Jumlah tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah **52.211.020** jiwa. Sehingga dalam satu tahun jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan sebanyak **894.642** jiwa atau naik sebesar **1,71%**.

Sebagai Provinsi dengan jumlah populasi terbesar se-Indonesia, tidak lantas menjadi keuntungan bagi Provinsi Jawa Barat, karena pada dasarnya persebaran penduduk di Jawa Barat merupakan satu permasalahan yang harus dihadapi. Persebaran penduduk tidak seimbang antara satu daerah dengan daerah lainnya. Populasi penduduk terpusat pada beberapa daerah sementara daerah lainnya persebaran dan kepadatannya lebih rendah. Daerah-daerah penyangga ibukota Jawa Barat dan daerah Bandung Raya merupakan daerah yang mempunyai sebaran dan kepadatan yang tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Kemudahan akses akan berbagai kebutuhan menjadikan daerah penyangga ibukota Jawa Barat dan daerah Bandung Raya banyak dikunjungi dan menjadi tempat tinggal favorit di Provinsi Jawa Barat.

Untuk melihat jumlah dan sebaran penduduk di Provinsi Jawa Barat ada baiknya dibahas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sebaran penduduk dapat dilihat dari proporsi penduduk, kepadatan penduduk dalam suatu daerah, dan laju pertumbuhan penduduk. Data dibawah ini menjadi acuan dalam membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan di Provinsi Jawa Barat.

4.1.1.1. Jumlah Dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari proporsi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Proporsi penduduk berdasarkan jenis kelamin tersebut untuk melihat berapa banyak jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Tujuannya adalah untuk menyediakan berbagai sarana dan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan kebutuhan jenis kelamin dari penduduk yang ada.

Tabel 4-1 Jumlah dan Proporsi Penduduk berdasarkan Kabupate/Kota dan Jenis Kelamin

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
3201	BOGOR	3.042.999	5,83	2.905.926	5,57	5.948.925	11,39
3202	SUKABUMI	1.488.335	2,85	1.440.198	2,76	2.928.533	5,61
3203	CIANJUR	1.385.353	2,65	1.329.407	2,55	2.714.760	5,20
3204	BANDUNG	1.986.995	3,81	1.917.675	3,67	3.904.670	7,48
3205	GARUT	1.494.645	2,86	1.427.045	2,73	2.921.690	5,60
3206	TASIKMALAYA	1.031.333	1,98	994.748	1,91	2.026.081	3,88
3207	CIAMIS	663.166	1,27	657.108	1,26	1.320.274	2,53
3208	KUNINGAN	636.750	1,22	617.456	1,18	1.254.206	2,40
3209	CIREBON	1.280.500	2,45	1.243.197	2,38	2.523.697	4,83
3210	MAJALENGKA	694.240	1,33	685.242	1,31	1.379.482	2,64
3211	SUMEDANG	627.241	1,20	614.554	1,18	1.241.795	2,38
3212	INDRAMAYU	1.012.532	1,94	998.683	1,91	2.011.215	3,85
3213	SUBANG	855.501	1,64	854.698	1,64	1.710.199	3,28
3214	PURWAKARTA	549.164	1,05	533.845	1,02	1.083.009	2,07
3215	KARAWANG	1.348.745	2,58	1.318.170	2,52	2.666.915	5,11
3216	BEKASI	1.752.916	3,36	1.716.326	3,29	3.469.242	6,64
3217	BANDUNG BARAT	993.147	1,90	956.386	1,83	1.949.533	3,73
3218	PANGANDARAN	226.287	0,43	224.643	0,43	450.930	0,86
3271	KOTA BOGOR	584.527	1,12	572.016	1,10	1.156.543	2,22
3272	KOTA SUKABUMI	189.955	0,36	188.032	0,36	377.987	0,72
3273	KOTA BANDUNG	1.304.891	2,50	1.301.025	2,49	2.605.916	4,99
3274	KOTA CIREBON	180.165	0,35	178.985	0,34	359.150	0,69
3275	KOTA BEKASI	1.295.623	2,48	1.300.304	2,49	2.595.927	4,97
3276	KOTA DEPOK	1.021.104	1,96	1.017.250	1,95	2.038.354	3,90
3277	KOTA CIMAHI	293.756	0,56	291.064	0,56	584.820	1,12
3278	KOTA TASIKMALAYA	394.497	0,76	382.246	0,73	776.743	1,49

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
3279	KOTA BANJAR	106.122	0,20	104.302	0,20	210.424	0,40
TOTAL		26.440.489	50,64	25.770.531	49,36	52.211.020	100,00

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Untuk menguji apakah terdapat perbedaan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan secara statistik, digunakan uji Chi-Square dengan statistik uji sebagai berikut:

$$X^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Dengan :

- O_i = frekuensi observasi pada kategori ke-i
- E_i = frekuensi harapan (expected frequency) pada kategori ke-i
- X^2 = nilai statistik uji Chi-Square

Berdasarkan hasil uji Chi-Square pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ (tingkat kepercayaan 95%), diperoleh p-value ($2,2 \times 10^{-16}$) < 0,05 dan $x_{hitung}^2(8596.7) > x_{tabel}^2(3,841)$, maka H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Hal ini bisa disebabkan karena :

- Banyaknya penduduk produktif yang berasal dari luar Provinsi Jawa Barat yang datang untuk bekerja. Hal ini dikarenakan Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan Ibu Kota sangat memungkinkan banyaknya lapangan kerja. Demikian juga dengan beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat yang menjadi pusat industri.
- Di Provinsi Jawa Barat juga terdapat beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia yang menjadi tujuan penduduk untuk melanjutkan pendidikannya

Kabupaten/Kota yang menjadi Penyangga Ibu Kota adalah Seluruh Daerah Kab. Bogor, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Sebagian Kab. Cianjur (Kec. Pacet, Kec. Cugenang, Kec. Sukaresmi, dan Kec. Cipanas), dengan jumlah penduduk sebanyak **15.683.795** jiwa (**30,04 %**) dari total seluruh penduduk. Adapun rincian berdasarkan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 4-2 berikut ini :

Tabel 4-2 Proporsi Penduduk Kabupaten/Kota Penyangga Ibu Kota

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
3201	BOGOR	3.042.999	5,83	2.905.926	5,57	5.948.925	11,39
3203*	CIANJUR*	244.846	0,47	229.958	0,44	474.804	0,91
3216	BEKASI	1.752.916	3,36	1.716.326	3,29	3.469.242	6,64
3271	KOTA BOGOR	584.527	1,12	572.016	1,10	1.156.543	2,22
3275	KOTA BEKASI	1.295.623	2,48	1.300.304	2,49	2.595.927	4,97
3276	KOTA DEPOK	1.021.104	1,96	1.017.250	1,95	2.038.354	3,90
TOTAL		7.942.015	15,21	7.741.780	14,83	15.683.795	30,04

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Keterangan : Berdasarkan Perpres No.60 Tahun 2020, Kabupaten/Kota yang menjadi Penyangga Ibu Kota adalah Seluruh Daerah Kab. Bogor, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Sebagian Kab. Cianjur (Kec. Pacet, Kec. Cugenang, Kec. Sukaresmi, dan Kec. Cipanas)

Persebaran jumlah penduduk di daerah penyangga ibu kota pada dasarnya dipengaruhi sulitnya mencari tempat tinggal di Ibu Kota Negara. Banyak penduduk daerah penyangga ibu kota yang bekerja di Ibu Kota Negara. Sulit dan mahal tempat tinggal di Ibu Kota Negara menyebabkan banyak penduduk mencari tempat tinggal di daerah-daerah penyangga. Hal ini dikarenakan harga pasaran tempat tinggal di daerah penyangga lebih murah dan dapat menjangkau tempat kerja. Selain itu, daerah penyangga ibu kota saat ini sudah mempunyai fasilitas yang sangat memadai. Selain bertempat tinggal di daerah penyangga ibu kota pertambahan jumlah penduduk di daerah penyangga ibu kota juga dipengaruhi oleh semakin banyaknya industri yang berkembang di daerah penyangga ibukota dan sekitarnya.

Selain daerah penyangga ibukota, sebaran penduduk di Provinsi Jawa Barat berada di wilayah Bandung Raya sebanyak **18,08%** dari total penduduk atau **9.439.708** jiwa. Kabupaten/Kota yang menjadi Daerah Cekungan Bandung (Bandung Raya) adalah Seluruh Daerah Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Sebagian Kab. Sumedang (Kec. Tanjungsari, Kec. Sukasari, Kec. Pamulihan, Kec. Cimanggu, dan Kec. Jatinangor). Adapun rincian berdasarkan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 4-3 berikut ini :

Tabel 4-3 Proporsi Penduduk Kabupaten/Kota Bandung Raya

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
3204	BANDUNG	1.986.995	3,81	1.917.675	3,67	3.904.670	7,48
3211*	SUMEDANG*	200.007	0,38	194.762	0,37	394.769	0,76

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
3217	BANDUNG BARAT	993.147	1,90	956.386	1,83	1.949.533	3,73
3273	KOTA BANDUNG	1.304.891	2,50	1.301.025	2,49	2.605.916	4,99
3277	KOTA CIMAHI	293.756	0,56	291.064	0,56	584.820	1,12
TOTAL		4.778.796	9,15	4.660.912	8,93	9.439.708	18,08

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Keterangan : Berdasarkan Perpres No. 45 Tahun 2018, Kabupaten/Kota yang menjadi Daerah Cekungan Bandung (Bandung Raya) adalah Seluruh Daerah Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimaahi, dan Sebagian Kab. Sumedang (Kec. Tanjungsari, Kec. Sukasari, Kec. Pamulihan, Kec. Cimanggu, dan Kec. Jatinangor)

Wilayah Bandung Raya selain sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi, juga merupakan pusat perdagangan dan jasa, industri, serta pendidikan. Ketiga hal tersebut menjadi faktor yang mendorong tingginya jumlah penduduk di wilayah tersebut, dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Jawa Barat. Walaupun demikian, sebaran penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Barat, masih didominasi oleh wilayah Kabupaten/Kota penyangga Ibu Kota Jakarta.

Banyaknya jumlah penduduk di Bandung Raya juga dipengaruhi karena banyaknya lapangan pekerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk dari luar daerah. Selain itu juga di sekitar Bandung Raya banyak lembaga pendidikan yang terkenal di Indonesia. Kondisi ini menjadikan wilayah Bandung Raya menjadi tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan pendidikan. Selain itu jikapun lembaga pendidikan itu berada di luar daerah Bandung Raya, akan tetapi penduduk yang melanjutkan pendidikan dilembaga tersebut cenderung untuk memilih tinggal di daerah Bandung Raya. Hal ini dikarenakan mudahnya akses untuk memperoleh informasi serta sarana yang penunjang kelancaran pendidikannya. Selain itu juga dengan tinggal di daerah Bandung Raya lebih mudah untuk mencari hiburan, sehingga dapat menghilangkan tekanan akibat lamanya menuntut ilmu.

Sementara apabila dilihat dari jenis kelamin, penduduk di daerah Bandung Raya lebih banyak berjenis kelamin laki-laki. Hal ini semakin memperkuat bahwa daerah Bandung Raya merupakan daerah yang menarik bagi kaum pendatang untuk memperoleh mata pencaharian serta pendidikan, khususnya pendidikan tinggi.

4.1.1.2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena perubahan jumlah penduduk di satu wilayah/area baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya.

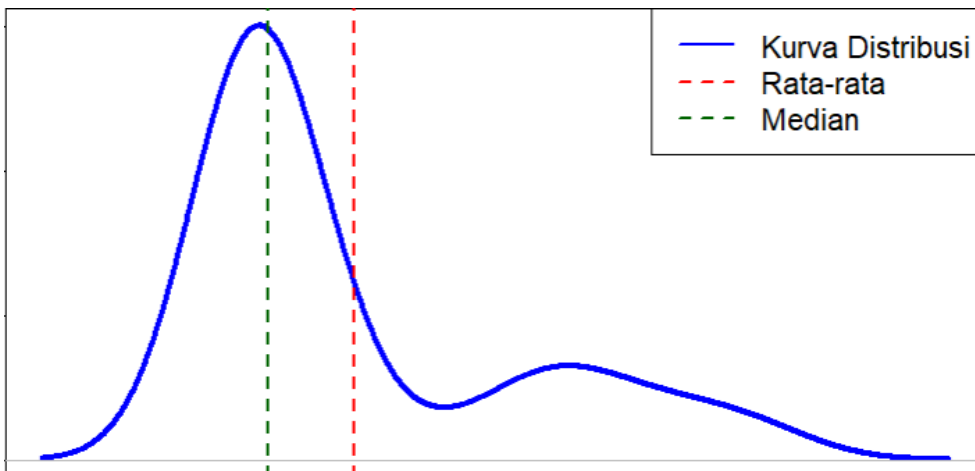
Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu kesatuan ruang. Pada Tabel di bawah memperlihatkan kepadatan penduduk Provinsi Jawa Barat bahwa dengan luas **37.044** Km² dihuni oleh **52.211.020** jiwa atau per Km² dihuni oleh **1.385** jiwa.

Tabel 4-4 Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH (KM ²)	KEPADATAN (JIWA/KM ²)
		N	%		
32	JAWA BARAT	52.211.020	100,00	37.044,86	1.409
3201	BOGOR	5.948.925	11,39	2.991,78	1.988
3202	SUKABUMI	2.928.533	5,61	4.164,15	703
3203	CIANJUR	2.714.760	5,20	3.631,92	747
3204	BANDUNG	3.904.670	7,48	1.740,84	2.243
3205	GARUT	2.921.690	5,60	3.101,24	942
3206	TASIKMALAYA	2.026.081	3,88	2.705,86	749
3207	CIAMIS	1.320.274	2,53	1.595,94	827
3208	KUNINGAN	1.254.206	2,40	1.192,90	1.051
3209	CIREBON	2.523.697	4,83	1.076,76	2.344
3210	MAJALENGKA	1.379.482	2,64	1.330,17	1.037
3211	SUMEDANG	1.241.795	2,38	1.566,20	793
3212	INDRAMAYU	2.011.215	3,85	2.076,06	969
3213	SUBANG	1.710.199	3,28	2.165,55	790
3214	PURWAKARTA	1.083.009	2,07	993,09	1.091
3215	KARAWANG	2.666.915	5,11	1.913,71	1.394
3216	BEKASI	3.469.242	6,64	1.251,05	2.773
3217	BANDUNG BARAT	1.949.533	3,73	1.283,44	1.519
3218	PANGANDARAN	450.930	0,86	1.128,15	400
3271	KOTA BOGOR	1.156.543	2,22	111,37	10.385
3272	KOTA SUKABUMI	377.987	0,72	48,31	7.824
3273	KOTA BANDUNG	2.605.916	4,99	166,59	15.642
3274	KOTA CIREBON	359.150	0,69	39,47	9.100
3275	KOTA BEKASI	2.595.927	4,97	213,04	12.185
3276	KOTA DEPOK	2.038.354	3,90	199,91	10.197
3277	KOTA CIMAHI	584.820	1,12	42,43	13.783
3278	KOTA TASIKMALAYA	776.743	1,49	183,94	4.223
3279	KOTA BANJAR	210.424	0,40	131,01	1.606

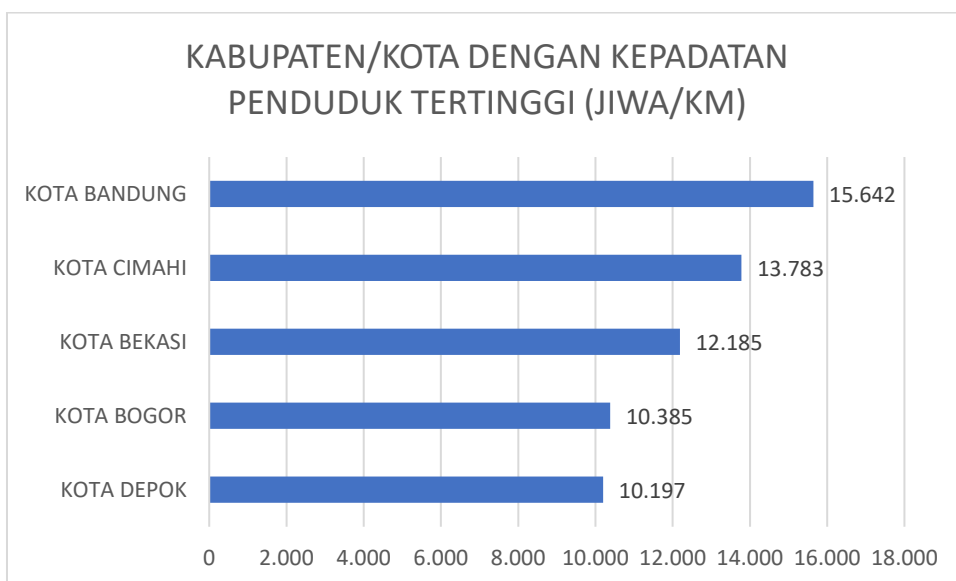
Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Keterangan : Luas Wilayah Berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022



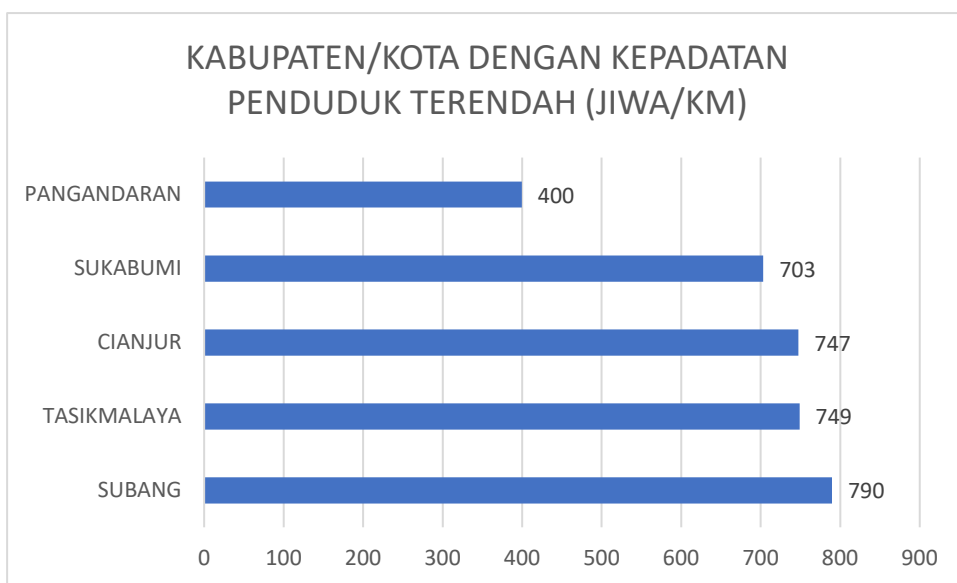
Gambar 4-1 Kurva Sebaran Penduduk

Persebaran Penduduk di Jawa Barat apabila dilihat dari setiap Kabupaten/Kota, kepadatan penduduk didominasi oleh penduduk yang berdomisili di wilayah Kota. Sedangkan distribusi kepadatan penduduk menunjukkan pola miring ke kanan (right skewed). Hal ini terlihat dari posisi rata-rata yang lebih besar dibandingkan median. Dengan menggunakan Kota Bandung merupakan wilayah terpadat dengan **15.642** jiwa/Km², disusul Kota Cimahi, Kota Bekasi, Kota Bogor dan Kota Depok sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 4-2 Kabupaten/Kota dengan Kepadatan Penduduk Tertinggi

Dengan menggunakan metode *Interquartile Range* (IQR), teridentifikasi bahwa Kota Bandung dan Kota Cimahi merupakan nilai pencilan (outlier). Artinya kepadatan penduduk di kedua kota tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan sebagian besar wilayah lainnya di Provinsi Jawa Barat. Sementara itu untuk beberapa daerah lainnya terjadi kebalikan dari daerah-daerah diatas karena memiliki kepadatan terendah yakni di Kabupaten Pangandaran yaitu sebanyak **400** Jiwa/Km². Terendah berikutnya Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Subang seperti terlampir pada gambar berikut;



Gambar 4-3 Kabupaten/Kota dengan Kepadatan Penduduk Terendah

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab tinggi-rendahnya kepadatan penduduk di suatu daerah faktor pertama adalah kelahiran, jika banyak kelahiran yang terjadi, maka semakin padat juga kondisi di suatu daerah. Faktor kedua adalah ekonomi. Sebagian besar daerah memiliki kondisi perekonomian yang lebih baik dari daerah yang lain. Hal ini ditentukan dari seberapa banyak tempat industri, peluang kerja dan jumlah pendapatannya. Faktor yang ketiga adalah kondisi alam dan letak geografis wilayah yang memiliki cuaca atau iklim yang mendukung untuk menjadi tempat tinggal atau tempat bekerja. Daerah dengan kondisi demikian, lebih diminati oleh penduduk. Letak geografis juga menentukan suatu tempat apakah tempat tersebut untuk dijadikan tempat tinggal atau tempat bekerja. Misalnya dekat jauhnya dengan sekolah, pusat pemerintah, pusat perbelanjaan dan infrastruktur jalan untuk akses keluar masuk daerah tersebut.

4.1.1.3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk disuatu wilayah. Dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan perpindahan (migrasi). Secara terus menerus jumlah penduduk akan dipengaruhi oleh banyaknya bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi disisi lain akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua kelompok umur. Sementara itu, migrasi juga berperan dalam mempengaruhi jumlah penduduk, dimana penduduk imigran (pendatang) akan menambah dan emigran (penduduk yang keluar) akan mengurangi jumlah penduduk. Jadi, pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi (masuk/in migration dan keluar/out migration). Selisih antara fertilitas dan mortalitas disebut perubahan reproduktif (reproductive change) atau pertumbuhan alamiah (natural growth), sedangkan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi netto (net migration).

LPP tentunya tidak terlepas dari membandingkan jumlah penduduk yang ada dalam suatu daerah dalam beberapa tahun. Laju pertumbuhan penduduk tentunya akan terlihat jika ada perbedaan jumlah penduduk antara tahun yang satu dibandingkan dengan tahun lainnya. Perbedaan tersebut dapat berupa penambahan atau pengurangan jumlah penduduk dalam satu daerah. Demikian juga dengan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat dengan melihat jumlah penduduk dalam beberapa tahun. Berikut adalah data jumlah penduduk Jawa Barat dalam 9 (delapan) tahun terakhir.

Penghitungan LPP menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$r = \left\{ \left(\frac{P_t}{P_0} \right) \left(\frac{1}{t} \right) - 1 \right\} \times 100$$

Keterangan Rumus:

r : Laju Pertumbuhan Penduduk

t : Tahun Awal – Tahun Dasar

P_t : Penduduk Tahun 2025

P₀ : Penduduk Tahun 2015

$$r = \{ (52.211.020 / 43.195.688)^{(1/10)} - 1 \} \times 100 = 1.91$$

Angka LPP tersebut boleh jadi kurang mencerminkan angka sebenarnya, namun itulah fakta yang dapat disajikan berdasarkan data kependudukan yang tercatat dalam Database SIAK. Idealnya dilakukan kolaborasi metodologi yang dilakukan oleh BPS dan DUKCAPIL, sehingga dapat saling melengkapi. Sinergitas antara kedua belah pihak sangat

perlu dilakukan, sehingga data yang lebih akurat dapat disajikan kepada pemangku kebijakan sebagai dasar pengambilan keputusan (decision making), utamanya dalam perencanaan pembangunan di Jawa Barat. Tabel 4-5 memperlihatkan jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat dalam sepuluh tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 4-5 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2015-2025

NO	TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LPP
1	2015	21.976.271	21.219.417	43.195.688	-
2	2016	22.275.690	21.464.469	43.740.159	1,26
3	2017	22.590.755	21.771.384	44.362.139	1,34
4	2018	22.915.986	22.245.339	45.161.325	1,49
5	2019	23.223.993	22.555.604	45.779.597	1,46
6	2020	23.893.514	23.249.109	47.142.623	1,76
7	2021	24.423.410	23.796.684	48.220.094	1,85
8	2022	24.987.540	24.352.130	49.339.670	1,92
9	2023	25.268.145	24.631.847	49.899.992	1,82
10	2024	25.997.794	25.318.584	52.211.020	1,93
11	2025	26.440.489	25.770.531	52.211.020	1,91

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat mengalami penambahan **9.015.332** jiwa dalam jangka waktu sepuluh tahun. Pertambahan penduduk yang cukup besar di Provinsi Jawa Barat ini memperlihatkan bahwa:

1. Provinsi Jawa Barat mempunyai daya tarik yang besar bagi para pendatang, diantaranya disebabkan oleh banyaknya daerah industri di Provinsi Jawa Barat, khususnya di daerah penyangga ibu kota.
2. Provinsi Jawa Barat juga menjadi daya tarik bagi para pendatang untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini terjadi karena di Provinsi Jawa Barat terdapat beberapa perguruan tinggi yang ternama di Indonesia.

4.1.2. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

4.1.2.1. Jumlah Dan Proporsi Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin

4.1.2.1.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk, disesuaikan dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing. Kebutuhan yang

berkaitan dengan umur dan jenis kelamin mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sebagainya. Dalam bidang kesehatan, setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Bagi penduduk perempuan remaja misalnya, mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan agar ketika memasuki usia perkawinan tidak terkena anemia. Sedangkan kelompok penduduk usia lanjut, membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih intensif. Tabel 4-6 memperlihatkan penduduk Provinsi Jawa Barat berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 4-6 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

NO	UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	00-04	1.782.738	3,41	1.668.856	3,20	3.451.594	6,61
2	05-09	2.316.868	4,44	2.171.423	4,16	4.488.291	8,60
3	10-14	2.334.138	4,47	2.185.813	4,19	4.519.951	8,66
4	15-19	2.094.997	4,01	1.992.644	3,82	4.087.641	7,83
5	20-24	2.173.748	4,16	2.063.190	3,95	4.236.938	8,12
6	25-29	2.162.145	4,14	2.028.532	3,89	4.190.677	8,03
7	30-34	2.034.268	3,90	1.940.386	3,72	3.974.654	7,61
8	35-39	1.856.884	3,56	1.798.472	3,44	3.655.356	7,00
9	40-44	1.966.835	3,77	1.971.093	3,78	3.937.928	7,54
10	45-49	1.815.376	3,48	1.860.280	3,56	3.675.656	7,04
11	50-54	1.628.752	3,12	1.667.441	3,19	3.296.193	6,31
12	55-59	1.358.936	2,60	1.368.422	2,62	2.727.358	5,22
13	60-64	1.042.418	2,00	1.074.799	2,06	2.117.217	4,06
14	65-69	800.254	1,53	818.483	1,57	1.618.737	3,10
15	70-74	516.185	0,99	505.938	0,97	1.022.123	1,96
16	> 75	555.947	1,06	654.759	1,25	1.210.706	2,32
TOTAL		26.440.489	50,64	25.770.531	49,36	52.211.020	100,00

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Provinsi Jawa Barat paling banyak berada di kelompok umur 10-14 tahun yaitu sejumlah **4.519.951** jiwa dan kelompok umur dengan jumlah penduduk terkecil adalah kelompok umur 70-74 dengan jumlah **1.022.123** jiwa.

Selain itu, distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur di Provinsi Jawa Barat menunjukkan struktur demografi yang masih didominasi oleh usia muda,

terutama pada rentang usia produktif awal hingga remaja. Hal ini tercermin dari relatif tingginya proporsi penduduk pada kelompok umur 5–9 tahun hingga 25–29 tahun, yang mengindikasikan potensi bonus demografi apabila dapat diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan yang memadai.

4.1.2.1.2. Penduduk Usia Median

Umur median adalah ukuran statistik dalam demografi yang menunjukkan usia yang membagi populasi menjadi dua bagian yang sama besar. Artinya, setengah dari jumlah penduduk memiliki usia di bawah umur median, sementara setengah lainnya memiliki usia di atasnya. Umur median sering digunakan untuk menggambarkan struktur usia suatu populasi dan menjadi indikator apakah suatu negara atau daerah memiliki populasi yang relatif muda, menengah, atau tua.

Sebagai contoh, jika suatu negara memiliki umur median 30 tahun, itu berarti 50% dari total penduduk berusia di bawah 30 tahun, dan 50% lainnya berusia di atas 30 tahun. Semakin tinggi umur median, semakin tua struktur penduduk suatu negara, yang dapat memengaruhi kebijakan ekonomi, tenaga kerja, dan sistem sosial.

Tabel 4-7 Jumlah Penduduk dan Usia Median di Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK		UMUR MEDIAN
		N	%	
32	JAWA BARAT	52.211.020	100,00	26,07
3201	BOGOR	5.948.925	11,39	25,78
3202	SUKABUMI	2.928.533	5,61	25,99
3203	CIANJUR	2.714.760	5,20	25,86
3204	BANDUNG	3.904.670	7,48	25,89
3205	GARUT	2.921.690	5,60	25,65
3206	TASIKMALAYA	2.026.081	3,88	30,48
3207	CIAMIS	1.320.274	2,53	30,66
3208	KUNINGAN	1.254.206	2,40	30,41
3209	CIREBON	2.523.697	4,83	26,23
3210	MAJALENGKA	1.379.482	2,64	30,47
3211	SUMEDANG	1.241.795	2,38	30,53
3212	INDRAMAYU	2.011.215	3,85	30,52
3213	SUBANG	1.710.199	3,28	30,58
3214	PURWAKARTA	1.083.009	2,07	25,87
3215	KARAWANG	2.666.915	5,11	26,02
3216	BEKASI	3.469.242	6,64	25,79

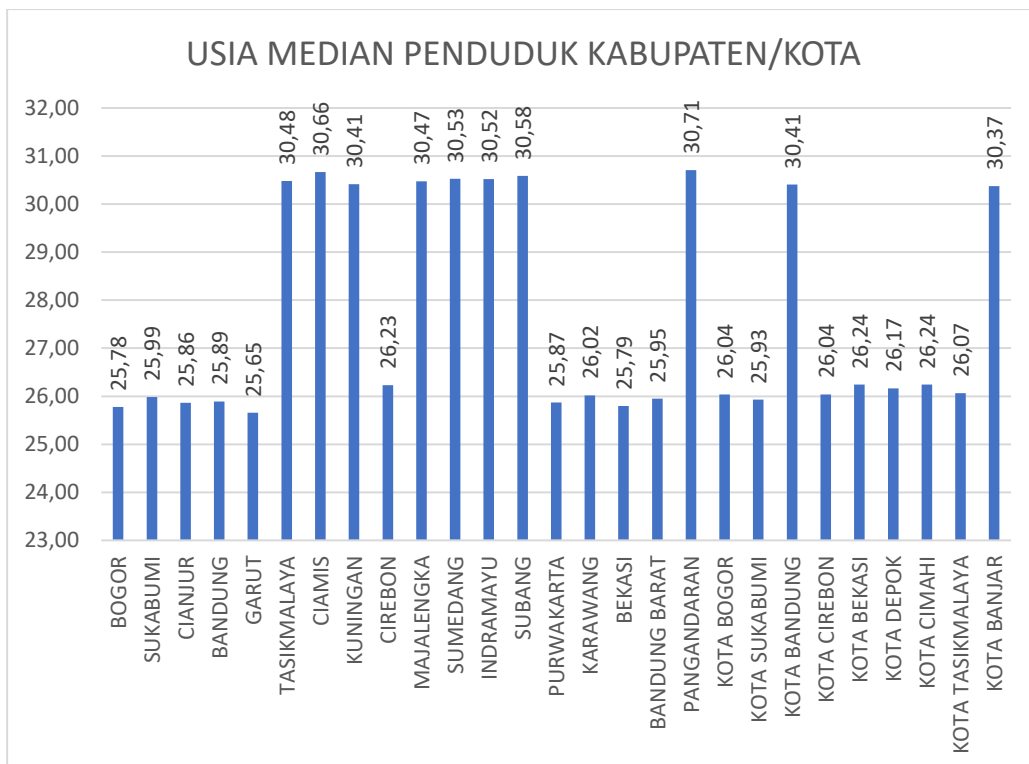
KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK		UMUR MEDIAN
		N	%	
3217	BANDUNG BARAT	1.949.533	3,73	25,95
3218	PANGANDARAN	450.930	0,86	30,71
3271	KOTA BOGOR	1.156.543	2,22	26,04
3272	KOTA SUKABUMI	377.987	0,72	25,93
3273	KOTA BANDUNG	2.605.916	4,99	30,41
3274	KOTA CIREBON	359.150	0,69	26,04
3275	KOTA BEKASI	2.595.927	4,97	26,24
3276	KOTA DEPOK	2.038.354	3,90	26,17
3277	KOTA CIMAHI	584.820	1,12	26,24
3278	KOTA TASIKMALAYA	776.743	1,49	26,07
3279	KOTA BANJAR	210.424	0,40	30,37

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Data ini menyajikan jumlah penduduk dan usia median di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Usia median merupakan indikator penting dalam demografi yang menunjukkan usia tengah dari distribusi penduduk, di mana setengah populasi berada di bawah usia tersebut dan setengahnya lagi berada di atasnya.

Jawa Barat memiliki total penduduk sebanyak **52.211.020** jiwa, dengan usia median **26,07** tahun. Kabupaten dengan usia median terendah adalah Kabupaten Garut (**25,65** tahun), yang menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki populasi yang relatif lebih muda dibandingkan dengan wilayah lainnya. Sebaliknya, usia median tertinggi tercatat di Kabupaten Pangandaran (**30,71** tahun), yang menunjukkan proporsi penduduk usia lebih tua lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya.

Perbedaan usia median antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh berbagai faktor demografis dan sosial ekonomi. Salah satu faktor utama adalah tingkat fertilitas, di mana daerah dengan angka kelahiran yang lebih tinggi cenderung memiliki usia median yang lebih rendah karena proporsi penduduk usia muda lebih besar. Selain itu, arus migrasi juga berperan penting, terutama di wilayah perkotaan atau kawasan industri seperti Bekasi dan Karawang yang menarik penduduk usia produktif dari daerah lain, sehingga menekan kenaikan usia median.



Gambar 4-4 Usia Median Penduduk Kabupaten/Kota

Secara keseluruhan, angka usia median di Jawa Barat menggambarkan bahwa populasi provinsi ini masih relatif muda, yang dapat menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif.

4.1.2.1.3. Rasio Jenis Kelamin

Rasio Jenis Kelamin (RJK) menggambarkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap setiap 100 orang penduduk perempuan. RJK berguna untuk melihat proporsi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan untuk berbagai perencanaan kegiatan seperti penyediaan rumah sakit bersalin, penyediaan ragam pendidikan dan lain sebagainya. RJK dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin yang ada dalam suatu daerah. RJK pun dapat melihat perbandingan penduduk berdasarkan jenis kelamin. Dengan demikian suatu daerah dengan RJK yang berbeda akan mempunyai kebutuhan yang berbeda pula. Hal ini berkaitan dengan perbedaan kebutuhan antara penduduk laki-laki dengan perempuan. Dengan demikian berdasarkan RJK ini, maka penyediaan sarana tergantung kepada berapa banyak rasio jenis kelamin ini.

Tabel 4-8 Rasio Jenis Kelamin berdasarkan Kabupaten/Kota

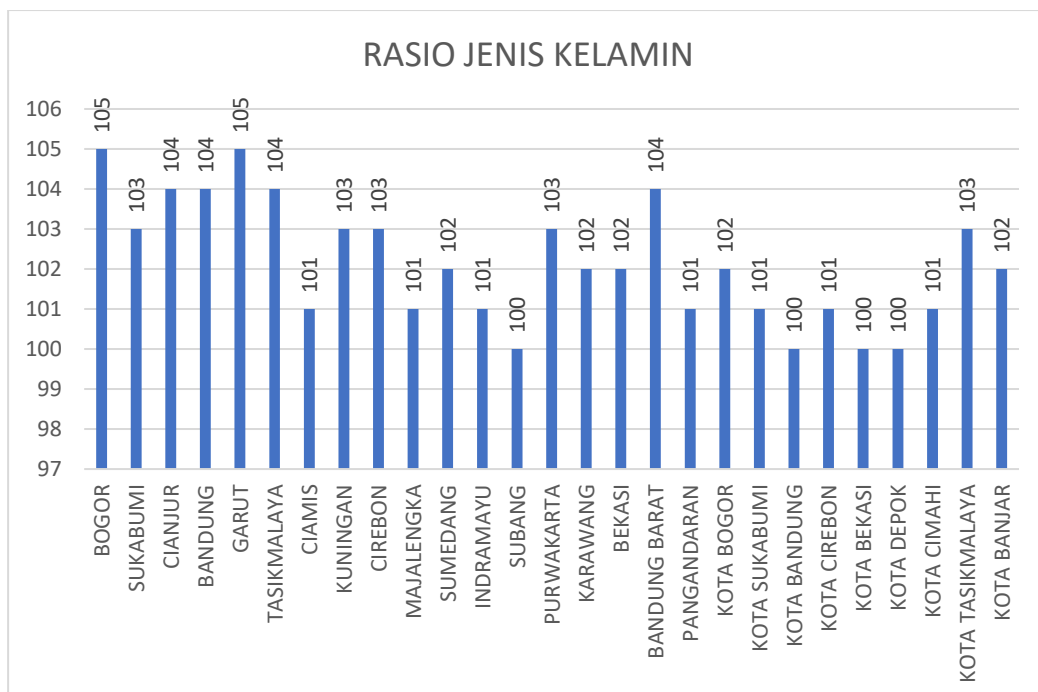
KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK			RASIO JENIS KELAMIN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
3201	BOGOR	3.042.999	2.905.926	5.948.925	105
3202	SUKABUMI	1.488.335	1.440.198	2.928.533	103
3203	CIANJUR	1.385.353	1.329.407	2.714.760	104
3204	BANDUNG	1.986.995	1.917.675	3.904.670	104
3205	GARUT	1.494.645	1.427.045	2.921.690	105
3206	TASIKMALAYA	1.031.333	994.748	2.026.081	104
3207	CIAMIS	663.166	657.108	1.320.274	101
3208	KUNINGAN	636.750	617.456	1.254.206	103
3209	CIREBON	1.280.500	1.243.197	2.523.697	103
3210	MAJALENGKA	694.240	685.242	1.379.482	101
3211	SUMEDANG	627.241	614.554	1.241.795	102
3212	INDRAMAYU	1.012.532	998.683	2.011.215	101
3213	SUBANG	855.501	854.698	1.710.199	100
3214	PURWAKARTA	549.164	533.845	1.083.009	103
3215	KARAWANG	1.348.745	1.318.170	2.666.915	102
3216	BEKASI	1.752.916	1.716.326	3.469.242	102
3217	BANDUNG BARAT	993.147	956.386	1.949.533	104
3218	PANGANDARAN	226.287	224.643	450.930	101
3271	KOTA BOGOR	584.527	572.016	1.156.543	102
3272	KOTA SUKABUMI	189.955	188.032	377.987	101
3273	KOTA BANDUNG	1.304.891	1.301.025	2.605.916	100
3274	KOTA CIREBON	180.165	178.985	359.150	101
3275	KOTA BEKASI	1.295.623	1.300.304	2.595.927	100
3276	KOTA DEPOK	1.021.104	1.017.250	2.038.354	100
3277	KOTA CIMAHI	293.756	291.064	584.820	101
3278	KOTA TASIKMALAYA	394.497	382.246	776.743	103
3279	KOTA BANJAR	106.122	104.302	210.424	102
TOTAL		26.440.489	25.770.531	52.211.020	103

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Tabel di atas menampilkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat serta rasio jenis kelamin (RJK), yang merupakan perbandingan jumlah laki-laki terhadap perempuan dalam suatu wilayah. Rasio jenis kelamin di Jawa Barat secara keseluruhan adalah **103**, yang berarti terdapat **103** laki-laki untuk setiap **100** perempuan. Kabupaten/kota dengan rasio tertinggi adalah Kabupaten

Bogor dan Kabupaten Garut (**105**), menunjukkan proporsi laki-laki yang lebih besar dibanding perempuan.

Kabupaten/kota dengan rasio terendah adalah Kota Bekasi, Kabupaten Subang dan Kota Bandung dan Kota Depok (**100**), yang berarti jumlah laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Secara umum, rasio jenis kelamin yang tidak jauh dari angka **100** menandakan keseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan di Jawa Barat, yang dapat berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan pembangunan di daerah ini.



Gambar 4-5 Rasio Jenis Kelamin

Selain jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, ada juga jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin berdasarkan kelompok umur. Tabel 4-9 memperlihatkan Rasio Jenis Kelamin berdasarkan kelompok umur sebagai berikut:

Tabel 4-9 Rasio Jenis Kelamin berdasarkan Kelompok Umur

NO	UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH		RJK
		N	%	N	%	N	%	
1	00-04	1.782.738	3,41	1.668.856	3,20	3.451.594	6,61	107
2	05-09	2.316.868	4,44	2.171.423	4,16	4.488.291	8,60	107
3	10-14	2.334.138	4,47	2.185.813	4,19	4.519.951	8,66	107
4	15-19	2.094.997	4,01	1.992.644	3,82	4.087.641	7,83	105
5	20-24	2.173.748	4,16	2.063.190	3,95	4.236.938	8,12	105
6	25-29	2.162.145	4,14	2.028.532	3,89	4.190.677	8,03	107
7	30-34	2.034.268	3,90	1.940.386	3,72	3.974.654	7,61	105
8	35-39	1.856.884	3,56	1.798.472	3,44	3.655.356	7,00	103
9	40-44	1.966.835	3,77	1.971.093	3,78	3.937.928	7,54	100
10	45-49	1.815.376	3,48	1.860.280	3,56	3.675.656	7,04	98
11	50-54	1.628.752	3,12	1.667.441	3,19	3.296.193	6,31	98
12	55-59	1.358.936	2,60	1.368.422	2,62	2.727.358	5,22	99
13	60-64	1.042.418	2,00	1.074.799	2,06	2.117.217	4,06	97
14	65-69	800.254	1,53	818.483	1,57	1.618.737	3,10	98
15	70-74	516.185	0,99	505.938	0,97	1.022.123	1,96	102
16	> 75	555.947	1,06	654.759	1,25	1.210.706	2,32	85
TOTAL		26.440.489	50,64	25.770.531	49,36	52.211.020	100,00	103

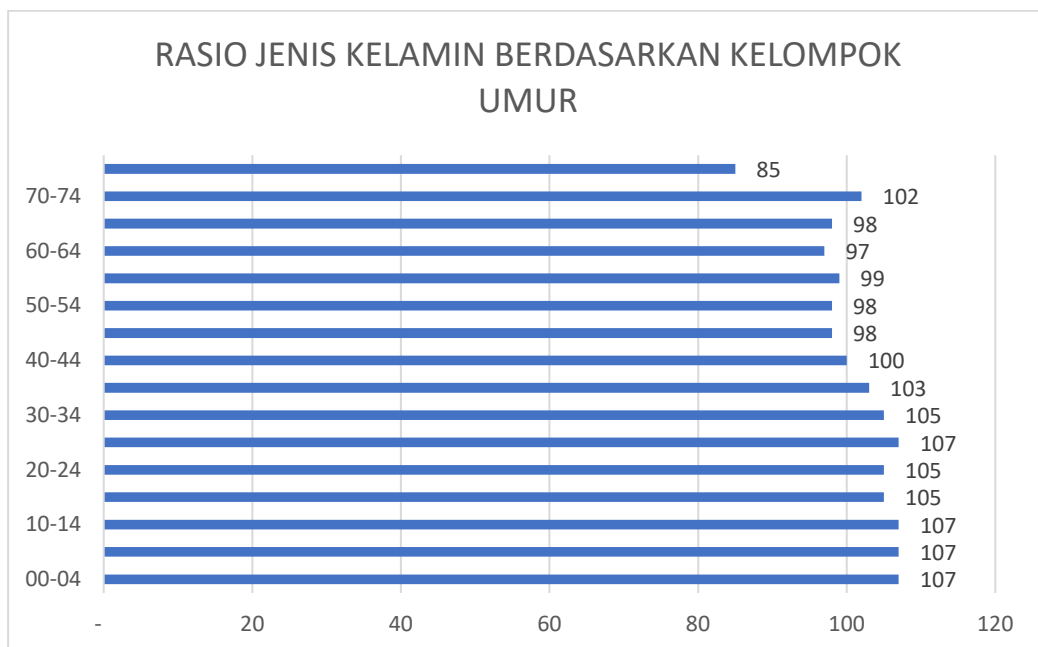
Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan distribusi penduduk menurut kelompok umur, Rasio jenis kelamin secara keseluruhan sebesar **103**, yang berarti terdapat 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan.

Jika dilihat menurut kelompok umur, rasio jenis kelamin tertinggi terdapat pada kelompok usia **0–4 tahun, 5–9 tahun, 10–14 tahun, dan 25–29 tahun**, masing-masing sebesar **107**. Hal ini menunjukkan bahwa pada kelompok usia anak dan sebagian usia produktif awal, jumlah laki-laki relatif lebih dominan dibandingkan perempuan. Kondisi ini lazim terjadi karena secara biologis angka kelahiran bayi laki-laki umumnya sedikit lebih tinggi dibandingkan bayi perempuan.

Memasuki kelompok usia 15–39 tahun, rasio jenis kelamin mulai menurun dan berada pada kisaran **103–105**, yang menunjukkan keseimbangan yang lebih mendekati proporsional antara laki-laki dan perempuan. Pada kelompok usia 40–44 tahun, rasio mencapai **100**, yang berarti jumlah laki-laki dan perempuan relatif seimbang.

Selanjutnya, pada kelompok usia 45–69 tahun, rasio jenis kelamin berada di bawah 100 (antara **97–99**), yang menunjukkan bahwa jumlah perempuan mulai lebih banyak dibandingkan laki-laki. Kondisi ini semakin jelas pada kelompok usia lanjut **>75 tahun**, di mana rasio jenis kelamin turun menjadi **85**, yang berarti hanya terdapat 85 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Fenomena ini mencerminkan kecenderungan umum bahwa perempuan memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki.



Gambar 4-6 Rasio Jenis Kelamin berdasarkan Kelompok Umur

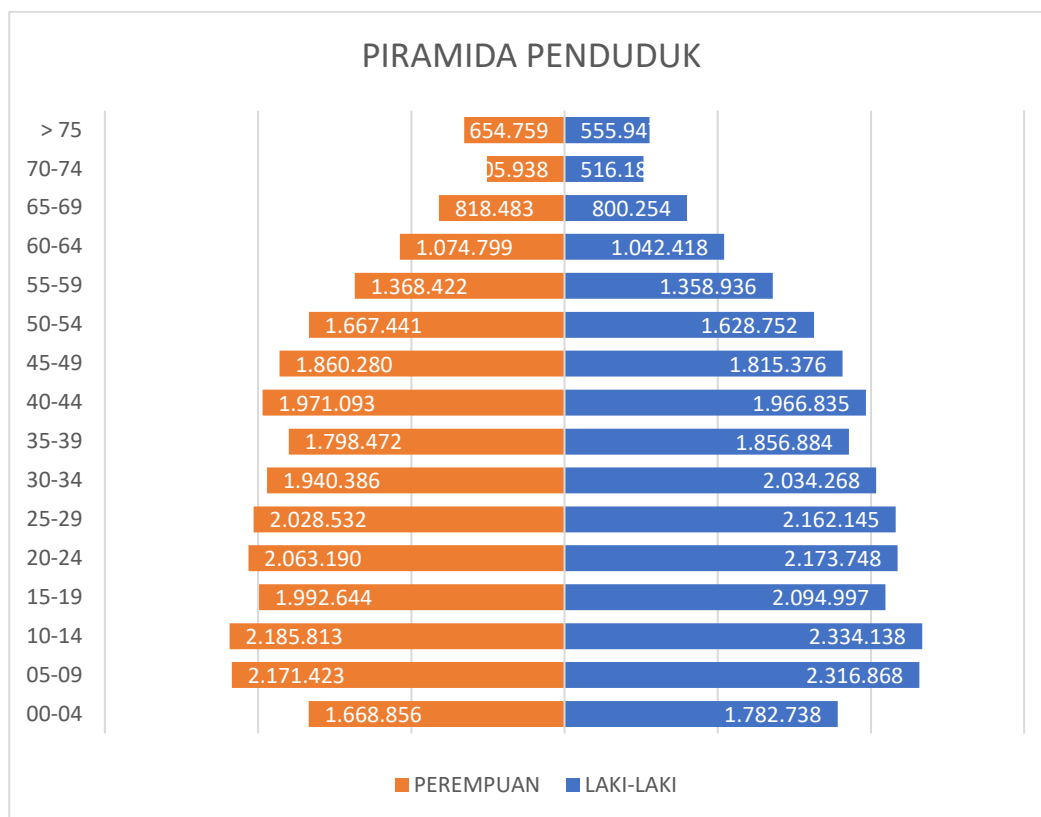
Secara keseluruhan, pola rasio jenis kelamin menunjukkan dominasi laki-laki pada usia muda dan pergeseran dominasi perempuan pada usia lanjut, yang merupakan karakteristik struktur demografi yang umum terjadi.

4.1.2.1.4. Piramida Penduduk

Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan dalam bentuk grafik. Sumbu horizontal (dasar piramida) menunjukkan jumlah penduduk (dalam hal ini diwakili dengan persentase jumlah penduduk), sumbu vertikal menunjukkan kelompok umur 5 tahunan. Dasar piramida dimulai dengan umur termuda hingga ke puncak kelompok umur tertua. Bagian kiri piramida adalah penduduk laki-laki dan bagian kanan untuk penduduk perempuan.

Provinsi Jawa Barat menunjukkan struktur penduduk muda/expansive, dengan struktur penduduk muda lebih besar dibandingkan kelompok usia di atasnya. Pada piramida ini terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun yang terletak pada dasar piramida mulai mengecil. Ini berarti angka kelahiran mulai menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, walaupun dari segi jumlah absolute tidak kecil. Demikian juga dengan jumlah penduduk 5-9 tahun masih terlihat lebar, berarti lima tahun kedepan dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini.

Piramida penduduk Provinsi Jawa Barat juga dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan dalam jangka panjang. Dengan piramida yang menunjukkan lebih banyak di kelompok usia 0-4 tahun dan 5-9 tahun, maka dalam jangka 15 sampai 20 tahun Pemerintah harus mampu merencanakan lapangan pekerjaan bagi penduduk tersebut yang telah menjadi kelompok penduduk yang produktif. Piramida penduduk ini juga dapat digunakan untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilihan Umum. Dalam jangka waktu 10 sampai 15 tahun akan ada banyak pemilih pemula yang harus mendapatkan sosialisasi tentang demokrasi.



Gambar 4-7 Piramida Penduduk Provinsi Jawa Barat

Piramida ini memiliki bentuk yang mendekati piramida ekspansif, yang menunjukkan jumlah penduduk yang besar di kelompok usia muda dan produktif, serta semakin berkurang pada kelompok usia lanjut.

Piramida penduduk tersebut menunjukkan dasar yang relatif lebar, menandakan bahwa kelompok usia muda (0–14 tahun) masih memiliki jumlah yang besar. Pada kelompok usia **0–4 tahun**, tercatat **1.782.738 laki-laki** dan **1.668.856 perempuan**. Kelompok usia **5–9 tahun** dan **10–14 tahun** bahkan lebih besar, masing-masing mencapai **2.316.868** dan **2.334.138 laki-laki**, serta **2.171.423** dan **2.185.813 perempuan**. Kondisi ini menunjukkan bahwa angka kelahiran dalam beberapa tahun terakhir masih relatif tinggi dan struktur penduduk masih didominasi usia anak.

Memasuki kelompok usia produktif (15–64 tahun), jumlah penduduk tetap besar dan relatif stabil. Kelompok usia **20–24 tahun** dan **25–29 tahun** memiliki jumlah yang signifikan, yakni masing-masing **2.173.748** dan **2.162.145 laki-laki**, serta **2.063.190** dan **2.028.532 perempuan**. Komposisi ini mencerminkan potensi tenaga kerja yang kuat dan mendukung kondisi bonus demografi, di mana proporsi usia produktif lebih besar dibanding usia nonproduktif.

Namun, setelah memasuki usia lanjut (≥ 60 tahun), jumlah penduduk mulai menurun secara bertahap. Pada kelompok usia **60–64 tahun**, terdapat **1.042.418 laki-laki** dan **1.074.799 perempuan**. Pada kelompok usia **>75 tahun**, jumlahnya menurun menjadi **555.947 laki-laki** dan **654.759 perempuan**. Terlihat bahwa pada kelompok usia lanjut jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, yang mencerminkan kecenderungan angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Piramida penduduk ini menunjukkan bahwa struktur demografi masih didominasi oleh kelompok usia muda dan produktif, yang menciptakan potensi bonus demografi jika dikelola dengan baik. Namun, penurunan jumlah penduduk pada kelompok usia lanjut juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan sosial. Dengan perencanaan yang tepat, struktur demografi ini dapat menjadi aset yang berharga bagi pembangunan ekonomi dan sosial di masa depan.

4.1.2.1.5. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukan keadaan ekonomi suatu negara, apakah negara tersebut tergolong kedalam negara maju atau negara yang sedang berkembang. Angka DR merupakan salah

satu indikator demografi yang penting, semakin tinggi angka DR menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk pada usia produktif (usia 15 - 64 tahun) yaitu untuk membiayai kebutuhan hidup penduduk yang belum produktif/usia muda (usia 0 - 14 tahun) dan tidak produktif/usia tua lagi (usia 65 tahun keatas), sedang DR yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif secara ekonomi. Sebagaimana perhitungan proyeksi ahli demografi bahwa Indonesia akan menikmati bonus demografi pada Tahun 2020-2030, tidak terkecuali untuk Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4-10 Rasio Ketergantungan berdasarkan Kabupaten/Kota

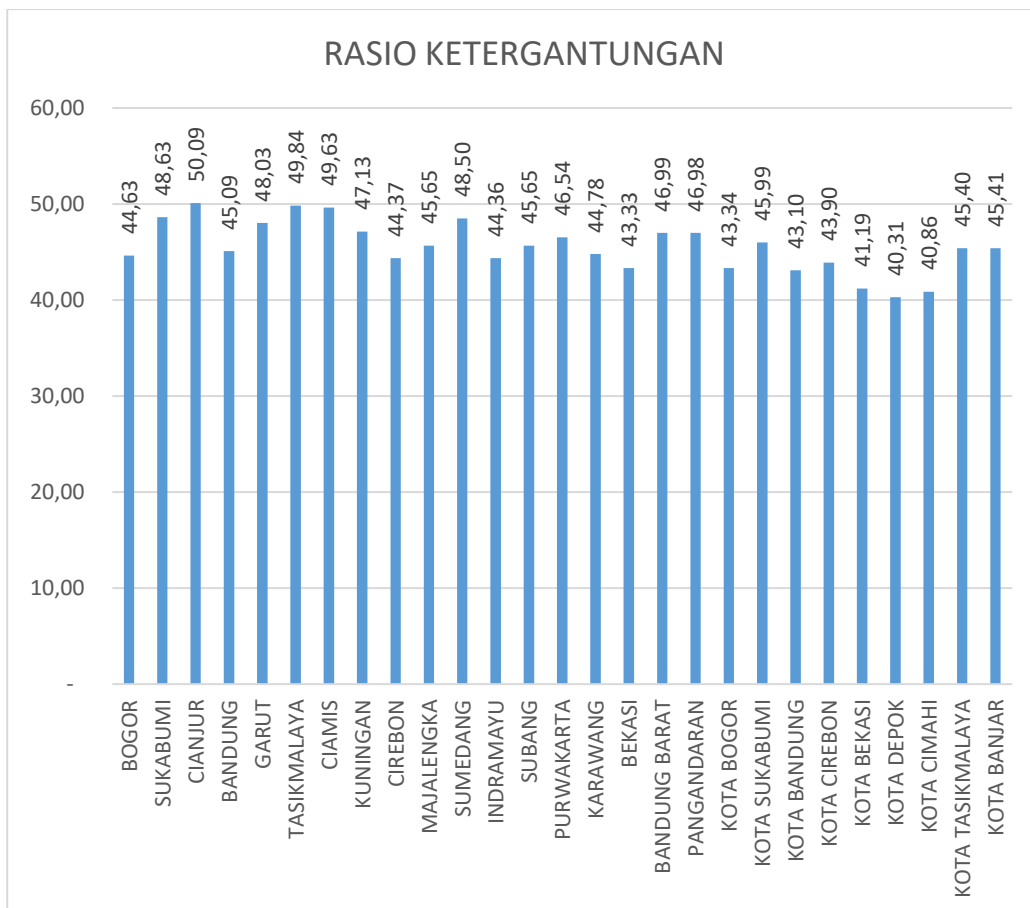
KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	0-14 TAHUN	15-64 TAHUN	>= 65 TAHUN	RASIO KETERGANTUNGAN		
					MUDA	TUA	TOTAL
3201	BOGOR	1.510.312	4.113.094	325.519	36,72	7,91	44,63
3202	SUKABUMI	723.475	1.970.389	234.669	36,72	11,91	48,63
3203	CIANJUR	701.099	1.808.758	204.903	38,76	11,33	50,09
3204	BANDUNG	946.723	2.691.254	266.693	35,18	9,91	45,09
3205	GARUT	755.006	1.973.777	192.907	38,25	9,77	48,03
3206	TASIKMALAYA	445.164	1.352.199	228.718	32,92	16,91	49,84
3207	CIAMIS	269.677	882.364	168.233	30,56	19,07	49,63
3208	KUNINGAN	281.810	852.446	119.950	33,06	14,07	47,13
3209	CIREBON	596.294	1.748.075	179.328	34,11	10,26	44,37
3210	MAJALENGKA	308.141	947.126	124.215	32,53	13,11	45,65
3211	SUMEDANG	268.099	836.235	137.461	32,06	16,44	48,50
3212	INDRAMAYU	447.694	1.393.201	170.320	32,13	12,23	44,36
3213	SUBANG	368.177	1.174.193	167.829	31,36	14,29	45,65
3214	PURWAKARTA	272.931	739.043	71.035	36,93	9,61	46,54
3215	KARAWANG	659.053	1.842.016	165.846	35,78	9,00	44,78
3216	BEKASI	893.424	2.420.425	155.393	36,91	6,42	43,33
3217	BANDUNG BARAT	476.663	1.326.329	146.541	35,94	11,05	46,99
3218	PANGANDARAN	92.176	306.793	51.961	30,05	16,94	46,98
3271	KOTA BOGOR	276.196	806.837	73.510	34,23	9,11	43,34
3272	KOTA SUKABUMI	91.986	258.905	27.096	35,53	10,47	45,99
3273	KOTA BANDUNG	572.818	1.821.065	212.033	31,46	11,64	43,10
3274	KOTA CIREBON	84.397	249.584	25.169	33,82	10,08	43,90
3275	KOTA BEKASI	594.867	1.838.617	162.443	32,35	8,84	41,19
3276	KOTA DEPOK	466.798	1.452.781	118.775	32,13	8,18	40,31
3277	KOTA CIMAHI	129.066	415.175	40.579	31,09	9,77	40,86

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	0-14 TAHUN	15-64 TAHUN	>= 65 TAHUN	RASIO KETERGANTUNGAN		
					MUDA	TUA	TOTAL
3278	KOTA TASIKMALAYA	181.183	534.223	61.337	33,92	11,48	45,40
3279	KOTA BANJAR	46.607	144.714	19.103	32,21	13,20	45,41
TOTAL		12.459.836	35.899.618	3.851.566	34,71	10,73	45,44

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Tabel tersebut memberikan gambaran tentang distribusi penduduk berdasarkan kelompok usia serta rasio ketergantungan di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Dari total populasi sekitar **52.211.020** jiwa, sebanyak **12.459.836** jiwa (**26,86%**) berada dalam kelompok usia muda (0-14 tahun), **35.899.618** jiwa (**68,76%**) berada dalam usia produktif (15-64 tahun), dan **3.851.566** jiwa (**7,38%**) tergolong dalam kelompok lansia (>=65 tahun). Dengan dominasi penduduk usia produktif yang cukup tinggi, Provinsi Jawa Barat memiliki potensi besar untuk memanfaatkan bonus demografi, yang dapat menjadi keuntungan jika disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan tenaga kerja, dan lapangan pekerjaan yang memadai.

Rasio ketergantungan, yang menunjukkan beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif, rata-rata mencapai **45,44**. Rincian dari rasio ini mencakup **34,71** untuk ketergantungan muda, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar **35** anak, serta **10,73** untuk ketergantungan lansia, yang menunjukkan bahwa hampir **10** orang lansia bergantung pada setiap 100 orang usia produktif. Persebaran data relatif homogen dan tidak terdapat pencilan yang signifikan, sehingga seluruh nilai masih berada dalam rentang distribusi yang wajar. Tetapi, beberapa daerah memiliki rasio ketergantungan yang lebih tinggi dibanding rata-rata, seperti Kabupaten Cianjur (**50,09**), Kabupaten Tasikmalaya (**49,84**), dan Kabupaten Ciamis (**49,63**), yang mencerminkan tingginya jumlah penduduk yang belum atau tidak lagi berada dalam usia produktif. Sebaliknya, daerah seperti Kota Depok (**40,31**), Kota Cimahi (**40,86**) dan Kota Bekasi (**41,19**) memiliki rasio ketergantungan yang lebih rendah, menunjukkan dominasi kelompok usia produktif yang lebih besar serta potensi ekonomi yang lebih tinggi.



Gambar 4-8 Rasio Ketergantungan Kabupaten/Kota

Secara sosial dan ekonomi, wilayah ini menghadapi tantangan dalam pengelolaan beban ketergantungan, terutama dengan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal layanan kesehatan dan jaminan sosial. Sementara itu, daerah dengan rasio ketergantungan muda yang tinggi perlu berfokus pada pengembangan kualitas pendidikan dan penciptaan lapangan kerja agar generasi muda dapat terserap ke dalam pasar kerja secara optimal. Dengan kebijakan yang tepat, struktur demografi ini dapat menjadi kekuatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

4.1.2.2. Jumlah Dan Proporsi Penduduk Menurut Status Kawin

Informasi tentang perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan. Terutama dalam hal pembangunan keluarga, kelahiran dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga. Dari informasi penduduk berstatus kawin, umur perkawinan pertama, dan lama kawin akan

berguna untuk mengestimasi angka kelahiran yang akan terjadi. Umur perkawinan pertama misalnya, berkaitan dengan lamanya seseorang perempuan beresiko untuk hamil dan melahirkan. Perkawinan usia dini juga akan berakibat pada besarnya angka perceraian. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidaksiapan orang tua dalam pengasuhan anak, serta kurang matangnya tingkat emosional pasangan pada saat harus menjalankan tugas dan fungsinya dalam rumah tangga. Dalam hal ini, konsep perkawinan difokuskan pada kondisi dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama secara sah (de jure) maupun tanpa pengesahan perkawinan (de facto). Secara tidak langsung status perkawinan akan mempengaruhi tingkat kelahiran. Umumnya, suatu daerah dengan proporsi kawin yang tinggi, cenderung menaikkan angka kelahiran.

Tabel 4-11 Jumlah Penduduk berdasarkan Status Kawin

NO	STATUS KAWIN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	BELUM KAWIN	12.953.748	24,81	10.437.820	19,99	23.391.568	44,80
2	KAWIN	12.606.771	24,15	12.612.172	24,16	25.218.943	48,30
3	CERAI HIDUP	417.601	0,80	758.310	1,45	1.175.911	2,25
4	CERAI MATI	462.369	0,89	1.962.229	3,76	2.424.598	4,64
TOTAL		26.440.489	50,64	25.770.531	49,36	52.211.020	100,00

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Tabel di atas menyajikan komposisi penduduk menurut status kawin pada penduduk Provinsi Jawa Barat. Tabel tersebut menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Jawa Barat didominasi oleh penduduk berstatus kawin yakni **48,30%**, diikuti dengan status belum kawin **44,80%**, cerai hidup **2,25%**, dan cerai mati **4,64%**. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, proporsi penduduk laki-laki yang berstatus kawin, cerai hidup dan cerai mati lebih rendah dibandingkan perempuan. Sementara, proporsi penduduk laki-laki berstatus belum kawin lebih tinggi dibandingkan perempuan, karena biasanya laki-laki masih meneruskan pendidikan atau baru mulai bekerja, sehingga menunda perkawinan. Begitu juga laki-laki yang dikonstruksikan sebagai tulang punggung keluarga yang harus membiayai kebutuhan keluarganya mempunyai keinginan mapan terlebih dahulu secara ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Tabel 4-12 Jumlah Penduduk berdasarkan Status Kawin dan Kelompok Umur

NO	UMUR	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI	
		N	%	N	%	N	%	N	%
1	00-04	3.451.594	6,61	-	-	-	-	-	-
2	05-09	4.488.291	8,60	-	-	-	-	-	-
3	10-14	4.519.937	8,66	13	0,00	-	-	1	0,00

NO	UMUR	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI	
		N	%	N	%	N	%	N	%
4	15-19	4.062.512	7,78	24.726	0,05	371	0,00	32	0,00
5	20-24	3.497.855	6,70	724.082	1,39	13.668	0,03	1.333	0,00
6	25-29	1.791.577	3,43	2.324.325	4,45	67.124	0,13	7.651	0,01
7	30-34	701.732	1,34	3.133.004	6,00	120.356	0,23	19.562	0,04
8	35-39	337.303	0,65	3.140.656	6,02	139.610	0,27	37.787	0,07
9	40-44	217.234	0,42	3.466.022	6,64	175.246	0,34	79.426	0,15
10	45-49	133.179	0,26	3.225.078	6,18	178.201	0,34	139.198	0,27
11	50-54	82.337	0,16	2.839.870	5,44	156.527	0,30	217.459	0,42
12	55-59	49.884	0,10	2.255.873	4,32	120.398	0,23	301.203	0,58
13	60-64	27.004	0,05	1.648.317	3,16	83.368	0,16	358.528	0,69
14	65-69	15.194	0,03	1.158.558	2,22	54.667	0,10	390.318	0,75
15	70-74	7.950	0,02	660.085	1,26	30.992	0,06	323.096	0,62
16	> 75	7.985	0,02	618.334	1,18	35.383	0,07	549.004	1,05
TOTAL		23.391.568	44,80	25.218.943	48,30	1.175.911	2,25	2.424.598	4,64

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Tabel diatas menunjukkan distribusi status perkawinan penduduk berdasarkan kelompok umur. Dari total penduduk yang tercatat, **44,80%** atau sekitar **23.391.568** orang berstatus belum kawin, dengan persentase tertinggi berada pada kelompok usia anak-anak dan remaja, terutama usia 0-14 tahun. Sementara itu, **48,30%** atau sekitar **25.218.943** orang telah menikah, dengan jumlah terbesar pada kelompok usia 25-39 tahun, di mana puncaknya terjadi pada kelompok umur 40-44 tahun dengan lebih dari **3.466.022** orang yang menikah.

Selain itu, data juga mencatat bahwa **2,25%** atau sekitar **1.175.911** orang berstatus cerai hidup, dengan proporsi tertinggi pada kelompok umur 40-49 tahun, menunjukkan bahwa perceraian lebih umum terjadi pada usia dewasa. Sementara itu, **4,64%** atau sekitar **2.424.598** orang berstatus cerai mati, dengan jumlah terbesar pada kelompok 60 tahun ke atas, mencerminkan dampak usia lanjut terhadap status perkawinan. Secara keseluruhan, distribusi status perkawinan ini menggambarkan pola sosial demografi penduduk, di mana mayoritas penduduk yang sudah menikah berada pada usia produktif, sedangkan kasus perceraian dan cerai mati meningkat seiring bertambahnya usia.

Tabel 4-13 Jumlah Penduduk berdasarkan Status Perkawinan Belum Kawin dan Kawin

NO	UMUR	BELUM KAWIN		KAWIN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	00-04	1.782.738	1.668.856	-	-
2	05-09	2.316.868	2.171.423	-	-
3	10-14	2.334.136	2.185.801	1	12

NO	UMUR	BELUM KAWIN		KAWIN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
4	15-19	2.092.509	1.970.003	2.467	22.259
5	20-24	1.992.995	1.504.860	178.442	545.640
6	25-29	1.237.931	553.646	904.197	1.420.128
7	30-34	544.584	157.148	1.440.159	1.692.845
8	35-39	267.627	69.676	1.523.378	1.617.278
9	40-44	171.638	45.596	1.710.268	1.755.754
10	45-49	99.158	34.021	1.623.508	1.601.570
11	50-54	55.782	26.555	1.477.903	1.361.967
12	55-59	29.968	19.916	1.233.296	1.022.577
13	60-64	14.629	12.375	936.478	711.839
14	65-69	7.401	7.793	701.970	456.588
15	70-74	3.314	4.636	438.111	221.974
16	> 75	2.470	5.515	436.593	181.741
TOTAL		12.953.748	10.437.820	12.606.771	12.612.172

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Tabel diatas menyajikan distribusi status perkawinan penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang belum kawin lebih banyak didominasi oleh laki-laki, dengan total **12.953.748** laki-laki dan **10.437.820** perempuan. Sebagian besar dari mereka berada pada kelompok usia 0-14 tahun, yang mencerminkan bahwa mayoritas anak-anak dan remaja masih berada dalam status ini. Sementara itu, penduduk yang telah menikah tercatat hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan, dengan total **12.606.771** laki-laki dan **12.62.172** perempuan. Puncak jumlah penduduk yang menikah terjadi pada kelompok usia 40-44 tahun, yang menandakan bahwa periode ini menjadi fase utama pernikahan bagi masyarakat.

Tabel 4-14 Jumlah Penduduk berdasarkan Status Perkawinan Cerai Hidup dan Cerai Mati

NO	UMUR	CERAI HIDUP		CERAI MATI	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	00-04	-	-	-	-
2	05-09	-	-	-	-
3	10-14	-	-	1	-
4	15-19	21	350	-	32
5	20-24	2.103	11.565	208	1.125
6	25-29	18.082	49.042	1.935	5.716
7	30-34	44.180	76.176	5.345	14.217
8	35-39	56.414	83.196	9.465	28.322
9	40-44	67.644	107.602	17.285	62.141

NO	UMUR	CERAI HIDUP		CERAI MATI	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
10	45-49	66.164	112.037	26.546	112.652
11	50-54	56.498	100.029	38.569	178.890
12	55-59	43.036	77.362	52.636	248.567
13	60-64	27.724	55.644	63.587	294.941
14	65-69	17.199	37.468	73.684	316.634
15	70-74	9.360	21.632	65.400	257.696
16	> 75	9.176	26.207	107.708	441.296
TOTAL		417.601	758.310	462.369	1.962.229

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Dalam kategori cerai hidup, jumlah perempuan yang bercerai lebih tinggi dibanding laki-laki, yaitu **758.310** perempuan dan **417.601** laki-laki. Hal ini terlihat jelas pada kelompok usia 40 tahun ke atas, di mana angka perceraian mulai meningkat. Sementara itu, pada kategori cerai mati, jumlah perempuan yang kehilangan pasangan jauh lebih besar, mencapai **1.962.229** dibandingkan **462.369** laki-laki. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perempuan lebih sering menjadi janda dibanding laki-laki menjadi duda, yang kemungkinan disebabkan oleh angka harapan hidup perempuan yang lebih tinggi. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa status perkawinan dipengaruhi oleh faktor usia dan jenis kelamin. Laki-laki cenderung menikah lebih lambat, sedangkan perempuan lebih banyak mengalami perceraian atau kehilangan pasangan di usia lanjut.

4.1.2.2.1. Angka Perkawinan Kasar

Angka Perkawinan Kasar (APK) menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu. Angka perkawinan kasar ini merupakan indikator perkawinan yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin, tetapi bagi daerah002Ddaerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga.

Tabel 4-15 Angka Perkawinan Kasar berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	JUMLAH PERKAWINAN	ANGKA PERKAWINAN KASAR
3201	BOGOR	5.875.830	27.171	4,62
3202	SUKABUMI	2.899.139	13.456	4,64
3203	CIANJUR	2.674.818	13.173	4,92

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	JUMLAH PERKAWINAN	ANGKA PERKAWINAN KASAR
3204	BANDUNG	3.873.653	25.437	6,57
3205	GARUT	2.883.791	22.379	7,76
3206	TASIKMALAYA	2.012.288	13.412	6,67
3207	CIAMIS	1.309.491	8.837	6,75
3208	KUNINGAN	1.247.821	9.570	7,67
3209	CIREBON	2.509.723	17.218	6,86
3210	MAJALENGKA	1.374.317	10.196	7,42
3211	SUMEDANG	1.233.691	8.655	7,02
3212	INDRAMAYU	1.998.472	10.701	5,35
3213	SUBANG	1.695.197	7.601	4,48
3214	PURWAKARTA	1.073.459	6.428	5,99
3215	KARAWANG	2.639.594	12.998	4,92
3216	BEKASI	3.434.768	14.418	4,20
3217	BANDUNG BARAT	1.930.450	11.820	6,12
3218	PANGANDARAN	448.980	3.202	7,13
3271	KOTA BOGOR	1.150.721	6.420	5,58
3272	KOTA SUKABUMI	373.189	2.210	5,92
3273	KOTA BANDUNG	2.599.743	13.272	5,11
3274	KOTA CIREBON	358.265	2.560	7,15
3275	KOTA BEKASI	2.585.499	11.031	4,27
3276	KOTA DEPOK	2.024.664	9.564	4,72
3277	KOTA CIMAHI	584.222	3.629	6,21
3278	KOTA TASIKMALAYA	773.692	6.188	8,00
3279	KOTA BANJAR	209.925	1.672	7,96
TOTAL		51.775.402	293.218	5,66

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Tabel di atas menyajikan data Angka Perkawinan Kasar di berbagai kabupaten dan kota, dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di Provinsi Jawa Barat mencapai **(51.775.402)** jiwa dan jumlah pernikahan sebanyak **(293.218)** kasus, sehingga angka pernikahan kasar rata-rata berada di **(5,66)**.

Jumlah pernikahan tertinggi terdapat di Kabupaten Bandung **(25.437)**, Kabupaten Garut **(22.379)**, dan Kabupaten Bogor **(21.171)**, sedangkan jumlah terendah berada di Kota Banjar **(1.672)**, Kota Sukabumi **(2.210)**, dan Kota Cirebon **(2.560)**.

Pada indikator Angka Pernikahan Kasar, nilai tertinggi tercatat di Kota Tasikmalaya **(8,00)**, Kota Banjar **(7,96)**, dan Kabupaten Garut **(7,76)**, sedangkan nilai terendah berada di Kabupaten Bekasi **(4,20)**, Kota Bekasi **(4,27)**, dan Kabupaten Subang **(4,48)**.

Secara umum, data ini mencerminkan variasi tingkat pernikahan di berbagai Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, yang dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, faktor budaya, serta kondisi sosial dan ekonomi di masing-masing wilayah.

4.1.2.2.2. Angka Perkawinan Umum

Angka Perkawinan Umum (APU) menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada suatu tahun tertentu. Angka Perkawinan Umum lebih cermat dibandingkan dengan Angka Perkawinan Kasar karena dalam perhitungan ini hanya memasukkan penduduk yang berisiko kawin saja yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas sebagai faktor penyebut. Sementara penduduk berusia di bawah 15 tahun tidak diikutsertakan sebagai penyebut karena dianggap belum terpapar terhadap peristiwa perkawinan.

Tabel 4-16 Angka Perkawinan Umum berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK USIA ≥ 15 TAHUN	JUMLAH PERKAWINAN	ANGKA PERKAWINAN UMUM
3201	BOGOR	4.438.613	27.171	6,12
3202	SUKABUMI	2.205.058	13.456	6,10
3203	CIANJUR	2.013.661	13.173	6,54
3204	BANDUNG	2.957.947	25.437	8,60
3205	GARUT	2.166.684	22.379	10,33
3206	TASIKMALAYA	1.580.917	13.412	8,48
3207	CIAMIS	1.050.597	8.837	8,41
3208	KUNINGAN	972.396	9.570	9,84
3209	CIREBON	1.927.403	17.218	8,93
3210	MAJALENGKA	1.071.341	10.196	9,52
3211	SUMEDANG	973.696	8.655	8,89
3212	INDRAMAYU	1.563.521	10.701	6,84
3213	SUBANG	1.342.022	7.601	5,66
3214	PURWAKARTA	810.078	6.428	7,94
3215	KARAWANG	2.007.862	12.998	6,47
3216	BEKASI	2.575.818	14.418	5,60

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK USIA >= 15 TAHUN	JUMLAH PERKAWINAN	ANGKA PERKAWINAN UMUM
3217	BANDUNG BARAT	1.472.870	11.820	8,03
3218	PANGANDARAN	358.754	3.202	8,93
3271	KOTA BOGOR	880.347	6.420	7,29
3272	KOTA SUKABUMI	286.001	2.210	7,73
3273	KOTA BANDUNG	2.033.098	13.272	6,53
3274	KOTA CIREBON	274.753	2.560	9,32
3275	KOTA BEKASI	2.001.060	11.031	5,51
3276	KOTA DEPOK	1.571.556	9.564	6,09
3277	KOTA CIMAHI	455.754	3.629	7,96
3278	KOTA TASIKMALAYA	595.560	6.188	10,39
3279	KOTA BANJAR	163.817	1.672	10,21
TOTAL		39.751.184	293.218	7,38

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Data yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk usia di atas 15 tahun, jumlah pernikahan, dan angka perkawinan umum di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Secara keseluruhan, jumlah penduduk usia di atas 15 tahun di Jawa Barat mencapai **39.751.184** jiwa, dengan jumlah pernikahan sebanyak **293.218**. Angka perkawinan umum di Jawa Barat rata-rata sebesar **7,38**, Angka tersebut menjelaskan bahwa dari 1.000 penduduk Provinsi Jawa Barat yang berusia diatas 15 tahun terdapat **±7** orang yang melakukan pernikahan.

Angka Pernikahan Umum tertinggi tercatat di Kota Tasikmalaya (**10,39**), Kabupaten Garut (**10,33**), dan Kota Banjar (**10,21**), yang menunjukkan bahwa dalam setiap 1.000 penduduk berusia di atas 15 di daerah tersebut melangsungkan sekitar **10** pernikahan. Sedangkan Angka Pernikahan Umum terendah tercatat berada di Kota Bekasi (**5,51**), Kabupaten Bekasi (**5,60**), dan Kabupaten Subang (**5,66**), yang menunjukkan bahwa dalam setiap 1.000 penduduk di daerah tersebut melangsungkan sekitar **5** pernikahan. Meski Angka Pernikahan Umum hampir berbeda dua kali lipat antar Kota Bekasi dan Kota Tasikamalaya, tetapi angka tersebut tidak termasuk pencilan dan masih dikatakan normal. Faktor-faktor seperti jumlah penduduk usia menikah, kondisi sosial ekonomi, serta budaya lokal kemungkinan besar mempengaruhi angka perkawinan di masing-masing daerah.

4.1.2.2.3. Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur

Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur atau angka perkawinan spesifik (age specific marriage rate) adalah angka yang menunjukkan berapa banyaknya penduduk pada suatu umur tertentu yang berstatus kawin untuk tiap-tiap 1.000 penduduk pada kelompok umur yang sama. Indikator ini berguna untuk perencanaan program-program yang berkaitan dengan peningkatan usia kawin pertama, mempertahankan anak-anak usia sekolah untuk tetap bersekolah dan mengembangkan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja.

Tabel 4-17 Angka Perkawinan menurut Kelompok Umur

NO	UMUR	JUMLAH PERNIKAHAN	PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	PENDUDUK USIA ≥ 15 TAHUN	APK	APU
1	00-04	-	3.032.607	-	-	-
2	05-09	-	4.463.958	-	-	-
3	10-14	3	4.513.724	-	0,001	-
4	15-19	9.516	4.054.191	4.087.641	2,35	2,33
5	20-24	98.727	4.213.246	4.236.938	23,43	23,30
6	25-29	108.361	4.182.271	4.190.677	25,91	25,86
7	30-34	37.075	3.966.246	3.974.654	9,35	9,33
8	35-39	15.044	3.649.433	3.655.356	4,12	4,12
9	40-44	9.737	3.934.817	3.937.928	2,47	2,47
10	45-49	5.961	3.677.698	3.675.656	1,62	1,62
11	50-54	3.644	3.303.837	3.296.193	1,10	1,11
12	55-59	2.304	2.740.301	2.727.358	0,84	0,84
13	60-64	1.351	2.133.293	2.117.217	0,63	0,64
14	65-69	797	1.636.471	1.618.737	0,49	0,49
15	70-74	363	1.037.293	1.022.123	0,35	0,36
16	> 75	335	1.236.016	1.210.706	0,27	0,28
TOTAL		293.218	51.775.402	39.751.184	5,66	7,38

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Tabel di atas menggambarkan jumlah pernikahan, jumlah penduduk pertengahan tahun, jumlah penduduk usia ≥ 15 tahun, serta Angka Perkawinan Kasar (APK) dan Angka Perkawinan Umum (APU) menurut kelompok umur di Jawa Barat. Secara keseluruhan, jumlah pernikahan tercatat sebanyak 293.218 peristiwa. Jumlah penduduk pertengahan tahun sebesar **51.775.402** jiwa, dengan penduduk usia ≥ 15 tahun sebanyak **39.751.184** jiwa. Berdasarkan data tersebut, Angka Perkawinan Kasar

(APK) tercatat sebesar **5,66**, yang berarti terdapat sekitar **6** pernikahan untuk setiap 1.000 penduduk. Sementara itu, Angka Perkawinan Umum (APU) sebesar **7,38** menunjukkan bahwa dari setiap 1.000 penduduk usia 15 tahun ke atas terdapat sekitar **7** pernikahan.

Jika dilihat menurut kelompok umur, jumlah pernikahan tertinggi terjadi pada usia 25–29 tahun sebanyak **108.361** pernikahan, diikuti kelompok usia 20–24 tahun sebanyak **98.727** pernikahan, serta usia 30–34 tahun sebanyak **37.075** pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa puncak pernikahan terjadi pada usia dewasa muda. Dari sisi indikator, nilai APK dan APU tertinggi juga berada pada kelompok usia 25–29 tahun, dengan APK sebesar **25,91** dan APU sebesar **25,86**. Kelompok usia 20–24 tahun mencatat APK sebesar **23,43** dan APU sebesar **23,30**. Selanjutnya, pada usia 30–34 tahun APK sebesar **9,35** dan APU sebesar **9,33**. Setelah usia 30 tahun, angka perkawinan mulai menunjukkan tren penurunan secara bertahap seiring bertambahnya usia.

Pada kelompok usia 15–19 tahun, jumlah pernikahan tercatat **9.516** dengan APU sebesar **2,33**, yang menunjukkan bahwa kejadian perkawinan pada usia remaja relatif lebih rendah dibandingkan kelompok usia dewasa muda. Sementara itu, pada kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas), baik APK maupun APU berada di bawah **1,00**, mencerminkan rendahnya intensitas pernikahan pada usia lanjut. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa pola perkawinan di Jawa Barat terkonsentrasi pada usia produktif, khususnya rentang 20–29 tahun, kemudian menurun secara konsisten pada kelompok usia yang lebih tua. Pola tersebut mencerminkan kecenderungan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan pada fase awal hingga pertengahan usia produktif.

4.1.2.2.4. Rata-Rata Umur Kawin Pertama (SMAM)

Rata-rata usia kawin pertama dari penduduk suatu daerah mencerminkan keadaan sosial ekonomi dari daerah tersebut. Perempuan dan laki-laki yang kawin muda biasanya tidak banyak mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga mereka menikah pada usia muda dan meninggalkan bangku sekolah. Untuk memperoleh rata-rata usia kawin pertama yang lebih cermat, para demografer mengembangkan rata-rata usia kawin dari data tentang proporsi penduduk yang masih lajang menurut umur. Estimasi rata-rata usia kawin dengan cara ini disebut Singulate Mean Age at Marriage (SMAM).

Definisi Singulate Mean Age at Marriage (SMAM) adalah perkiraan (estimasi) rata-rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang (belum kawin). Kegunaan tersedianya indikator rata-rata umur kawin pertama dengan metode SMAM akan memudahkan para penentu kebijakan dan perencana pembangunan untuk mengembangkan program pemberdayaan orang muda agar meneruskan sekolah, dan

bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan pendidikan keterampilan agar tidak segera memasuki jenjang perkawinan. Program untuk pendewasaan usia perkawinan bagi perempuan juga dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

Tabel 4-18 Rata-Rata Umur Kawin Pertama berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	USIA RATA-RATA PERKAWINAN (TAHUN)	
		PEREMPUAN	LAKI-LAKI
32	JAWA BARAT	26	31
3201	BOGOR	26	30
3202	SUKABUMI	24	29
3203	CIANJUR	24	29
3204	BANDUNG	25	28
3205	GARUT	24	29
3206	TASIKMALAYA	24	29
3207	CIAMIS	25	30
3208	KUNINGAN	25	30
3209	CIREBON	25	30
3210	MAJALENGKA	25	29
3211	SUMEDANG	24	28
3212	INDRAMAYU	26	29
3213	SUBANG	25	29
3214	PURWAKARTA	25	29
3215	KARAWANG	25	29
3216	BEKASI	26	29
3217	BANDUNG BARAT	24	28
3218	PANGANDARAN	24	29
3271	KOTA BOGOR	27	30
3272	KOTA SUKABUMI	26	29
3273	KOTA BANDUNG	27	30
3274	KOTA CIREBON	26	29
3275	KOTA BEKASI	28	31
3276	KOTA DEPOK	27	30
3277	KOTA CIMAHI	27	30
3278	KOTA TASIKMALAYA	25	29
3279	KOTA BANJAR	25	29

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Tabel di atas menunjukkan usia rata-rata perkawinan menurut jenis kelamin pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Secara keseluruhan, usia rata-rata perkawinan di Jawa Barat adalah 26 tahun untuk perempuan dan 31 tahun untuk laki-laki. Data ini menunjukkan bahwa laki-laki cenderung menikah pada usia yang lebih matang dibandingkan perempuan, dengan selisih rata-rata sekitar lima tahun. Berdasarkan wilayah, terdapat variasi usia rata-rata perkawinan antar kabupaten/kota. Untuk laki-laki, usia rata-rata tertinggi tercatat di Kota Bekasi sebesar 31 tahun, diikuti oleh Jawa Barat secara agregat (31 tahun), serta beberapa daerah seperti Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Depok, dan Kota Cimahi yang berada pada angka 30 tahun. Sementara itu, usia rata-rata perkawinan laki-laki terendah tercatat sebesar 28 tahun, antara lain di Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung Barat.

Untuk perempuan, usia rata-rata perkawinan tertinggi tercatat di Kota Bekasi sebesar 28 tahun, diikuti oleh Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Depok, dan Kota Cimahi yang masing-masing sebesar 27 tahun. Sebaliknya, usia rata-rata perkawinan perempuan terendah, yaitu 24 tahun, tercatat di beberapa kabupaten seperti Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Sumedang, Bandung Barat, dan Pangandaran. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa wilayah perkotaan cenderung memiliki usia rata-rata perkawinan yang lebih tinggi dibandingkan sebagian wilayah kabupaten. Pola ini dapat mencerminkan pengaruh faktor pendidikan, partisipasi kerja, serta karakteristik sosial ekonomi yang berbeda antarwilayah di Provinsi Jawa Barat.

4.1.2.2.5. Angka Perceraian Kasar

Berakhirnya suatu perkawinan selain membawa implikasi demografi juga mempunyai implikasi sosiologi. Implikasi demografi adalah mempengaruhi fertilitas dalam arti mengurangi fertilitas, sedangkan implikasi sosiologi lebih kepada persepsi masyarakat tentang status cerai terutama bagi perempuan. Angka Perceraian Kasar menunjukkan jumlah perceraian per 1000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu.

Angka ini berguna untuk mengetahui gambaran sosiologis suatu daerah yang berkaitan dengan tingkat perceraian. Angka perceraian kasar ini merupakan indikator perceraian (cerai hidup) yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin, bagi daerahdaerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan perceraian serta jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga.

Tabel 4-19 Angka Perceraian Kasar berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	JUMLAH PERCERAIAN	ANGKA PERCERAIAN KASAR
3201	BOGOR	5.875.830	12.330	2,10
3202	SUKABUMI	2.899.139	5.406	1,86
3203	CIANJUR	2.674.818	6.010	2,25
3204	BANDUNG	3.873.653	9.614	2,48
3205	GARUT	2.883.791	8.671	3,01
3206	TASIKMALAYA	2.012.288	4.100	2,04
3207	CIAMIS	1.309.491	3.805	2,91
3208	KUNINGAN	1.247.821	2.148	1,72
3209	CIREBON	2.509.723	5.405	2,15
3210	MAJALENGKA	1.374.317	4.587	3,34
3211	SUMEDANG	1.233.691	2.294	1,86
3212	INDRAMAYU	1.998.472	4.627	2,32
3213	SUBANG	1.695.197	2.715	1,60
3214	PURWAKARTA	1.073.459	2.279	2,12
3215	KARAWANG	2.639.594	5.643	2,14
3216	BEKASI	3.434.768	4.280	1,25
3217	BANDUNG BARAT	1.930.450	4.386	2,27
3218	PANGANDARAN	448.980	1.822	4,06
3271	KOTA BOGOR	1.150.721	3.809	3,31
3272	KOTA SUKABUMI	373.189	1.581	4,24
3273	KOTA BANDUNG	2.599.743	9.809	3,77
3274	KOTA CIREBON	358.265	843	2,35
3275	KOTA BEKASI	2.585.499	7.500	2,90
3276	KOTA DEPOK	2.024.664	4.766	2,35
3277	KOTA CIMAHI	584.222	1.550	2,65
3278	KOTA TASIKMALAYA	773.692	3.506	4,53
3279	KOTA BANJAR	209.925	1.417	6,75
TOTAL		51.775.402	124.903	2,41

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Secara keseluruhan, jumlah penduduk pertengahan tahun tercatat **51.775.402** jiwa, dengan jumlah perceraian mencapai **124.903** kasus, menghasilkan angka perceraian kasar sebesar **2,41** per 1.000 penduduk. Dari data ini, terdapat variasi angka yang cukup tinggi karena terdapat pencilan atau nilai ekstrem. Kota Banjar memiliki

angka perceraian kasar tertinggi dengan indikasi sebagai nilai ekstrem, yaitu **6,75**, yang menunjukkan bahwa jumlah perceraian per 1.000 penduduk di daerah ini cukup tinggi dibandingkan wilayah lain. Selain itu, Kota Tasikmalaya (**4,53**), Kota Sukabumi (**4,24**), dan Kabupaten Pangandaran (**4,06**) juga memiliki angka perceraian kasar yang tinggi.

Sebaliknya, wilayah dengan angka perceraian kasar yang lebih rendah adalah Kabupaten Bekasi (**1,25**), Kabupaten Subang (**1,6**), dan Kabupaten Kuningan (**1,72**), yang menunjukkan tingkat perceraian yang lebih rendah dibandingkan daerah lain. Secara absolut, jumlah perceraian tertinggi terjadi di Kabupaten Bogor (**12.330** kasus), diikuti oleh Kota Bandung (**9.808** kasus) dan Kabupaten Bandung (**9.614** kasus). Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah penduduk yang lebih besar di daerah tersebut. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa meskipun secara keseluruhan angka perceraian kasar berada pada angka **2,41**, terdapat variasi yang signifikan antar kabupaten/kota. Faktor-faktor seperti jumlah penduduk, kondisi sosial ekonomi, dan budaya di setiap daerah dapat berkontribusi terhadap perbedaan angka perceraian ini.

4.1.2.2.6. Angka Perceraian Umum

Angka Perceraian Umum menunjukkan penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu tahun tertentu.

Tabel 4-20 Angka Perceraian Umum berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK USIA >= 15 TAHUN	JUMLAH PERCERAIAN	ANGKA PERCERAIAN UMUM
3201	BOGOR	4.438.613	12.330	2,78
3202	SUKABUMI	2.205.058	9.809	4,45
3203	CIANJUR	2.013.661	9.614	4,77
3204	BANDUNG	2.957.947	8.671	2,93
3205	GARUT	2.166.684	7.500	3,46
3206	TASIKMALAYA	1.580.917	6.010	3,80
3207	CIAMIS	1.050.597	5.643	5,37
3208	KUNINGAN	972.396	5.406	5,56
3209	CIREBON	1.927.403	5.405	2,80
3210	MAJALENGKA	1.071.341	4.766	4,45
3211	SUMEDANG	973.696	4.627	4,75
3212	INDRAMAYU	1.563.521	4.587	2,93
3213	SUBANG	1.342.022	4.386	3,27

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK USIA $\geq$ 15 TAHUN	JUMLAH PERCERAIAN	ANGKA PERCERAIAN UMUM
3214	PURWAKARTA	810.078	4.280	5,28
3215	KARAWANG	2.007.862	4.100	2,04
3216	BEKASI	2.575.818	3.809	1,48
3217	BANDUNG BARAT	1.472.870	3.805	2,58
3218	PANGANDARAN	358.754	3.506	9,77
3271	KOTA BOGOR	880.347	2.715	3,08
3272	KOTA SUKABUMI	286.001	2.294	8,02
3273	KOTA BANDUNG	2.033.098	2.279	1,12
3274	KOTA CIREBON	274.753	2.148	7,82
3275	KOTA BEKASI	2.001.060	1.822	0,91
3276	KOTA DEPOK	1.571.556	1.581	1,01
3277	KOTA CIMAHI	455.754	1.550	3,40
3278	KOTA TASIKMALAYA	595.560	1.417	2,38
3279	KOTA BANJAR	163.817	843	5,15
TOTAL		39.751.184	124.903	3,14

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Tabel ini menyajikan data mengenai angka perceraian umum di berbagai kabupaten/kota. Secara keseluruhan, terdapat **39.751.184** penduduk usia di atas 15 tahun dengan jumlah perceraian mencapai **124.903** kasus, menghasilkan angka perceraian umum sebesar **3,14** per 1.000 penduduk usia di atas 15 tahun. Wilayah dengan angka perceraian umum tertinggi adalah Kabupaten Pangandaran (**9,77**), Kota Sukabumi (**8,02**), Kota Cirebon (**7,82**), dan Kabupaten Kuningan (**5,56**).

Sebaliknya, wilayah dengan angka perceraian umum terendah adalah Kota Bekasi (**0,91**), Kota Depok (**1,01**), dan Kota Bandung (**1,12**). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perceraian di wilayah-wilayah ini lebih rendah dibandingkan daerah lain. Dari segi jumlah absolut perceraian, Kabupaten Bogor (**12.330** kasus), diikuti oleh Kabupaten Sukabumi (**9.809** kasus) dan Kabupaten Cianjur (**9.614** kasus) mencatat angka perceraian tertinggi. Hal ini bisa disebabkan oleh jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang lebih besar di daerah tersebut. Secara keseluruhan, angka perceraian umum di setiap wilayah bervariasi, yang dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, serta kebijakan setempat terkait pernikahan dan perceraian.

4.1.2.3. Keluarga

Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga, diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga dapat dibagi menjadi 2 tipe yaitu:

1. Keluarga Inti (Nuclear family), yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin, atau ayah dengan anak-anak yang belum kawin atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin.
2. Keluarga luas (extended family), adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak baik yang sudah kawin atau belum, cucu, orang tua, mertua maupun kerabat-kerabat lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

Informasi tentang jumlah keluarga disajikan dalam bentuk tabel per wilayah, di bawah ini beberapa indikator yang diperlukan untuk menggambarkan kondisi keluarga.

4.1.2.3.1. Jumlah Keluarga Dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga, dimana diasumsikan semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahteraannya. Rata-rata jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga luas menjadi keluarga kecil.

Tabel 4-21 Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	KEPALA KELUARGA		RAK
			N	%	
3201	BOGOR	5.948.925	1.868.269	31,41	3,18
3202	SUKABUMI	2.928.533	1.004.268	34,29	2,92
3203	CIANJUR	2.714.760	927.510	34,17	2,93
3204	BANDUNG	3.904.670	1.292.533	33,10	3,02
3205	GARUT	2.921.690	948.821	32,48	3,08
3206	TASIKMALAYA	2.026.081	746.491	36,84	2,71
3207	CIAMIS	1.320.274	480.060	36,36	2,75
3208	KUNINGAN	1.254.206	429.812	34,27	2,92
3209	CIREBON	2.523.697	863.319	34,21	2,92

KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	KEPALA KELUARGA		RAK
			N	%	
3210	MAJALENGKA	1.379.482	499.676	36,22	2,76
3211	SUMEDANG	1.241.795	453.380	36,51	2,74
3212	INDRAMAYU	2.011.215	740.722	36,83	2,72
3213	SUBANG	1.710.199	651.913	38,12	2,62
3214	PURWAKARTA	1.083.009	366.193	33,81	2,96
3215	KARAWANG	2.666.915	920.363	34,51	2,90
3216	BEKASI	3.469.242	1.084.566	31,26	3,20
3217	BANDUNG BARAT	1.949.533	663.026	34,01	2,94
3218	PANGANDARAN	450.930	166.828	37,00	2,70
3271	KOTA BOGOR	1.156.543	371.709	32,14	3,11
3272	KOTA SUKABUMI	377.987	125.675	33,25	3,01
3273	KOTA BANDUNG	2.605.916	864.954	33,19	3,01
3274	KOTA CIREBON	359.150	119.812	33,36	3,00
3275	KOTA BEKASI	2.595.927	828.060	31,90	3,13
3276	KOTA DEPOK	2.038.354	651.657	31,97	3,13
3277	KOTA CIMAHI	584.820	194.396	33,24	3,01
3278	KOTA TASIKMALAYA	776.743	261.259	33,64	2,97
3279	KOTA BANJAR	210.424	74.965	35,63	2,81
TOTAL		52.211.020	17.600.237	33,71	2,97

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Data di atas menunjukkan jumlah penduduk, kepala keluarga, dan rata-rata jumlah anggota keluarga di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Secara keseluruhan, jumlah penduduk tercatat sebanyak **52.211.020** jiwa dengan **17.600.237** kepala keluarga, menghasilkan rata-rata jumlah anggota keluarga sebesar **2,97** orang per keluarga yang artinya dalam 1 keluarga memiliki sekitar **3** anggota keluarga. Meski secara keseluruhan persebarannya tidak signifikan, beberapa wilayah memiliki rata-rata jumlah anggota keluarga yang lebih tinggi, seperti Kabupaten Bekasi (**3,20**), Kabupaten Bogor (**3,18**), dan Kota Bekasi (**3,13**). Sebaliknya, beberapa daerah memiliki rata-rata anggota keluarga lebih kecil, seperti Kabupaten Subang (**2,62**), Kabupaten Pangandaran (**2,70**), dan Kabupaten Tasikmalaya (**2,71**). Rata-rata jumlah anggota keluarga yang lebih besar di beberapa daerah dapat mencerminkan pola hidup komunal atau tingginya tingkat ketergantungan dalam rumah tangga. Sebaliknya, wilayah dengan angka lebih rendah bisa mengindikasikan dominasi rumah tangga inti atau jumlah anak yang lebih sedikit dalam satu keluarga.

4.1.2.3.2. Hubungan Dengan Kepala Keluarga

Hubungan dengan kepala keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal bersama (living arrangement) dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, keponakan, orang tua dan mertua, termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama seperti pembantu rumah tangga.

Tabel 4-22 Hubungan Dengan Kepala Keluarga

NO	STATUS HUBUNGAN DALAM KELUARGA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	KEPALA KELUARGA	13.896.216	26,62	3.704.021	7,09	17.600.237	33,71
2	SUAMI	340	0,00	-	-	340	0,00
3	ISTERI	-	0,00	11.658.253	22,33	11.658.253	22,33
4	ANAK	12.152.386	23,28	10.002.334	19,16	22.154.720	42,43
5	MENANTU	781	0,00	1.041	0,00	1.822	0,00
6	CUCU	146.229	0,28	109.747	0,21	255.976	0,49
7	ORANG TUA	8.823	0,02	66.687	0,13	75.510	0,14
8	MERTUA	4.712	0,01	29.995	0,06	34.707	0,07
9	FAMILI LAINNYA	195.926	0,38	154.123	0,30	350.049	0,67
10	PEMBANTU	183	0,00	765	0,00	948	0,00
11	LAINNYA	34.893	0,07	43.565	0,08	78.458	0,15
TOTAL		26.440.489	50,64	25.770.531	49,36	52.211.020	100,00

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan data status hubungan dalam keluarga, jumlah kepala keluarga mencapai **17.600.237** orang (**33,71%**), dengan dominasi laki-laki sebesar **13.896.216** orang (**26,62%**) dibandingkan perempuan **3.704.021** orang (**7,09%**). Kategori terbesar adalah anak yaitu **22.154.720** orang (**42,43%**), terdiri dari **12.152.386** orang (**23,28%**) laki-laki dan **10.002.334** orang (**19,16%**) perempuan. Peran istri juga cukup besar yaitu **11.658.253** orang (**22,33%**).

Kategori lain seperti cucu tercatat **255.976** orang (**0,49%**), orang tua **75.510** orang (**0,14%**), mertua **34.707** orang (**0,07%**), serta famili lainnya **350.049** orang (**0,67%**). Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk dalam keluarga adalah anak-anak, sedangkan kepala keluarga didominasi oleh laki-laki. Jumlah anggota keluarga lainnya, seperti orang tua dan mertua, relatif kecil, menunjukkan

bahwa pola keluarga inti lebih umum dibandingkan keluarga besar yang tinggal bersama.

4.1.2.3.3. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur

Informasi tentang kelompok umur dari Kepala Keluarga dan anggota keluarga penting diketahui terutama untuk melakukan analisis kondisi demografi keluarga serta perencanaan kebijakan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

Tabel 4-23 Kepala Keluarga berdasarkan Kelompok Umur

NO	UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	00-04	60	0,00	52	0,00	112	0,00
2	05-09	158	0,00	103	0,00	261	0,00
3	10-14	368	0,00	303	0,00	671	0,00
4	15-19	12.696	0,07	13.989	0,08	26.685	0,15
5	20-24	252.360	1,43	74.630	0,42	326.990	1,86
6	25-29	1.019.298	5,79	133.434	0,76	1.152.732	6,55
7	30-34	1.561.390	8,87	174.166	0,99	1.735.556	9,86
8	35-39	1.640.619	9,32	198.513	1,13	1.839.132	10,45
9	40-44	1.837.320	10,44	276.130	1,57	2.113.450	12,01
10	45-49	1.747.146	9,93	337.545	1,92	2.084.691	11,84
11	50-54	1.595.209	9,06	389.434	2,21	1.984.643	11,28
12	55-59	1.343.084	7,63	424.711	2,41	1.767.795	10,04
13	60-64	1.034.532	5,88	434.544	2,47	1.469.076	8,35
14	65-69	794.600	4,51	423.309	2,41	1.217.909	6,92
15	70-74	511.796	2,91	321.168	1,82	832.964	4,73
16	> 75	545.580	3,10	501.990	2,85	1.047.570	5,95
TOTAL		13.896.216	78,95	3.704.021	21,05	17.600.237	100,00

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan distribusi kepala keluarga berdasarkan kelompok umur, dari total **17.600.237** kepala keluarga, kelompok usia 40-44 tahun memiliki jumlah kepala keluarga yang lebih tinggi, mencapai **2.113.450** orang (**12,01%**), yang menjadi puncak distribusi kepala keluarga dalam data ini. Seiring bertambahnya usia, jumlah kepala keluarga cenderung menurun, meskipun tetap tinggi pada kelompok usia 45-49 tahun (**2.084.691** orang atau **11,84%**) dan 50-54 tahun (**1.984.643** orang atau **11,28%**). Setelah usia 60 tahun, jumlah kepala keluarga berkurang signifikan, dengan kelompok 60-64 tahun

sebanyak **1.469.076** orang (**8,35%**), lalu turun menjadi **1.217.909** orang (**6,92%**) pada usia 65-69 tahun, **832.964** orang (**4,73%**) pada kelompok 70-74 tahun, dan terakhir menjadi **1.047.570** orang (**5,95%**) untuk kelompok usia di atas 75 tahun.

Dari segi gender, kepala keluarga masih didominasi oleh laki-laki, yaitu sebanyak **13.896.216** orang (**78,95%**), sedangkan perempuan sebagai kepala keluarga hanya **3.704.021** orang (**21,05%**). Data ini mencerminkan bahwa mayoritas kepala keluarga berada dalam usia produktif, dengan puncaknya pada usia 40-44 tahun, sedangkan kepala keluarga perempuan lebih banyak ditemukan pada kelompok usia lanjut, yang kemungkinan besar disebabkan oleh faktor usia harapan hidup yang lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki.

4.1.2.3.4. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga sekaligus sebagai kepala keluarga. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga karena pasangan meninggal, cerai atau sebab-sebab yang lain. Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya di masa depan dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan. Penambahan persentase kepala keluarga perempuan tersebut dapat juga menggambarkan tingkat perceraian (baik cerai hidup maupun cerai mati) yang terjadi dan juga dapat menggambarkan salah satu tren gaya hidup modern.

Tabel 4-24 Kepala Keluarga berdasarkan Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
3201	BOGOR	1.490.857	8,47	377.412	2,14	1.868.269	10,62
3202	SUKABUMI	787.084	4,47	217.184	1,23	1.004.268	5,71
3203	CIANJUR	726.425	4,13	201.085	1,14	927.510	5,27
3204	BANDUNG	1.047.786	5,95	244.747	1,39	1.292.533	7,34
3205	GARUT	759.474	4,32	189.347	1,08	948.821	5,39
3206	TASIKMALAYA	575.232	3,27	171.259	0,97	746.491	4,24
3207	CIAMIS	370.067	2,10	109.993	0,62	480.060	2,73
3208	KUNINGAN	339.125	1,93	90.687	0,52	429.812	2,44
3209	CIREBON	675.809	3,84	187.510	1,07	863.319	4,91
3210	MAJALENGKA	388.562	2,21	111.114	0,63	499.676	2,84
3211	SUMEDANG	358.037	2,03	95.343	0,54	453.380	2,58

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
3212	INDRAMAYU	561.173	3,19	179.549	1,02	740.722	4,21
3213	SUBANG	493.731	2,81	158.182	0,90	651.913	3,70
3214	PURWAKARTA	286.695	1,63	79.498	0,45	366.193	2,08
3215	KARAWANG	726.686	4,13	193.677	1,10	920.363	5,23
3216	BEKASI	898.699	5,11	185.867	1,06	1.084.566	6,16
3217	BANDUNG BARAT	532.612	3,03	130.414	0,74	663.026	3,77
3218	PANGANDARAN	130.807	0,74	36.021	0,20	166.828	0,95
3271	KOTA BOGOR	291.582	1,66	80.127	0,46	371.709	2,11
3272	KOTA SUKABUMI	95.218	0,54	30.457	0,17	125.675	0,71
3273	KOTA BANDUNG	676.592	3,84	188.362	1,07	864.954	4,91
3274	KOTA CIREBON	90.708	0,52	29.104	0,17	119.812	0,68
3275	KOTA BEKASI	658.592	3,74	169.468	0,96	828.060	4,70
3276	KOTA DEPOK	517.034	2,94	134.623	0,76	651.657	3,70
3277	KOTA CIMAHI	154.616	0,88	39.780	0,23	194.396	1,10
3278	KOTA TASIKMALAYA	205.266	1,17	55.993	0,32	261.259	1,48
3279	KOTA BANJAR	57.747	0,33	17.218	0,10	74.965	0,43
TOTAL		13.896.216	78,95	3.704.021	21,05	17.600.237	100,00

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan data di atas jumlah kepala keluarga di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, total kepala keluarga di wilayah ini mencapai **17.600.237** orang, dengan dominasi laki-laki sebagai kepala keluarga sebanyak **13.896.216** orang (**78,95%**), sedangkan perempuan sebagai kepala keluarga tercatat sebanyak **3.704.021** orang (**21,05%**), dominasi laki-laki sebagai kepala keluarga di Jawa Barat berada di bawah rata-rata Indonesia.. Kabupaten dengan jumlah kepala keluarga tertinggi adalah Kabupaten Bogor, dengan total **1.868.269** kepala keluarga (**10,62%**), terdiri dari **1.490.857** laki-laki (**8,47%**) dan **377.412** perempuan (**2,14%**). Kabupaten lain dengan jumlah kepala keluarga yang cukup besar adalah Kabupaten Bandung (**1.292.533** kepala keluarga atau **7,34%**) dan Kabupaten Bekasi (**1.084.566** kepala keluarga atau **6,16%**).

Di sisi lain, daerah dengan jumlah kepala keluarga paling sedikit adalah Kota Banjar, dengan **74.965** kepala keluarga (**0,43%**), diikuti oleh Kota Cirebon (**119.812** kepala keluarga atau **0,68%**) dan Kota Sukabumi (**125.675** kepala keluarga atau **0,71%**). Dari segi gender, meskipun laki-laki tetap menjadi mayoritas sebagai kepala keluarga, persentase kepala keluarga perempuan cukup signifikan. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas kepala keluarga masih dipegang oleh laki-laki, namun peran perempuan sebagai kepala keluarga juga tidak bisa diabaikan, terutama di daerah tertentu yang

mungkin memiliki faktor sosial atau ekonomi yang mendorong lebih banyak perempuan untuk mengambil peran tersebut.

4.1.2.3.5. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

Dalam konsep demografi kepala keluarga merupakan seseorang baik laki-laki maupun perempuan, berstatus menikah maupun tidak, yang mempunyai peran, fungsi dan tanggungjawab sebagai kepala keluarga baik secara ekonomi, sosial maupun psikologi. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai baik hidup maupun mati.

Tabel 4-25 Kepala Keluarga berdasarkan Status Perkawinan

NO	STATUS KAWIN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	BELUM KAWIN	481.448	2,74	224.049	1,27	705.497	4,01
2	KAWIN	12.569.472	71,42	884.296	5,02	13.453.768	76,44
3	CERAI HIDUP	395.311	2,25	722.051	4,10	1.117.362	6,35
4	CERAI MATI	449.985	2,56	1.873.625	10,65	2.323.610	13,20
TOTAL		13.896.216	78,95	3.704.021	21,05	17.600.237	100,00

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan data status perkawinan, mayoritas kepala keluarga berada pada status kawin dengan jumlah **13.453.768 orang (76,44%)**. Status cerai mati juga menunjukkan angka yang cukup besar yaitu **2.323.610 orang (13,20%)**, dengan dominasi perempuan sebesar **1.873.625 orang (10,65%)** dibandingkan laki-laki **449.985 orang (2,56%)**. Pada status cerai hidup tercatat sebanyak **1.117.362 orang (6,35%)**, di mana jumlah perempuan lebih tinggi yaitu **722.051 orang (4,10%)** dibandingkan laki-laki **395.311 orang (2,25%)**.

Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa laki-laki masih mendominasi sebagai kepala keluarga dalam semua kategori status perkawinan. Namun, jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga cukup signifikan, terutama pada kelompok cerai hidup dan cerai mati, yang menunjukkan bahwa perempuan lebih sering menjadi kepala keluarga setelah peristiwa perpisahan atau kehilangan pasangan.

4.1.2.3.6. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula

tingkat kesejahteraan keluarga. Untuk itu jenjang pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga.

Tabel 4-26 Kepala Keluarga berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	TIDAK/BELUM SEKOLAH	252.490	1,43	177.910	1,01	430.400	2,45
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	178.318	1,01	111.017	0,63	289.335	1,64
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	5.009.796	28,46	1.911.660	10,86	6.921.456	39,33
4	SMP/SEDERAJAT	2.430.121	13,81	546.567	3,11	2.976.688	16,91
5	SMA/SEDERAJAT	4.560.855	25,91	718.261	4,08	5.279.116	29,99
6	DIPLOMA I/II	61.920	0,35	19.547	0,11	81.467	0,46
7	AKADEMI/ DIPLOMA III/S.MUDA	279.965	1,59	60.349	0,34	340.314	1,93
8	DIPLOMA IV/ STRATA I	1.009.372	5,73	144.714	0,82	1.154.086	6,56
9	STRATA II	102.933	0,58	12.614	0,07	115.547	0,66
10	STRATA III	10.446	0,06	1.382	0,01	11.828	0,07
TOTAL		13.896.216	78,95	3.704.021	21,05	17.600.237	100,00

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan data tingkat pendidikan terakhir kepala keluarga, terlihat bahwa jenjang tamat SD atau sederajat mendominasi dengan jumlah **6.921.456 orang (39,33%)**. Selain itu, pada jenjang SMA atau sederajat juga cukup besar yaitu **5.279.116 orang (29,99%)**, menunjukkan kontribusi signifikan dari pendidikan menengah atas.

Di sisi lain, pada jenjang pendidikan tinggi, khususnya Diploma IV/Strata I (S1), jumlahnya relatif lebih kecil yaitu **1.154.086 orang (6,56%)**, dan semakin menurun pada jenjang Strata II (S2) dan Strata III (S3) yang masing-masing hanya **115.547 orang (0,66%)** dan **11.828 orang (0,07%)**.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mayoritas kepala keluarga memiliki pendidikan maksimal pada tingkat menengah, dengan jumlah yang semakin berkurang pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Laki-laki mendominasi hampir di semua kategori pendidikan, sementara perempuan memiliki proporsi yang lebih rendah, terutama di tingkat pendidikan tinggi.

4.1.2.3.7. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Pekerjaan

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap pot ekonomi keluarga. Oleh sebab itu informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

Tabel 4-27 Kepala Keluarga berdasarkan Kelompok Pekerjaan

NO	KELOMPOK PEKERJAAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	188.715	1,07	121.805	0,69	310.520	1,76
2	APARATUR/PEJABAT NEGARA	461.810	2,62	48.801	0,28	510.611	2,90
3	TENAGA PENGAJAR	116.385	0,66	26.025	0,15	142.410	0,81
4	WIRASWASTA	11.448.052	65,04	474.356	2,70	11.922.408	67,74
5	PERTANIAN/PETERNAKAN	1.279.159	7,27	131.011	0,74	1.410.170	8,01
6	NELAYAN	66.008	0,38	191	0,00	66.199	0,38
7	AGAMA DAN KEPERCAYAAN	14.828	0,08	634	0,00	15.462	0,09
8	PELAJAR/MAHASISWA	101.957	0,58	62.914	0,36	164.871	0,94
9	TENAGA KESEHATAN	21.696	0,12	7.284	0,04	28.980	0,16
10	PENSIUNAN	190.679	1,08	54.969	0,31	245.648	1,40
11	LAINNYA	6.927	0,04	2.776.031	15,77	2.782.958	15,81
TOTAL		13.896.216	78,95	3.704.021	21,05	17.600.237	100,00

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan data kelompok pekerjaan kepala keluarga, mayoritas bekerja di sektor wirausaha dengan jumlah **11.922.408 (67,74%)**, didominasi laki-laki sebesar **11.448.052 (65,04%)** dibandingkan perempuan **474.356 (2,70%)**. Kelompok pertanian/peternakan juga cukup besar yaitu **1.410.170 (8,01%)**, serta kategori lainnya **2.782.958 (15,81%)** yang didominasi perempuan sebesar **2.776.031 (15,77%)**.

Pada kelompok dengan jumlah kecil, sektor tenaga kesehatan hanya **28.980 (0,16%)**, tenaga pengajar **142.410 (0,81%)**, serta nelayan **66.199 (0,38%)** yang hampir seluruhnya laki-laki yaitu **66.008 (0,38%)**. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mayoritas kepala keluarga bekerja di sektor wirausaha dan pertanian/peternakan, sementara perempuan lebih banyak ditemukan dalam kategori lainnya atau sebagai tenaga pengajar dan kesehatan.

4.1.2.4. Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

Penduduk suatu wilayah memiliki beragam karakteristik sosial yang dapat dikaji dari berbagai aspek, seperti tingkat pendidikan, agama yang dianut, serta kondisi kesehatan atau kecacatan. Pemahaman terhadap karakteristik sosial ini penting untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan.

4.1.2.4.1. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan suatu wilayah. Pendidikan tidak hanya berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga dalam membuka peluang ekonomi dan sosial bagi individu serta masyarakat. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan menunjukkan sebaran masyarakat berdasarkan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh, mulai dari tidak sekolah, pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi.

Tabel 4-28 Jumlah Penduduk menurut Pendidikan

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	TIDAK/ BELUM SEKOLAH	5.659.451	10,84	5.364.582	10,27	11.024.033	21,11
2	BELUM TAMAT SD/ SEDERAJAT	2.603.787	4,99	2.413.919	4,62	5.017.706	9,61
3	TAMAT SD/ SEDERAJAT	6.301.113	12,07	6.977.503	13,36	13.278.616	25,43
4	SMP/SEDERAJAT	3.889.102	7,45	3.970.811	7,61	7.859.913	15,05
5	SMA/ SEDERAJAT	6.359.529	12,18	5.333.488	10,22	11.693.017	22,40
6	DIPLOMA I/II	67.562	0,13	91.599	0,18	159.161	0,30
7	AKADEMI/ DIPLOMA III/ S.MUDA	307.578	0,59	398.643	0,76	706.221	1,35
8	DIPLOMA IV/ STRATA I	1.134.135	2,17	1.143.356	2,19	2.277.491	4,36
9	STRATA II	107.499	0,21	71.299	0,14	178.798	0,34
10	STRATA III	10.733	0,02	5.331	0,01	16.064	0,03
TOTAL		26.440.489	50,64	25.770.531	49,36	52.211.020	100,00

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan data jumlah penduduk menurut pendidikan terakhir, kelompok terbesar berada pada jenjang tamat SD/ sederajat dengan jumlah **13.278.616 (25,43%)**, diikuti oleh lulusan SMA/ sederajat sebanyak **11.693.017 (22,40%)**, sementara jumlah

penduduk yang tidak atau belum pernah bersekolah juga masih cukup besar yaitu **11.024.033 (21,11%)**, serta yang belum tamat SD/ sederajat sebanyak **5.017.706 (9,61%)**, dan pada jenjang pendidikan tinggi jumlahnya relatif kecil, dengan lulusan Diploma IV/Strata I sebanyak **2.277.491 (4,36%)**, Diploma III sebanyak **706.221 (1,35%)**, serta Strata II dan Strata III masing-masing hanya **178.798 (0,34%)** dan **16.064 (0,03%)**.

Secara keseluruhan, mayoritas penduduk masih berada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, terutama pada tingkat tamat SD dan SMA/ sederajat. Proporsi penduduk dengan pendidikan tinggi masih relatif kecil (di bawah 6% secara kumulatif untuk Diploma hingga Strata III). Distribusi pendidikan antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang, bahkan perempuan sedikit lebih tinggi pada beberapa jenjang seperti tamat SD, SMP, Diploma I/II, Diploma III, dan Strata I.

4.1.2.4.2. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Selain jumlah penduduk berdasarkan pendidikan yang sedang ditempuh, pendidikan tertinggi yang ditamatkan juga menjadi faktor penting dalam analisis sosial. Data ini menunjukkan tingkat pendidikan terakhir yang telah diselesaikan oleh penduduk, yang dapat menjadi cerminan dari kualitas tenaga kerja, tingkat literasi, serta kesiapan masyarakat dalam menghadapi tantangan global. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, semakin besar pula potensi peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.

Tabel 4-29 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	TIDAK/BELUM SEKOLAH	5.572.113	10,86	5.288.848	10,31	10.860.961	21,16
2	BELUM TAMAT SD/ SEDERAJAT	2.568.248	5,00	2.391.034	4,66	4.959.282	9,66
	BELUM SELESAI PENDIDIKAN	8.140.361	15,86	7.679.882	14,97	15.820.243	30,83
1	TAMAT SD/ SEDERAJAT	6.298.467	12,27	6.964.716	13,57	13.263.183	25,85
2	SMP/ SEDERAJAT	3.824.458	7,45	3.902.691	7,61	7.727.149	15,06
3	SMA/ SEDERAJAT	6.151.870	11,99	5.132.562	10,00	11.284.432	21,99
4	DIPLOMA I/II	68.954	0,13	92.792	0,18	161.746	0,32
5	AKADEMI/ DIPLOMA III/ S. MUDA	305.513	0,60	391.212	0,76	696.725	1,36
6	DIPLOMA IV/ STRATA I	1.093.909	2,13	1.082.359	2,11	2.176.268	4,24
7	STRATA II	103.928	0,20	67.363	0,13	171.291	0,33
8	STRATA III	10.334	0,02	5.007	0,01	15.341	0,03

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
	TELAH SELESAI PENDIDIKAN	17.857.433	34,80	17.638.702	34,37	35.496.135	69,17
	TOTAL JUMLAH PENDUDUK	25.997.794	50,66	25.318.584	49,34	52.211.020	100,00

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak **15.820.243** orang (**30,83%**) termasuk dalam kategori belum selesai pendidikan, yang mencakup penduduk yang tidak atau belum sekolah (**10.860.961** orang atau **21,16%**) serta mereka yang belum tamat SD (**4.959.282** orang atau **9,66%**). Sementara itu, sebanyak **35.496.135** orang (**69,17%**) telah menyelesaikan pendidikan pada berbagai jenjang. Mayoritas penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan terakhirnya berada pada tingkat **SD/ sederajat**, dengan jumlah **13.263.183** orang (**25,85%**), terdiri dari **6.298.467** laki-laki (**12,27%**) dan **6.964.716** perempuan (**13,57%**). Di tingkat **SMP/ sederajat**, terdapat **7.727.149** orang (**15,06%**), sedangkan lulusan **SMA/ sederajat** mencapai **11.284.432** orang (**21,99%**).

Pada jenjang pendidikan tinggi, lulusan Diploma I/II tercatat sebanyak **161.746** orang (**0,32%**), sementara lulusan Diploma III (Akademi/Sarjana Muda) berjumlah **696.725** orang (**1,36%**). Untuk lulusan Diploma IV/Strata I (S1), terdapat **2.176.268** orang (**4,24%**), dengan distribusi hampir merata antara laki-laki (**1.093.909** orang atau **2,13%**) dan perempuan (**1.082.359** orang atau **2,11%**). Di tingkat pascasarjana, lulusan Strata II (S2) mencapai **171.291** orang (**0,33%**) dan lulusan Strata III (S3) sebanyak **15.341** orang (**0,03%**).

Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan lebih besar dibandingkan mereka yang belum menyelesaikannya, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam akses pendidikan. Namun, masih terdapat lebih dari **30% penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan**, terutama pada tingkat dasar, yang memerlukan perhatian lebih dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses bagi seluruh masyarakat.

4.1.2.4.3. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Agama merupakan bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat yang memengaruhi berbagai aspek, termasuk norma, budaya, dan perilaku sosial. Jumlah penduduk menurut agama menunjukkan sebaran masyarakat berdasarkan keyakinan yang dianut. Data ini dapat digunakan untuk memahami pluralitas sosial, menjaga kerukunan antarumat beragama, serta merancang kebijakan yang mendukung kehidupan beragama yang harmonis dan toleran.

Tabel 4-30 Jumlah Penduduk menurut Agama

NO	AGAMA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	ISLAM	25.330.348	49,36	24.633.231	48,00	49.963.579	97,36
2	KRISTEN	448.840	0,87	460.642	0,90	909.482	1,77
3	KATHOLIK	151.604	0,30	158.871	0,31	310.475	0,61
4	HINDU	9.201	0,02	8.473	0,02	17.674	0,03
5	BUDHA	49.742	0,10	49.729	0,10	99.471	0,19
6	KHONGHUCU	6.321	0,01	6.097	0,01	12.418	0,02
7	KEPERCAYAAN	1.738	0,00	1.541	0,00	3.279	0,01
	TOTAL	25.997.794	50,66	25.318.584	49,34	52.211.020	100,00

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan data di atas, mayoritas penduduk menganut agama Islam dengan jumlah **49.963.579** orang (**97,36%**), sementara penganut agama Kristen tercatat **909.482** orang (**1,77%**) dan Katolik sebanyak **310.475** orang (**0,61%**), sedangkan pada kelompok dengan jumlah lebih kecil, agama Buddha berjumlah **99.471** orang (**0,19%**), Hindu **17.674** orang (**0,03%**), dan Khonghucu **12.418** orang (**0,02%**), serta kepercayaan lainnya sangat sedikit yaitu **3.279** orang (**0,01%**).

Dari data ini, terlihat bahwa agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh hampir seluruh penduduk. Sementara itu, penganut agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu, dan kepercayaan lain memiliki jumlah yang lebih kecil. Dengan komposisi yang beragam ini, toleransi dan keharmonisan antarumat beragama menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas sosial dan budaya di masyarakat.

4.1.2.4.4. Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan

Jumlah penduduk menurut kecacatan menggambarkan sebaran masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau sensorik. Data ini penting dalam perencanaan kebijakan inklusif, seperti aksesibilitas fasilitas umum, kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, serta program-program kesejahteraan sosial yang memastikan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami jumlah serta jenis kecacatan yang dimiliki penduduk, pemerintah dan lembaga terkait dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan mendukung bagi penyandang disabilitas.

Tabel 4-31 Jumlah Penduduk menurut Kecacatan

NO	DISABILITAS	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	FISIK	10.130	12,86	8.363	10,61	18.493	23,47
2	NETRA/BUTA	3.456	4,39	3.119	3,96	6.575	8,34
3	RUNGU/WICARA	5.675	7,20	4.941	6,27	10.616	13,47
4	MENTAL/JIWA	16.658	21,14	9.739	12,36	26.397	33,50
5	FISIK DAN MENTAL	1.698	2,15	1.354	1,72	3.052	3,87
6	LAINNYA	7.677	9,74	5.987	7,60	13.664	17,34
TOTAL		45.294	57,48	33.503	42,52	78.797	100,00

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah total penduduk penyandang disabilitas tercatat sebanyak **78.797** orang, dengan laki-laki **45.294** orang (**57,48%**) dan perempuan **33.503** orang (**42,52%**); jenis disabilitas yang paling banyak adalah disabilitas mental/jiwa yaitu **26.397** orang (**33,50%**), diikuti disabilitas fisik sebanyak **18.493** orang (**23,47%**), sementara kategori lainnya juga cukup besar yaitu **13.664** orang (**17,34%**); pada kelompok dengan jumlah lebih kecil, disabilitas rungu/wicara tercatat **10.616** orang (**13,47%**), disabilitas netra/buta **6.575** orang (**8,34%**), serta disabilitas fisik dan mental secara bersamaan sebanyak **3.052** orang (**3,87%**).

Dari data ini, terlihat bahwa laki-laki memiliki jumlah penyandang disabilitas yang lebih tinggi dibandingkan perempuan di semua kategori. Dengan jumlah penyandang disabilitas yang cukup signifikan, diperlukan perhatian lebih dalam penyediaan aksesibilitas, layanan kesehatan, serta peluang pendidikan dan pekerjaan yang inklusif agar mereka dapat berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

4.1.2.5. Kelahiran

Kelahiran merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Banyaknya kelahiran membawa konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi, dari pemenuhan gizi, perawatan kesehatan ibu dan anak, dan pada gilirannya membutuhkan fasilitas pendidikan termasuk pemenuhan kesempatan kerja. Tingkat kelahiran di masa lalu akan mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah kelahiran di masa kini, sehingga pengetahuan tentang fertilitas beserta indikator-indikatornya, termasuk Keluarga Berencana sangat berguna bagi para penentu kebijakan maupun perencana dalam menyusun program-

program pembangunan sosial terutama terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan ibu, anak dan pembangunan keluarga.

4.1.2.5.1. Jumlah Kelahiran

Jumlah kelahiran didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup yang terjadi dalam periode tertentu di suatu wilayah. Di Provinsi Jawa Barat, data jumlah kelahiran menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan, khususnya dalam penyediaan layanan kesehatan ibu dan anak, pendidikan, serta infrastruktur pendukung. Dengan populasi yang besar, angka kelahiran di Jawa Barat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan penduduk, sehingga pemantauan yang cermat diperlukan untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan sumber daya. Selain itu, informasi ini juga digunakan dalam perhitungan berbagai indikator fertilitas yang membantu pemerintah dalam merancang kebijakan kependudukan dan program keluarga berencana. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, edukasi mengenai kesehatan reproduksi, serta program imunisasi menjadi langkah strategis dalam menjaga kualitas kelahiran dan menekan angka kematian ibu dan bayi, sehingga pembangunan di sektor kesehatan dan sosial dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Tabel 4-32 Jumlah Kelahiran berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELAHIRAN	
		JUMLAH	%
3201	BOGOR	54.618	11,40
3202	SUKABUMI	26.479	5,53
3203	CIANJUR	26.725	5,58
3204	BANDUNG	37.852	7,90
3205	GARUT	29.299	6,12
3206	TASIKMALAYA	18.840	3,93
3207	CIAMIS	10.998	2,30
3208	KUNINGAN	12.607	2,63
3209	CIREBON	24.367	5,09
3210	MAJALENGKA	14.282	2,98
3211	SUMEDANG	11.014	2,30
3212	INDRAMAYU	13.890	2,90
3213	SUBANG	12.959	2,70
3214	PURWAKARTA	10.531	2,20
3215	KARAWANG	23.509	4,91

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELAHIRAN	
		JUMLAH	%
3216	BEKASI	31.020	6,47
3217	BANDUNG BARAT	20.205	4,22
3218	PANGANDARAN	3.723	0,78
3271	KOTA BOGOR	11.536	2,41
3272	KOTA SUKABUMI	3.742	0,78
3273	KOTA BANDUNG	21.621	4,51
3274	KOTA CIREBON	3.565	0,74
3275	KOTA BEKASI	22.615	4,72
3276	KOTA DEPOK	18.002	3,76
3277	KOTA CIMAHI	5.061	1,06
3278	KOTA TASIKMALAYA	7.945	1,66
3279	KOTA BANJAR	2.078	0,43
TOTAL		479.083	100,00

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Jumlah kelahiran di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2025 tercatat sebanyak **479.083** kelahiran, dengan distribusi yang bervariasi di setiap kabupaten dan kota. Kabupaten Bogor mencatat jumlah kelahiran tertinggi, yaitu **54.618** kelahiran (**11,40%**), diikuti oleh Kabupaten Bandung sebanyak **37.852** kelahiran (**7,90%**), dan Kabupaten Bekasi dengan **31.020** kelahiran (**6,47%**). Beberapa daerah lain dengan jumlah kelahiran yang cukup tinggi meliputi Kabupaten Garut sebanyak **29.299** kelahiran (**6,12%**), Kabupaten Cianjur sebanyak **26.725** kelahiran (**5,58%**), serta Kabupaten Sukabumi sebanyak **26.479** kelahiran (**5,53%**). Kabupaten Cirebon juga mencatat angka yang relatif besar, yaitu **24.367** kelahiran (**5,09%**).

Di sisi lain, beberapa wilayah dengan jumlah kelahiran yang lebih rendah di antaranya adalah Kota Banjar dengan **2.078** kelahiran (**0,43%**), Kota Cirebon sebanyak **3.565** kelahiran (**0,74%**), Kabupaten Pangandaran sebanyak **3.723** kelahiran (**0,78%**), serta Kota Sukabumi sebanyak **3.742** kelahiran (**0,78%**). Secara umum, variasi jumlah kelahiran di setiap daerah dipengaruhi oleh besaran jumlah penduduk, struktur umur, tingkat urbanisasi, serta akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak. Data ini menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan program keluarga berencana guna mengantisipasi kebutuhan penduduk di masa mendatang.

4.1.2.5.2. Angka Kelahiran Kasar

Angka kelahiran kasar (Crude Birth Rate/CBR) merupakan indikator demografi yang menunjukkan jumlah kelahiran hidup per 1.000 penduduk dalam suatu wilayah pada tahun tertentu. CBR memberikan gambaran umum tentang tingkat kelahiran di suatu daerah, meskipun masih bersifat kasar karena tidak memperhitungkan kelompok penduduk yang berisiko melahirkan, seperti laki-laki, anak-anak, dan lansia. Meskipun begitu, angka kelahiran kasar tetap menjadi salah satu ukuran penting dalam analisis kependudukan dan perencanaan pembangunan. Dengan mengetahui tingkat kelahiran di suatu daerah, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat terkait kesehatan ibu dan anak, pendidikan, serta program keluarga berencana. Perubahan angka kelahiran kasar juga dapat mencerminkan perkembangan sosial dan ekonomi suatu daerah, termasuk peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, perubahan pola keluarga, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4-33 Angka Kelahiran Kasar (CBR) berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	JUMLAH KELAHIRAN	ANGKA KELAHIRAN KASAR
3201	BOGOR	5.875.830	54.618	9,30
3202	SUKABUMI	2.899.139	26.479	9,13
3203	CIANJUR	2.674.818	26.725	9,99
3204	BANDUNG	3.873.653	37.852	9,77
3205	GARUT	2.883.791	29.299	10,16
3206	TASIKMALAYA	2.012.288	18.840	9,36
3207	CIAMIS	1.309.491	10.998	8,40
3208	KUNINGAN	1.247.821	12.607	10,10
3209	CIREBON	2.509.723	24.367	9,71
3210	MAJALENGKA	1.374.317	14.282	10,39
3211	SUMEDANG	1.233.691	11.014	8,93
3212	INDRAMAYU	1.998.472	13.890	6,95
3213	SUBANG	1.695.197	12.959	7,64
3214	PURWAKARTA	1.073.459	10.531	9,81
3215	KARAWANG	2.639.594	23.509	8,91
3216	BEKASI	3.434.768	31.020	9,03
3217	BANDUNG BARAT	1.930.450	20.205	10,47
3218	PANGANDARAN	448.980	3.723	8,29
3271	KOTA BOGOR	1.150.721	11.536	10,03

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	JUMLAH KELAHIRAN	ANGKA KELAHIRAN KASAR
3272	KOTA SUKABUMI	373.189	3.742	10,03
3273	KOTA BANDUNG	2.599.743	21.621	8,32
3274	KOTA CIREBON	358.265	3.565	9,95
3275	KOTA BEKASI	2.585.499	22.615	8,75
3276	KOTA DEPOK	2.024.664	18.002	8,89
3277	KOTA CIMAHI	584.222	5.061	8,66
3278	KOTA TASIKMALAYA	773.692	7.945	10,27
3279	KOTA BANJAR	209.925	2.078	9,90
TOTAL		51.775.402	479.083	9,25

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Angka kelahiran kasar (Crude Birth Rate/CBR) di Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan tercatat sebesar **9,25** kelahiran per 1.000 penduduk. Dari data yang tersedia, kabupaten/kota dengan angka kelahiran kasar tertinggi adalah Kabupaten Bandung Barat, dengan CBR sebesar **10,47**, diikuti oleh Kabupaten Majalengka (**10,39**) dan Kota Tasikmalaya (**10,27**). Sementara itu, daerah dengan angka kelahiran kasar terendah adalah Kabupaten Indramayu (**6,95**) dan Kabupaten Subang (**7,64**). Distribusi angka kelahiran kasar ini menunjukkan adanya variasi tingkat kelahiran di berbagai daerah, tetapi tidak ada yang memiliki nilai ekstrem sehingga tidak signifikan secara statistik, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat kesejahteraan, serta akses terhadap layanan kesehatan dan program keluarga berencana. Kabupaten dan kota dengan angka kelahiran kasar yang tinggi umumnya memiliki populasi yang lebih muda dan tingkat fertilitas yang masih relatif tinggi, sementara daerah dengan angka lebih rendah cenderung mengalami perubahan demografi yang mengarah pada penurunan tingkat kelahiran.

4.1.2.6. Kematian

Kematian atau mortalitas merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk dan struktur demografi suatu wilayah. Tingkat kematian yang tinggi dapat menjadi indikator rendahnya kualitas kesehatan masyarakat, sedangkan tingkat kematian yang rendah mencerminkan keberhasilan layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial di suatu daerah. Oleh karena itu, pemantauan angka kematian sangat penting untuk mengevaluasi kebijakan kesehatan, seperti akses terhadap fasilitas medis, program imunisasi, serta pencegahan dan penanganan penyakit menular maupun tidak menular. Angka kematian biasanya dinyatakan dalam bentuk "rate" yang mengukur jumlah kematian dalam periode tertentu per jumlah

penduduk di wilayah tersebut. Ukuran ini memberikan gambaran tentang risiko kematian di suatu daerah serta membantu pemerintah dalam perencanaan kebijakan kesehatan dan sosial yang lebih efektif. Dengan data yang akurat, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk meningkatkan harapan hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4.1.2.6.1. Jumlah Kematian

Jumlah kematian menunjukkan banyaknya kasus kematian yang terjadi di suatu daerah pada tahun tertentu. Informasi ini sangat penting dalam memantau kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Data jumlah kematian digunakan sebagai dasar perhitungan berbagai indikator mortalitas, seperti Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate), Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate), dan Angka Harapan Hidup. Selain itu, informasi ini membantu dalam evaluasi kesehatan masyarakat, perencanaan kebijakan, serta pemantauan keberhasilan program kesehatan. Dengan memahami pola kematian, pemerintah dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 4-34 Jumlah Kematian berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEMATIAN	
		N	%
3201	BOGOR	30.073	10,03
3202	SUKABUMI	8.496	2,83
3203	CIANJUR	12.038	4,02
3204	BANDUNG	15.902	5,30
3205	GARUT	9.662	3,22
3206	TASIKMALAYA	7.252	2,42
3207	CIAMIS	7.047	2,35
3208	KUNINGAN	11.748	3,92
3209	CIREBON	11.354	3,79
3210	MAJALENGKA	13.913	4,64
3211	SUMEDANG	17.223	5,75
3212	INDRAMAYU	3.615	1,21
3213	SUBANG	8.143	2,72
3214	PURWAKARTA	5.792	1,93
3215	KARAWANG	36.408	12,15
3216	BEKASI	11.655	3,89
3217	BANDUNG BARAT	6.415	2,14

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEMATIAN	
		N	%
3218	PANGANDARAN	3.031	1,01
3271	KOTA BOGOR	8.739	2,92
3272	KOTA SUKABUMI	3.776	1,26
3273	KOTA BANDUNG	20.643	6,89
3274	KOTA CIREBON	3.145	1,05
3275	KOTA BEKASI	18.507	6,17
3276	KOTA DEPOK	13.956	4,66
3277	KOTA CIMAHI	4.254	1,42
3278	KOTA TASIKMALAYA	5.099	1,70
3279	KOTA BANJAR	1.879	0,63
TOTAL		299.765	100,00

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Jumlah kematian di Provinsi Jawa Barat selama periode tertentu mencapai **299.765** jiwa. Kabupaten dengan jumlah kematian tertinggi adalah Karawang dengan **36.408** jiwa, diikuti oleh Kabupaten Bogor dengan **30.073** jiwa dan Kota Bandung dengan **20.643** jiwa. Sementara itu, daerah dengan jumlah kematian terendah adalah Kota Banjar dengan **1.879** jiwa, diikuti oleh Kabupaten Pangandaran dengan **3.031** jiwa.

Data ini mencerminkan variasi tingkat kematian di berbagai daerah di Jawa Barat, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jumlah penduduk, kualitas layanan kesehatan, tingkat kesejahteraan, serta faktor lingkungan dan sosial. Informasi ini penting untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan kesehatan serta peningkatan layanan medis guna menekan angka kematian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4.1.2.6.2. Angka Kematian Kasar

Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate) merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kematian yang terjadi dalam satu tahun per 1.000 penduduk. Sebagai ukuran sederhana, angka ini memberikan gambaran umum tentang tingkat kematian di suatu wilayah tanpa mempertimbangkan faktor usia dan jenis kelamin. Meskipun begitu, indikator ini tetap bermanfaat untuk analisis awal dalam menilai kondisi kesehatan masyarakat serta memantau tren kematian dari waktu ke waktu.



Tabel 4-35 Angka Kematian Kasar berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	JUMLAH KEMATIAN	ANGKA KEMATIAN KASAR
3201	BOGOR	5.875.830	30.073	5,12
3202	SUKABUMI	2.899.139	8.496	2,93
3203	CIANJUR	2.674.818	12.038	4,50
3204	BANDUNG	3.873.653	15.902	4,11
3205	GARUT	2.883.791	9.662	3,35
3206	TASIKMALAYA	2.012.288	7.252	3,60
3207	CIAMIS	1.309.491	7.047	5,38
3208	KUNINGAN	1.247.821	11.748	9,41
3209	CIREBON	2.509.723	11.354	4,52
3210	MAJALENGKA	1.374.317	13.913	10,12
3211	SUMEDANG	1.233.691	17.223	13,96
3212	INDRAMAYU	1.998.472	3.615	1,81
3213	SUBANG	1.695.197	8.143	4,80
3214	PURWAKARTA	1.073.459	5.792	5,40
3215	KARAWANG	2.639.594	36.408	13,79
3216	BEKASI	3.434.768	11.655	3,39
3217	BANDUNG BARAT	1.930.450	6.415	3,32
3218	PANGANDARAN	448.980	3.031	6,75
3271	KOTA BOGOR	1.150.721	8.739	7,59
3272	KOTA SUKABUMI	373.189	3.776	10,12
3273	KOTA BANDUNG	2.599.743	20.643	7,94
3274	KOTA CIREBON	358.265	3.145	8,78
3275	KOTA BEKASI	2.585.499	18.507	7,16
3276	KOTA DEPOK	2.024.664	13.956	6,89
3277	KOTA CIMAHI	584.222	4.254	7,28
3278	KOTA TASIKMALAYA	773.692	5.099	6,59
3279	KOTA BANJAR	209.925	1.879	8,95
TOTAL		51.775.402	299.765	5,79

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel, jumlah penduduk pertengahan tahun 2025 di Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak **51.775.402** jiwa, dengan jumlah kematian sebesar **299.765** jiwa. Dari data tersebut, diperoleh Angka Kematian Kasar (AKK/CDR) Provinsi Jawa Barat sebesar **5,79** per 1.000 penduduk. Nilai ini menunjukkan rata-rata jumlah

kematian penduduk selama satu tahun dibandingkan dengan total penduduk pertengahan tahun.

Beberapa kabupaten/kota memiliki Angka Kematian Kasar di atas rata-rata provinsi. Nilai tertinggi tercatat di Kabupaten Sumedang sebesar **13,96**, diikuti Kabupaten Karawang sebesar **13,79**, serta Kabupaten Majalengka dan Kota Sukabumi yang masing-masing sebesar **10,12**. Selain itu, Kabupaten Kuningan juga tergolong tinggi dengan angka **9,41**, disusul Kota Banjar sebesar **8,95** dan Kota Cirebon sebesar **8,78**. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kematian di wilayah-wilayah tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat.

Sebaliknya, beberapa daerah menunjukkan Angka Kematian Kasar yang lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi. Angka terendah tercatat di Kabupaten Indramayu sebesar **1,81**, kemudian Kabupaten Sukabumi sebesar **2,93**, dan Kabupaten Bandung Barat sebesar **3,32**. Selanjutnya, Kabupaten Garut dan Kabupaten Bekasi juga memiliki angka relatif rendah, masing-masing sebesar **3,35** dan **3,39**. Rendahnya angka kematian kasar di wilayah-wilayah tersebut dapat menjadi indikasi kondisi kesehatan masyarakat yang relatif lebih baik, meskipun tetap perlu dianalisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan struktur umur penduduk dan faktor lainnya.

Data ini dapat menjadi dasar untuk analisis lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kematian di masing-masing kabupaten/kota, seperti akses terhadap pelayanan kesehatan, kondisi sosial ekonomi, lingkungan, serta karakteristik demografi penduduk. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan dan intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran, khususnya bagi wilayah dengan Angka Kematian Kasar yang tergolong tinggi.

4.2. Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Kualitas penduduk tidak hanya mencakup aspek jumlah dan pertumbuhan penduduk, tetapi juga kondisi kesehatan, tingkat pendidikan, serta kesejahteraan ekonomi dan sosial. Penduduk yang berkualitas memiliki tingkat kesehatan yang baik, akses terhadap pendidikan yang memadai, serta keterampilan yang mendukung daya saing di dunia kerja. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penduduk menjadi prioritas dalam pembangunan, terutama melalui program kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Salah satu aspek penting dalam mengukur kualitas penduduk adalah kesehatan. Dengan kondisi kesehatan yang baik, masyarakat dapat menjalankan aktivitas produktif yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Selain itu,

kualitas penduduk juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan serta penerapan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.

4.2.1. Kesehatan

Kesehatan merupakan indikator utama dalam menilai kualitas penduduk. Kondisi kesehatan masyarakat mencerminkan tingkat kesejahteraan dan keberhasilan layanan kesehatan di suatu daerah. Faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan meliputi akses terhadap fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis, pola hidup masyarakat, serta kondisi lingkungan.

Peningkatan kualitas kesehatan dapat dicapai melalui berbagai program, seperti imunisasi, perbaikan gizi, pengendalian penyakit menular, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, edukasi mengenai pola hidup sehat dan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan sistem kesehatan yang baik, diharapkan angka kematian dapat ditekan, angka harapan hidup meningkat, serta kualitas penduduk secara keseluruhan dapat terus berkembang.

4.2.1.1. Kelahiran

Kelahiran merupakan salah satu indikator penting dalam menilai dinamika kependudukan di suatu wilayah. Tingkat kelahiran yang tinggi atau rendah dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk dan berimplikasi pada berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Oleh karena itu, pemantauan angka kelahiran menjadi hal yang penting untuk perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

4.2.1.1.1. Angka Kelahiran Menurut Umur

Angka Kelahiran Menurut Umur (Age-Specific Fertility Rate/ASFR) merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelahiran per 1.000 perempuan usia produktif (15-49 tahun) dalam kelompok umur tertentu. Indikator ini penting karena tingkat kelahiran bervariasi pada setiap kelompok umur, misalnya angka kelahiran pada perempuan usia 20-24 tahun berbeda dengan perempuan usia 35-39 tahun.

ASFR memperhitungkan perbedaan kemampuan melahirkan pada setiap kelompok umur, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai pola kesuburan suatu wilayah. Informasi ini sangat berguna dalam perencanaan dan peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta dalam perumusan kebijakan program keluarga berencana (KB). Selain itu, ASFR juga menjadi indikator penting dalam

pengembangan proyeksi penduduk, terutama dalam menghitung jumlah bayi usia 0-1 tahun di masa mendatang. Dengan memahami pola kelahiran berdasarkan umur, pemerintah dan pemangku kebijakan dapat mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mengelola pertumbuhan penduduk secara lebih efektif.

Tabel 4-36 Angka Kelahiran Menurut Umur

NO	KELOMPOK UMUR	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH KELAHIRAN	ASFR
1	15-19	1.992.644	11.685	5,86
2	20-24	2.063.190	144.304	69,94
3	25-29	2.028.532	238.947	117,79
4	30-34	1.940.386	196.459	101,25
5	35-39	1.798.472	127.749	71,03
6	40-44	1.971.093	74.714	37,90
7	45-49	1.860.280	33.112	17,80
TOTAL		13.654.597	826.970	60,56

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan data Angka Kelahiran Menurut Umur (Age-Specific Fertility Rate/ASFR), terlihat bahwa tingkat kelahiran pada perempuan usia produktif 15–49 tahun di Provinsi Jawa Barat tahun 2025 bervariasi menurut kelompok umur. Jumlah perempuan usia 15–49 tahun tercatat sebanyak **13.654.597** jiwa, dengan jumlah kelahiran sebanyak 826.970 kelahiran, sehingga diperoleh ASFR total sebesar 60,56 per 1.000 perempuan.

Kelompok umur dengan ASFR tertinggi terdapat pada usia 25–29 tahun, yaitu sebesar **117,79** per 1.000 perempuan, dengan jumlah kelahiran mencapai **238.947** dari **2.028.532** perempuan. Selanjutnya, angka yang juga tinggi terdapat pada kelompok umur 30–34 tahun sebesar **101,25**, dan kelompok umur 35–39 tahun sebesar **71,03**. Sementara itu, kelompok umur 20–24 tahun memiliki ASFR sebesar **69,94**, menunjukkan bahwa tingkat kelahiran mulai meningkat sejak usia dewasa muda dan mencapai puncaknya pada usia 25–29 tahun.

Pada kelompok umur yang lebih muda, yaitu 15–19 tahun, ASFR tercatat sebesar **5,86**, yang menunjukkan bahwa kelahiran pada usia remaja relatif lebih rendah dibandingkan kelompok umur lainnya. Setelah memasuki usia 35 tahun ke atas, angka kelahiran menurut umur cenderung menurun, yaitu pada kelompok umur 40–44 tahun sebesar **37,90**, dan turun lagi pada kelompok umur 45–49 tahun menjadi **17,80**. Pola ini

menunjukkan bahwa tingkat kelahiran tertinggi terjadi pada usia reproduksi utama, kemudian menurun seiring bertambahnya umur perempuan.

Data ini penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan kependudukan, kesehatan ibu dan anak, serta program keluarga berencana. Dengan memahami pola kelahiran menurut kelompok umur, pemerintah dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran, baik dalam penguatan layanan kesehatan reproduksi, edukasi usia perkawinan, maupun perencanaan keluarga yang berkualitas.

4.2.1.1.2. Angka Kelahiran Total

Angka Fertilitas Total (TFR) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (usia 15-49 tahun) dengan asumsi pola fertilitas yang ada tetap berlangsung. Indikator ini menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan dinamika pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. TFR memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan layanan kesehatan reproduksi, serta perbaikan pelayanan bagi ibu dan anak. TFR yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan penduduk yang cepat, sehingga menambah beban pada sumber daya dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Sebaliknya, TFR yang terlalu rendah dapat berkontribusi pada penurunan jumlah penduduk usia produktif di masa depan, yang berpotensi menimbulkan tantangan dalam struktur ketenagakerjaan dan ekonomi.

Dengan memahami angka fertilitas total, pemerintah dan para pemangku kebijakan dapat menyusun strategi yang lebih efektif dalam mengelola kependudukan, seperti program keluarga berencana (KB), peningkatan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, serta edukasi tentang kesehatan reproduksi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan demografi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 4-37 Angka Kelahiran Total

NO	KELOMPOK UMUR	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH KELAHIRAN	ASFR	TFR
1	15-19	1.992.644	11.685	5,86	0,03
2	20-24	2.063.190	144.304	69,94	0,35
3	25-29	2.028.532	238.947	117,79	0,59
4	30-34	1.940.386	196.459	101,25	0,51
5	35-39	1.798.472	127.749	71,03	0,36
6	40-44	1.971.093	74.714	37,90	0,19

NO	KELOMPOK UMUR	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH KELAHIRAN	ASFR	TFR
7	45-49	1.860.280	33.112	17,80	0,09
TOTAL		13.654.597	826.970	60,56	2,11

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel, Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar 2,11. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata seorang perempuan selama masa reproduksinya diperkirakan akan melahirkan sekitar **2,11** anak. Dengan demikian, tingkat fertilitas di Jawa Barat masih berada pada kisaran yang menunjukkan bahwa setiap perempuan secara rata-rata melahirkan lebih dari dua anak sepanjang usia reproduktifnya.

Menurut kelompok umur, kontribusi fertilitas terbesar terdapat pada perempuan usia 25–29 tahun dengan nilai TFR sebesar **0,59**, diikuti kelompok umur 30–34 tahun sebesar **0,51**, dan kelompok umur 35–39 tahun sebesar **0,36**. Selanjutnya, kelompok umur 20–24 tahun memberikan kontribusi **0,35**, sedangkan kelompok umur 40–44 tahun sebesar **0,19** dan kelompok umur 45–49 tahun sebesar **0,09**. Adapun kelompok umur 15–19 tahun memiliki kontribusi TFR paling rendah, yaitu **0,03**.

Pola tersebut menunjukkan bahwa tingkat fertilitas di Jawa Barat paling banyak terkonsentrasi pada kelompok umur 25–34 tahun, sehingga kelompok usia tersebut merupakan rentang usia reproduktif dengan kontribusi kelahiran terbesar. Setelah itu, tingkat fertilitas cenderung menurun pada kelompok umur yang lebih tua. Data ini penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan kependudukan, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, dan pembangunan keluarga berkualitas.

4.2.1.1.3. Rasio Anak Perempuan

Rasio anak dan perempuan merupakan perbandingan antara jumlah anak di bawah lima tahun dengan jumlah perempuan usia 15-49 tahun di suatu wilayah pada waktu tertentu. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat fertilitas di suatu daerah, terutama ketika data kelahiran atau data registrasi tidak tersedia. Semakin tinggi rasio anak dan perempuan, semakin tinggi pula tingkat fertilitas di wilayah tersebut, yang menunjukkan bahwa lebih banyak perempuan usia reproduktif memiliki anak dalam lima tahun terakhir. Sebaliknya, rasio yang lebih rendah dapat mengindikasikan tingkat kelahiran yang menurun atau keberhasilan program keluarga berencana (KB).

Informasi ini sangat berguna bagi para perencana kebijakan dalam mengevaluasi tren pertumbuhan penduduk serta merancang strategi yang lebih efektif dalam pengendalian fertilitas dan peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak.



Dengan memahami rasio ini, pemerintah dapat mengoptimalkan program kependudukan dan kesehatan reproduksi guna menciptakan keseimbangan pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan.

Tabel 4-38 Rasio Anak dan Perempuan berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	PEREMPUAN USIA 15-49 TAHUN	ANAK USIA 0-4 TAHUN	RASIO ANAK DAN PEREMPUAN
3201	BOGOR	1.595.319	416.907	26,13
3202	SUKABUMI	746.030	203.010	27,21
3203	CIANJUR	681.328	194.290	28,52
3204	BANDUNG	1.027.681	264.013	25,69
3205	GARUT	754.580	211.161	27,98
3206	TASIKMALAYA	485.099	128.397	26,47
3207	CIAMIS	314.270	77.231	24,57
3208	KUNINGAN	311.732	80.967	25,97
3209	CIREBON	669.239	170.399	25,46
3210	MAJALENGKA	353.762	89.183	25,21
3211	SUMEDANG	304.873	75.557	24,78
3212	INDRAMAYU	525.860	115.735	22,01
3213	SUBANG	436.868	98.420	22,53
3214	PURWAKARTA	284.427	76.675	26,96
3215	KARAWANG	713.924	178.996	25,07
3216	BEKASI	968.064	239.399	24,73
3217	BANDUNG BARAT	502.812	137.247	27,30
3218	PANGANDARAN	109.180	26.736	24,49
3271	KOTA BOGOR	308.576	77.274	25,04
3272	KOTA SUKABUMI	99.469	25.848	25,99
3273	KOTA BANDUNG	685.595	153.583	22,40
3274	KOTA CIREBON	95.114	23.820	25,04
3275	KOTA BEKASI	712.187	160.061	22,47
3276	KOTA DEPOK	557.649	124.742	22,37
3277	KOTA CIMAHI	155.941	35.240	22,60
3278	KOTA TASIKMALAYA	201.627	52.821	26,20
3279	KOTA BANJAR	53.391	13.882	26,00
TOTAL		13.654.597	3.451.594	25,28

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan data di atas, rasio anak dan perempuan (Child-Woman Ratio/CWR) di Provinsi Jawa Barat adalah **26,82**. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat sekitar **±26-27** anak usia 0-4 tahun untuk setiap 100 perempuan usia 15-49 tahun di wilayah tersebut. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, nilai CWR bervariasi. Kabupaten Cianjur memiliki rasio tertinggi dengan **30,09**, yang menunjukkan tingkat fertilitas relatif tinggi dibandingkan daerah lainnya. Kabupaten Garut juga memiliki rasio yang cukup tinggi, yaitu **29,83**. Sementara itu, daerah dengan rasio terendah adalah Kabupaten Indramayu dengan **23,27**, yang mengindikasikan tingkat kelahiran yang lebih rendah atau keberhasilan program keluarga berencana di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, rasio anak dan perempuan ini mencerminkan pola fertilitas di masing-masing Kabupaten/Kota. Daerah dengan rasio lebih tinggi cenderung memiliki angka kelahiran yang masih tinggi, sedangkan daerah dengan rasio lebih rendah kemungkinan telah mengalami transisi demografi dengan tingkat kelahiran yang lebih terkendali. Informasi ini sangat penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan kependudukan, termasuk peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta evaluasi efektivitas program keluarga berencana (KB). Dengan memahami rasio anak dan perempuan, perencanaan pembangunan daerah dapat lebih optimal dalam menyesuaikan kebutuhan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4.2.1.2. Kematian

Tinggi rendahnya tingkat kematian (mortalitas) penduduk di suatu daerah akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk di daerah tersebut. Sehingga indikator kematian penting dalam merencanakan berbagai kebijakan di bidang kesehatan maupun untuk mengevaluasi program kegiatan pembangunan yang telah dilakukan. Tingkat kematian dipengaruhi oleh: faktor sosial ekonomi, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, umur, jenis kelamin dll. Kematian juga dapat dilihat dari penyebab kematian, seperti akibat penyakit menular atau penyakit degeneratif, kecelakaan maupun penyebab yang lain.

Kematian dewasa umumnya disebabkan karena penyakit menular, penyakit degeneratif, kecelakaan atau gaya hidup yang beresiko terhadap kematian. Kematian bayi dan balita umumnya disebabkan oleh penyakit sistem pernapasan bagian atas (ISPA) dan diare, yang merupakan penyakit karena infeksi kuman. Faktor gizi buruk juga menyebabkan anak-anak rentan terhadap penyakit menular, sehingga mudah terinfeksi dan menyebabkan tingginya kematian bayi dan balita di suatu daerah.

Tabel 4-39 Data Kematian dalam Indikator Kesehatan

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	BAYI	NEONATAL	POST NEONATAL	ANAK BALITA	BALITA	IBU
3201	BOGOR	708	618	92	40	748	92
3202	SUKABUMI	232	195	37	16	248	22
3203	CIANJUR	190	170	20	6	196	30
3204	BANDUNG	433	366	67	21	454	49
3205	GARUT	289	268	21	9	298	68
3206	TASIKMALAYA	254	212	42	15	269	27
3207	CIAMIS	129	121	8	3	132	14
3208	KUNINGAN	159	135	24	9	168	23
3209	CIREBON	233	206	27	15	248	23
3210	MAJALENGKA	140	118	22	3	143	19
3211	SUMEDANG	154	122	32	19	173	14
3212	INDRAMAYU	133	121	12	1	134	22
3213	SUBANG	117	109	8	2	119	22
3214	PURWAKARTA	125	114	11	2	127	12
3215	KARAWANG	206	197	9	1	207	39
3216	BEKASI	228	206	22	7	235	29
3217	BANDUNG BARAT	168	146	22	4	172	21
3218	PANGANDARAN	24	20	4	-	24	3
3271	KOTA BOGOR	110	100	10	15	125	10
3272	KOTA SUKABUMI	61	50	11	9	70	1
3273	KOTA BANDUNG	237	203	34	13	250	25
3274	KOTA CIREBON	61	53	8	1	62	9
3275	KOTA BEKASI	168	151	17	3	171	15
3276	KOTA DEPOK	225	186	39	17	242	26
3277	KOTA CIMAHI	79	72	7	3	82	3
3278	KOTA TASIKMALAYA	73	59	14	6	79	9
3279	KOTA BANJAR	30	21	9	8	38	5
TOTAL		4.966	4.339	629	4	74	632

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

4.2.1.2.1. Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/ IMR/ AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun, atau didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi

berusia di bawah 1 tahun pada 1000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal, adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan pengaruh lingkungan luar. Angka Kelahiran Bayi/IMR digunakan sebagai indikator yang menggambarkan kemajuan pembangunan yang dapat menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Tabel 4-40 Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/ IMR/ AKB)

KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELAHIRAN		KEMATIAN BAYI		ANGKA KEMATIAN BAYI
		N	%	N	%	
3201	BOGOR	54.618	11,40	708	14,26	12,96
3202	SUKABUMI	26.479	5,53	232	4,67	8,76
3203	CIANJUR	26.725	5,58	190	3,83	7,11
3204	BANDUNG	37.852	7,90	433	8,72	11,44
3205	GARUT	29.299	6,12	289	5,82	9,86
3206	TASIKMALAYA	18.840	3,93	254	5,11	13,48
3207	CIAMIS	10.998	2,30	129	2,60	11,73
3208	KUNINGAN	12.607	2,63	159	3,20	12,61
3209	CIREBON	24.367	5,09	233	4,69	9,56
3210	MAJALENGKA	14.282	2,98	140	2,82	9,80
3211	SUMEDANG	11.014	2,30	154	3,10	13,98
3212	INDRAMAYU	13.890	2,90	133	2,68	9,58
3213	SUBANG	12.959	2,70	117	2,36	9,03
3214	PURWAKARTA	10.531	2,20	125	2,52	11,87
3215	KARAWANG	23.509	4,91	206	4,15	8,76
3216	BEKASI	31.020	6,47	228	4,59	7,35
3217	BANDUNG BARAT	20.205	4,22	168	3,38	8,31
3218	PANGANDARAN	3.723	0,78	24	0,48	6,45
3271	KOTA BOGOR	11.536	2,41	110	2,22	9,54
3272	KOTA SUKABUMI	3.742	0,78	61	1,23	16,30
3273	KOTA BANDUNG	21.621	4,51	237	4,77	10,96

KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELAHIRAN		KEMATIAN BAYI		ANGKA KEMATIAN BAYI
		N	%	N	%	
3274	KOTA CIREBON	3.565	0,74	61	1,23	17,11
3275	KOTA BEKASI	22.615	4,72	168	3,38	7,43
3276	KOTA DEPOK	18.002	3,76	225	4,53	12,50
3277	KOTA CIMAHI	5.061	1,06	79	1,59	15,61
3278	KOTA TASIKMALAYA	7.945	1,66	73	1,47	9,19
3279	KOTA BANJAR	2.078	0,43	30	0,60	14,44
TOTAL		479.083	100,00	4.966	100,00	10,37

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025 & Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator penting untuk menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan ibu, bayi, dan kualitas layanan kesehatan. Berdasarkan data pada tabel, jumlah kelahiran di kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak **479.083** kelahiran, sedangkan jumlah kematian bayi mencapai **4.966** kasus. Dengan demikian, Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar **10,37** per 1.000 kelahiran hidup.

Beberapa kabupaten/kota memiliki Angka Kematian Bayi di atas rata-rata provinsi. Nilai tertinggi tercatat di Kota Cirebon sebesar **17,11**, diikuti Kota Sukabumi sebesar **16,30**, Kota Cimahi sebesar **15,61**, dan Kota Banjar sebesar **14,44**. Selain itu, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Tasikmalaya juga menunjukkan angka yang relatif tinggi, masing-masing sebesar **13,98** dan **13,48**. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kematian bayi di wilayah-wilayah tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Barat.

Sebaliknya, beberapa daerah memiliki Angka Kematian Bayi yang lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi. Angka terendah tercatat di Kabupaten Pangandaran sebesar **6,45**, disusul Kabupaten Cianjur sebesar **7,11**, Kabupaten Bekasi sebesar **7,35**, dan Kota Bekasi sebesar **7,43**. Rendahnya angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kematian bayi di wilayah-wilayah tersebut relatif lebih rendah dibandingkan daerah lainnya.

Secara umum, perbedaan Angka Kematian Bayi antarwilayah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti akses terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak, kualitas penanganan persalinan, kondisi gizi, lingkungan, serta efektivitas pelayanan neonatal. Oleh karena itu, data ini penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan kesehatan

daerah, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi, menekan risiko kematian bayi, dan memperkuat intervensi pada wilayah dengan angka kematian bayi yang masih tinggi.

4.2.1.2.2. Angka Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/NNDR)

Kematian neonatal atau kematian endogen adalah kematian yang terjadi sebelum bayi mencapai usia satu bulan atau 28 hari. Angka ini biasanya dinyatakan dalam jumlah kematian per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun tertentu. Sebagian besar kasus kematian neonatal disebabkan oleh faktor-faktor yang sudah ada sejak lahir atau selama masa kehamilan. Beberapa penyebab utama meliputi kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, komplikasi saat persalinan, serta infeksi yang terjadi dalam periode awal kehidupan bayi. Selain itu, faktor kesehatan ibu selama kehamilan, seperti kekurangan gizi, hipertensi, atau penyakit infeksi, juga dapat meningkatkan risiko kematian neonatal.

Tingginya angka kematian neonatal mencerminkan kondisi kesehatan ibu dan kualitas layanan kesehatan di suatu daerah. Oleh karena itu, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan ibu dan bayi, termasuk pemeriksaan kehamilan yang rutin, perawatan neonatal yang optimal, serta edukasi gizi bagi ibu hamil, menjadi langkah penting dalam menekan angka kematian neonatal dan meningkatkan kesejahteraan bayi yang baru lahir.

Tabel 4-41 Angka Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/NNDR)

KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELAHIRAN		KEMATIAN NEONATAL		ANGKA KEMATIAN NEONATAL
		N	%	N	%	
3201	BOGOR	54.618	11,40	343	6,91	6,28
3202	SUKABUMI	26.479	5,53	90	1,81	3,40
3203	CIANJUR	26.725	5,58	79	1,59	2,96
3204	BANDUNG	37.852	7,90	176	3,54	4,65
3205	GARUT	29.299	6,12	122	2,46	4,16
3206	TASIKMALAYA	18.840	3,93	103	2,07	5,47
3207	CIAMIS	10.998	2,30	55	1,11	5,00
3208	KUNINGAN	12.607	2,63	66	1,33	5,24
3209	CIREBON	24.367	5,09	104	2,09	4,27
3210	MAJALENGKA	14.282	2,98	63	1,27	4,41
3211	SUMEDANG	11.014	2,30	71	1,43	6,45
3212	INDRAMAYU	13.890	2,90	56	1,13	4,03
3213	SUBANG	12.959	2,70	48	0,97	3,70

KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELAHIRAN		KEMATIAN NEONATAL		ANGKA KEMATIAN NEONATAL
		N	%	N	%	
3214	PURWAKARTA	10.531	2,20	45	0,91	4,27
3215	KARAWANG	23.509	4,91	75	1,51	3,19
3216	BEKASI	31.020	6,47	97	1,95	3,13
3217	BANDUNG BARAT	20.205	4,22	82	1,65	4,06
3218	PANGANDARAN	3.723	0,78	12	0,24	3,22
3271	KOTA BOGOR	11.536	2,41	50	1,01	4,33
3272	KOTA SUKABUMI	3.742	0,78	28	0,56	7,48
3273	KOTA BANDUNG	21.621	4,51	111	2,24	5,13
3274	KOTA CIREBON	3.565	0,74	27	0,54	7,57
3275	KOTA BEKASI	22.615	4,72	74	1,49	3,27
3276	KOTA DEPOK	18.002	3,76	90	1,81	5,00
3277	KOTA CIMAHI	5.061	1,06	30	0,60	5,93
3278	KOTA TASIKMALAYA	7.945	1,66	35	0,70	4,41
3279	KOTA BANJAR	2.078	0,43	9	0,18	4,33
TOTAL		479.083	100,00	2.141	100,00	4,47

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025 & Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel, jumlah kelahiran di Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak **479.083** kelahiran, dengan jumlah kematian neonatal sebanyak **2.141** kasus. Dengan demikian, angka kematian neonatal di Jawa Barat adalah sekitar **4,47** per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan jumlah kematian bayi usia 0–28 hari dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup.

Wilayah dengan angka kematian neonatal tertinggi adalah Kota Cirebon (**7,57**), Kota Sukabumi (**7,48**), Kabupaten Sumedang (**6,45**), dan Kabupaten Bogor (**6,28**). Sementara itu, wilayah dengan angka terendah adalah Kabupaten Cianjur (**2,96**), Kabupaten Bekasi (**3,13**), Kabupaten Karawang (**3,19**), dan Kabupaten Pangandaran (**3,22**).

Perbedaan ini dapat disebabkan oleh faktor seperti akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, ketersediaan tenaga medis terlatih, serta faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi kesehatan ibu dan bayi. Untuk menekan angka kematian neonatal, diperlukan upaya peningkatan kualitas perawatan prenatal dan neonatal, termasuk pemantauan kesehatan ibu hamil, akses persalinan yang aman, serta perawatan intensif bagi bayi baru lahir yang berisiko tinggi.

4.2.1.2.3. Angka Kematian Post Neonatal (Angka Kematian Lepas Baru Lahir/PNNDR)

Kematian post neonatal adalah kematian yang terjadi pada bayi berusia satu bulan hingga kurang dari satu tahun. Angka ini dinyatakan dalam jumlah kematian per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun tertentu. Penyebab utama kematian post neonatal umumnya berbeda dari kematian neonatal. Jika kematian neonatal lebih banyak disebabkan oleh faktor bawaan sejak lahir, maka kematian post neonatal lebih sering dikaitkan dengan faktor lingkungan dan kondisi kesehatan setelah bayi lahir. Penyakit infeksi seperti pneumonia, diare, sepsis, serta kekurangan gizi menjadi faktor dominan yang berkontribusi terhadap angka kematian post neonatal. Selain itu, faktor sosial-ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan, kebersihan lingkungan, serta pemberian ASI eksklusif juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kelangsungan hidup bayi dalam periode ini.

Upaya pencegahan kematian post neonatal dapat dilakukan dengan meningkatkan cakupan imunisasi, memperbaiki sanitasi dan kebersihan lingkungan, memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pola asuh bayi yang sehat, serta memastikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, terutama bagi bayi yang lahir dalam kondisi rentan.

Tabel 4-42 Angka Kematian Post Neonatal (Angka Kematian Lepas Baru Lahir/PNNDR)

KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELAHIRAN		KEMATIAN POST NEONATAL		ANGKA KEMATIAN POST NEONATAL
		N	%	N	%	
3201	BOGOR	54.618	11,40	367	12,98	6,72
3202	SUKABUMI	26.479	5,53	142	5,02	5,36
3203	CIANJUR	26.725	5,58	111	3,93	4,15
3204	BANDUNG	37.852	7,90	257	9,09	6,79
3205	GARUT	29.299	6,12	167	5,91	5,70
3206	TASIKMALAYA	18.840	3,93	151	5,34	8,01
3207	CIAMIS	10.998	2,30	74	2,62	6,73
3208	KUNINGAN	12.607	2,63	93	3,29	7,38
3209	CIREBON	24.367	5,09	129	4,56	5,29
3210	MAJALENGKA	14.282	2,98	77	2,72	5,39
3211	SUMEDANG	11.014	2,30	83	2,94	7,54
3212	INDRAMAYU	13.890	2,90	77	2,72	5,54
3213	SUBANG	12.959	2,70	69	2,44	5,32
3214	PURWAKARTA	10.531	2,20	80	2,83	7,60
3215	KARAWANG	23.509	4,91	131	4,63	5,57



KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELAHIRAN		KEMATIAN POST NEONATAL		ANGKA KEMATIAN POST NEONATAL
		N	%	N	%	
3216	BEKASI	31.020	6,47	131	4,63	4,22
3217	BANDUNG BARAT	20.205	4,22	86	3,04	4,26
3218	PANGANDARAN	3.723	0,78	12	0,42	3,22
3271	KOTA BOGOR	11.536	2,41	60	2,12	5,20
3272	KOTA SUKABUMI	3.742	0,78	33	1,17	8,82
3273	KOTA BANDUNG	21.621	4,51	126	4,46	5,83
3274	KOTA CIREBON	3.565	0,74	34	1,20	9,54
3275	KOTA BEKASI	22.615	4,72	94	3,33	4,16
3276	KOTA DEPOK	18.002	3,76	135	4,78	7,50
3277	KOTA CIMAHI	5.061	1,06	49	1,73	9,68
3278	KOTA TASIKMALAYA	7.945	1,66	38	1,34	4,78
3279	KOTA BANJAR	2.078	0,43	21	0,74	10,11
TOTAL		479.083	100,00	2.827	100,00	5,90

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025 & Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel, jumlah kelahiran di Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak **479.083** kelahiran, dengan jumlah kematian post-neonatal sebanyak **2.827** kasus. Dengan demikian, angka kematian post-neonatal di Jawa Barat adalah **5,90** per 1.000 kelahiran hidup.

Wilayah dengan angka kematian post-neonatal tertinggi adalah Kota Banjar (**10,11**), Kota Cimahi (**9,68**), Kota Cirebon (**9,54**), dan Kota Sukabumi (**8,82**). Sementara itu, wilayah dengan angka terendah adalah Kabupaten Pangandaran (**3,22**), Kabupaten Cianjur (**4,15**), Kota Bekasi (**4,16**), dan Kabupaten Bekasi (**4,22**). Data ini menunjukkan bahwa kondisi kematian bayi usia post-neonatal di setiap daerah masih berbeda-beda dan perlu menjadi perhatian dalam pelayanan kesehatan bayi.

Faktor-faktor seperti kondisi sosial-ekonomi, kualitas sanitasi, gizi bayi, serta akses terhadap imunisasi dan perawatan kesehatan berperan dalam menentukan angka kematian post-neonatal. Oleh karena itu, peningkatan edukasi kesehatan ibu, program imunisasi yang optimal, serta pemenuhan kebutuhan gizi bayi sangat penting untuk menekan angka kematian pada fase ini.

4.2.1.2.4. Angka Kematian Anak

Angka Kematian Anak merujuk pada jumlah kematian anak berusia 1 hingga menjelang 5 tahun dalam suatu periode tertentu. Angka ini menjadi indikator penting

dalam menilai kualitas kesehatan lingkungan serta efektivitas layanan kesehatan yang tersedia bagi anak-anak. Tingkat kematian anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kecukupan gizi, pola asuh, akses terhadap layanan kesehatan, serta kondisi sanitasi dan kebersihan lingkungan. Anak-anak yang mengalami kekurangan gizi lebih rentan terhadap penyakit menular seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, dan campak, yang sering menjadi penyebab utama kematian pada kelompok usia ini. Selain itu, kecelakaan di dalam atau sekitar rumah, seperti tersedak, tenggelam, atau luka akibat benda tajam, juga dapat meningkatkan risiko kematian anak.

Untuk menekan angka kematian anak, diperlukan berbagai upaya, termasuk peningkatan cakupan imunisasi, penyediaan asupan gizi yang cukup, perbaikan sanitasi lingkungan, serta edukasi bagi orang tua mengenai pola asuh dan pencegahan kecelakaan pada anak. Akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan juga menjadi faktor krusial dalam menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Tabel 4-43 Angka Kematian Anak

KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	ANAK USIA 1-4 TAHUN		KEMATIAN ANAK BALITA		ANGKA KEMATIAN ANAK BALITA
		N	%	N	%	
3201	BOGOR	362.157	12,19	40	16,13	0,11
3202	SUKABUMI	176.422	5,94	16	6,45	0,09
3203	CIANJUR	167.479	5,64	6	2,42	0,04
3204	BANDUNG	226.050	7,61	21	8,47	0,09
3205	GARUT	181.782	6,12	9	3,63	0,05
3206	TASIKMALAYA	109.519	3,69	15	6,05	0,14
3207	CIAMIS	66.206	2,23	3	1,21	0,05
3208	KUNINGAN	68.327	2,30	9	3,63	0,13
3209	CIREBON	146.009	4,91	15	6,05	0,10
3210	MAJALENGKA	74.876	2,52	3	1,21	0,04
3211	SUMEDANG	64.523	2,17	19	7,66	0,29
3212	INDRAMAYU	101.835	3,43	1	0,40	0,01
3213	SUBANG	85.442	2,88	2	0,81	0,02
3214	PURWAKARTA	66.108	2,22	2	0,81	0,03
3215	KARAWANG	155.457	5,23	1	0,40	0,01
3216	BEKASI	208.303	7,01	7	2,82	0,03
3217	BANDUNG BARAT	116.949	3,94	4	1,61	0,03
3218	PANGANDARAN	23.007	0,77	-	-	-

KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	ANAK USIA 1-4 TAHUN		KEMATIAN ANAK BALITA		ANGKA KEMATIAN ANAK BALITA
		N	%	N	%	
3271	KOTA BOGOR	65.667	2,21	15	6,05	0,23
3272	KOTA SUKABUMI	22.091	0,74	9	3,63	0,41
3273	KOTA BANDUNG	131.892	4,44	13	5,24	0,10
3274	KOTA CIREBON	20.246	0,68	1	0,40	0,05
3275	KOTA BEKASI	137.386	4,62	3	1,21	0,02
3276	KOTA DEPOK	106.723	3,59	17	6,85	0,16
3277	KOTA CIMAHI	30.168	1,02	3	1,21	0,10
3278	KOTA TASIKMALAYA	44.843	1,51	6	2,42	0,13
3279	KOTA BANJAR	11.797	0,40	8	3,23	0,68
TOTAL		2.971.264	100,00	248	100,00	0,08

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025 & Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel, jumlah anak usia 1–4 tahun di Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak **2.971.264** anak, dengan jumlah kematian anak balita sebanyak **248** kasus. Dengan demikian, angka kematian anak balita di Jawa Barat sebesar **0,08**. Wilayah dengan angka kematian anak balita tertinggi adalah Kota Banjar (**0,68**), Kota Sukabumi (**0,41**), Kabupaten Sumedang (**0,29**), dan Kota Bogor (**0,23**). Sementara itu, wilayah dengan angka terendah adalah Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Karawang yang masing-masing sebesar **0,01**, diikuti Kabupaten Subang dan Kota Bekasi sebesar **0,02**.

Faktor-faktor seperti akses terhadap layanan kesehatan, status gizi, kebersihan lingkungan, serta ketersediaan imunisasi berperan penting dalam menekan angka kematian anak. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan anak, edukasi bagi orang tua, serta perbaikan kondisi lingkungan menjadi langkah strategis dalam mengurangi angka kematian anak usia dini.

4.2.1.2.5. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (Under-Five Mortality Rate) adalah indikator yang menggambarkan jumlah kematian anak berusia 0 hingga 4 tahun per 1.000 anak pada kelompok umur yang sama dalam satu tahun tertentu. Indikator ini menjadi ukuran penting dalam menilai tingkat kesehatan masyarakat, akses terhadap layanan kesehatan, serta kondisi sosial dan ekonomi di suatu wilayah.

Tingkat kematian balita dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kecukupan gizi, pola asuh, ketersediaan layanan kesehatan, serta sanitasi dan kebersihan lingkungan. Penyakit menular seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, campak, dan

malaria menjadi penyebab utama kematian pada balita, terutama di daerah dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan. Selain itu, gizi buruk dan kondisi lingkungan yang tidak higienis juga berkontribusi terhadap tingginya angka kematian balita. Upaya untuk menurunkan angka kematian balita mencakup peningkatan cakupan imunisasi, penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik, edukasi bagi orang tua mengenai perawatan anak, serta perbaikan kualitas gizi dan sanitasi. Dengan intervensi yang tepat, angka kematian balita dapat ditekan, sehingga meningkatkan kualitas hidup anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 4-44 Angka Kematian Balita

KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	ANAK USIA 0-4 TAHUN		KEMATIAN BALITA		ANGKA KEMATIAN BALITA
		N	%	N	%	
3201	BOGOR	416.907	12,08	748	14,35	1,79
3202	SUKABUMI	203.010	5,88	248	4,76	1,22
3203	CIANJUR	194.290	5,63	196	3,76	1,01
3204	BANDUNG	264.013	7,65	454	8,71	1,72
3205	GARUT	211.161	6,12	298	5,72	1,41
3206	TASIKMALAYA	128.397	3,72	269	5,16	2,10
3207	CIAMIS	77.231	2,24	132	2,53	1,71
3208	KUNINGAN	80.967	2,35	168	3,22	2,07
3209	CIREBON	170.399	4,94	248	4,76	1,46
3210	MAJALENGKA	89.183	2,58	143	2,74	1,60
3211	SUMEDANG	75.557	2,19	173	3,32	2,29
3212	INDRAMAYU	115.735	3,35	134	2,57	1,16
3213	SUBANG	98.420	2,85	119	2,28	1,21
3214	PURWAKARTA	76.675	2,22	127	2,44	1,66
3215	KARAWANG	178.996	5,19	207	3,97	1,16
3216	BEKASI	239.399	6,94	235	4,51	0,98
3217	BANDUNG BARAT	137.247	3,98	172	3,30	1,25
3218	PANGANDARAN	26.736	0,77	24	0,46	0,90
3271	KOTA BOGOR	77.274	2,24	125	2,40	1,62
3272	KOTA SUKABUMI	25.848	0,75	70	1,34	2,71
3273	KOTA BANDUNG	153.583	4,45	250	4,79	1,63
3274	KOTA CIREBON	23.820	0,69	62	1,19	2,60
3275	KOTA BEKASI	160.061	4,64	171	3,28	1,07
3276	KOTA DEPOK	124.742	3,61	242	4,64	1,94
3277	KOTA CIMAHI	35.240	1,02	82	1,57	2,33

KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	ANAK USIA 0-4 TAHUN		KEMATIAN BALITA		ANGKA KEMATIAN BALITA
		N	%	N	%	
3278	KOTA TASIKMALAYA	52.821	1,53	79	1,52	1,50
3279	KOTA BANJAR	13.882	0,40	38	0,73	2,74
TOTAL		3.451.594	100,00	5.214	100,00	1,51

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025 & Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel, jumlah anak usia 0–4 tahun di Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak **3.451.594** anak, dengan jumlah kematian balita sebanyak **5.214** kasus. Dengan demikian, angka kematian balita di Jawa Barat tercatat sebesar **1,51**. Beberapa kabupaten/kota memiliki angka kematian balita di atas rata-rata provinsi. Nilai tertinggi tercatat di Kota Banjar sebesar **2,74**, diikuti Kota Sukabumi sebesar **2,71**, Kota Cirebon sebesar **2,60**, dan Kota Cimahi sebesar **2,33**. Selain itu, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Tasikmalaya juga tergolong cukup tinggi, masing-masing sebesar **2,29** dan **2,10**.

Sebaliknya, beberapa daerah memiliki angka kematian balita yang lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi. Angka terendah tercatat di Kabupaten Pangandaran sebesar **0,90**, diikuti Kabupaten Bekasi sebesar **0,98**, Kabupaten Cianjur sebesar **1,01**, dan Kota Bekasi sebesar **1,07**. Selanjutnya, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Karawang juga relatif rendah, masing-masing sebesar **1,16**. Data ini menunjukkan bahwa kondisi kematian balita di tiap daerah masih berbeda-beda. Oleh karena itu, data tersebut penting sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan anak, perbaikan gizi, imunisasi, serta upaya pencegahan kematian balita di daerah yang angkanya masih tinggi.

4.2.1.2.6. Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate/AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian perempuan yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, atau dalam 42 hari setelah melahirkan, per 1.000 kelahiran hidup. Kematian ini disebabkan oleh faktor yang berkaitan langsung dengan kehamilan dan persalinan, seperti komplikasi kehamilan, perdarahan, infeksi, preeklampsia, eklampsia, serta komplikasi akibat penanganan medis yang kurang optimal. Tingginya angka kematian ibu mencerminkan kualitas layanan kesehatan maternal dan akses terhadap fasilitas medis yang memadai. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah kondisi sosial-ekonomi, tingkat pendidikan ibu, serta keterlambatan dalam mengenali bahaya kehamilan, mencapai fasilitas kesehatan, dan mendapatkan penanganan yang tepat. Upaya untuk menurunkan angka kematian ibu mencakup peningkatan akses terhadap layanan kesehatan maternal, pemeriksaan

kehamilan yang rutin, persalinan yang didampingi tenaga medis profesional, serta peningkatan edukasi tentang kehamilan sehat bagi ibu dan keluarga. Selain itu, sistem rujukan yang cepat dan efektif dalam menangani komplikasi kehamilan sangat penting untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi. Dengan perbaikan layanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kesadaran masyarakat, angka kematian ibu dapat ditekan, sehingga mendukung kesehatan reproduksi yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan keluarga serta generasi mendatang.

Tabel 4-45 Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate/ AKI)

KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELAHIRAN		KEMATIAN IBU		ANGKA KEMATIAN IBU
		N	%	N	%	
3201	BOGOR	54.618	11,40	92	14,56	1,68
3202	SUKABUMI	26.479	5,53	22	3,48	0,83
3203	CIANJUR	26.725	5,58	30	4,75	1,12
3204	BANDUNG	37.852	7,90	49	7,75	1,29
3205	GARUT	29.299	6,12	68	10,76	2,32
3206	TASIKMALAYA	18.840	3,93	27	4,27	1,43
3207	CIAMIS	10.998	2,30	14	2,22	1,27
3208	KUNINGAN	12.607	2,63	23	3,64	1,82
3209	CIREBON	24.367	5,09	23	3,64	0,94
3210	MAJALENGKA	14.282	2,98	19	3,01	1,33
3211	SUMEDANG	11.014	2,30	14	2,22	1,27
3212	INDRAMAYU	13.890	2,90	22	3,48	1,58
3213	SUBANG	12.959	2,70	22	3,48	1,70
3214	PURWAKARTA	10.531	2,20	12	1,90	1,14
3215	KARAWANG	23.509	4,91	39	6,17	1,66
3216	BEKASI	31.020	6,47	29	4,59	0,93
3217	BANDUNG BARAT	20.205	4,22	21	3,32	1,04
3218	PANGANDARAN	3.723	0,78	3	0,47	0,81
3271	KOTA BOGOR	11.536	2,41	10	1,58	0,87
3272	KOTA SUKABUMI	3.742	0,78	1	0,16	0,27
3273	KOTA BANDUNG	21.621	4,51	25	3,96	1,16
3274	KOTA CIREBON	3.565	0,74	9	1,42	2,52
3275	KOTA BEKASI	22.615	4,72	15	2,37	0,66
3276	KOTA DEPOK	18.002	3,76	26	4,11	1,44
3277	KOTA CIMAHI	5.061	1,06	3	0,47	0,59
3278	KOTA TASIKMALAYA	7.945	1,66	9	1,42	1,13



KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELAHIRAN		KEMATIAN IBU		ANGKA KEMATIAN IBU
		N	%	N	%	
3279	KOTA BANJAR	2.078	0,43	5	0,79	2,41
TOTAL		479.083	100,00	632	100,00	1,32

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025 & Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel, jumlah kelahiran di Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak **479.083** kelahiran, dengan jumlah kematian ibu sebanyak **632** kasus. Dengan demikian, angka kematian ibu di Jawa Barat tercatat sebesar **1,32**. Beberapa kabupaten/kota memiliki angka kematian ibu yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Nilai tertinggi tercatat di Kota Cirebon sebesar **2,52**, diikuti Kota Banjar sebesar **2,41**, Kabupaten Garut sebesar **2,32**, dan Kabupaten Kuningan sebesar **1,82**. Selain itu, Kabupaten Subang juga tergolong cukup tinggi dengan angka **1,70**, disusul Kabupaten Bogor sebesar **1,68** dan Kabupaten Karawang sebesar **1,66**.

Sebaliknya, beberapa daerah memiliki angka kematian ibu yang lebih rendah. Angka terendah tercatat di Kota Sukabumi sebesar **0,27**, diikuti Kota Cimahi sebesar **0,59**, Kota Bekasi sebesar **0,66**, serta Kabupaten Pangandaran sebesar **0,81**. Selain itu, Kabupaten Sukabumi juga relatif rendah dengan angka **0,83**, disusul Kota Bogor sebesar **0,87** dan Kabupaten Bekasi sebesar **0,93**. Tingginya angka kematian ibu di beberapa wilayah menunjukkan perlunya peningkatan akses layanan kesehatan bagi ibu hamil, termasuk pemeriksaan kehamilan yang rutin, peningkatan kualitas tenaga medis, serta fasilitas persalinan yang lebih baik. Selain itu, edukasi tentang kehamilan sehat dan persalinan yang aman sangat penting untuk menekan angka kematian ibu di masa mendatang.

4.2.2. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pembangunan sosial serta ekonomi. Indikator pendidikan digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pendidikan penduduk di suatu wilayah. Beberapa indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan pendidikan di Jawa Barat meliputi angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan angka penduduk putus sekolah.

4.2.2.1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) menyajikan persentase atau proporsi penduduk berusia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf Latin dibandingkan dengan jumlah penduduk keseluruhan pada satu tahun tertentu. Indikator ini

mencerminkan mutu dan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah dalam menyerap informasi pendidikan. Semakin tinggi nilai AMH, semakin tinggi pula mutu sumber daya manusia di wilayah tersebut. Indikator AMH memiliki beberapa kegunaan, antara lain:

1. Mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan yang masih memiliki penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
2. Menunjukkan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi dari berbagai media.
3. Menggambarkan kemampuan komunikasi lisan dan tertulis, yang mencerminkan potensi perkembangan intelektual serta kontribusi terhadap pembangunan daerah.

AMH disajikan dalam bentuk terpilah, yaitu dihitung berdasarkan penduduk laki-laki dan perempuan, untuk melihat perbedaan tingkat literasi berdasarkan gender.

Tabel 4-46 Angka Melek Huruf

NO	KELOMPOK USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PERKOTAAN	PERDESAAN	JUMLAH
1	15-24	99,97	99,97	99,98	99,94	99,97
2	15-29	99,98	99,98	99,98	99,96	99,98
3	15+	99,43	98,35	99,03	98,33	98,90
4	60+	96,83	90,86	94,21	92,39	93,77

Sumber : Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2025 - BPS Provinsi Jawa Barat

Angka Melek Huruf (AMH) di Provinsi Jawa Barat tahun 2025 menunjukkan tingkat literasi yang sangat tinggi pada hampir seluruh kelompok usia. Pada kelompok usia 15–24 tahun, AMH tercatat sebesar **99,97%** baik untuk laki-laki maupun perempuan. Jika dilihat menurut wilayah, AMH pada kelompok usia ini mencapai **99,98%** di perkotaan dan **99,94%** di pedesaan, dengan angka total **99,97%**. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca dan menulis pada generasi muda di Jawa Barat sudah hampir merata.

Pada kelompok usia 15–29 tahun, AMH tercatat sebesar **99,98%** untuk laki-laki dan **99,98%** untuk perempuan. Sementara itu, AMH di wilayah perkotaan juga sebesar **99,98%** dan di pedesaan **99,96%**, dengan angka total **99,98%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat melek huruf pada kelompok usia muda hingga dewasa awal berada pada kategori sangat tinggi.

Untuk kelompok usia 15 tahun ke atas, AMH tercatat sebesar **99,43%** pada laki-laki dan **98,35%** pada perempuan. Dilihat dari wilayah tempat tinggal, angka melek huruf

pada kelompok ini mencapai **99,03%** di perkotaan dan **98,33%** di perdesaan, dengan total **98,90%**. Angka ini tetap tergolong tinggi, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan kelompok usia yang lebih muda.

Sementara itu, pada kelompok usia 60 tahun ke atas, AMH menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan kelompok usia lainnya, yaitu **96,83%** untuk laki-laki dan **90,86%** untuk perempuan. Berdasarkan wilayah, AMH lansia tercatat sebesar **94,21%** di perkotaan dan **92,39%** di perdesaan, dengan total **93,77%**. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok lansia, terutama perempuan, masih memiliki tingkat literasi yang relatif lebih rendah dibandingkan generasi yang lebih muda.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa Angka Melek Huruf di Provinsi Jawa Barat sudah sangat baik, terutama pada kelompok usia muda. Namun demikian, perhatian tetap perlu diberikan pada kelompok usia lanjut dan pada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, agar pemerataan literasi di seluruh kelompok penduduk dapat terus ditingkatkan.

4.2.2.2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan proporsi jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu, tanpa memperhitungkan usia sekolah yang seharusnya, dibandingkan dengan jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APK yang tinggi menunjukkan bahwa akses pendidikan di suatu wilayah cukup baik, meskipun masih terdapat peserta didik yang bersekolah di luar kelompok usia idealnya.

Berdasarkan data yang telah diolah, APK untuk jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA termasuk madrasah dan sederajat menggambarkan proporsi peserta didik yang terdaftar dalam sistem pendidikan formal. Meskipun angka ini mencakup peserta didik di luar kelompok usia ideal, tingginya APK menandakan bahwa semakin banyak penduduk yang mendapatkan kesempatan untuk bersekolah, sehingga akses pendidikan di wilayah ini tergolong baik.

Sumber data ini berasal dari Statistik Pusdatin Kemendikdasmen dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang telah diolah. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan ke depan. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan tetap menjadi fokus utama agar setiap anak, tanpa terkecuali, dapat menikmati haknya untuk belajar dan berkembang. Dengan langkah strategis yang tepat, diharapkan pendidikan di Jawa Barat semakin inklusif dan berdaya saing.

Tabel 4-47 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK USIA 7 - 12 TAHUN		JUMLAH SISWA		ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)
		N	%	N	%	
3201	BOGOR	667.243	12,43	715.560	13,21	107,24
3202	SUKABUMI	310.839	5,79	304.029	5,61	97,81
3203	CIANJUR	304.818	5,68	300.537	5,55	98,60
3204	BANDUNG	405.872	7,56	409.988	7,57	101,01
3205	GARUT	322.699	6,01	320.254	5,91	99,24
3206	TASIKMALAYA	187.186	3,49	181.753	3,36	97,10
3207	CIAMIS	112.821	2,10	111.417	2,06	98,76
3208	KUNINGAN	119.072	2,22	115.083	2,12	96,65
3209	CIREBON	239.778	4,47	243.949	4,50	101,74
3210	MAJALENGKA	130.660	2,43	125.517	2,32	96,06
3211	SUMEDANG	113.995	2,12	114.372	2,11	100,33
3212	INDRAMAYU	201.749	3,76	194.759	3,60	96,54
3213	SUBANG	161.689	3,01	158.030	2,92	97,74
3214	PURWAKARTA	116.898	2,18	117.422	2,17	100,45
3215	KARAWANG	287.304	5,35	289.942	5,35	100,92
3216	BEKASI	407.413	7,59	429.719	7,93	105,48
3217	BANDUNG BARAT	200.743	3,74	197.287	3,64	98,28
3218	PANGANDARAN	38.455	0,72	37.581	0,69	97,73
3271	KOTA BOGOR	118.881	2,22	118.818	2,19	99,95
3272	KOTA SUKABUMI	39.192	0,73	39.948	0,74	101,93
3273	KOTA BANDUNG	230.357	4,29	224.709	4,15	97,55
3274	KOTA CIREBON	35.857	0,67	39.405	0,73	109,89
3275	KOTA BEKASI	259.961	4,84	266.872	4,93	102,66
3276	KOTA DEPOK	203.943	3,80	213.332	3,94	104,60
3277	KOTA CIMAHI	53.941	1,01	52.470	0,97	97,27
3278	KOTA TASIKMALAYA	75.931	1,41	74.887	1,38	98,63
3279	KOTA BANJAR	19.139	0,36	18.762	0,35	98,03
PROVINSI JAWA BARAT		5.366.436	100,00	5.416.402	100,00	100,93

Sumber : Statistik Pusdatin Kemendikdasmen dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan data pada Tabel Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar, jumlah penduduk usia 7–12 tahun di Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak **5.366.436**

jiwa, sedangkan jumlah siswa sebanyak **5.416.402** siswa. Dengan demikian, APK Sekolah Dasar Provinsi Jawa Barat mencapai **100,93%**.

Daerah dengan APK tertinggi adalah Kota Cirebon sebesar **109,89%**, Kabupaten Bogor sebesar **107,24%**, dan Kabupaten Bekasi sebesar **105,48%**. Capaian di atas 100 persen menunjukkan bahwa jumlah siswa sekolah dasar di daerah tersebut lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia 7–12 tahun.

Sementara itu, daerah dengan APK terendah adalah Kabupaten Majalengka sebesar **96,06%**, Kabupaten Indramayu sebesar **96,54%**, dan Kabupaten Kuningan sebesar **96,65%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan dasar masih perlu terus diperkuat, terutama di daerah dengan capaian APK yang relatif lebih rendah.

Tabel 4-48 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK USIA 13 - 15 TAHUN		JUMLAH SISWA		ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)
		N	%	N	%	
3201	BOGOR	354.151	13,13	354.652	13,37	100,14
3202	SUKABUMI	146.421	5,43	140.752	5,31	96,13
3203	CIANJUR	151.308	5,61	151.000	5,69	99,80
3204	BANDUNG	204.359	7,58	194.657	7,34	95,25
3205	GARUT	164.395	6,09	164.584	6,20	100,11
3206	TASIKMALAYA	102.450	3,80	103.567	3,90	101,09
3207	CIAMIS	61.192	2,27	63.024	2,38	102,99
3208	KUNINGAN	64.285	2,38	66.314	2,50	103,16
3209	CIREBON	122.527	4,54	124.590	4,70	101,68
3210	MAJALENGKA	68.447	2,54	65.881	2,48	96,25
3211	SUMEDANG	59.502	2,21	61.067	2,30	102,63
3212	INDRAMAYU	92.632	3,43	88.737	3,34	95,80
3213	SUBANG	81.461	3,02	80.334	3,03	98,62
3214	PURWAKARTA	57.296	2,12	58.277	2,20	101,71
3215	KARAWANG	129.892	4,82	124.030	4,68	95,49
3216	BEKASI	182.806	6,78	175.463	6,61	95,98
3217	BANDUNG BARAT	99.925	3,70	96.256	3,63	96,33
3218	PANGANDARAN	20.447	0,76	19.644	0,74	96,07
3271	KOTA BOGOR	59.994	2,22	62.694	2,36	104,50

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK USIA 13 - 15 TAHUN		JUMLAH SISWA		ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)
		N	%	N	%	
3272	KOTA SUKABUMI	21.286	0,79	21.771	0,82	102,28
3273	KOTA BANDUNG	119.479	4,43	116.303	4,38	97,34
3274	KOTA CIREBON	22.502	0,83	23.581	0,89	104,80
3275	KOTA BEKASI	129.537	4,80	117.707	4,44	90,87
3276	KOTA DEPOK	104.121	3,86	99.698	3,76	95,75
3277	KOTA CIMAHI	26.985	1,00	26.486	1,00	98,15
3278	KOTA TASIKMALAYA	39.550	1,47	41.039	1,55	103,76
3279	KOTA BANJAR	10.598	0,39	10.856	0,41	102,43
PROVINSI JAWA BARAT		2.697.548	100,00	2.652.964	100,00	98,35

Sumber : Statistik Pusdatin Kemendikdasmen dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan data pada Tabel Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (SMP), jumlah penduduk usia 13–15 tahun di Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak **2.697.548** jiwa, sedangkan jumlah siswa sebanyak **2.652.964** siswa. Dengan demikian, APK SMP Provinsi Jawa Barat mencapai **98,35%**.

Daerah dengan APK tertinggi adalah Kota Cirebon sebesar **104,80%**, Kota Bogor sebesar **104,50%**, dan Kota Tasikmalaya sebesar **103,76%**. Capaian di atas 100% menunjukkan bahwa jumlah siswa SMP di daerah tersebut lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia 13–15 tahun, yang dapat dipengaruhi oleh siswa di luar kelompok usia standar atau mobilitas siswa antar daerah.

Sementara itu, daerah dengan APK terendah adalah Kota Bekasi sebesar **90,87%**, Kabupaten Bandung sebesar **95,25%**, dan Kabupaten Karawang sebesar **95,49%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun APK SMP Jawa Barat sudah cukup tinggi, pemerataan akses dan keberlanjutan pendidikan pada jenjang SMP masih perlu terus diperkuat, terutama di daerah dengan capaian relatif lebih rendah.

Tabel 4-49 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah (SMA, SMK, dan pendidikan lainnya yang setara)

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK USIA 16 - 18 TAHUN		JUMLAH SISWA		ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)
		N	%	N	%	
3201	BOGOR	272.123	11,61	288.517	12,02	100,14



KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK USIA 16 - 18 TAHUN		JUMLAH SISWA		ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)
		N	%	N	%	
3202	SUKABUMI	112.005	4,78	109.731	4,57	96,13
3203	CIANJUR	125.154	5,34	135.813	5,66	99,80
3204	BANDUNG	166.486	7,10	160.581	6,69	95,25
3205	GARUT	144.407	6,16	157.570	6,57	100,11
3206	TASIKMALAYA	85.272	3,64	92.141	3,84	101,09
3207	CIAMIS	54.848	2,34	55.411	2,31	102,99
3208	KUNINGAN	66.752	2,85	65.027	2,71	103,16
3209	CIREBON	97.448	4,16	106.425	4,44	101,68
3210	MAJALENGKA	65.989	2,81	62.098	2,59	96,25
3211	SUMEDANG	52.601	2,24	57.557	2,40	102,63
3212	INDRAMAYU	73.427	3,13	79.896	3,33	95,80
3213	SUBANG	65.005	2,77	71.018	2,96	98,62
3214	PURWAKARTA	50.305	2,15	48.915	2,04	101,71
3215	KARAWANG	113.101	4,82	111.483	4,65	95,49
3216	BEKASI	155.656	6,64	151.627	6,32	95,98
3217	BANDUNG BARAT	81.994	3,50	76.223	3,18	96,33
3218	PANGANDARAN	20.495	0,87	18.844	0,79	96,07
3271	KOTA BOGOR	63.813	2,72	67.194	2,80	104,50
3272	KOTA SUKABUMI	24.260	1,03	26.305	1,10	102,28
3273	KOTA BANDUNG	133.125	5,68	136.732	5,70	97,34
3274	KOTA CIREBON	25.317	1,08	27.086	1,13	104,80
3275	KOTA BEKASI	110.778	4,73	119.938	5,00	90,87
3276	KOTA DEPOK	94.440	4,03	86.031	3,59	95,75
3277	KOTA CIMAHI	37.279	1,59	32.033	1,34	98,15
3278	KOTA TASIKMALAYA	37.809	1,61	40.784	1,70	103,76
3279	KOTA BANJAR	14.335	0,61	14.434	0,60	102,43
PROVINSI JAWA BARAT		2.344.224	100,00	2.399.414	100,00	102,35

Sumber : Statistik Pusdatin Kemendikdasmen dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan data pada Tabel Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah, jumlah penduduk usia 16–18 tahun di Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak **2.344.224** jiwa, sedangkan jumlah siswa sebanyak **2.399.414** siswa. Dengan demikian, APK Sekolah Menengah Provinsi Jawa Barat mencapai **102,35%**.

Daerah dengan APK tertinggi adalah Kota Cirebon sebesar **104,80%**, Kota Bogor sebesar **104,50%**, dan Kota Tasikmalaya sebesar **103,76%**. Capaian di atas 100% menunjukkan bahwa jumlah siswa pada jenjang sekolah menengah di daerah tersebut lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia 16–18 tahun, yang dapat dipengaruhi oleh siswa di luar kelompok usia standar, siswa yang mengulang kelas, atau mobilitas siswa antardaerah.

Sementara itu, daerah dengan APK terendah adalah Kota Bekasi sebesar **90,87%**, Kabupaten Bandung sebesar **95,25%**, dan Kabupaten Karawang sebesar **95,49%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun APK Sekolah Menengah di Jawa Barat secara umum sudah melampaui 100%, pemerataan akses dan keberlanjutan pendidikan pada jenjang sekolah menengah tetap perlu diperkuat, terutama di daerah dengan capaian relatif lebih rendah.

Tabel 4-50 Angka Partisipasi Kasar di Provinsi Jawa Barat

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH SISWA	ANGKA PARTISIPASI KASAR
1	SD/MI SEDERAJAT	5.366.436	5.416.402	100,93
2	SMP/MTs SEDERAJAT	2.697.548	2.652.964	98,35
3	SMA/SMK/MA SEDERAJAT	2.344.224	2.399.414	102,35
TOTAL		10.408.208	10.468.780	100,58

Sumber : Statistik Pusdatin Kemendikdasmen dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, diolah.

Berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, jumlah total penduduk usia sekolah dari jenjang SD/MI sederajat sampai dengan SMA/SMK/MA sederajat tercatat sebanyak **10.408.208** jiwa, dengan jumlah siswa sebanyak **10.468.780** siswa. Hal ini menghasilkan APK total sebesar **100,58%**, yang menunjukkan bahwa jumlah siswa yang bersekolah sedikit lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang terkait. Rincian APK di setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

1. SD/MI sederajat memiliki APK sebesar **100,93%**, dengan jumlah siswa **5.416.402** dari total penduduk usia SD sebanyak **5.366.436** jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar telah mengenyam pendidikan pada jenjang ini.
2. SMP/MTs sederajat memiliki APK sebesar **98,35%**, dengan **2.652.964** siswa dari total **2.697.548** jiwa penduduk usia SMP. Meskipun relatif tinggi, angka ini mengindikasikan masih adanya sebagian kecil anak usia SMP yang belum terdaftar di sekolah.

3. SMA/SMK/MA sederajat memiliki APK tertinggi, yaitu **102,35%**, dengan jumlah siswa **2.399.414** dari total **2.344.224** jiwa penduduk usia sekolah menengah. APK yang melebihi 100% ini menunjukkan adanya siswa yang berusia lebih tua atau berasal dari luar daerah yang turut mengakses pendidikan di Jawa Barat.

Secara keseluruhan, capaian APK di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat dan SMA/SMK/MA sederajat telah melampaui 100%, sedangkan jenjang SMP/MTs sederajat masih berada di bawah 100%. APK di atas 100% dapat mengindikasikan adanya siswa di luar kelompok usia standar, siswa yang mengulang kelas, atau siswa dari luar daerah yang bersekolah di Jawa Barat.

Untuk meningkatkan APK, diperlukan penguatan akses dan pemerataan layanan pendidikan, terutama pada jenjang SMP/MTs sederajat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan dukungan transportasi bagi wilayah yang sulit dijangkau, serta pemberian bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar hambatan ekonomi tidak menjadi penyebab anak tidak bersekolah.

Selain itu, kualitas pembelajaran dan alternatif layanan pendidikan juga perlu terus diperkuat melalui pelatihan guru, pemanfaatan teknologi digital, sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat, serta perluasan pendidikan nonformal seperti Kejar Paket A, B, dan C. Dengan langkah tersebut, partisipasi pendidikan di Jawa Barat diharapkan semakin meningkat, merata, dan berkelanjutan.

4.2.2.3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur persentase peserta didik yang bersekolah pada jenjang pendidikan sesuai dengan usia idealnya. APM yang tinggi menunjukkan bahwa sistem pendidikan di suatu daerah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan jenjang usia yang seharusnya. Perbedaan antara APK dan APM sering kali disebabkan oleh keterlambatan masuk sekolah atau peserta didik yang mengulang kelas.

Sumber data ini berasal dari Statistik Pusdatin Kemendikdasmen dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang telah diolah. Data tersebut menjadi dasar dalam menganalisis efektivitas pendidikan serta merumuskan kebijakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

Tabel 4-51 Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK USIA 7 - 12 TAHUN		JUMLAH SISWA USIA 7 - 12 TAHUN		ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)
		N	%	N	%	
3201	BOGOR	667.243	12,43	657.526	12,98	98,54
3202	SUKABUMI	310.839	5,79	284.437	5,62	91,51
3203	CIANJUR	304.818	5,68	280.620	5,54	92,06
3204	BANDUNG	405.872	7,56	382.780	7,56	94,31
3205	GARUT	322.699	6,01	299.195	5,91	92,72
3206	TASIKMALAYA	187.186	3,49	172.454	3,41	92,13
3207	CIAMIS	112.821	2,10	105.174	2,08	93,22
3208	KUNINGAN	119.072	2,22	107.818	2,13	90,55
3209	CIREBON	239.778	4,47	224.490	4,43	93,62
3210	MAJALENGKA	130.660	2,43	119.406	2,36	91,39
3211	SUMEDANG	113.995	2,12	107.353	2,12	94,17
3212	INDRAMAYU	201.749	3,76	181.197	3,58	89,81
3213	SUBANG	161.689	3,01	149.081	2,94	92,20
3214	PURWAKARTA	116.898	2,18	109.728	2,17	93,87
3215	KARAWANG	287.304	5,35	272.139	5,37	94,72
3216	BEKASI	407.413	7,59	402.518	7,95	98,80
3217	BANDUNG BARAT	200.743	3,74	185.544	3,66	92,43
3218	PANGANDARAN	38.455	0,72	35.366	0,70	91,97
3271	KOTA BOGOR	118.881	2,22	110.688	2,19	93,11
3272	KOTA SUKABUMI	39.192	0,73	36.855	0,73	94,04
3273	KOTA BANDUNG	230.357	4,29	213.373	4,21	92,63
3274	KOTA CIREBON	35.857	0,67	35.687	0,70	99,53
3275	KOTA BEKASI	259.961	4,84	251.190	4,96	96,63
3276	KOTA DEPOK	203.943	3,80	201.577	3,98	98,84
3277	KOTA CIMAHI	53.941	1,01	49.961	0,99	92,62
3278	KOTA TASIKMALAYA	75.931	1,41	70.932	1,40	93,42
3279	KOTA BANJAR	19.139	0,36	17.472	0,34	91,29
PROVINSI JAWA BARAT		5.366.436	100,00	5.064.561	100,00	94,37

Sumber : Statistik Pusdatin Kemendikdasmen dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan data Tabel Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar, APM SD/MI sederajat di Provinsi Jawa Barat mencapai **94,37%**. Angka ini diperoleh dari jumlah penduduk usia 7–12 tahun sebanyak **5.366.436** jiwa dan jumlah siswa usia 7–12

tahun sebanyak **5.064.561** siswa. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah dasar telah bersekolah sesuai dengan kelompok usia yang seharusnya.

Daerah dengan APM tertinggi adalah Kota Cirebon sebesar **99,53%**, Kota Depok sebesar **98,84%**, dan Kabupaten Bekasi sebesar **98,80%**. Sementara itu, daerah dengan APM terendah adalah Kabupaten Indramayu sebesar **89,81%**, Kabupaten Kuningan sebesar **90,55%**, dan Kota Banjar sebesar **91,29%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun APM sekolah dasar di Jawa Barat sudah cukup tinggi, pemerataan akses pendidikan dasar masih perlu terus diperkuat, terutama di daerah dengan capaian yang relatif lebih rendah.

Tabel 4-52 Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK USIA 13 - 15 TAHUN		JUMLAH SISWA USIA 13 - 15 TAHUN		ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)
		N	%	N	%	
3201	BOGOR	354.151	13,13	279.162	12,82	78,83
3202	SUKABUMI	146.421	5,43	119.721	5,50	81,76
3203	CIANJUR	151.308	5,61	118.422	5,44	78,27
3204	BANDUNG	204.359	7,58	160.487	7,37	78,53
3205	GARUT	164.395	6,09	134.281	6,17	81,68
3206	TASIKMALAYA	102.450	3,80	89.835	4,13	87,69
3207	CIAMIS	61.192	2,27	53.722	2,47	87,79
3208	KUNINGAN	64.285	2,38	54.632	2,51	84,98
3209	CIREBON	122.527	4,54	95.894	4,40	78,26
3210	MAJALENGKA	68.447	2,54	55.484	2,55	81,06
3211	SUMEDANG	59.502	2,21	50.734	2,33	85,26
3212	INDRAMAYU	92.632	3,43	69.434	3,19	74,96
3213	SUBANG	81.461	3,02	66.676	3,06	81,85
3214	PURWAKARTA	57.296	2,12	49.103	2,25	85,70
3215	KARAWANG	129.892	4,82	101.390	4,66	78,06
3216	BEKASI	182.806	6,78	147.879	6,79	80,89
3217	BANDUNG BARAT	99.925	3,70	80.393	3,69	80,45
3218	PANGANDARAN	20.447	0,76	16.727	0,77	81,81
3271	KOTA BOGOR	59.994	2,22	50.083	2,30	83,48
3272	KOTA SUKABUMI	21.286	0,79	17.894	0,82	84,06
3273	KOTA BANDUNG	119.479	4,43	99.709	4,58	83,45
3274	KOTA CIREBON	22.502	0,83	18.178	0,83	80,78
3275	KOTA BEKASI	129.537	4,80	96.925	4,45	74,82

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK USIA 13 - 15 TAHUN		JUMLAH SISWA USIA 13 - 15 TAHUN		ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)
		N	%	N	%	
3276	KOTA DEPOK	104.121	3,86	82.833	3,80	79,55
3277	KOTA CIMAHI	26.985	1,00	23.470	1,08	86,97
3278	KOTA TASIKMALAYA	39.550	1,47	35.459	1,63	89,66
3279	KOTA BANJAR	10.598	0,39	9.213	0,42	86,93
PROVINSI JAWA BARAT		2.697.548	100,00	2.177.740	100,00	80,73

Sumber : Statistik Pusdatin Kemendikdasmen dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan data Tabel Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama, APM SMP/MTs sederajat di Provinsi Jawa Barat mencapai **80,73%**. Angka ini diperoleh dari jumlah penduduk usia 13–15 tahun sebanyak **2.697.548** jiwa dan jumlah siswa usia 13–15 tahun sebanyak **2.177.740** siswa. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia SMP telah bersekolah sesuai dengan kelompok usia yang seharusnya, meskipun masih terdapat sekitar **19,27%** anak usia 13–15 tahun yang belum tercatat bersekolah sesuai jenjang usianya.

Daerah dengan APM tertinggi adalah Kota Tasikmalaya sebesar **89,66%**, Kabupaten Ciamis sebesar **87,79%**, dan Kabupaten Tasikmalaya sebesar **87,69%**. Sementara itu, daerah dengan APM terendah adalah Kota Bekasi sebesar **74,82%**, Kabupaten Indramayu sebesar **74,96%**, dan Kabupaten Karawang sebesar **78,06%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan akses dan keberlanjutan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat masih perlu terus diperkuat, terutama di daerah dengan capaian APM yang relatif lebih rendah.

Tabel 4-53 Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah (SMA, SMK, dan pendidikan lainnya yang setara)

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK USIA 16 - 18 TAHUN		JUMLAH SISWA USIA 16 - 18 TAHUN		ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)
		N	%	N	%	
3201	BOGOR	272.123	11,61	213.492	11,76	78,45
3202	SUKABUMI	112.005	4,78	86.903	4,79	77,59
3203	CIANJUR	125.154	5,34	92.986	5,12	74,30
3204	BANDUNG	166.486	7,10	120.114	6,62	72,15
3205	GARUT	144.407	6,16	112.312	6,19	77,77
3206	TASIKMALAYA	85.272	3,64	75.430	4,15	88,46
3207	CIAMIS	54.848	2,34	42.604	2,35	77,68
3208	KUNINGAN	66.752	2,85	50.035	2,76	74,96
3209	CIREBON	97.448	4,16	75.260	4,15	77,23



KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK USIA 16 - 18 TAHUN		JUMLAH SISWA USIA 16 - 18 TAHUN		ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)
		N	%	N	%	
3210	MAJALENGKA	65.989	2,81	48.494	2,67	73,49
3211	SUMEDANG	52.601	2,24	42.611	2,35	81,01
3212	INDRAMAYU	73.427	3,13	57.702	3,18	78,58
3213	SUBANG	65.005	2,77	53.356	2,94	82,08
3214	PURWAKARTA	50.305	2,15	38.319	2,11	76,17
3215	KARAWANG	113.101	4,82	84.425	4,65	74,65
3216	BEKASI	155.656	6,64	119.605	6,59	76,84
3217	BANDUNG BARAT	81.994	3,50	58.662	3,23	71,54
3218	PANGANDARAN	20.495	0,87	14.787	0,81	72,15
3271	KOTA BOGOR	63.813	2,72	50.180	2,76	78,64
3272	KOTA SUKABUMI	24.260	1,03	20.157	1,11	83,09
3273	KOTA BANDUNG	133.125	5,68	106.991	5,89	80,37
3274	KOTA CIREBON	25.317	1,08	19.991	1,10	78,96
3275	KOTA BEKASI	110.778	4,73	93.082	5,13	84,03
3276	KOTA DEPOK	94.440	4,03	66.684	3,67	70,61
3277	KOTA CIMAHI	37.279	1,59	26.443	1,46	70,93
3278	KOTA TASIKMALAYA	37.809	1,61	33.394	1,84	88,32
3279	KOTA BANJAR	14.335	0,61	11.522	0,63	80,38
PROVINSI JAWA BARAT		2.344.224	100,00	1.815.541	100,00	77,45

Sumber : Statistik Pusdatin Kemendikdasmen dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan data Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah, tingkat partisipasi pendidikan menengah yang mencakup SMA/SMK/MA sederajat di Provinsi Jawa Barat mencapai **77,45%**. Angka ini diperoleh dari jumlah penduduk usia 16–18 tahun sebanyak **2.344.224** jiwa dan jumlah siswa usia 16–18 tahun sebanyak **1.815.541** siswa. Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar **22,55%** penduduk usia 16–18 tahun yang belum tercatat bersekolah sesuai jenjang usianya.

Daerah dengan APM tertinggi adalah Kabupaten Tasikmalaya sebesar **88,46%**, Kota Tasikmalaya sebesar **88,32%**, dan Kota Bekasi sebesar **84,03%**. Sementara itu, daerah dengan APM terendah adalah Kota Depok sebesar **70,61%**, Kota Cimahi sebesar **70,93%**, dan Kabupaten Bandung Barat sebesar **71,54%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan akses dan keberlanjutan pendidikan menengah masih perlu terus diperkuat, terutama di daerah dengan capaian APM yang relatif lebih rendah.

Tabel 4-54 Angka Partisipasi Murni di Provinsi Jawa Barat

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH SISWA	ANGKA PARTISIPASI MURNI
1	SD/MI SEDERAJAT	5.366.436	5.064.561	94,37
2	SMP/MTs SEDERAJAT	2.697.548	2.177.740	80,73
3	SMA/SMK/MA SEDERAJAT	2.344.224	1.815.541	77,45
TOTAL		10.408.208	9.057.842	87,03

Sumber : Statistik Pusdatin Kemendikdasmen dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, diolah.

Berdasarkan data Tabel Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Jawa Barat, tingkat partisipasi pendidikan pada setiap jenjang menunjukkan capaian yang berbeda. Pada jenjang SD/MI sederajat, APM mencapai **94,37%**, dengan jumlah penduduk sebanyak **5.366.436** jiwa dan jumlah siswa sebanyak **5.064.561** siswa. Capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas anak usia sekolah dasar telah bersekolah sesuai dengan kelompok usia dan jenjang pendidikannya.

Pada jenjang SMP/MTs sederajat, APM tercatat sebesar **80,73%**, dengan jumlah penduduk sebanyak **2.697.548** jiwa dan jumlah siswa sebanyak **2.177.740** siswa. Sementara itu, jenjang SMA/SMK/MA sederajat memiliki APM sebesar **77,45%**, dengan jumlah penduduk sebanyak **2.344.224** jiwa dan jumlah siswa sebanyak **1.815.541** siswa. Capaian ini menunjukkan bahwa partisipasi murni cenderung menurun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, APM Provinsi Jawa Barat mencapai **87,03%**, dengan total jumlah penduduk sebanyak **10.408.208** jiwa dan jumlah siswa sebanyak **9.057.842** siswa. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi pendidikan sudah cukup baik, masih diperlukan upaya peningkatan akses, pemerataan layanan pendidikan, ketepatan pendataan peserta didik, serta penguatan keberlanjutan pendidikan, terutama pada jenjang SMA/SMK/MA sederajat yang memiliki APM paling rendah dibandingkan jenjang lainnya.

Untuk meningkatkan APM di Jawa Barat, diperlukan penguatan akses dan keterjangkauan pendidikan, terutama di wilayah dengan capaian partisipasi rendah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan transportasi pendidikan, pengembangan pendidikan jarak jauh atau sekolah terbuka, serta perluasan bantuan pendidikan seperti beasiswa dan subsidi bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar hambatan ekonomi tidak menjadi penyebab anak tidak bersekolah.

Selain itu, peningkatan mutu pendidikan dan kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting. Pelatihan guru, revitalisasi pendidikan vokasi, pengembangan program Kejar Paket, serta sosialisasi pentingnya pendidikan kepada orang tua dan masyarakat perlu terus diperkuat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dunia industri, dan masyarakat, diharapkan APM di Jawa Barat dapat terus meningkat secara merata dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

4.2.2.4. Angka Penduduk Putus Sekolah

Angka penduduk putus sekolah mencerminkan jumlah individu yang tidak berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan ini antara lain kondisi ekonomi keluarga yang sulit, keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan, serta faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi keputusan individu untuk melanjutkan sekolah atau tidak.

Tingginya angka putus sekolah dapat berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Oleh karena itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk menekan angka ini, seperti pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah, serta penyuluhan mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak.

Tabel 55 Angka Putus Sekolah Tingkat SD/MI dan SMP/MTs Sederajat

NO	KABUPATEN/ KOTA	SEKOLAH DASAR (SD)			SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)		
		JUMLAH SISWA	JUMLAH PUTUS SEKOLAH	%	JUMLAH SISWA	JUMLAH PUTUS SEKOLAH	%
1	Kab. Bandung	359.821	257	0,07	140.208	33	0,02
2	Kab. Bandung Barat	160.173	117	0,07	65.266	9	0,01
3	Kab. Bekasi	353.961	206	0,06	133.066	27	0,02
4	Kab. Bogor	552.128	273	0,05	236.266	122	0,05
5	Kab. Ciamis	84.605	29	0,03	38.667	7	0,02
6	Kab. Cianjur	259.469	493	0,19	99.012	100	0,10
7	Kab. Cirebon	201.901	110	0,05	82.671	18	0,02
8	Kab. Garut	269.648	160	0,06	106.462	79	0,07
9	Kab. Indramayu	167.370	216	0,13	63.790	19	0,03
10	Kab. Karawang	246.086	216	0,09	92.066	14	0,02
11	Kab. Kuningan	97.391	66	0,07	41.930	14	0,03
12	Kab. Majalengka	113.468	45	0,04	41.196	17	0,04

NO	KABUPATEN/ KOTA	SEKOLAH DASAR (SD)			SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)		
		JUMLAH SISWA	JUMLAH PUTUS SEKOLAH	%	JUMLAH SISWA	JUMLAH PUTUS SEKOLAH	%
13	Kab. Pangandaran	30.652	13	0,04	13.279	2	0,02
14	Kab. Purwakarta	102.409	36	0,04	40.711	3	0,01
15	Kab. Subang	142.296	40	0,03	62.437	16	0,03
16	Kab. Sukabumi	240.463	255	0,11	86.163	43	0,05
17	Kab. Sumedang	101.571	45	0,04	43.339	11	0,03
18	Kab. Tasikmalaya	151.747	96	0,06	64.337	42	0,07
19	Kota Bandung	201.344	22	0,01	99.720	2	0,00
20	Kota Banjar	14.179	4	0,03	7.819	2	0,03
21	Kota Bekasi	226.570	134	0,06	97.249	23	0,02
22	Kota Bogor	100.094	19	0,02	43.326	8	0,02
23	Kota Cimahi	46.638	26	0,06	22.328	4	0,02
24	Kota Cirebon	33.636	8	0,02	18.175	-	-
25	Kota Depok	159.417	27	0,02	76.185	11	0,01
26	Kota Sukabumi	33.281	17	0,05	16.102	1	0,01
27	Kota Tasikmalaya	62.639	28	0,04	28.994	17	0,06
PROVINSI JAWA BARAT		4.512.957	2.958	0,07	1.860.764	644	0,03

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, diolah

Berdasarkan data Angka Putus Sekolah Tingkat SD dan SMP Sederajat di Provinsi Jawa Barat, jumlah siswa SD tercatat sebanyak **4.512.957** siswa, dengan jumlah putus sekolah sebanyak **2.958** siswa atau sebesar **0,07%**. Sementara itu, pada jenjang SMP, jumlah siswa tercatat sebanyak **1.860.764** siswa, dengan jumlah putus sekolah sebanyak **644** siswa atau sebesar **0,03%**. Data ini menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada jenjang SD lebih tinggi dibandingkan jenjang SMP, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya.

Pada jenjang SD, jumlah putus sekolah tertinggi terdapat di Kabupaten Cianjur sebanyak **493** siswa atau **0,19%**, diikuti oleh Kabupaten Bogor sebanyak **273** siswa atau **0,05%**, dan Kabupaten Bandung sebanyak **257** siswa atau **0,07%**. Jika dilihat dari persentase, Kabupaten Cianjur juga menjadi daerah dengan persentase tertinggi, yaitu **0,19%**, disusul Kabupaten Indramayu sebesar **0,13%** dan Kabupaten Sukabumi sebesar **0,11%**. Sementara itu, daerah dengan angka putus sekolah SD relatif rendah antara lain Kota Banjar sebanyak **4** siswa, Kota Cirebon sebanyak **8** siswa, dan Kabupaten Pangandaran sebanyak **13** siswa.

Pada jenjang SMP, jumlah putus sekolah tertinggi terdapat di Kabupaten Bogor sebanyak **122** siswa atau **0,05%**, diikuti oleh Kabupaten Cianjur sebanyak **100** siswa atau **0,10%**, dan Kabupaten Garut sebanyak **79** siswa atau **0,07%**. Jika dilihat dari persentasenya, Kabupaten Cianjur menjadi yang tertinggi dengan **0,10%**, disusul Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya masing-masing sebesar **0,07%**, serta Kota Tasikmalaya sebesar **0,06%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun angka putus sekolah di Jawa Barat secara umum relatif rendah, upaya pencegahan putus sekolah tetap perlu diperkuat, terutama di daerah dengan jumlah dan persentase putus sekolah yang lebih tinggi.

Tabel 56 Angka Putus Sekolah Tingkat SMA/SMK/MA Sederajat

NO	KABUPATEN/ KOTA	SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)			SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)		
		JUMLAH SISWA	JUMLAH PUTUS SEKOLAH	%	JUMLAH SISWA	JUMLAH PUTUS SEKOLAH	%
1	Kab. Bandung	64.394	13	0,02	55.987	32	0,06
2	Kab. Bandung Barat	29.860	7	0,02	30.669	10	0,03
3	Kab. Bekasi	61.600	14	0,02	74.799	23	0,03
4	Kab. Bogor	91.985	16	0,02	136.976	114	0,08
5	Kab. Ciamis	18.508	5	0,03	20.388	10	0,05
6	Kab. Cianjur	33.341	41	0,12	55.945	61	0,11
7	Kab. Cirebon	27.852	13	0,05	49.807	27	0,05
8	Kab. Garut	53.126	18	0,03	54.900	20	0,04
9	Kab. Indramayu	22.842	48	0,21	47.257	41	0,09
10	Kab. Karawang	34.154	8	0,02	62.567	27	0,04
11	Kab. Kuningan	20.965	2	0,01	27.687	3	0,01
12	Kab. Majalengka	20.778	2	0,01	26.463	22	0,08
13	Kab. Pangandaran	5.021	1	0,02	9.303	4	0,04
14	Kab. Purwakarta	18.207	-	-	19.896	6	0,03
15	Kab. Subang	27.442	2	0,01	32.784	5	0,02
16	Kab. Sukabumi	41.648	12	0,03	38.863	45	0,12
17	Kab. Sumedang	19.850	-	-	24.191	16	0,07
18	Kab. Tasikmalaya	29.134	19	0,07	38.695	3	0,01
19	Kota Bandung	64.061	6	0,01	53.310	8	0,02
20	Kota Banjar	3.654	-	-	8.345	-	-
21	Kota Bekasi	50.224	7	0,01	61.968	6	0,01
22	Kota Bogor	22.091	1	-	34.067	14	0,04

NO	KABUPATEN/ KOTA	SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)			SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)		
		JUMLAH SISWA	JUMLAH PUTUS SEKOLAH	%	JUMLAH SISWA	JUMLAH PUTUS SEKOLAH	%
23	Kota Cimahi	11.013	1	0,01	16.814	1	0,01
24	Kota Cirebon	12.986	1	0,01	10.398	2	0,02
25	Kota Depok	33.060	1	-	39.466	48	0,12
26	Kota Sukabumi	8.299	2	0,02	10.243	47	0,46
27	Kota Tasikmalaya	16.665	-	-	16.834	8	0,05
PROVINSI JAWA BARAT		842.760	240	0,03	1.058.622	603	0,06

Sumber : Diolah. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data Angka Putus Sekolah Tingkat SMA dan SMK Sederajat di Provinsi Jawa Barat, jumlah siswa SMA tercatat sebanyak **842.760** siswa, dengan jumlah putus sekolah sebanyak **240** siswa atau **0,03%**. Sementara itu, pada jenjang SMK, jumlah siswa tercatat sebanyak **1.058.622** siswa, dengan jumlah putus sekolah sebanyak **603** siswa atau **0,06%**. Data ini menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada jenjang SMK lebih tinggi dibandingkan SMA, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya.

Pada jenjang SMA, jumlah putus sekolah tertinggi terdapat di Kabupaten Indramayu sebanyak **48** siswa atau **0,21%**, diikuti oleh Kabupaten Cianjur sebanyak **41** siswa atau **0,12%**, dan Kabupaten Tasikmalaya sebanyak **19** siswa atau **0,07%**. Jika dilihat dari persentase, Kabupaten Indramayu juga menjadi daerah dengan persentase tertinggi, disusul Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tasikmalaya. Sementara itu, beberapa daerah mencatat angka putus sekolah sangat rendah atau nihil, seperti Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya.

Pada jenjang SMK, jumlah putus sekolah tertinggi terdapat di Kabupaten Bogor sebanyak **114** siswa atau **0,08%**, diikuti oleh Kabupaten Cianjur sebanyak **61** siswa atau **0,11%**, serta Kota Depok dan Kota Sukabumi masing-masing sebanyak **48** dan **47** siswa. Jika dilihat dari persentasenya, Kota Sukabumi mencatat persentase tertinggi sebesar **0,46%**, disusul Kabupaten Sukabumi dan Kota Depok masing-masing sebesar **0,12%**, serta Kabupaten Cianjur sebesar **0,11%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun angka putus sekolah pada jenjang SMA dan SMK secara umum relatif rendah, upaya pencegahan tetap perlu diperkuat, terutama pada daerah dengan jumlah maupun persentase putus sekolah yang lebih tinggi.



Tabel 57 Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan Khusus/SLB

NO	KABUPATEN/ KOTA	PENDIDIKAN KHUSUS (SLB)		
		JUMLAH SISWA	JUMLAH PUTUS SEKOLAH	%
1	Kab. Bandung	3.503	7	0,20
2	Kab. Bandung Barat	1.293	2	0,15
3	Kab. Bekasi	728	-	-
4	Kab. Bogor	689	-	-
5	Kab. Ciamis	1.839	2	0,11
6	Kab. Cianjur	801	1	0,12
7	Kab. Cirebon	1.570	1	0,06
8	Kab. Garut	2.380	1	0,04
9	Kab. Indramayu	735	6	0,82
10	Kab. Karawang	685	1	0,15
11	Kab. Kuningan	1.375	22	1,60
12	Kab. Majalengka	910	1	0,11
13	Kab. Pangandaran	580	-	-
14	Kab. Purwakarta	698	1	0,14
15	Kab. Subang	1.010	-	-
16	Kab. Sukabumi	1.200	2	0,17
17	Kab. Sumedang	1.544	3	0,19
18	Kab. Tasikmalaya	1.332	2	0,15
19	Kota Bandung	2.108	2	0,09
20	Kota Banjar	354	-	-
21	Kota Bekasi	926	1	0,11
22	Kota Bogor	740	1	0,14
23	Kota Cimahi	703	-	-
24	Kota Cirebon	448	-	-
25	Kota Depok	694	1	0,14
26	Kota Sukabumi	295	-	-
27	Kota Tasikmalaya	755	-	-
PROVINSI JAWA BARAT		29.895	57	0,19

Sumber : Diolah. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data Angka Putus Sekolah pada Pendidikan Khusus/SLB di Provinsi Jawa Barat, jumlah siswa tercatat sebanyak **29.895** siswa, dengan jumlah putus sekolah

sebanyak **57** siswa atau sebesar **0,19%**. Secara umum, angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat putus sekolah pada Pendidikan Khusus/SLB relatif rendah, namun tetap perlu mendapat perhatian karena menyangkut keberlanjutan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Jumlah putus sekolah tertinggi terdapat di Kabupaten Kuningan sebanyak **22** siswa atau **1,60%**, diikuti oleh Kabupaten Bandung sebanyak **7** siswa atau **0,20%**, serta Kabupaten Indramayu sebanyak **6** siswa atau **0,82%**. Jika dilihat dari persentase, Kabupaten Kuningan juga menjadi daerah dengan persentase tertinggi, disusul Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian khusus pada daerah dengan jumlah maupun persentase putus sekolah yang relatif lebih tinggi.

Sementara itu, beberapa daerah mencatat tidak terdapat kasus putus sekolah pada Pendidikan Khusus/SLB, antara lain Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Subang, Kota Banjar, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya. Capaian ini perlu dipertahankan melalui penguatan layanan pendidikan inklusif, pendampingan peserta didik berkebutuhan khusus, dukungan keluarga, serta peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana pendidikan khusus di seluruh wilayah Jawa Barat.

4.2.3. Ekonomi

Perekonomian suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi tenaga kerja dan angkatan kerja yang tersedia. Angkatan kerja mencakup penduduk yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Sementara itu, tenaga kerja adalah bagian dari angkatan kerja yang sudah memiliki pekerjaan. Indikator tenaga kerja menjadi tolok ukur dalam menilai dinamika pasar kerja dan efektivitas kebijakan ekonomi serta ketenagakerjaan.

4.2.3.1. Proporsi Dan Jumlah Tenaga Kerja Dan Angkatan Kerja

Indikator ini mencerminkan jumlah serta proporsi penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja dibandingkan dengan total populasi. Dengan memahami proporsi tenaga kerja dan angkatan kerja, pemerintah dapat mengukur potensi ekonomi serta tingkat ketergantungan penduduk non-produktif terhadap kelompok produktif.

4.2.3.1.1. Jumlah Dan Proporsi Tenaga Kerja

Tenaga kerja (Manpower) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Indikator ini berguna sebagai wacana pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Disamping itu juga untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja (penduduk usia kerja) potensial. Penghitungan persentase tenaga kerja dilaksanakan dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (usia kerja) dengan jumlah penduduk keseluruhan.

Tabel 4-58 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Pekerjaan

N O	KELOMPOK PEKERJAAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	BELUM/ TIDAK BEKERJA	6.517.819	12,48	5.623.238	10,77	12.141.057	23,25
2	APARATUR/ PEJABAT NEGARA	477.163	0,91	239.826	0,46	716.989	1,37
3	TENAGA PENGAJAR	121.867	0,23	213.498	0,41	335.365	0,64
4	WIRASWASTA	12.472.915	23,89	1.975.190	3,78	14.448.105	27,67
5	PERTANIAN/ PETERNAKAN	1.298.273	2,49	224.783	0,43	1.523.056	2,92
6	NELAYAN	71.997	0,14	369	0,00	72.366	0,14
7	AGAMA DAN KEPERCAYAAN	15.113	0,03	1.715	0,00	16.828	0,03
8	PELAJAR/ MAHASISWA	5.239.498	10,04	4.520.828	8,66	9.760.326	18,69
9	TENAGA KESEHATAN	23.692	0,05	84.075	0,16	107.767	0,21
10	PENSIUNAN	191.920	0,37	89.371	0,17	281.291	0,54
11	LAINNYA	10.232	0,02	12.797.638	24,51	12.807.870	24,53
TOTAL		26.440.489	50,64	25.770.531	49,36	52.211.020	100,00

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel, jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat menurut kelompok pekerjaan tercatat sebanyak **52.211.020** jiwa, yang terdiri atas **26.440.489** laki-laki (**50,64%**) dan **25.770.531** perempuan (**49,36%**). Kelompok pekerjaan dengan jumlah terbesar adalah wiraswasta, yaitu sebanyak **14.448.105** jiwa (**27,67%**), diikuti oleh kelompok lainnya sebanyak **12.807.870** jiwa (**24,53%**), serta belum/tidak bekerja sebanyak **12.141.057** jiwa (**23,25%**). Selain itu, kelompok pelajar/mahasiswa juga cukup

besar, yaitu **9.760.326** jiwa (**18,69%**). Sementara itu, kelompok pekerjaan dengan jumlah paling sedikit adalah agama dan kepercayaan sebanyak **16.828** jiwa (**0,03%**), disusul nelayan sebanyak **72.366** jiwa (**0,14%**) dan tenaga kesehatan sebanyak **107.767** jiwa (**0,21%**).

Jika dilihat menurut jenis kelamin, kelompok wiraswasta didominasi oleh laki-laki, yaitu **12.472.915** jiwa, sedangkan perempuan sebanyak **1.975.190** jiwa. Pada kelompok belum/tidak bekerja, tercatat **6.517.819** laki-laki dan **5.623.238** perempuan. Sementara itu, pada kelompok pelajar/mahasiswa terdapat **5.239.498** laki-laki dan **4.520.828** perempuan. Untuk kelompok tenaga pengajar dan tenaga kesehatan, jumlah perempuan relatif lebih besar dibandingkan laki-laki, yang menunjukkan bahwa kedua bidang tersebut lebih banyak diisi oleh penduduk perempuan.

Khusus untuk kelompok pekerjaan “lainnya”, jumlahnya tercatat sangat besar, yaitu **12.807.870** jiwa (**24,53%**), dengan komposisi **10.232** laki-laki dan **12.797.638** perempuan. Kelompok pekerjaan ini pada umumnya merupakan jenis pekerjaan yang tidak tersedia atau tidak terakomodasi secara rinci dalam aplikasi SIAK, sehingga dicatat dalam kategori umum lainnya. Khusus untuk penduduk perempuan, jenis pekerjaan ibu rumah tangga masuk ke dalam kelompok pekerjaan “lainnya”, sehingga menyebabkan jumlah perempuan pada kategori ini sangat dominan.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa struktur pekerjaan penduduk Jawa Barat didominasi oleh sektor wiraswasta, diikuti oleh kategori lainnya, belum/tidak bekerja, dan pelajar/mahasiswa. Informasi ini penting sebagai dasar dalam memahami gambaran sosial ekonomi penduduk serta mendukung perencanaan kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan, dan pelayanan administrasi kependudukan di daerah.

Tabel 4-59 Proporsi Tenaga Kerja

NO	UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	15-19	2.094.997	5,84	1.992.644	5,55	4.087.641	11,39
2	20-24	2.173.748	6,06	2.063.190	5,75	4.236.938	11,80
3	25-29	2.162.145	6,02	2.028.532	5,65	4.190.677	11,67
4	30-34	2.034.268	5,67	1.940.386	5,41	3.974.654	11,07
5	35-39	1.856.884	5,17	1.798.472	5,01	3.655.356	10,18
6	40-44	1.966.835	5,48	1.971.093	5,49	3.937.928	10,97
7	45-49	1.815.376	5,06	1.860.280	5,18	3.675.656	10,24
8	50-54	1.628.752	4,54	1.667.441	4,64	3.296.193	9,18
9	55-59	1.358.936	3,79	1.368.422	3,81	2.727.358	7,60



NO	UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
10	60-64	1.042.418	2,90	1.074.799	2,99	2.117.217	5,90
TOTAL		18.134.359	50,51	17.765.259	49,49	35.899.618	100,00

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Proporsi tenaga kerja menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang berpotensi terlibat dalam kegiatan ekonomi terhadap keseluruhan penduduk usia kerja. Indikator ini penting untuk melihat struktur penduduk produktif serta gambaran ketersediaan sumber daya manusia menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

Berdasarkan tabel, jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Jawa Barat tahun 2025 pada kelompok umur 15–64 tahun tercatat sebanyak **35.899.618** jiwa, terdiri atas **18.134.359** laki-laki (**50,51%**) dan **17.765.259** perempuan (**49,49%**). Komposisi ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia kerja antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang, dengan jumlah laki-laki sedikit lebih besar dibandingkan perempuan.

Dilihat menurut kelompok umur, jumlah penduduk usia kerja terbesar berada pada kelompok umur 20–24 tahun, yaitu sebanyak **4.236.938** jiwa (**11,80%**), diikuti kelompok umur 25–29 tahun sebanyak **4.190.677** jiwa (**11,67%**), dan kelompok umur 15–19 tahun sebanyak **4.087.641** jiwa (**11,39%**). Selain itu, kelompok umur 30–34 tahun juga cukup besar, yaitu **3.974.654** jiwa (**11,07%**). Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur penduduk usia kerja di Jawa Barat masih didominasi oleh kelompok usia muda dan usia produktif awal.

Sementara itu, jumlah penduduk usia kerja cenderung menurun pada kelompok umur yang lebih tua. Kelompok umur 55–59 tahun tercatat sebanyak **2.727.358** jiwa (**7,60%**), sedangkan kelompok umur 60–64 tahun merupakan yang paling sedikit, yaitu **2.117.217** jiwa (**5,90%**). Penurunan ini menunjukkan bahwa semakin bertambah umur, proporsi penduduk dalam kelompok usia kerja semakin berkurang.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki struktur penduduk usia kerja yang besar dan didominasi oleh usia produktif muda. Kondisi ini merupakan potensi penting bagi pembangunan daerah, karena ketersediaan penduduk usia kerja yang besar dapat menjadi modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, dan penguatan pasar kerja. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan perluasan kesempatan kerja.

Proporsi tenaga kerja menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang berpotensi terlibat dalam kegiatan ekonomi terhadap keseluruhan penduduk usia kerja. Indikator ini penting untuk melihat struktur penduduk produktif serta gambaran ketersediaan sumber daya manusia menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Lebih lanjut, berikut cara penghitungan Tabel Proporsi Tenaga Kerja sebagai berikut:

$$\text{Proporsi tenaga Kerja (Manpower)} = \frac{\text{Usia Produktif}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 = \text{Angka}$$

$$\text{Proporsi tenaga Kerja (Manpower)} = \frac{35.899.618}{52.211.020} \times 100 = \mathbf{68,75}$$

Dari perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proporsi penduduk usia kerja di Provinsi Jawa Barat mencapai **68,75%**. Angka ini diperoleh dari jumlah penduduk usia 15–64 tahun sebanyak **35.899.618** jiwa dibandingkan dengan total penduduk **52.211.020** jiwa. Ini berarti bahwa sekitar **68,75%** penduduk Jawa Barat berada dalam kategori usia produktif dan berpotensi terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kesimpulan dari angka ini adalah:

1. **Mayoritas penduduk berada pada usia produktif.** Dengan proporsi sebesar **68,75%**, Jawa Barat memiliki potensi sumber daya manusia yang besar karena sebagian besar penduduknya berada pada rentang usia kerja.
2. **Diperlukan dukungan kebijakan ketenagakerjaan.** Besarnya jumlah penduduk usia produktif perlu diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, dan kebijakan ketenagakerjaan yang mampu menjawab kebutuhan pasar kerja.
3. **Tantangan utama adalah penyerapan tenaga kerja.** Besarnya proporsi penduduk usia kerja belum otomatis menunjukkan bahwa seluruhnya sudah bekerja. Oleh karena itu, tantangan berikutnya adalah memastikan agar penduduk usia produktif dapat terserap secara optimal ke dalam dunia kerja.
4. **Menjadi modal penting bagi pertumbuhan ekonomi.** Jika dikelola dengan baik, besarnya penduduk usia kerja dapat menjadi kekuatan dalam meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pembangunan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, proporsi penduduk usia kerja sebesar **68,75%** menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki potensi tenaga kerja yang sangat besar, sehingga perlu didukung dengan strategi pembangunan yang tepat agar potensi tersebut dapat

memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

4.2.3.1.2. Jumlah Dan Proporsi Penduduk Bekerja Dan Menganggur

Angkatan kerja merupakan penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang aktif dalam kegiatan ekonomi, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan (menganggur). Indikator ini menjadi salah satu faktor penting dalam memahami dinamika ketenagakerjaan di suatu daerah. Semakin tinggi jumlah dan proporsi angkatan kerja, semakin besar potensi produktif yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, tingginya angka angkatan kerja juga harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja agar tidak meningkatkan tingkat pengangguran.

Di Jawa Barat, jumlah dan proporsi angkatan kerja mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja yang terus berkembang. Untuk memastikan angkatan kerja terserap dengan baik, diperlukan strategi yang tepat, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan, penguatan sektor industri dan UMKM, serta kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Dengan langkah-langkah tersebut, angkatan kerja dapat lebih berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 4-60 Proporsi Angkatan Kerja

NO	UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	15-19	463.870	2,62	408.945	2,31	872.815	4,93
2	20-24	780.686	4,41	380.144	2,15	1.160.830	6,55
3	25-29	1.574.844	8,89	451.930	2,55	2.026.774	11,44
4	30-34	1.906.712	10,76	475.429	2,68	2.382.141	13,44
5	35-39	1.836.085	10,36	398.538	2,25	2.234.623	12,61
6	40-44	1.962.946	11,08	364.498	2,06	2.327.444	13,14
7	45-49	1.814.357	10,24	306.299	1,73	2.120.656	11,97
8	50-54	1.627.430	9,19	244.318	1,38	1.871.748	10,56
9	55-59	1.349.209	7,61	211.066	1,19	1.560.275	8,81
10	60-64	1.004.037	5,67	156.725	0,88	1.160.762	6,55
TOTAL		14.320.176	80,82	3.397.892	19,18	17.718.068	100,00

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan tabel di atas, jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak **17.718.068** orang, terdiri atas **14.320.176** laki-laki (**80,82%**) dan **3.397.892**

perempuan (**19,18%**). Komposisi ini menunjukkan bahwa angkatan kerja di Jawa Barat masih didominasi oleh laki-laki, sedangkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja relatif lebih rendah.

Dilihat menurut kelompok umur, jumlah angkatan kerja terbesar terdapat pada kelompok umur 30–34 tahun, yaitu sebanyak **2.382.141** orang (**13,44%**). Selanjutnya, kelompok umur 40–44 tahun berjumlah **2.327.444** orang (**13,14%**), diikuti kelompok umur 35–39 tahun sebanyak **2.234.623** orang (**12,61%**), serta kelompok umur 45–49 tahun sebanyak **2.120.656** orang (**11,97%**). Data ini menunjukkan bahwa angkatan kerja di Jawa Barat didominasi oleh penduduk usia produktif utama.

Sementara itu, jumlah angkatan kerja terendah terdapat pada kelompok umur 15–19 tahun, yaitu sebanyak **872.815** orang (**4,93%**). Kelompok umur 20–24 tahun juga relatif lebih rendah, yaitu **1.160.830** orang (**6,55%**), sama dengan kelompok umur 60–64 tahun yang juga sebesar **1.160.762** orang (**6,55%**). Adapun kelompok umur 55–59 tahun tercatat sebanyak **1.560.275** orang (**8,81%**). Kondisi ini menunjukkan bahwa angkatan kerja paling terkonsentrasi pada usia dewasa produktif, sementara pada usia yang lebih muda dan lebih tua jumlahnya relatif lebih kecil.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa struktur angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat didominasi oleh kelompok usia 30–49 tahun dan masih didominasi oleh laki-laki. Kondisi ini menjadi potensi penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, namun juga menunjukkan perlunya upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja melalui perluasan kesempatan kerja, pelatihan keterampilan, dan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif.

$$\text{Angkatan Kerja} = \frac{\text{Tenaga Kerja}}{\text{Usia Produktif}} \times 100 = \text{Angka}$$

$$\text{Angkatan Kerja} = \frac{17.718.068}{39.751.184} \times 100 = \mathbf{49,35}$$

Berdasarkan perbandingan antara jumlah angkatan kerja sebanyak **17.718.068** orang dengan jumlah penduduk usia kerja 15–64 tahun sebanyak **39.751.184** orang, dapat disimpulkan bahwa proporsi angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat sebesar **49,35%**. Artinya, sekitar **49,35%** penduduk usia kerja termasuk dalam kategori angkatan kerja, yaitu penduduk yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Sebaliknya, sekitar **50,65%** penduduk usia kerja tidak termasuk angkatan kerja, seperti pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pensiunan, atau penduduk lain yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi. Hasil perhitungan proporsi tersebut diperoleh dari pembagian jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki jumlah angkatan kerja yang besar, namun proporsinya terhadap seluruh penduduk usia kerja masih belum dominan. Kondisi ini menunjukkan masih adanya potensi sumber daya manusia usia kerja yang belum sepenuhnya masuk ke pasar kerja. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan, dan perluasan kesempatan kerja agar potensi penduduk usia produktif dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Tabel 4-61 Proporsi Bukan Angkatan Kerja

NO	UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	15-19	1.631.127	8,97	1.583.699	8,71	3.214.826	17,68
2	20-24	1.393.062	7,66	1.683.046	9,26	3.076.108	16,92
3	25-29	587.301	3,23	1.576.602	8,67	2.163.903	11,90
4	30-34	127.556	0,70	1.464.957	8,06	1.592.513	8,76
5	35-39	20.799	0,11	1.399.934	7,70	1.420.733	7,81
6	40-44	3.889	0,02	1.606.595	8,84	1.610.484	8,86
7	45-49	1.019	0,01	1.553.981	8,55	1.555.000	8,55
8	50-54	1.322	0,01	1.423.123	7,83	1.424.445	7,83
9	55-59	9.727	0,05	1.157.356	6,37	1.167.083	6,42
10	60-64	38.381	0,21	918.074	5,05	956.455	5,26
TOTAL		3.814.183	20,98	14.367.367	79,02	18.181.550	100,00

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel, jumlah bukan angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak **18.181.550** orang, terdiri atas **3.814.183** laki-laki (**20,98%**) dan **14.367.367** perempuan (**79,02%**). Komposisi ini menunjukkan bahwa kelompok bukan angkatan kerja di Jawa Barat didominasi oleh perempuan.

Dilihat menurut kelompok umur, jumlah bukan angkatan kerja terbesar terdapat pada kelompok umur 15–19 tahun, yaitu sebanyak **3.214.826** orang (**17,68%**), diikuti kelompok umur 20–24 tahun sebanyak **3.076.108** orang (**16,92%**), dan kelompok umur 25–29 tahun sebanyak **2.163.903** orang (**11,90%**). Selain itu, kelompok umur 30–34 tahun juga cukup besar, yaitu **1.592.513** orang (**8,76%**). Kondisi ini menunjukkan bahwa bukan angkatan kerja banyak terkonsentrasi pada usia muda hingga usia produktif awal.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, pada kelompok usia muda 15–19 tahun jumlah laki-laki dan perempuan relatif berimbang, yaitu **1.631.127** laki-laki dan **1.583.699** perempuan. Namun, pada kelompok umur berikutnya, jumlah perempuan

jauh lebih besar dibandingkan laki-laki. Misalnya pada kelompok umur 40–44 tahun, tercatat **1.606.595** perempuan dan hanya **3.889** laki-laki, sedangkan pada kelompok umur 45–49 tahun terdapat **1.553.981** perempuan dan **1.019** laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mendominasi kategori bukan angkatan kerja, terutama pada kelompok usia dewasa.

Secara umum, data ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk bukan angkatan kerja di Jawa Barat masih cukup besar, terutama pada kelompok perempuan dan usia muda. Kondisi ini dapat berkaitan dengan penduduk yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, pensiun, atau belum aktif dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, data ini penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pendidikan, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan perempuan agar partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi dapat terus ditingkatkan.

$$\text{Bukan Angkatan Kerja} = \frac{\text{Bukan Tenaga Kerja}}{\text{Usia Produktif}} \times 100 = \text{Angka}$$

$$\text{Bukan Angkatan Kerja} = \frac{18.181.550}{35.899.618} \times 100 = \mathbf{50,65}$$

Berdasarkan hasil perhitungan, proporsi penduduk bukan angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat tahun 2025 sebesar **50,65%** dari total penduduk usia produktif. Angka ini diperoleh dari perbandingan jumlah bukan angkatan kerja sebanyak **18.181.550** orang terhadap jumlah penduduk usia kerja 15–64 tahun sebanyak **35.899.618** orang.

Angka tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk usia kerja di Jawa Barat belum termasuk ke dalam angkatan kerja, baik karena masih menempuh pendidikan, mengurus rumah tangga, pensiun, maupun alasan lainnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa tidak semua penduduk usia produktif terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi.

Tingginya proporsi bukan angkatan kerja, terutama pada kelompok perempuan dan usia muda, menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan partisipasi penduduk dalam pasar kerja. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap produktivitas ekonomi daerah serta pemanfaatan potensi sumber daya manusia secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu mendorong lebih banyak penduduk usia produktif untuk masuk ke dalam dunia kerja, antara lain melalui pelatihan keterampilan, perluasan akses pekerjaan yang inklusif, serta pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi kelompok yang partisipasinya masih rendah.

4.2.3.2. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) mengukur proporsi penduduk usia 15-64 tahun yang tergolong sebagai angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan, dibandingkan dengan total penduduk dalam rentang usia tersebut. Indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat keterlibatan penduduk usia produktif dalam pasar tenaga kerja, mencerminkan sejauh mana mereka berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Indikator ini sangat penting dalam menganalisis dinamika ketenagakerjaan, karena menunjukkan seberapa besar bagian dari tenaga kerja yang benar-benar terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif. Dengan memahami tingkat partisipasi angkatan kerja, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang kebijakan yang lebih tepat untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengatasi pengangguran, serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Tabel 4-62 Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

NO	UMUR	TIDAK BEKERJA	BEKERJA	ANGKATAN KERJA	BUKAN ANGKATAN KERJA	TENAGA KERJA	APAK
1	15-19	841.032	31.783	872.815	3.214.826	4.087.641	21,35
2	20-24	678.567	482.263	1.160.830	3.076.108	4.236.938	27,40
3	25-29	458.892	1.567.882	2.026.774	2.163.903	4.190.677	48,36
4	30-34	212.728	2.169.413	2.382.141	1.592.513	3.974.654	59,93
5	35-39	94.787	2.139.836	2.234.623	1.420.733	3.655.356	61,13
6	40-44	55.468	2.271.976	2.327.444	1.610.484	3.937.928	59,10
7	45-49	33.666	2.086.990	2.120.656	1.555.000	3.675.656	57,69
8	50-54	24.725	1.847.023	1.871.748	1.424.445	3.296.193	56,79
9	55-59	22.964	1.537.311	1.560.275	1.167.083	2.727.358	57,21
10	60-64	21.769	1.138.993	1.160.762	956.455	2.117.217	54,82
TOTAL		2.444.598	15.273.470	17.718.068	18.181.550	35.899.618	49,35

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan tabel di atas, Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) di Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan tercatat sebesar **49,35%**. Angka ini menunjukkan bahwa dari total **35.899.618** penduduk usia 15–64 tahun, sebanyak **17.718.068** orang termasuk dalam angkatan kerja, baik yang bekerja sebanyak **15.273.470** orang maupun yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan sebanyak **2.444.598** orang. Sementara itu, sebanyak **18.181.550** orang tergolong bukan angkatan kerja.

Dilihat menurut kelompok umur, APAK terendah terdapat pada kelompok usia 15–19 tahun, yaitu sebesar **21,35%**, karena sebagian besar penduduk pada kelompok umur ini masih berada pada usia sekolah. Selanjutnya, pada kelompok umur 20–24 tahun, APAK tercatat sebesar **27,40%**. Setelah itu, angka partisipasi meningkat cukup tajam pada kelompok umur 25–29 tahun menjadi **48,36%**, dan terus meningkat pada kelompok umur 30–34 tahun sebesar **59,93%**.

APAK tertinggi terdapat pada kelompok umur 35–39 tahun, yaitu sebesar **61,13%**, diikuti kelompok umur 40–44 tahun sebesar **59,10%**, dan kelompok umur 30–34 tahun sebesar **59,93%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja tertinggi berada pada usia produktif utama, yaitu saat penduduk berada pada fase paling aktif dalam dunia kerja.

Setelah itu, tingkat partisipasi mulai menurun secara bertahap. Pada kelompok umur 45–49 tahun, APAK tercatat sebesar **57,69%**, kemudian 50–54 tahun sebesar **56,79%**, 55–59 tahun sebesar **57,21%**, dan 60–64 tahun sebesar **54,82%**. Meskipun mulai menurun, angka ini menunjukkan bahwa pada kelompok usia yang lebih tua masih terdapat proporsi penduduk yang cukup besar yang tetap aktif dalam angkatan kerja.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja di Jawa Barat cenderung rendah pada usia muda, meningkat pada usia produktif utama, dan mulai menurun pada usia yang lebih tua. Pola ini mencerminkan kondisi umum ketenagakerjaan, di mana penduduk usia sekolah masih banyak yang belum masuk pasar kerja, sedangkan pada usia dewasa partisipasi ekonomi mencapai tingkat tertinggi. Data ini penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Jawa Barat.

4.2.3.3. Jumlah Dan Proporsi Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan

Indikator jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan memberikan gambaran mengenai distribusi tenaga kerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan. Data ini menunjukkan seberapa besar proporsi tenaga kerja yang terserap di setiap jenis pekerjaan dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Dengan memahami distribusi ini, pemerintah dapat melihat sektor-sektor yang mendominasi pasar tenaga kerja serta mengidentifikasi sektor yang masih membutuhkan peningkatan serapan tenaga kerja.

Selain itu, indikator ini memiliki peran penting dalam perencanaan kebijakan ketenagakerjaan di tingkat daerah. Dengan mengetahui sebaran tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaan, pemerintah dapat merancang program pelatihan, peningkatan keterampilan, serta kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Informasi

ini juga membantu dalam menentukan sektor yang perlu mendapatkan dorongan investasi atau dukungan kebijakan agar dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel 4-63 Jumlah dan Proporsi Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan

N O	KELOMPOK PERKERJAAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	6.517.819	12,48	5.623.238	10,77	12.141.057	23,25
2	PELAJAR/ MAHASISWA	5.239.498	10,04	4.520.828	8,66	9.760.326	18,69
3	PENSIUNAN	191.920	0,37	89.371	0,17	281.291	0,54
4	LAINNYA	10.232	0,02	12.797.638	24,51	12.807.870	24,53
	BELUM/TIDAK BEKERJA	11.959.469	22,91	23.031.075	44,11	34.990.544	67,02
5	APARATUR/PEJABAT NEGARA	477.163	0,91	239.826	0,46	716.989	1,37
6	TENAGA PENGAJAR	121.867	0,23	213.498	0,41	335.365	0,64
7	WIRASWASTA	12.472.915	23,89	1.975.190	3,78	14.448.105	27,67
8	PERTANIAN/ PETERNAKAN	1.298.273	2,49	224.783	0,43	1.523.056	2,92
9	NELAYAN	71.997	0,14	369	0,00	72.366	0,14
10	AGAMA DAN KEPERCAYAAN	15.113	0,03	1.715	0,00	16.828	0,03
11	TENAGA KESEHATAN	23.692	0,05	84.075	0,16	107.767	0,21
	MEMILIKI PEKERJAAN	14.481.020	27,74	2.739.456	5,25	17.220.476	32,98
	TOTAL	26.440.489	50,64	25.770.531	49,36	52.211.020	100,00

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan data di atas, jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak **52.211.020** jiwa, yang terdiri atas **26.440.489** laki-laki (**50,64%**) dan **25.770.531** perempuan (**49,36%**). Jika dilihat berdasarkan kelompok pekerjaan, penduduk dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu penduduk yang belum/tidak bekerja dan penduduk yang memiliki pekerjaan.

Kelompok belum/tidak bekerja berjumlah **34.990.544** jiwa (**67,02%**) dari total penduduk. Kelompok ini mencakup kategori belum/tidak bekerja sebanyak **12.141.057** jiwa (**23,25%**), pelajar/mahasiswa sebanyak **9.760.326** jiwa (**18,69%**), pensiunan

sebanyak **281.291** jiwa (**0,54%**), serta lainnya sebanyak **12.807.870** jiwa (**24,53%**). Kategori “lainnya” didominasi oleh perempuan, yaitu **12.797.638** jiwa (**24,51%**), sedangkan laki-laki hanya **10.232** jiwa (**0,02%**). Kelompok ini umumnya merupakan jenis pekerjaan yang tidak tersedia atau tidak terakomodasi secara rinci dalam aplikasi SIAK, dan khusus untuk perempuan, kategori ini banyak mencakup ibu rumah tangga.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, kelompok belum/tidak bekerja terdiri atas **11.959.469** laki-laki (**22,91%**) dan **23.031.075** perempuan (**44,11%**). Dominasi perempuan pada kelompok ini menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang berada di luar pekerjaan formal atau lebih berperan dalam aktivitas domestik.

Sementara itu, kelompok penduduk yang memiliki pekerjaan berjumlah **17.220.476** jiwa (**32,98%**). Kelompok ini didominasi oleh laki-laki sebanyak **14.481.020** jiwa (**27,74%**), sedangkan perempuan sebanyak **2.739.456** jiwa (**5,25%**). Jenis pekerjaan yang paling banyak ditekuni adalah wiraswasta, yaitu sebanyak **14.448.105** jiwa (**27,67%**), yang sebagian besar terdiri atas **12.472.915** laki-laki (**23,89%**) dan **1.975.190** perempuan (**3,78%**). Selain itu, terdapat pertanian/peternakan sebanyak **1.523.056** jiwa (**2,92%**), aparatur/pejabat negara sebanyak **716.989** jiwa (**1,37%**), tenaga pengajar sebanyak **335.365** jiwa (**0,64%**), tenaga kesehatan sebanyak **107.767** jiwa (**0,21%**), nelayan sebanyak **72.366** jiwa (**0,14%**), dan agama dan kepercayaan sebanyak **16.828** jiwa (**0,03%**).

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Jawa Barat masih berada dalam kategori belum/tidak bekerja, dengan proporsi terbesar berasal dari kategori lainnya, belum/tidak bekerja, dan pelajar/mahasiswa. Sementara itu, pada kelompok penduduk yang bekerja, lapangan pekerjaan yang paling dominan adalah wiraswasta. Data ini juga memperlihatkan adanya perbedaan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi kerja, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

4.2.4. Sosial

Dalam aspek sosial, terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menilai kesejahteraan masyarakat, di antaranya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, proporsi penduduk penyandang cacat, serta proporsi penduduk miskin penerima Askeskin. Indikator-indikator ini penting untuk memahami kondisi sosial-ekonomi penduduk serta merancang kebijakan yang tepat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.2.4.1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah individu atau keluarga yang mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan dalam menjalankan fungsi sosialnya. Hambatan tersebut dapat disebabkan oleh kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan sosial, maupun perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sehingga mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup secara layak, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.

Seiring perkembangan kebijakan kesejahteraan sosial, istilah PMKS mengalami perubahan menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Perubahan istilah ini dilakukan untuk mengurangi stigma negatif terhadap masyarakat rentan serta mendorong pendekatan yang lebih inklusif, manusiawi, dan berorientasi pada pelayanan. Dengan istilah PPKS, penanganan kesejahteraan sosial tidak hanya dipandang sebagai upaya menyelesaikan masalah sosial, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan, pemberdayaan, dan pemenuhan hak dasar masyarakat.

Kementerian Sosial menangani berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang dialami oleh seluruh lapisan masyarakat rentan. Masyarakat yang membutuhkan perhatian dan layanan sosial tersebut dikategorikan ke dalam 12 PAS (Pemerlu Atensi Sosial), yang meliputi fakir miskin, masyarakat berpendapatan rendah, anak rentan, lansia terlantar, penyandang disabilitas, korban bencana, perempuan rentan, korban kekerasan, korban NAPZA, korban HIV/AIDS, warga binaan, serta kelompok afirmatif. Melalui pengelompokan tersebut, pelaksanaan program kesejahteraan sosial diharapkan dapat lebih terarah, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat rentan secara lebih efektif.

Tabel 4-64 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

NO	KATEGORI PPKS	JUMLAH	%
1	FAKIR MISKIN	2.474.593	38,92
2	ANAK RENTAN	57.226	0,90
3	DIFABEL	22634	0,36
4	LANSIA TERLANTAR	202762	3,19
5	MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH	3.319.160	52,20
6	KORBAN BENCANA	25023	0,39
7	KELOMPOK AFIRMATIF	7	0,00
8	WARGA BINAAN	2.493	0,04
9	KORBAN KEKERASAN	135	0,00
10	KORBAN NAPZA	530	0,01

NO	KATEGORI PPKS	JUMLAH	%
11	KORBAN HIV/AIDS	1.388	0,02
12	PEREMPUAN RENTAN	252815	3,98
TOTAL		6.358.766	100,00

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), jumlah PPKS tercatat sebanyak **6.358.766** orang. Komposisi terbesar berasal dari kategori masyarakat berpendapatan rendah sebanyak **3.319.160** orang atau sekitar **52,20%** dari total PPKS. Selanjutnya, kategori fakir miskin tercatat sebanyak **2.474.593** orang atau sekitar **38,92%**.

Selain dua kategori utama tersebut, terdapat beberapa kelompok PPKS lainnya yang juga memerlukan perhatian, antara lain perempuan rentan sebanyak **252.815** orang, lansia terlantar sebanyak **202.762** orang, anak rentan sebanyak **57.226** orang, korban bencana sebanyak **25.023** orang, dan difabel sebanyak **22.634** orang. Sementara itu, kategori dengan jumlah relatif kecil meliputi warga binaan, korban HIV/AIDS, korban NAPZA, korban kekerasan, dan kelompok afirmatif.

Data PPKS tersebut bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan masih bersifat sementara karena masih terdapat beberapa dinas sosial kabupaten/kota yang belum menyampaikan atau melengkapi data. Oleh karena itu, angka PPKS yang disajikan masih dapat mengalami perubahan seiring dengan proses pemutakhiran dan konsolidasi data yang dilakukan.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa permasalahan kesejahteraan sosial masih didominasi oleh kelompok masyarakat yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, khususnya masyarakat berpendapatan rendah dan fakir miskin. Oleh karena itu, upaya penanganan PPKS perlu diarahkan pada penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses layanan dasar, serta pendampingan bagi kelompok rentan agar kesejahteraan sosial masyarakat dapat terus meningkat. Data ini menunjukkan bahwa permasalahan kesejahteraan sosial di Jawa Barat sangat kompleks dan melibatkan berbagai kelompok rentan. Oleh karena itu, beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan ini antara lain:

1. Meningkatkan intervensi sosial dan ekonomi bagi kelompok miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan akses terhadap pendidikan serta pekerjaan yang layak.
2. Memperkuat layanan perlindungan sosial bagi anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, serta korban kekerasan dan eksploitasi.

3. Meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, orang dengan HIV/AIDS, dan korban perdagangan manusia.
4. Penguatan kebijakan mitigasi bencana dan pemulihan sosial untuk menangani korban bencana alam dan sosial.
5. Mendorong kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menyediakan layanan kesejahteraan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis komunitas, diharapkan kesejahteraan sosial di Jawa Barat dapat terus meningkat dan lebih banyak individu yang keluar dari kondisi rentan menuju kehidupan yang lebih baik.

4.2.4.2. Proporsi Penduduk Penyandang Cacat

Penduduk penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dapat menghambat aktivitas sehari-hari dan partisipasi dalam kehidupan sosial. Tingginya proporsi penduduk penyandang cacat menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif, seperti penyediaan aksesibilitas yang lebih baik dalam fasilitas umum, pendidikan inklusif, serta peluang kerja yang sesuai dengan kondisi mereka. Selain itu, peningkatan layanan kesehatan rehabilitatif dan dukungan sosial sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Tabel 4-65 Proporsi Penduduk Penyandang Cacat

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	PENDUDUK DISABILITAS	ANGKA PENYANDANG CACAT
3201	BOGOR	5.948.925	4.561	0,77
3202	SUKABUMI	2.928.533	2.460	0,84
3203	CIANJUR	2.714.760	2.797	1,03
3204	BANDUNG	3.904.670	4.551	1,17
3205	GARUT	2.921.690	3.896	1,33
3206	TASIKMALAYA	2.026.081	2.044	1,01
3207	CIAMIS	1.320.274	8.685	6,58
3208	KUNINGAN	1.254.206	2.872	2,29
3209	CIREBON	2.523.697	1.863	0,74
3210	MAJALENGKA	1.379.482	1.718	1,25
3211	SUMEDANG	1.241.795	1.795	1,45
3212	INDRAMAYU	2.011.215	2.038	1,01
3213	SUBANG	1.710.199	1.308	0,76

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	PENDUDUK DISABILITAS	ANGKA PENYANDANG CACAT
3214	PURWAKARTA	1.083.009	1.130	1,04
3215	KARAWANG	2.666.915	2.806	1,05
3216	BEKASI	3.469.242	2.359	0,68
3217	BANDUNG BARAT	1.949.533	1.668	0,86
3218	PANGANDARAN	450.930	3.646	8,09
3271	KOTA BOGOR	1.156.543	1.203	1,04
3272	KOTA SUKABUMI	377.987	474	1,25
3273	KOTA BANDUNG	2.605.916	9.235	3,54
3274	KOTA CIREBON	359.150	844	2,35
3275	KOTA BEKASI	2.595.927	8.069	3,11
3276	KOTA DEPOK	2.038.354	2.611	1,28
3277	KOTA CIMAHI	584.820	1.603	2,74
3278	KOTA TASIKMALAYA	776.743	1.832	2,36
3279	KOTA BANJAR	210.424	729	3,46
TOTAL		52.211.020	78.797	1,51

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel, dari total **52.211.020** jiwa penduduk Provinsi Jawa Barat, tercatat sebanyak **78.797** jiwa merupakan penduduk disabilitas. Dengan demikian, angka penyandang cacat di Jawa Barat tercatat sebesar **1,51**. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum terdapat sekitar **1,51** penyandang disabilitas pada setiap 1.000 penduduk. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, angka penyandang cacat tertinggi terdapat di Kabupaten Pangandaran sebesar **8,09**, diikuti Kabupaten Ciamis sebesar **6,58**, Kota Bandung sebesar **3,54**, Kota Banjar sebesar **3,46**, dan Kota Bekasi sebesar **3,11**. Selain itu, Kota Cimahi juga tergolong cukup tinggi dengan angka **2,74**, disusul Kota Tasikmalaya sebesar **2,36**, Kota Cirebon sebesar **2,35**, dan Kabupaten Kuningan sebesar **2,29**. Kondisi ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk disabilitas di wilayah-wilayah tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Barat.

Sebaliknya, angka penyandang cacat terendah tercatat di Kabupaten Bekasi sebesar **0,68**, diikuti Kabupaten Cirebon sebesar **0,74**, Kabupaten Subang sebesar **0,76**, Kabupaten Bogor sebesar **0,77**, dan Kabupaten Sukabumi sebesar **0,84**. Sementara itu, Kabupaten Bandung Barat juga relatif rendah dengan angka **0,86**. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk disabilitas di wilayah-wilayah tersebut lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Secara umum, data ini menunjukkan adanya variasi angka penyandang cacat antarwilayah di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu,

data tersebut penting sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan sosial, kesehatan, dan pelayanan publik yang lebih inklusif, terutama untuk meningkatkan aksesibilitas, rehabilitasi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan bagi penduduk disabilitas di daerah dengan angka yang relatif tinggi.

4.2.4.3. Proporsi Penduduk Miskin Penerima Askeskin

Salah satu indikator utama dalam keberhasilan pengentasan kemiskinan adalah terpenuhinya akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Akses ini menjadi krusial karena kesehatan yang baik merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas hidup serta produktivitas masyarakat. Penduduk miskin sering kali menghadapi kendala dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, baik karena keterbatasan biaya, jarak fasilitas kesehatan yang jauh, maupun keterbatasan informasi mengenai layanan yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa kelompok rentan ini tetap dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas melalui berbagai skema perlindungan sosial, salah satunya dengan Asuransi Kesehatan atau Jaminan Kesehatan bagi penduduk miskin.

Pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin umumnya dipenuhi melalui berbagai program asuransi kesehatan yang disediakan oleh pemerintah, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu agar mereka tetap dapat memperoleh pelayanan medis tanpa harus terbebani oleh biaya yang tinggi. Untuk mengukur efektivitas program ini, diperlukan data yang akurat mengenai jumlah dan proporsi penduduk miskin yang telah menerima manfaat dari asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan. Informasi ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi serta perbaikan kebijakan agar cakupan layanan kesehatan bagi penduduk miskin dapat terus meningkat, sehingga tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan dapat tercapai.

BPJS Kesehatan memiliki program Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu agar tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak. Program ini terbagi menjadi dua sumber pendanaan utama, yaitu PBI APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan PBI APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). PBI APBN dibiayai oleh pemerintah pusat dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Peserta PBI APBN secara otomatis didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan kelas III dan mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS, baik di tingkat puskesmas, klinik, maupun rumah sakit.

Sementara itu, PBI APBD merupakan skema pembiayaan yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Program ini ditujukan bagi warga yang tidak tercover dalam PBI APBN tetapi masih tergolong tidak mampu. Setiap daerah memiliki kewenangan dalam menentukan kuota peserta dan mekanisme pendataan sesuai dengan kondisi serta ketersediaan anggaran daerah. Keberadaan PBI APBN dan APBD sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan, dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa terbebani biaya. Namun, tantangan dalam pelaksanaannya masih ada, seperti ketidaktepatan sasaran, keterbatasan anggaran daerah, serta masalah administrasi yang menghambat akses peserta terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi terkait untuk meningkatkan akurasi data penerima, memperluas cakupan layanan, serta memastikan keberlanjutan program agar semakin banyak masyarakat yang memperoleh manfaat dari jaminan kesehatan ini.

Tabel 4-66 Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Provinsi Jawa Barat

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	PBI APBN		PBI APBD		TOTAL	
		N	%	N	%	N	%
3201	BOGOR	937.582	3,28	1.914.682	6,70	2.852.264	9,98
3202	SUKABUMI	448.854	1,57	1.456.124	5,10	1.904.978	6,67
3203	CIANJUR	402.849	1,41	1.357.093	4,75	1.759.942	6,16
3204	BANDUNG	543.948	1,90	1.433.200	5,02	1.977.148	6,92
3205	GARUT	270.651	0,95	1.563.270	5,47	1.833.921	6,42
3206	TASIKMALAYA	270.702	0,95	984.899	3,45	1.255.601	4,39
3207	CIAMIS	299.067	1,05	558.636	1,96	857.703	3,00
3208	KUNINGAN	68.417	0,24	692.744	2,42	761.161	2,66
3209	CIREBON	391.772	1,37	1.235.764	4,33	1.627.536	5,70
3210	MAJALENGKA	194.809	0,68	679.458	2,38	874.267	3,06
3211	SUMEDANG	170.316	0,60	534.358	1,87	704.674	2,47
3212	INDRAMAYU	395.516	1,38	1.023.882	3,58	1.419.398	4,97
3213	SUBANG	205.975	0,72	778.906	2,73	984.881	3,45
3214	PURWAKARTA	101.360	0,35	426.796	1,49	528.156	1,85
3215	KARAWANG	456.360	1,60	973.076	3,41	1.429.436	5,00
3216	BEKASI	956.500	3,35	707.622	2,48	1.664.122	5,82
3217	BANDUNG BARAT	285.063	1,00	849.095	2,97	1.134.158	3,97
3218	PANGANDARAN	97.732	0,34	266.127	0,93	363.859	1,27
3271	KOTA BOGOR	199.033	0,70	359.107	1,26	558.140	1,95
3272	KOTA SUKABUMI	44.770	0,16	141.983	0,50	186.753	0,65

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	PBI APBN		PBI APBD		TOTAL	
		N	%	N	%	N	%
3273	KOTA BANDUNG	634.112	2,22	522.261	1,83	1.156.373	4,05
3274	KOTA CIREBON	81.608	0,29	136.250	0,48	217.858	0,76
3275	KOTA BEKASI	431.618	1,51	485.393	1,70	917.011	3,21
3276	KOTA DEPOK	398.310	1,39	274.908	0,96	673.218	2,36
3277	KOTA CIMAHI	100.473	0,35	146.849	0,51	247.322	0,87
3278	KOTA TASIKMALAYA	103.002	0,36	440.912	1,54	543.914	1,90
3279	KOTA BANJAR	50.531	0,18	85.025	0,30	135.556	0,47
TOTAL		8.540.930	29,90	20.028.420	70,10	28.569.350	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data pada tabel, jumlah penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan di Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak **29.589.166** jiwa. Jumlah tersebut terdiri atas **19.240.076** jiwa (**65,02%**) peserta PBI JK dan **10.349.090** jiwa (**34,98%**) peserta PBPU Pemda. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas penerima bantuan BPJS Kesehatan di Jawa Barat masih berasal dari kelompok PBI JK, yaitu peserta jaminan kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat, sedangkan sisanya merupakan peserta PBPU Pemda yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, jumlah penerima bantuan BPJS Kesehatan terbesar terdapat di Kabupaten Bogor sebanyak **3.268.667** jiwa (**11,05%**), diikuti Kabupaten Garut sebanyak **2.112.935** jiwa (**7,14%**), Kabupaten Cianjur sebanyak **2.024.001** jiwa (**6,84%**), Kabupaten Bandung sebanyak **1.789.917** jiwa (**6,05%**), dan Kabupaten Sukabumi sebanyak **1.755.994** jiwa (**5,93%**). Besarnya jumlah penerima bantuan di wilayah-wilayah tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan dukungan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Sementara itu, daerah dengan jumlah penerima bantuan BPJS Kesehatan paling sedikit adalah Kota Banjar sebanyak **136.594** jiwa (**0,46%**), Kota Sukabumi sebanyak **196.340** jiwa (**0,66%**), Kota Cirebon sebanyak **215.108** jiwa (**0,73%**), dan Kota Cimahi sebanyak **246.038** jiwa (**0,83%**). Rendahnya jumlah penerima di daerah tersebut dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Dilihat dari komposisinya, pada hampir seluruh kabupaten/kota, jumlah peserta PBI JK lebih besar dibandingkan PBPU Pemda. Namun demikian, terdapat beberapa daerah yang menunjukkan porsi PBPU Pemda cukup besar, seperti Kota Bandung, Bekasi, Karawang, Cianjur, dan Kota Depok. Hal ini menunjukkan adanya peran pemerintah daerah dalam memperluas cakupan perlindungan kesehatan bagi penduduk yang belum tercakup melalui skema PBI JK pusat.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa cakupan penerima bantuan BPJS Kesehatan di Provinsi Jawa Barat sangat besar dan tersebar di seluruh kabupaten/kota. Informasi ini penting sebagai dasar untuk evaluasi kebijakan jaminan kesehatan, peningkatan akurasi sasaran penerima bantuan, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

4.3. Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk merupakan dinamika penting dalam studi kependudukan, karena mencerminkan pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya, baik secara sementara maupun permanen. Mobilitas ini memberikan gambaran tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah, daya tarik wilayah tertentu, serta potensi tekanan atau peluang sosial ekonomi di daerah tujuan maupun asal.

4.3.1. Mobilitas Permanen

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah administratif lainnya, yang mencerminkan perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan dalam penyediaan fasilitas pembangunan antar daerah. Mobilitas penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung pembangunan manusia yang menyeluruh, karena menggambarkan dinamika sosial, ekonomi, dan geografis yang terjadi dalam suatu wilayah. Analisis mengenai mobilitas penduduk, baik yang bersifat permanen maupun nonpermanen, menjadi lebih signifikan ketika dilakukan pada unit administrasi yang lebih kecil dari provinsi, seperti kabupaten/kota, kecamatan, atau bahkan desa/kelurahan. Hal ini karena mobilitas penduduk lebih mudah diamati dan dianalisis dampaknya secara langsung di tingkat lokal, terutama terkait pelayanan publik, ketersediaan infrastruktur, dan kebutuhan sosial-ekonomi lainnya. Untuk memahami arus migrasi secara lebih rinci, digunakan beberapa indikator penting, yaitu:

1. Migrasi Masuk (Mi) – jumlah penduduk yang datang dan menetap di suatu wilayah dari wilayah lain.
2. Migrasi Keluar (Mo) – jumlah penduduk yang meninggalkan wilayah asal untuk menetap di wilayah lain.
3. Migrasi Neto (Mn) – selisih antara jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar, yang menunjukkan apakah suatu wilayah mengalami surplus atau defisit migrasi.
4. Migrasi Bruto (Mb) – jumlah total dari migrasi masuk dan keluar tanpa memperhatikan arah pergerakan, yang mengindikasikan tingkat mobilitas keseluruhan suatu wilayah.

5. Persentase Migrasi dari Perdesaan ke Perkotaan – menggambarkan pergerakan penduduk dari daerah dengan karakteristik pedesaan ke wilayah perkotaan, sering kali sebagai respons terhadap daya tarik ekonomi dan akses terhadap fasilitas yang lebih baik.

Ukuran-ukuran tersebut bermanfaat dalam menilai apakah suatu kabupaten/kota merupakan daerah tujuan migrasi (dengan daya tarik tertentu) atau justru menjadi daerah asal migrasi karena adanya tekanan atau keterbatasan. Selain itu, analisis migrasi biasanya dilengkapi dengan pembagian menurut kelompok umur dan jenis kelamin untuk memahami lebih jauh profil dan kebutuhan penduduk yang bermigrasi.

4.3.1.1. Migrasi Masuk

Migrasi masuk adalah jumlah penduduk yang berpindah ke suatu wilayah dari wilayah lain dengan tujuan menetap. Tingginya angka migrasi masuk biasanya mengindikasikan daya tarik suatu wilayah, baik karena faktor ekonomi, pendidikan, maupun sosial. Daerah dengan fasilitas publik yang baik, lapangan kerja yang tersedia, serta kualitas hidup yang lebih tinggi cenderung menjadi tujuan migrasi masuk.

Tabel 4-67 Migrasi Masuk

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	MIGRASI MASUK		ANGKA MIGRASI MASUK		
			KAB/ KOTA	PROVINSI	KAB/ KOTA	PROVINSI	TOTAL
3201	BOGOR	5.875.830	30.881	50.704	5,26	8,63	13,88
3202	SUKABUMI	2.899.139	13.155	7.540	4,54	2,60	7,14
3203	CIANJUR	2.674.818	13.818	6.409	5,17	2,40	7,56
3204	BANDUNG	3.873.653	30.329	8.684	7,83	2,24	10,07
3205	GARUT	2.883.791	14.686	5.054	5,09	1,75	6,85
3206	TASIKMALAYA	2.012.288	11.901	4.080	5,91	2,03	7,94
3207	CIAMIS	1.309.491	8.315	3.443	6,35	2,63	8,98
3208	KUNINGAN	1.247.821	4.906	4.341	3,93	3,48	7,41
3209	CIREBON	2.509.723	9.691	6.796	3,86	2,71	6,57
3210	MAJALENGKA	1.374.317	6.475	2.989	4,71	2,17	6,89
3211	SUMEDANG	1.233.691	9.449	2.930	7,66	2,37	10,03
3212	INDRAMAYU	1.998.472	7.084	6.943	3,54	3,47	7,02
3213	SUBANG	1.695.197	9.438	5.770	5,57	3,40	8,97
3214	PURWAKARTA	1.073.459	7.241	3.379	6,75	3,15	9,89

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	MIGRASI MASUK		ANGKA MIGRASI MASUK		
			KAB/ KOTA	PROVINSI	KAB/ KOTA	PROVINSI	TOTAL
3215	KARAWANG	2.639.594	17.695	16.047	6,70	6,08	12,78
3216	BEKASI	3.434.768	28.274	43.652	8,23	12,71	20,94
3217	BANDUNG BARAT	1.930.450	18.407	5.504	9,54	2,85	12,39
3218	PANGANDARAN	448.980	2.434	1.392	5,42	3,10	8,52
3271	KOTA BOGOR	1.150.721	10.010	6.703	8,70	5,83	14,52
3272	KOTA SUKABUMI	373.189	11.374	1.267	30,48	3,40	33,87
3273	KOTA BANDUNG	2.599.743	24.083	9.229	9,26	3,55	12,81
3274	KOTA CIREBON	358.265	4.750	1.537	13,26	4,29	17,55
3275	KOTA BEKASI	2.585.499	15.455	32.489	5,98	12,57	18,54
3276	KOTA DEPOK	2.024.664	10.429	31.917	5,15	15,76	20,92
3277	KOTA CIMAHI	584.222	8.931	2.561	15,29	4,38	19,67
3278	KOTA TASIKMALAYA	773.692	8.439	1.936	10,91	2,50	13,41
3279	KOTA BANJAR	209.925	1.861	974	8,87	4,64	13,50
TOTAL		51.775.402	339.511	274.270	6,56	5,30	11,85

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan tabel di atas, Provinsi Jawa Barat mencatat total migrasi masuk sebanyak **613.781** jiwa, yang terdiri dari **339.511** jiwa migrasi masuk antar kabupaten/kota dan **274.270** jiwa migrasi masuk dari luar provinsi. Dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 2025 sebesar **51.775.402** jiwa, maka angka migrasi masuk total di Jawa Barat tercatat sebesar **11,85** per 1.000 penduduk, yang berarti bahwa pada setiap 1.000 penduduk terdapat sekitar **12** penduduk yang melakukan migrasi masuk. Kondisi ini menunjukkan bahwa mobilitas penduduk menuju wilayah-wilayah di Jawa Barat masih cukup tinggi.

Beberapa kabupaten/kota menunjukkan angka migrasi masuk total yang relatif tinggi. Kota Sukabumi menempati posisi tertinggi dengan angka **33,87** per 1.000 penduduk, diikuti Kabupaten Bekasi sebesar **20,94**, Kota Depok sebesar **20,92**, Kota Cimahi sebesar **19,67**, dan Kota Bekasi sebesar **18,54**. Selain itu, Kota Cirebon juga memiliki angka cukup tinggi yaitu **17,55**. Tingginya angka migrasi masuk di wilayah-wilayah tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki daya tarik yang kuat, baik karena faktor ekonomi, pendidikan, perdagangan, maupun kedekatannya dengan pusat perkotaan.

Sebaliknya, beberapa daerah memiliki angka migrasi masuk total yang lebih rendah. Angka terendah tercatat di Kabupaten Cirebon sebesar **6,57**, diikuti Kabupaten Garut sebesar **6,85**, Kabupaten Majalengka sebesar **6,89**, Kabupaten Indramayu sebesar **7,02**, dan Kabupaten Sukabumi sebesar **7,14**. Rendahnya angka migrasi masuk pada wilayah-wilayah ini dapat menunjukkan bahwa daya tarik migrasi ke daerah tersebut relatif lebih kecil dibandingkan daerah lain di Jawa Barat.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa pola migrasi masuk di Jawa Barat cenderung mengarah ke wilayah perkotaan, kota penyangga, dan daerah dengan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama terkait penyediaan perumahan, infrastruktur, lapangan kerja, pendidikan, dan pelayanan publik agar pertumbuhan penduduk akibat migrasi masuk dapat dikelola dengan baik.

4.3.1.2. Migrasi Keluar

Migrasi keluar adalah jumlah penduduk yang meninggalkan wilayah asalnya untuk menetap di wilayah lain. Fenomena ini sering terjadi karena keterbatasan lapangan pekerjaan, fasilitas pendidikan yang terbatas, atau faktor lingkungan dan sosial yang kurang mendukung. Angka migrasi keluar yang tinggi dapat menjadi sinyal perlunya perbaikan kualitas hidup di daerah asal.

Tabel 4-68 Migrasi Keluar

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	MIGRASI KELUAR		ANGKA MIGRASI KELUAR		
			KAB/ KOTA	PROVINSI	KAB/ KOTA	PROVINSI	TOTAL
3201	BOGOR	5.875.830	24.269	25.066	4,13	4,27	8,40
3202	SUKABUMI	2.899.139	22.319	9.213	7,70	3,18	10,88
3203	CIANJUR	2.674.818	16.184	7.117	6,05	2,66	8,71
3204	BANDUNG	3.873.653	28.511	8.944	7,36	2,31	9,67
3205	GARUT	2.883.791	17.319	5.938	6,01	2,06	8,06
3206	TASIKMALAYA	2.012.288	15.888	5.321	7,90	2,64	10,54
3207	CIAMIS	1.309.491	10.196	3.796	7,79	2,90	10,69
3208	KUNINGAN	1.247.821	6.699	4.299	5,37	3,45	8,81
3209	CIREBON	2.509.723	12.803	7.505	5,10	2,99	8,09
3210	MAJALENGKA	1.374.317	7.166	2.820	5,21	2,05	7,27
3211	SUMEDANG	1.233.691	9.284	2.703	7,53	2,19	9,72
3212	INDRAMAYU	1.998.472	7.547	6.665	3,78	3,34	7,11

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	MIGRASI KELUAR		ANGKA MIGRASI KELUAR		
			KAB/ KOTA	PROVINSI	KAB/ KOTA	PROVINSI	TOTAL
3213	SUBANG	1.695.197	10.746	5.186	6,34	3,06	9,40
3214	PURWAKARTA	1.073.459	6.775	2.494	6,31	2,32	8,63
3215	KARAWANG	2.639.594	13.047	9.380	4,94	3,55	8,50
3216	BEKASI	3.434.768	18.837	19.692	5,48	5,73	11,22
3217	BANDUNG BARAT	1.930.450	16.271	4.394	8,43	2,28	10,70
3218	PANGANDARAN	448.980	2.858	1.429	6,37	3,18	9,55
3271	KOTA BOGOR	1.150.721	10.984	5.644	9,55	4,90	14,45
3272	KOTA SUKABUMI	373.189	6.254	1.508	16,76	4,04	20,80
3273	KOTA BANDUNG	2.599.743	32.010	9.295	12,31	3,58	15,89
3274	KOTA CIREBON	358.265	4.500	1.665	12,56	4,65	17,21
3275	KOTA BEKASI	2.585.499	23.422	25.087	9,06	9,70	18,76
3276	KOTA DEPOK	2.024.664	12.347	16.960	6,10	8,38	14,47
3277	KOTA CIMAHI	584.222	9.974	2.621	17,07	4,49	21,56
3278	KOTA TASIKMALAYA	773.692	7.524	1.906	9,72	2,46	12,19
3279	KOTA BANJAR	209.925	2.095	1003	9,98	4,78	14,76
TOTAL		51.775.402	339.511	274.270	6,56	5,30	11,85

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan tabel di atas, Provinsi Jawa Barat mencatat total migrasi keluar sebanyak **613.781** jiwa, yang terdiri dari **339.511** jiwa migrasi keluar antar kabupaten/kota dan **274.270** jiwa migrasi keluar ke luar provinsi. Dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 2025 sebesar **51.775.402** jiwa, maka angka migrasi keluar total di Jawa Barat tercatat sebesar **11,85** per 1.000 penduduk. Artinya, pada setiap 1.000 penduduk terdapat sekitar **12** penduduk yang melakukan migrasi keluar.

Beberapa kabupaten/kota menunjukkan angka migrasi keluar total yang tinggi. Kota Cimahi menempati posisi tertinggi dengan angka **21,56** per 1.000 penduduk, diikuti Kota Sukabumi sebesar **20,80**, Kota Bekasi sebesar **18,76**, Kota Cirebon sebesar **17,21**, dan Kota Bandung sebesar **15,89**. Selain itu, Kota Banjar dan Kota Depok juga memiliki angka migrasi keluar yang cukup tinggi, masing-masing sebesar **14,76** dan **14,47**. Tingginya angka migrasi keluar di wilayah-wilayah tersebut menunjukkan besarnya mobilitas penduduk dari daerah perkotaan.

Sebaliknya, beberapa daerah memiliki angka migrasi keluar total yang lebih rendah. Angka terendah tercatat di Kabupaten Indramayu sebesar **7,11**, diikuti

Kabupaten Majalengka sebesar **7,27**, Kabupaten Garut sebesar **8,06**, Kabupaten Cirebon sebesar **8,09**, dan Kabupaten Bogor sebesar **8,40**. Rendahnya angka migrasi keluar pada wilayah-wilayah ini menunjukkan bahwa perpindahan penduduk keluar dari daerah tersebut relatif lebih kecil dibandingkan daerah lainnya.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa migrasi keluar di Jawa Barat cenderung lebih tinggi pada wilayah perkotaan dibandingkan wilayah kabupaten. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perpindahan tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, maupun alasan sosial ekonomi lainnya. Oleh karena itu, data migrasi keluar ini penting sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan wilayah, terutama untuk memahami dinamika perpindahan penduduk dan menyiapkan kebijakan yang lebih tepat dalam bidang permukiman, ketenagakerjaan, transportasi, dan pelayanan publik.

4.3.1.3. Migrasi Neto

Angka Migrasi Neto (*nett migration/Mn*) merupakan selisih antara jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Apabila jumlah migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar, maka disebut migrasi neto positif, yang berarti wilayah tersebut mengalami pertambahan penduduk akibat perpindahan masuk. Sebaliknya, jika jumlah migrasi keluar lebih besar dibandingkan migrasi masuk, maka disebut migrasi neto negatif, yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut mengalami pengurangan jumlah penduduk karena lebih banyak orang yang pindah keluar daripada yang datang. Angka migrasi neto ini penting untuk memahami dinamika kependudukan suatu daerah, terutama dalam perencanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik.

Tabel 4-69 Migrasi Neto

KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	MIGRASI MASUK	MIGRASI KELUAR	ANGKA MIGRASI NETO
3201	BOGOR	5.875.830	81.585	49.335	5,49
3202	SUKABUMI	2.899.139	20.695	31.532	- 3,74
3203	CIANJUR	2.674.818	20.227	23.301	- 1,15
3204	BANDUNG	3.873.653	39.013	37.455	0,40
3205	GARUT	2.883.791	19.740	23.257	- 1,22
3206	TASIKMALAYA	2.012.288	15.981	21.209	- 2,60
3207	CIAMIS	1.309.491	11.758	13.992	- 1,71

KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	MIGRASI MASUK	MIGRASI KELUAR	ANGKA MIGRASI NETO
3208	KUNINGAN	1.247.821	9.247	10.998	- 1,40
3209	CIREBON	2.509.723	16.487	20.308	- 1,52
3210	MAJALENGKA	1.374.317	9.464	9.986	- 0,38
3211	SUMEDANG	1.233.691	12.379	11.987	0,32
3212	INDRAMAYU	1.998.472	14.027	14.212	- 0,09
3213	SUBANG	1.695.197	15.208	15.932	- 0,43
3214	PURWAKARTA	1.073.459	10.620	9.269	1,26
3215	KARAWANG	2.639.594	33.742	22.427	4,29
3216	BEKASI	3.434.768	71.926	38.529	9,72
3217	BANDUNG BARAT	1.930.450	23.911	20.665	1,68
3218	PANGANDARAN	448.980	3.826	4.287	- 1,03
3271	KOTA BOGOR	1.150.721	16.713	16.628	0,07
3272	KOTA SUKABUMI	373.189	12.641	7.762	13,07
3273	KOTA BANDUNG	2.599.743	33.312	41.305	- 3,07
3274	KOTA CIREBON	358.265	6.287	6.165	0,34
3275	KOTA BEKASI	2.585.499	47.944	48.509	- 0,22
3276	KOTA DEPOK	2.024.664	42.346	29.307	6,44
3277	KOTA CIMAHI	584.222	11.492	12.595	- 1,89
3278	KOTA TASIKMALAYA	773.692	10.375	9.430	1,22
3279	KOTA BANJAR	209.925	2.835	3.098	- 1,25
TOTAL		51.775.402	613.781	553.480	1,16

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah penduduk pertengahan tahun Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak **51.775.402** jiwa. Pada periode yang sama, jumlah migrasi masuk mencapai **613.781** jiwa, sedangkan migrasi keluar sebanyak **553.480** jiwa, sehingga diperoleh angka migrasi neto Jawa Barat sebesar **1,16**. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum Jawa Barat mengalami surplus migrasi, artinya jumlah penduduk yang masuk lebih besar dibandingkan penduduk yang keluar.

Daerah dengan angka migrasi neto tertinggi adalah Kota Sukabumi sebesar **13,07**, diikuti Kabupaten Bekasi sebesar **9,72**, Kota Depok sebesar **6,44**, Kabupaten Bogor sebesar **5,49**, dan Kabupaten Karawang sebesar **4,29**. Selain itu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Tasikmalaya

juga mencatat migrasi neto positif. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut lebih banyak menerima penduduk dibandingkan yang keluar, sehingga menjadi daerah tujuan perpindahan penduduk.

Sebaliknya, beberapa kabupaten/kota mengalami migrasi neto negatif, yang berarti jumlah penduduk keluar lebih besar daripada yang masuk. Nilai terendah tercatat di Kabupaten Sukabumi sebesar **-3,74**, diikuti Kota Bandung sebesar **-3,07**, Kabupaten Tasikmalaya sebesar **-2,60**, Kota Cimahi sebesar **-1,89**, dan Kabupaten Ciamis sebesar **-1,71**. Selain itu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kota Banjar, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, dan Pangandaran juga menunjukkan migrasi neto negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah-wilayah tersebut cenderung lebih banyak melepas penduduk ke daerah lain.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa arus migrasi di Jawa Barat cenderung terkonsentrasi pada wilayah perkotaan dan kawasan penyangga ekonomi, seperti Bekasi, Depok, Bogor, Karawang, dan Kota Sukabumi, yang memiliki daya tarik lebih besar bagi penduduk. Sementara itu, beberapa wilayah lain cenderung menjadi daerah asal migrasi. Informasi ini penting sebagai dasar perencanaan pembangunan, terutama dalam penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, perumahan, dan kesempatan kerja sesuai dengan dinamika perpindahan penduduk antarwilayah.

4.3.1.4. Migrasi Bruto

Angka Migrasi Bruto adalah ukuran statistik yang menggambarkan tingkat mobilitas penduduk suatu wilayah dalam satu periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Angka ini memperhitungkan jumlah seluruh kejadian perpindahan, baik migrasi masuk (*in-migration*) ke suatu daerah maupun migrasi keluar (*out-migration*) dari daerah tersebut. Dengan kata lain, angka migrasi bruto menunjukkan total aktivitas migrasi (masuk dan keluar) yang terjadi di antara dua wilayah (asal dan tujuan) dalam kurun waktu tertentu, relatif terhadap jumlah penduduk wilayah-wilayah tersebut.

Tabel 4-70 Migrasi Bruto

KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	MIGRASI MASUK	MIGRASI KELUAR	ANGKA MIGRASI BRUTO
3201	BOGOR	5.875.830	81.585	49.335	22,28
3202	SUKABUMI	2.899.139	20.695	31.532	18,01
3203	CIANJUR	2.674.818	20.227	23.301	16,27

KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	MIGRASI MASUK	MIGRASI KELUAR	ANGKA MIGRASI BRUTO
3204	BANDUNG	3.873.653	39.013	37.455	19,74
3205	GARUT	2.883.791	19.740	23.257	14,91
3206	TASIKMALAYA	2.012.288	15.981	21.209	18,48
3207	CIAMIS	1.309.491	11.758	13.992	19,66
3208	KUNINGAN	1.247.821	9.247	10.998	16,22
3209	CIREBON	2.509.723	16.487	20.308	14,66
3210	MAJALENGKA	1.374.317	9.464	9.986	14,15
3211	SUMEDANG	1.233.691	12.379	11.987	19,75
3212	INDRAMAYU	1.998.472	14.027	14.212	14,13
3213	SUBANG	1.695.197	15.208	15.932	18,37
3214	PURWAKARTA	1.073.459	10.620	9.269	18,53
3215	KARAWANG	2.639.594	33.742	22.427	21,28
3216	BEKASI	3.434.768	71.926	38.529	32,16
3217	BANDUNG BARAT	1.930.450	23.911	20.665	23,09
3218	PANGANDARAN	448.980	3.826	4.287	18,07
3271	KOTA BOGOR	1.150.721	16.713	16.628	28,97
3272	KOTA SUKABUMI	373.189	12.641	7.762	54,67
3273	KOTA BANDUNG	2.599.743	33.312	41.305	28,70
3274	KOTA CIREBON	358.265	6.287	6.165	34,76
3275	KOTA BEKASI	2.585.499	47.944	48.509	37,31
3276	KOTA DEPOK	2.024.664	42.346	29.307	35,39
3277	KOTA CIMAHI	584.222	11.492	12.595	41,23
3278	KOTA TASIKMALAYA	773.692	10.375	9.430	25,60
3279	KOTA BANJAR	209.925	2.835	3.098	28,26
TOTAL		51.775.402	613.781	553.480	22,54

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah penduduk pertengahan tahun Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak **51.775.402** jiwa. Pada periode yang sama, jumlah migrasi masuk mencapai **613.781** jiwa dan migrasi keluar sebanyak **553.480** jiwa, sehingga angka migrasi bruto Jawa Barat tercatat sebesar **22,54**. Angka ini menunjukkan bahwa dalam setiap 1.000 penduduk terdapat sekitar **23** peristiwa perpindahan penduduk, baik masuk maupun keluar, sehingga menggambarkan tingkat mobilitas penduduk yang cukup tinggi di Jawa Barat.

Daerah dengan angka migrasi bruto tertinggi adalah Kota Sukabumi sebesar **54,67**, diikuti Kota Cimahi sebesar **41,23**, Kota Bekasi sebesar **37,31**, Kota Depok sebesar **35,39**, dan Kota Cirebon sebesar **34,76**. Selain itu, Kabupaten Bekasi juga memiliki angka migrasi bruto yang tinggi, yaitu **32,16**. Tingginya angka migrasi bruto di wilayah-wilayah tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki arus perpindahan penduduk yang sangat dinamis, baik karena faktor pekerjaan, pendidikan, perdagangan, maupun perpindahan tempat tinggal.

Sebaliknya, daerah dengan angka migrasi bruto terendah adalah Kabupaten Indramayu sebesar **14,13**, diikuti Kabupaten Majalengka sebesar **14,15**, Kabupaten Cirebon sebesar **14,66**, Kabupaten Garut sebesar **14,91**, dan Kabupaten Kuningan sebesar **16,22**. Nilai yang lebih rendah ini menunjukkan bahwa mobilitas penduduk di wilayah-wilayah tersebut relatif lebih kecil dibandingkan daerah lain di Jawa Barat.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa mobilitas penduduk di Jawa Barat cenderung lebih tinggi di wilayah perkotaan dan daerah penyangga pusat pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menandakan bahwa kota-kota besar dan wilayah strategis masih menjadi pusat perpindahan penduduk. Oleh karena itu, data migrasi bruto penting digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama untuk mendukung kebijakan di bidang permukiman, transportasi, pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

4.3.2. Mobilitas Non Permanen

Mobilitas non permanen merujuk pada perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu singkat tanpa niat untuk menetap. Contoh dari mobilitas ini antara lain adalah komuter harian yang pergi ke kota untuk bekerja atau sekolah dan kembali ke tempat tinggalnya pada hari yang sama. Mobilitas non permanen biasanya terjadi karena adanya ketimpangan antara wilayah tempat tinggal dengan wilayah tujuan dalam hal lapangan pekerjaan, layanan pendidikan, dan fasilitas kesehatan.

Mobilitas ini memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, seperti kemacetan lalu lintas, tekanan terhadap infrastruktur kota, serta perubahan pola konsumsi dan aktivitas ekonomi. Selain itu, mobilitas non permanen sering kali menjadi indikator awal dari kemungkinan terjadinya migrasi permanen atau urbanisasi.

KODE WIL	KABUPATEN/ KOTA	AKTIF			TIDAK AKTIF		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
3201	BOGOR	28	17	45	48	58	106

KODE WIL	KABUPATEN/ KOTA	AKTIF			TIDAK AKTIF		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
3202	SUKABUMI	-	-	-	1	2	3
3203	CIANJUR	-	-	-	1	1	2
3204	BANDUNG	2.435	1.726	4.161	6.019	2.991	9.010
3205	GARUT	13	15	28	32	32	64
3206	TASIKMALAYA	2	1	3	47	51	98
3207	CIAMIS	1	-	1	2	2	4
3208	KUNINGAN	4	-	4	20	7	27
3209	CIREBON	3	1	4	1	-	1
3210	MAJALENGKA	1	-	1	19	9	28
3211	SUMEDANG	-	1	1	-	-	-
3212	INDRAMAYU	-	-	-	-	-	-
3213	SUBANG	-	-	-	3	-	3
3214	PURWAKARTA	4	1	5	4	2	6
3215	KARAWANG	315	299	614	245	208	453
3216	BEKASI	105	48	153	320	95	415
3217	BANDUNG BARAT	3	2	5	1	1	2
3218	PANGANDARAN	1	-	1	156	85	241
3271	KOTA BOGOR	31	20	51	64	69	133
3272	KOTA SUKABUMI	93	89	182	521	390	911
3273	KOTA BANDUNG	829	750	1.579	5.888	7.021	12.909
3274	KOTA CIREBON	111	93	204	189	243	432
3275	KOTA BEKASI	12	2	14	744	394	1.138
3276	KOTA DEPOK	507	451	958	3.112	2.208	5.320
3277	KOTA CIMAHI	133	114	247	1.456	1.197	2.653
3278	KOTA TASIKMALAYA	1	-	1	1	1	2
3279	KOTA BANJAR	-	-	-	1	1	2
TOTAL		4.632	3.630	8.262	18.895	15.068	33.963

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan tabel jumlah penduduk non-permanen Tahun 2025 di Provinsi Jawa Barat, terlihat bahwa sebaran data antar kabupaten/kota sangat bervariasi. Secara total, penduduk non-permanen berstatus aktif tercatat sebanyak **8.262** jiwa, terdiri atas **4.632** laki-laki dan **3.630** perempuan, sedangkan yang berstatus tidak aktif mencapai **33.963** jiwa, terdiri atas **18.895** laki-laki dan **15.068** perempuan. Wilayah dengan jumlah penduduk non-permanen aktif tertinggi adalah Kabupaten Bandung sebanyak **4.161** jiwa, diikuti Kota Bandung **1.579** jiwa, Kota Depok **958** jiwa, dan Kabupaten Karawang

614 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk non-permanen tidak aktif tertinggi tercatat di Kota Bandung sebanyak **12.909** jiwa, Kabupaten Bandung **9.010** jiwa, Kota Depok **5.320** jiwa, dan Kota Cimahi **2.653** jiwa.

Di sisi lain, masih terdapat sejumlah kabupaten/kota dengan angka yang sangat rendah bahkan nihil, baik pada status aktif maupun tidak aktif, seperti Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Ciamis, Sumedang, Indramayu, Subang, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendataan penduduk non-permanen belum merata di seluruh wilayah. Rendahnya angka tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh belum optimalnya pelaksanaan pendataan di daerah, terbatasnya sosialisasi kepada masyarakat dan aparat kewilayahan, serta masih rendahnya kesadaran penduduk non-permanen untuk melaporkan keberadaannya. Selain itu, karakteristik penduduk non-permanen yang memiliki mobilitas tinggi dan cenderung berpindah dalam waktu singkat juga menjadi kendala dalam proses pencatatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, pembinaan, dan pemantauan secara berkelanjutan agar pendataan penduduk non-permanen di kabupaten/kota dapat dilakukan lebih tertib, akurat, dan menyeluruh

4.3.3. Urbanisasi

Urbanisasi adalah proses peningkatan proporsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Fenomena ini merupakan bagian dari dinamika kependudukan yang umumnya terjadi seiring dengan perkembangan ekonomi, industrialisasi, dan modernisasi suatu negara. Urbanisasi juga bisa terjadi secara alami karena pertumbuhan penduduk di kota, maupun karena adanya arus migrasi dari desa ke kota.

Perpindahan penduduk ke kota sering didorong oleh harapan terhadap kualitas hidup yang lebih baik, termasuk peluang kerja, pendidikan, dan fasilitas layanan umum. Namun, urbanisasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan tantangan serius seperti munculnya permukiman kumuh, peningkatan angka pengangguran, serta tekanan terhadap layanan dasar dan infrastruktur perkotaan.

4.3.3.1. Persentase Penduduk Kota

Persentase penduduk kota menunjukkan seberapa besar proporsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dibandingkan dengan total penduduk. Angka ini mencerminkan perubahan struktur demografis Indonesia yang semakin urban.

Tabel 4-71 Persentase Penduduk Kota

WILAYAH	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	N	%	N	%	N	%
KABUPATEN	21.069.849	40,36	20.435.307	39,14	41.505.156	79,50
KOTA	5.370.640	10,29	5.335.224	10,22	10.705.864	20,50
JUMLAH	26.440.489	50,64	25.770.531	49,36	52.211.020	100,00
PERSENTASI PENDUDUK KOTA	25,49		26,11		25,79	

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan data penduduk menurut wilayah kabupaten dan kota, jumlah penduduk Jawa Barat tercatat sebanyak **52.211.020** jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk yang berada di wilayah kota sebanyak **10.705.864** jiwa atau **20,50%**, sedangkan penduduk yang berada di wilayah kabupaten sebanyak **41.505.156** jiwa atau **79,50%**.

Jika dilihat dari persentase penduduk kota terhadap penduduk kabupaten, diperoleh angka sebesar **25,79%**. Artinya, jumlah penduduk yang tinggal di wilayah kota setara dengan sekitar **25,79%** dari jumlah penduduk yang tinggal di wilayah kabupaten. Dengan kata lain, setiap 100 penduduk di wilayah kabupaten, terdapat sekitar **26** penduduk di wilayah kota.

Berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk kota laki-laki terhadap penduduk kabupaten laki-laki sebesar **25,49%**, sedangkan persentase penduduk kota perempuan terhadap penduduk kabupaten perempuan sebesar **26,11%**. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk perempuan di wilayah kota sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah kabupaten.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa distribusi penduduk Jawa Barat masih didominasi oleh wilayah kabupaten. Namun, keberadaan penduduk di wilayah kota tetap perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan, terutama karena wilayah kota memiliki karakteristik kepadatan penduduk, mobilitas, kebutuhan layanan publik, serta aktivitas sosial ekonomi yang relatif lebih tinggi.

4.3.3.2. Rasio Kota Dan Desa

Rasio kota dan desa menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dengan yang tinggal di wilayah perdesaan. Rasio ini penting untuk memahami distribusi penduduk dan arah kebijakan pembangunan wilayah. Misalnya, jika rasio menunjukkan dominasi penduduk kota, maka perlu adanya perhatian terhadap tata kelola kota, penyediaan hunian, dan transportasi publik.

Tabel 4-72 Rasio Kota dan Desa

WILAYAH	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	N	%	N	%	N	%
KABUPATEN	21.069.849	40,36	20.435.307	39,14	41.505.156	79,50
KOTA	5.370.640	10,29	5.335.224	10,22	10.705.864	20,50
JUMLAH	26.440.489	50,64	25.770.531	49,36	52.211.020	100,00
RASIO KOTA DAN DESA	392,32		383,03		387,69	

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan data penduduk menurut wilayah kabupaten dan kota, jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2025 tercatat sebanyak **52.211.020** jiwa, terdiri atas **41.505.156** jiwa atau **79,50%** yang berada di wilayah kabupaten dan **10.705.864** jiwa atau **20,50%** yang berada di wilayah kota.

Rasio penduduk kabupaten terhadap kota tercatat sebesar **387,69**. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk yang tinggal di wilayah kota, terdapat sekitar **388** penduduk yang tinggal di wilayah kabupaten. Dengan demikian, distribusi penduduk Jawa Barat masih sangat didominasi oleh wilayah kabupaten dibandingkan wilayah kota.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, rasio laki-laki di wilayah kabupaten terhadap kota sebesar **392,32**, sedangkan rasio perempuan sebesar **383,03**. Artinya, untuk setiap 100 penduduk laki-laki di wilayah kota, terdapat sekitar **392** penduduk laki-laki di wilayah kabupaten. Sementara itu, untuk setiap 100 penduduk perempuan di wilayah kota, terdapat sekitar **383** penduduk perempuan di wilayah kabupaten.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Jawa Barat terkonsentrasi di wilayah kabupaten. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan, penyediaan layanan publik, pemerataan infrastruktur, serta kebijakan kependudukan perlu memperhatikan dominasi penduduk di wilayah kabupaten, tanpa mengabaikan kebutuhan wilayah kota yang memiliki karakteristik kepadatan, mobilitas, dan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi.

POPULASI JAWA BARAT

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat
pada tahun 2025 tercatat sebanyak

52.211.020 jiwa.



DATA TAHUN 2025

LAKI-LAKI



26.440.489
jiwa

50,64%

PEREMPUAN



25.770.531
jiwa

49,36%

TOTAL PENDUDUK



52.211.020
jiwa

100,00%



MIGRASI PENDUDUK TAHUN 2025

Migrasi masuk adalah perpindahan penduduk dari wilayah lain untuk menetap di Provinsi Jawa Barat.

MIGRASI MASUK

613.781 jiwa



ANTAR
KABUPATEN/KOTA
339.511 jiwa



ANTAR
PROVINSI
274.270 jiwa

Migrasi keluar adalah perpindahan penduduk yang meninggalkan Provinsi Jawa Barat untuk menetap di wilayah lain.

MIGRASI KELUAR

553.480 jiwa



ANTAR
KABUPATEN/KOTA
355.829 jiwa



ANTAR
PROVINSI
197.651 jiwa



PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR

NO	UMUR	JUMLAH (JIWA)	%
1	00-04	3.451.594	6,61
2	05-09	4.488.291	8,60
3	10-14	4.519.951	8,66
4	15-19	4.087.641	7,83
5	20-24	4.236.938	8,12
6	25-29	4.190.677	8,03
7	30-34	3.974.654	7,61
8	35-39	3.655.356	7,00
9	40-44	3.937.928	7,54
10	45-49	3.675.656	7,04
11	50-54	3.296.193	6,31
12	55-59	2.727.358	5,22
13	60-64	2.117.217	4,06
14	65-69	1.618.737	3,10
15	70-74	1.022.123	1,96
16	> 75	1.210.706	2,32

TOTAL

52.211.020 100,00



PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN

**BELUM /
TIDAK BEKERJA**
34.990.544 jiwa
(67,02%)



**MEMILIKI
PEKERJAAN**
17.220.476 jiwa
(32,98%)

BELUM/TIDAK BEKERJA (67,02%)

1	BELUM/TIDAK BEKERJA	12.141.057 jiwa (23,25%)
2	PELAJAR/MAHASISWA	9.760.326 jiwa (18,69%)
3	PENSIUNAN	281.291 jiwa (0,54%)
4	LAINNYA	12.807.870 jiwa (24,53%)

JUMLAH BELUM/TIDAK BEKERJA 34.990.544 jiwa (67,02%)

MEMILIKI PEKERJAAN (32,98%)

5	APARATUR/PEJABAT NEGARA	716.989 jiwa (1,37%)
6	TENAGA PENGAJAR	335.365 jiwa (0,64%)
7	WIRASWASTA	14.448.105 jiwa (27,67%)
8	PERTANIAN/PETERNAKAN	1.523.056 jiwa (2,92%)
9	NELAYAN	72.366 jiwa (0,14%)
10	AGAMA DAN KEPERCAYAAN	16.828 jiwa (0,03%)
11	TENAGA KESEHATAN	107.767 jiwa (0,21%)

JUMLAH MEMILIKI PEKERJAAN 17.220.476 jiwa (32,98%)

TOTAL

52.211.020 jiwa (100,00%)



JUMLAH KEPALA KELUARGA TAHUN 2025



TOTAL KEPALA KELUARGA
17.600.237 jiwa
(100,00%)



LAKI-LAKI
13.896.216 jiwa
(78,95%)



PEREMPUAN
3.704.021 jiwa
(21,05%)

BAB 5

KEPEMILIKAN DOKUMEN

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan melalui proses pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Sebagai instrumen utama dalam administrasi negara, dokumen kependudukan memegang peran penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak sipil setiap warga negara. Tanpa keberadaan dokumen yang sah, individu akan menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta dalam mengurus berbagai keperluan hukum dan administratif lainnya. Oleh karena itu, tingkat cakupan kepemilikan dokumen kependudukan menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan di suatu daerah.

5.1. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga (KK) merupakan dokumen identitas resmi yang mencatat data lengkap tentang anggota suatu keluarga. Di dalamnya tercantum informasi penting seperti nama, nomor induk kependudukan (NIK), susunan dan hubungan antar anggota keluarga, tempat dan tanggal lahir, serta status pernikahan dan pekerjaan. Kegunaan Kartu Keluarga sangat vital dalam berbagai aspek kehidupan. KK menjadi dasar utama dalam pengurusan administrasi kependudukan lainnya, seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, hingga akta kematian. Selain itu, KK juga digunakan sebagai syarat dalam mengakses layanan publik, seperti mendaftar sekolah, memperoleh bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga mengurus dokumen legal lainnya seperti paspor dan NPWP. Tak hanya itu, KK juga berfungsi sebagai alat verifikasi hubungan keluarga dalam konteks hukum, pewarisan, maupun perwalian anak. Oleh karena itu, memiliki Kartu Keluarga yang valid dan selalu diperbarui merupakan bagian penting dari tanggung jawab administrasi setiap warga negara.

Tabel 5-1 Kepemilikan Kartu Keluarga

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	KEPALA KELUARGA	MEMILIKI DOKUMEN		BELUM MEMILIKI	
			N	%	N	%
3201	BOGOR	1.868.269	1.851.406	99,10	16.457	0,88
3202	SUKABUMI	1.004.268	994.103	98,99	9.965	0,99
3203	CIANJUR	927.510	908.347	97,93	19.163	2,07



KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	KEPALA KELUARGA	MEMILIKI DOKUMEN		BELUM MEMILIKI	
			N	%	N	%
3204	BANDUNG	1.292.533	1.275.098	98,65	17.435	1,35
3205	GARUT	948.821	937.559	98,81	11.262	1,19
3206	TASIKMALAYA	746.491	737.756	98,83	8.735	1,17
3207	CIAMIS	480.060	476.110	99,18	3.950	0,82
3208	KUNINGAN	429.812	422.186	98,23	7.626	1,77
3209	CIREBON	863.319	851.888	98,68	11.431	1,32
3210	MAJALENGKA	499.676	488.842	97,83	10.834	2,17
3211	SUMEDANG	453.380	439.628	96,97	13.752	3,03
3212	INDRAMAYU	740.722	722.153	97,49	18.569	2,51
3213	SUBANG	651.913	632.575	97,03	19.338	2,97
3214	PURWAKARTA	366.193	361.918	98,83	4.275	1,17
3215	KARAWANG	920.363	901.480	97,95	18.883	2,05
3216	BEKASI	1.084.566	1.059.976	97,73	24.590	2,27
3217	BANDUNG BARAT	663.026	655.432	98,85	7.594	1,15
3218	PANGANDARAN	166.828	165.985	99,49	843	0,51
3271	KOTA BOGOR	371.709	369.230	99,33	2.479	0,67
3272	KOTA SUKABUMI	125.675	125.071	99,52	604	0,48
3273	KOTA BANDUNG	864.954	855.347	98,89	9.607	1,11
3274	KOTA CIREBON	119.812	119.544	99,78	268	0,22
3275	KOTA BEKASI	828.060	816.349	98,59	11.711	1,41
3276	KOTA DEPOK	651.657	649.698	99,70	1.959	0,30
3277	KOTA CIMAHI	194.396	192.505	99,03	1.891	0,97
3278	KOTA TASIKMALAYA	261.259	260.456	99,69	803	0,31
3279	KOTA BANJAR	74.965	74.681	99,62	284	0,38
TOTAL		17.600.237	17.345.323	98,55	254.308	1,44

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah kepala keluarga di Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak **17.600.237** kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak **17.345.323** kepala keluarga atau **98,55%** telah memiliki Dokumen Kartu Keluarga, sedangkan **254.308** kepala keluarga atau **1,44%** tercatat belum memiliki Dokumen Kartu Keluarga. Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga bagi kepala keluarga di Jawa Barat sudah sangat tinggi. Hampir seluruh kabupaten/kota memiliki persentase kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga di atas **97%**, sehingga secara umum pelayanan administrasi kependudukan di daerah telah berjalan cukup baik.

Daerah dengan persentase kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga tertinggi antara lain Kota Cirebon sebesar **99,78%**, Kota Depok **99,70%**, Kota Tasikmalaya **99,69%**, Kota Banjar **99,62%**, dan Kota Sukabumi **99,52%**. Sementara itu, persentase kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga yang relatif lebih rendah tercatat di Kabupaten Sumedang sebesar **96,97%**, Kabupaten Subang **97,03%**, Kabupaten Indramayu **97,49%**, Kabupaten Bekasi **97,73%**, serta Kabupaten Majalengka **97,83%**. Meskipun selisih persentasenya tidak terlalu besar, dari sisi jumlah absolut masih terdapat daerah dengan kepala keluarga yang belum memiliki Dokumen Kartu Keluarga dalam jumlah cukup banyak, seperti Kabupaten Bekasi sebanyak **24.590** kepala keluarga, Kabupaten Subang **19.338** kepala keluarga, Kabupaten Cianjur **19.163** kepala keluarga, Kabupaten Karawang **18.883** kepala keluarga, dan Kabupaten Indramayu **18.569** kepala keluarga.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun cakupan kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga sudah sangat tinggi, masih diperlukan upaya lanjutan untuk menjangkau kepala keluarga yang belum memiliki Dokumen Kartu Keluarga, terutama di daerah dengan jumlah yang masih cukup besar. Langkah yang dapat diperkuat antara lain melalui pelayanan jemput bola, peningkatan akses layanan administrasi kependudukan, penguatan sosialisasi kepada masyarakat, serta koordinasi lintas sektor hingga tingkat kewilayahan. Dengan demikian, kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga dapat terus ditingkatkan secara merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

5.2. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan identitas resmi bagi setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah. KTP-el dilengkapi dengan cip yang berisi data biometrik, seperti sidik jari dan data kependudukan lainnya, sehingga memiliki tingkat keamanan dan keakuratan data yang tinggi. Kegunaan KTP-el sangat luas dan krusial dalam kehidupan sehari-hari. Dokumen ini menjadi alat bukti identitas diri yang sah untuk keperluan administratif, seperti membuka rekening bank, membuat SIM, mengurus paspor, menikah, hingga dalam proses rekrutmen kerja. Selain itu, KTP-el juga menjadi persyaratan utama untuk mendapatkan pelayanan publik, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, serta hak-hak politik seperti pemilu.

Karena sistemnya sudah terintegrasi secara nasional, KTP-el memudahkan pendataan dan pelayanan lintas daerah. Penduduk tidak perlu lagi membuat KTP baru saat berpindah domisili, cukup dengan memperbarui data yang ada. Hal ini mendukung terciptanya sistem administrasi kependudukan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan kata lain, KTP-el bukan hanya sekadar kartu identitas, melainkan

kunci utama dalam menjamin akses warga terhadap berbagai layanan dan hak-hak dasar sebagai warga negara.

Tabel 5-2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	WAJIB KTP	REKAM KTP		MEMILIKI KTP	
			N	%	N	%
3201	BOGOR	4.229.058	4.193.786	99,17	4.170.923	98,63
3202	SUKABUMI	2.106.759	2.082.337	98,84	2.067.391	98,13
3203	CIANJUR	1.920.069	1.897.885	98,84	1.891.803	98,53
3204	BANDUNG	2.819.796	2.800.109	99,30	2.788.041	98,87
3205	GARUT	2.059.653	2.036.582	98,88	2.002.401	97,22
3206	TASIKMALAYA	1.515.705	1.501.295	99,05	1.496.558	98,74
3207	CIAMIS	1.010.407	990.948	98,07	989.237	97,90
3208	KUNINGAN	931.377	920.578	98,84	918.359	98,60
3209	CIREBON	1.849.737	1.835.196	99,21	1.829.136	98,89
3210	MAJALENGKA	1.028.504	1.016.390	98,82	1.014.404	98,63
3211	SUMEDANG	934.379	924.265	98,92	920.391	98,50
3212	INDRAMAYU	1.502.314	1.491.536	99,28	1.485.294	98,87
3213	SUBANG	1.289.801	1.277.677	99,06	1.273.697	98,75
3214	PURWAKARTA	773.604	766.104	99,03	765.078	98,90
3215	KARAWANG	1.921.215	1.909.681	99,40	1.903.053	99,05
3216	BEKASI	2.451.523	2.435.458	99,34	2.417.130	98,60
3217	BANDUNG BARAT	1.407.435	1.396.066	99,19	1.391.779	98,89
3218	PANGANDARAN	345.078	340.151	98,57	339.918	98,50
3271	KOTA BOGOR	841.543	837.493	99,52	826.779	98,25
3272	KOTA SUKABUMI	273.075	271.015	99,25	270.789	99,16
3273	KOTA BANDUNG	1.947.960	1.934.972	99,33	1.930.235	99,09
3274	KOTA CIREBON	262.871	260.953	99,27	260.666	99,16
3275	KOTA BEKASI	1.916.951	1.911.578	99,72	1.909.961	99,64
3276	KOTA DEPOK	1.503.156	1.500.139	99,80	1.498.450	99,69
3277	KOTA CIMAHI	436.265	435.277	99,77	434.617	99,62
3278	KOTA TASIKMALAYA	569.582	567.663	99,66	567.249	99,59
3279	KOTA BANJAR	157.194	156.105	99,31	155.469	98,90
TOTAL		38.005.011	37.691.239	99,17	37.518.808	98,72

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah penduduk wajib KTP di Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak **38.005.011** jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak

37.691.239 jiwa atau **99,17%** telah melakukan perekaman KTP, sedangkan penduduk yang telah memiliki KTP tercatat sebanyak **37.518.808** jiwa atau **98,72%**. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat perekaman dan kepemilikan KTP di Provinsi Jawa Barat sudah sangat tinggi, sehingga secara umum tertib administrasi kependudukan bagi penduduk wajib KTP telah berjalan dengan baik di seluruh kabupaten/kota.

Daerah dengan persentase perekaman KTP tertinggi antara lain Kota Depok sebesar **99,80%**, Kota Cimahi **99,77%**, Kota Bekasi **99,72%**, Kota Tasikmalaya **99,66%**, dan Kota Bogor **99,52%**. Sementara itu, persentase kepemilikan KTP tertinggi tercatat di Kota Depok sebesar **99,69%**, Kota Bekasi **99,64%**, Kota Cimahi **99,62%**, Kota Tasikmalaya **99,59%**, dan Kota Sukabumi serta Kota Cirebon masing-masing sebesar **99,16%**. Di sisi lain, masih terdapat beberapa daerah dengan persentase kepemilikan KTP yang relatif lebih rendah, seperti Kabupaten Garut sebesar **97,22%**, Kabupaten Ciamis **97,90%**, Kabupaten Sukabumi **98,13%**, Kota Bogor **98,25%**, dan Kabupaten Pangandaran serta Kabupaten Sumedang masing-masing sebesar **98,50%**.

Meskipun capaian secara umum sudah sangat tinggi, data ini menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman maupun belum memiliki KTP. Kondisi tersebut perlu terus menjadi perhatian, terutama di daerah dengan capaian yang relatif lebih rendah, agar seluruh penduduk wajib KTP dapat terlayani secara optimal. Upaya yang dapat terus diperkuat antara lain melalui pelayanan jemput bola, percepatan perekaman bagi penduduk rentan, peningkatan sosialisasi, serta penguatan koordinasi hingga tingkat kewilayahan. Dengan demikian, cakupan perekaman dan kepemilikan KTP di Provinsi Jawa Barat dapat terus ditingkatkan secara merata.

5.3. Kepemilikan Akta

Akta kependudukan merupakan dokumen otentik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti sah terkait peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Kepemilikan akta-akta ini menjadi landasan legal dalam perlindungan identitas hukum serta akses terhadap hak-hak sipil dan layanan publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 menjadi dasar hukum utama pencatatan peristiwa penting dalam administrasi kependudukan.

5.3.1. Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang mencatat kelahiran seseorang, dan merupakan dasar utama untuk memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan

dokumen kependudukan lainnya, seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el di masa mendatang. Kepemilikan akta kelahiran memberikan identitas hukum pertama bagi seorang anak, sekaligus menjadi syarat dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, hingga perlindungan hukum anak. Akta ini wajib dicatatkan paling lambat 60 hari setelah kelahiran (Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006).

Tabel 5-3 Akta Kelahiran

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK USIA 0-4 TAHUN	MEMILIKI		BELUM MEMILIKI	
			N	%	N	%
3201	BOGOR	416.907	305.997	73,40	110.910	26,60
3202	SUKABUMI	203.010	195.817	96,46	7.193	3,54
3203	CIANJUR	194.290	186.423	95,95	7.867	4,05
3204	BANDUNG	264.013	225.893	85,56	38.120	14,44
3205	GARUT	211.161	166.812	79,00	44.349	21,00
3206	TASIKMALAYA	128.397	125.227	97,53	3.170	2,47
3207	CIAMIS	77.231	64.709	83,79	12.522	16,21
3208	KUNINGAN	80.967	79.662	98,39	1.305	1,61
3209	CIREBON	170.399	153.828	90,28	16.571	9,72
3210	MAJALENGKA	89.183	87.649	98,28	1.534	1,72
3211	SUMEDANG	75.557	67.626	89,50	7.931	10,50
3212	INDRAMAYU	115.735	93.151	80,49	22.584	19,51
3213	SUBANG	98.420	97.769	99,34	651	0,66
3214	PURWAKARTA	76.675	67.072	87,48	9.603	12,52
3215	KARAWANG	178.996	157.707	88,11	21.289	11,89
3216	BEKASI	239.399	196.508	82,08	42.891	17,92
3217	BANDUNG BARAT	137.247	123.505	89,99	13.742	10,01
3218	PANGANDARAN	26.736	24.146	90,31	2.590	9,69
3271	KOTA BOGOR	77.274	75.095	97,18	2.179	2,82
3272	KOTA SUKABUMI	25.848	25.815	99,87	33	0,13
3273	KOTA BANDUNG	153.583	144.097	93,82	9.486	6,18
3274	KOTA CIREBON	23.820	23.022	96,65	798	3,35
3275	KOTA BEKASI	160.061	159.785	99,83	276	0,17
3276	KOTA DEPOK	124.742	123.722	99,18	1.020	0,82
3277	KOTA CIMAHI	35.240	34.594	98,17	646	1,83
3278	KOTA TASIKMALAYA	52.821	50.063	94,78	2.758	5,22
3279	KOTA BANJAR	13.882	13.877	99,96	5	0,04
TOTAL		3.451.594	3.069.571	88,93	382.023	11,07

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk usia 0–4 tahun di Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak **3.451.594** jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak **3.069.571** jiwa atau **88,93%** telah memiliki akta kelahiran, sedangkan **382.023** jiwa atau **11,07%** belum memiliki akta kelahiran. Data ini menunjukkan bahwa cakupan kepemilikan akta kelahiran pada kelompok usia 0–4 tahun di Jawa Barat sudah cukup tinggi, namun masih terdapat anak usia dini yang belum tercatat kepemilikan aktanya dalam jumlah yang cukup besar. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena akta kelahiran merupakan dokumen dasar identitas hukum anak yang sangat penting untuk mendukung akses terhadap layanan administrasi, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum.

Daerah dengan persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0–4 tahun tertinggi antara lain Kota Banjar sebesar **99,96%**, Kota Sukabumi **99,87%**, Kota Bekasi **99,83%**, Kabupaten Subang **99,34%**, dan Kota Depok **99,18%**. Sementara itu, daerah dengan persentase kepemilikan yang relatif lebih rendah tercatat di Kabupaten Bogor sebesar **73,40%**, Kabupaten Garut **79,00%**, Kabupaten Indramayu **80,49%**, Kabupaten Bekasi **82,08%**, dan Kabupaten Ciamis **83,79%**. Dari sisi jumlah absolut, anak usia 0–4 tahun yang belum memiliki akta kelahiran paling banyak terdapat di Kabupaten Bogor sebanyak **110.910** jiwa, Kabupaten Garut **44.349** jiwa, Kabupaten Bekasi **42.891** jiwa, Kabupaten Bandung **38.120** jiwa, dan Kabupaten Indramayu **22.584** jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa selain faktor persentase, jumlah penduduk usia dini yang besar di beberapa wilayah juga memengaruhi tingginya jumlah anak yang belum memiliki akta kelahiran.

Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum kesadaran dan pencatatan akta kelahiran di Jawa Barat telah tinggi, namun masih terdapat tantangan di beberapa wilayah, terutama daerah yang memiliki jumlah penduduk besar atau keterbatasan akses terhadap layanan administrasi kependudukan. Padahal, kepemilikan akta kelahiran sangat penting sebagai bukti identitas hukum anak yang menjadi dasar untuk memperoleh dokumen kependudukan lainnya serta akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Upaya perlu terus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama Disdukcapil dalam menjangkau kelompok rentan, masyarakat terpencil, dan memperluas cakupan layanan agar seluruh anak dapat tercatat secara resmi dalam sistem administrasi negara.

5.3.2. Akta Perkawinan

Akta perkawinan adalah bukti sah terjadinya pernikahan yang dicatatkan oleh negara, baik bagi warga negara Indonesia yang menikah menurut agama non-Islam maupun bagi yang menikah secara adat. Akta ini berfungsi sebagai dasar hukum status perkawinan, pengurusan hak waris, tanggung jawab hukum suami-istri, serta keabsahan

anak dalam perkawinan. Bagi penduduk yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), sementara Disdukcapil mencatat perkawinan bagi penduduk non-Islam.

Tabel 5-4 Akta Perkawinan

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	WAJIB AKTA KAWIN	MEMILIKI		BELUM MEMILIKI	
			N	%	N	%
3201	BOGOR	2.763.826	1.857.395	67,20	906.431	32,80
3202	SUKABUMI	1.448.235	536.401	37,04	911.834	62,96
3203	CIANJUR	1.329.799	630.641	47,42	699.158	52,58
3204	BANDUNG	1.930.854	1.435.550	74,35	495.304	25,65
3205	GARUT	1.387.275	1.020.290	73,55	366.985	26,45
3206	TASIKMALAYA	1.025.987	652.014	63,55	373.973	36,45
3207	CIAMIS	672.132	485.827	72,28	186.305	27,72
3208	KUNINGAN	610.665	290.847	47,63	319.818	52,37
3209	CIREBON	1.197.019	1.005.271	83,98	191.748	16,02
3210	MAJALENGKA	687.868	524.710	76,28	163.158	23,72
3211	SUMEDANG	645.168	470.974	73,00	174.194	27,00
3212	INDRAMAYU	977.544	735.924	75,28	241.620	24,72
3213	SUBANG	886.237	533.576	60,21	352.661	39,79
3214	PURWAKARTA	510.446	320.275	62,74	190.171	37,26
3215	KARAWANG	1.295.125	907.476	70,07	387.649	29,93
3216	BEKASI	1.699.088	1.041.168	61,28	657.920	38,72
3217	BANDUNG BARAT	968.937	524.931	54,18	444.006	45,82
3218	PANGANDARAN	238.322	169.326	71,05	68.996	28,95
3271	KOTA BOGOR	520.676	354.885	68,16	165.791	31,84
3272	KOTA SUKABUMI	168.970	123.280	72,96	45.690	27,04
3273	KOTA BANDUNG	1.212.042	1.008.747	83,23	203.295	16,77
3274	KOTA CIREBON	154.816	130.728	84,44	24.088	15,56
3275	KOTA BEKASI	1.216.114	890.979	73,26	325.135	26,74
3276	KOTA DEPOK	932.906	732.138	78,48	200.768	21,52
3277	KOTA CIMAHI	275.051	228.042	82,91	47.009	17,09
3278	KOTA TASIKMALAYA	358.738	316.915	88,34	41.823	11,66
3279	KOTA BANJAR	98.292	91.054	92,64	7.238	7,36
TOTAL		25.212.132	17.019.364	67,50	8.192.768	32,50

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Keterangan : Wajib Akta Kawin : Penduduk Status Perkawinan "Kawin" Berusia Diatas 19 Tahun

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat yang berstatus kawin dan berusia di atas 19 tahun tercatat sebanyak **25.212.132** jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak **17.019.364** jiwa atau **67,50%** telah memiliki akta perkawinan, sedangkan **8.192.768** jiwa atau **32,50%** belum memiliki akta perkawinan. Data ini menunjukkan bahwa cakupan kepemilikan akta perkawinan di Jawa Barat sudah mencapai lebih dari dua pertiga dari total penduduk sasaran, namun masih terdapat sekitar sepertiga penduduk berstatus kawin yang belum memiliki dokumen tersebut.

Daerah dengan persentase kepemilikan akta perkawinan tertinggi antara lain Kota Banjar sebesar **92,64%**, Kota Tasikmalaya **88,34%**, Kota Cirebon **84,44%**, Kabupaten Cirebon **83,98%**, Kota Bandung **83,23%**, dan Kota Cimahi **82,91%**. Sementara itu, daerah dengan persentase kepemilikan yang relatif rendah tercatat di Kabupaten Sukabumi sebesar **37,04%**, Kabupaten Cianjur **47,42%**, Kabupaten Kuningan **47,63%**, Kabupaten Bandung Barat **54,18%**, dan Kabupaten Subang **60,21%**. Dari sisi jumlah absolut, penduduk berstatus kawin di atas 19 tahun yang belum memiliki akta perkawinan paling banyak terdapat di Kabupaten Sukabumi sebanyak **911.834** jiwa, Kabupaten Bogor **906.431** jiwa, Kabupaten Cianjur **699.158** jiwa, Kabupaten Bekasi **657.920** jiwa, dan Kabupaten Bandung **495.304** jiwa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kepemilikan akta perkawinan masih perlu terus ditingkatkan, mengingat dokumen ini memiliki arti penting sebagai bukti legal status perkawinan dan menjadi dasar dalam berbagai urusan administrasi kependudukan lainnya. Rendahnya cakupan di beberapa daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti belum tercatatnya perkawinan secara resmi, keterbatasan akses layanan, rendahnya kesadaran masyarakat, maupun kendala administratif lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif melalui peningkatan sosialisasi, kemudahan layanan pencatatan sipil, pelayanan jemput bola, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar kepemilikan akta perkawinan dapat meningkat secara lebih merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

5.3.3. Akta Perceraian

Kepemilikan akta cerai adalah status hukum seseorang yang secara sah memiliki dokumen resmi berupa akta cerai yang diterbitkan oleh lembaga berwenang, seperti pengadilan agama atau pengadilan negeri, setelah perceraian diputuskan secara hukum. Akta cerai berfungsi sebagai bukti otentik bahwa ikatan pernikahan telah berakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kepemilikan akta cerai penting untuk berbagai keperluan administrasi, seperti pengurusan perubahan status pada kartu identitas, kartu keluarga, atau dokumen perjalanan, serta menjadi dasar dalam pengaturan hak asuh anak, pembagian harta bersama, hak waris, dan



pernikahan kembali. Dengan demikian, akta cerai tidak hanya berperan sebagai bukti formal, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak-hak hukum bagi pihak-pihak yang bercerai.

Tabel 5-5 Akta Perceraian

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	WAJIB AKTA CERAI	MEMILIKI		BELUM MEMILIKI	
			N	%	N	%
3201	BOGOR	85.160	39.296	46,14	45.864	53,86
3202	SUKABUMI	69.747	11.228	16,10	58.519	83,90
3203	CIANJUR	56.326	16.002	28,41	40.324	71,59
3204	BANDUNG	74.975	41.754	55,69	33.221	44,31
3205	GARUT	59.053	24.725	41,87	34.328	58,13
3206	TASIKMALAYA	54.875	20.658	37,65	34.217	62,35
3207	CIAMIS	33.625	22.126	65,80	11.499	34,20
3208	KUNINGAN	27.976	15.612	55,80	12.364	44,20
3209	CIREBON	70.033	48.118	68,71	21.915	31,29
3210	MAJALENGKA	46.978	28.341	60,33	18.637	39,67
3211	SUMEDANG	36.778	20.505	55,75	16.273	44,25
3212	INDRAMAYU	67.648	48.895	72,28	18.753	27,72
3213	SUBANG	46.332	18.240	39,37	28.092	60,63
3214	PURWAKARTA	25.465	10.651	41,83	14.814	58,17
3215	KARAWANG	66.673	18.196	27,29	48.477	72,71
3216	BEKASI	43.303	16.857	38,93	26.446	61,07
3217	BANDUNG BARAT	50.374	18.068	35,87	32.306	64,13
3218	PANGANDARAN	12.617	8.615	68,28	4.002	31,72
3271	KOTA BOGOR	23.031	11.933	51,81	11.098	48,19
3272	KOTA SUKABUMI	10.453	5.100	48,79	5.353	51,21
3273	KOTA BANDUNG	72.778	52.723	72,44	20.055	27,56
3274	KOTA CIREBON	13.098	9.369	71,53	3.729	28,47
3275	KOTA BEKASI	39.944	28.063	70,26	11.881	29,74
3276	KOTA DEPOK	38.099	28.182	73,97	9.917	26,03
3277	KOTA CIMAHI	16.281	10.100	62,04	6.181	37,96
3278	KOTA TASIKMALAYA	24.850	15.956	64,21	8.894	35,79
3279	KOTA BANJAR	9.319	7.465	80,11	1.854	19,89
TOTAL		1.175.791	596.778	50,76	579.013	49,24

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Keterangan : Wajib Akta Cerai : Penduduk Status Perkawinan "Cerai" Berusia Diatas 19 Tahun

Berdasarkan data tabel di atas, jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat dengan status cerai hidup dan berusia di atas 19 tahun tercatat sebanyak **1.175.791** jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak **596.778** jiwa atau **50,76%** telah memiliki akta cerai, sedangkan **579.013** jiwa atau **49,24%** belum memiliki akta cerai. Data ini menunjukkan bahwa kepemilikan akta cerai di Jawa Barat masih belum merata, karena jumlah penduduk yang telah memiliki akta cerai hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan yang belum memiliki.

Daerah dengan persentase kepemilikan akta cerai tertinggi antara lain Kota Banjar sebesar **80,11%**, Kota Depok **73,97%**, Kota Bandung **72,44%**, Kabupaten Indramayu **72,28%**, dan Kota Cirebon **71,53%**. Sementara itu, daerah dengan persentase kepemilikan yang masih rendah tercatat di Kabupaten Sukabumi sebesar **16,10%**, Kabupaten Karawang **27,29%**, Kabupaten Cianjur **28,41%**, Kabupaten Bandung Barat **35,87%**, dan Kabupaten Tasikmalaya **37,65%**. Dari sisi jumlah absolut, penduduk berstatus cerai hidup di atas 19 tahun yang belum memiliki akta cerai paling banyak terdapat di Kabupaten Sukabumi sebanyak **58.519** jiwa, Kabupaten Karawang **48.477** jiwa, Kabupaten Bogor **45.864** jiwa, Kabupaten Cianjur **40.324** jiwa, dan Kabupaten Garut **34.328** jiwa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kepemilikan akta cerai masih perlu mendapat perhatian lebih, mengingat akta cerai merupakan dokumen hukum yang penting sebagai bukti sah putusannya perkawinan dan menjadi dasar dalam berbagai urusan administrasi kependudukan lainnya. Rendahnya cakupan di beberapa daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti belum seluruh perceraian tercatat secara resmi, keterbatasan akses layanan, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dokumen tersebut, maupun kendala administratif lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif melalui peningkatan sosialisasi, kemudahan akses layanan pencatatan sipil, pelayanan jemput bola, dan penguatan koordinasi lintas sektor agar kepemilikan akta cerai dapat meningkat secara lebih merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

5.3.4. Akta Kematian

Akta kematian adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah sebagai bukti sah terjadinya kematian seseorang, yang memuat data penting seperti nama, tanggal, dan penyebab kematian. Fungsi utama akta kematian adalah sebagai bukti legal untuk mengurus administrasi kependudukan, menghapus nama almarhum dari daftar penduduk, serta menjadi syarat penting dalam pengurusan hak warisan, klaim asuransi, santunan kematian, dan berbagai keperluan hukum lainnya yang terkait dengan status kematian seseorang.



Tabel 5-6 Akta Kematian

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
3201	BOGOR	26.806	6,69	16.637	4,15	43.443	10,84
3202	SUKABUMI	11.739	2,93	7.033	1,75	18.772	4,68
3203	CIANJUR	13.937	3,48	7.695	1,92	21.632	5,40
3204	BANDUNG	14.844	3,70	9.882	2,47	24.726	6,17
3205	GARUT	11.803	2,94	7.481	1,87	19.284	4,81
3206	TASIKMALAYA	7.911	1,97	5.491	1,37	13.402	3,34
3207	CIAMIS	6.640	1,66	4.432	1,11	11.072	2,76
3208	KUNINGAN	4.206	1,05	2.905	0,72	7.111	1,77
3209	CIREBON	11.161	2,78	7.873	1,96	19.034	4,75
3210	MAJALENGKA	10.298	2,57	9.478	2,36	19.776	4,93
3211	SUMEDANG	6.060	1,51	5.095	1,27	11.155	2,78
3212	INDRAMAYU	5.034	1,26	3.586	0,89	8.620	2,15
3213	SUBANG	7.036	1,76	4.950	1,23	11.986	2,99
3214	PURWAKARTA	6.153	1,53	4.734	1,18	10.887	2,72
3215	KARAWANG	13.099	3,27	9.093	2,27	22.192	5,54
3216	BEKASI	13.042	3,25	8.055	2,01	21.097	5,26
3217	BANDUNG BARAT	6.225	1,55	4.313	1,08	10.538	2,63
3218	PANGANDARAN	2.276	0,57	1.478	0,37	3.754	0,94
3271	KOTA BOGOR	7.034	1,75	4.934	1,23	11.968	2,99
3272	KOTA SUKABUMI	2.116	0,53	1.531	0,38	3.647	0,91
3273	KOTA BANDUNG	16.124	4,02	11.930	2,98	28.054	7,00
3274	KOTA CIREBON	2.284	0,57	1.890	0,47	4.174	1,04
3275	KOTA BEKASI	13.282	3,31	8.984	2,24	22.266	5,55
3276	KOTA DEPOK	9.365	2,34	7.014	1,75	16.379	4,09
3277	KOTA CIMAHI	3.045	0,76	2.400	0,60	5.445	1,36
3278	KOTA TASIKMALAYA	4.626	1,15	3.491	0,87	8.117	2,02
3279	KOTA BANJAR	1.285	0,32	1.056	0,26	2.341	0,58
TOTAL		237.431	59,23	163.441	40,77	400.872	100,00

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan data penerbitan akta kematian Tahun 2025, jumlah akta kematian yang diterbitkan di Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak **400.872** dokumen. Dari jumlah tersebut, penerbitan untuk penduduk laki-laki mencapai **237.431** dokumen atau **59,23%**, sedangkan untuk penduduk perempuan sebanyak **163.441** dokumen atau **40,77%**. Komposisi ini menunjukkan bahwa penerbitan akta kematian pada laki-laki

lebih tinggi dibandingkan perempuan. Secara umum, perbedaan tersebut sejalan dengan jumlah kematian yang tercatat lebih banyak pada laki-laki, sehingga berdampak pada lebih tingginya penerbitan dokumen akta kematian untuk penduduk laki-laki.

Dilihat menurut kabupaten/kota, jumlah penerbitan akta kematian tertinggi tercatat di Kabupaten Bogor sebanyak **43.443** dokumen atau **10,84%** dari total provinsi, diikuti Kota Bandung sebanyak **28.054** dokumen atau **7,00%**, Kabupaten Bandung **24.726** dokumen atau **6,17%**, Kota Bekasi **22.266** dokumen atau **5,55%**, dan Kabupaten Karawang **22.192** dokumen atau **5,54%**. Sementara itu, daerah dengan jumlah penerbitan terendah antara lain Kota Banjar sebanyak **2.341** dokumen atau **0,58%**, Kota Sukabumi **3.647** dokumen atau **0,91%**, Pangandaran **3.754** dokumen atau **0,94%**, Kota Cirebon **4.174** dokumen atau **1,04%**, dan Kota Cimahi **5.445** dokumen atau **1,36%**. Perbedaan jumlah ini pada dasarnya dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk dan banyaknya peristiwa kematian yang terjadi di masing-masing daerah.

Data ini menunjukkan bahwa penerbitan akta kematian di Jawa Barat selama Tahun 2025 telah berlangsung di seluruh kabupaten/kota, namun distribusinya masih terkonsentrasi di wilayah dengan jumlah penduduk besar. Akta kematian memiliki peran penting dalam tertib administrasi kependudukan karena menjadi dasar pemutakhiran data penduduk, penonaktifan identitas kependudukan, pengurusan hak waris, klaim jaminan sosial, dan berbagai layanan administrasi lainnya. Oleh karena itu, upaya peningkatan pelaporan peristiwa kematian dan percepatan penerbitan akta kematian perlu terus diperkuat melalui sosialisasi kepada masyarakat, integrasi layanan dengan fasilitas kesehatan dan pemerintah desa/kelurahan, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar setiap peristiwa kematian dapat segera tercatat secara lengkap dan akurat.

5.3.5. Akta Pengakuan Anak

Pengesahan anak adalah tindakan hukum yang dilakukan untuk mengesahkan status seorang anak yang lahir di luar perkawinan sah, sehingga setelah orang tuanya menikah secara sah, anak tersebut diakui sebagai anak sah berdasarkan akta pengesahan dari catatan sipil. Sementara itu, pengangkatan anak adalah proses hukum di mana seseorang atau pasangan suami istri mengangkat seorang anak yang bukan anak kandungnya untuk diperlakukan sebagai anak sendiri dengan hak dan kewajiban yang diakui secara hukum, biasanya melalui keputusan pengadilan. Berbeda dengan itu, pengakuan anak adalah tindakan sepihak, baik oleh ayah atau ibu biologis, untuk mengakui anak yang lahir di luar perkawinan sebagai anaknya sendiri, yang kemudian dicatat secara resmi dalam akta pengakuan anak.

Tabel 5-7 Perbedaan Pengesahan, Pengangkatan dan Pengakuan Anak

ASPEK	PENGESAHAN ANAK	PENGANGKATAN ANAK	PENGAKUAN ANAK
Definisi	Mengakui anak lahir di luar perkawinan setelah orang tua menikah	Mengangkat anak yang bukan anak kandung menjadi anak sah secara hukum	Mengakui anak lahir di luar nikah sebagai anak sendiri
Pihak yang Terlibat	Kedua orang tua kandung	Orang tua angkat dan anak	Salah satu orang tua biologis (ayah atau ibu)
Dasar Hukum	Pasal 272 KUH Perdata	PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak	Pasal 280 KUH Perdata
Tujuan	Menjadikan anak sah karena pernikahan	Memberikan status anak kepada anak angkat	Memberikan pengakuan hukum atas hubungan darah
Proses Administrasi	Dicatat di catatan sipil setelah pernikahan	Proses adopsi di pengadilan dan pencatatan	Dicatatkan dalam akta pengakuan anak di catatan sipil
Hak Anak	Sama dengan anak sah dalam pernikahan	Sama dengan anak kandung dalam keluarga angkat	Hak pengakuan, pemeliharaan, dan perlindungan

Sumber : KUH Perdata dan PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Ketiga proses ini memiliki dasar hukum, prosedur, serta konsekuensi hukum yang berbeda, meskipun sama-sama bertujuan melindungi hak-hak anak.

Tabel 5-8 Data Pengesahan, Pengangkatan dan Pengakuan Anak

KODE WIL	KABUPATEN/ KOTA	PENGESAHAN ANAK		PENGANGKATAN ANAK		PENGAKUAN ANAK	
		N	%	N	%	N	%
3201	BOGOR	279	10,20	16	9,76	10	2,68
3202	SUKABUMI	-	-	5	3,05	5	1,34
3203	CIANJUR	20	0,73	1	0,61	14	3,75
3204	BANDUNG	176	6,44	11	6,71	33	8,85
3205	GARUT	19	0,69	6	3,66	5	1,34
3206	TASIKMALAYA	3	0,11	1	0,61	1	0,27
3207	CIAMIS	4	0,15	1	0,61	7	1,88
3208	KUNINGAN	6	0,22	2	1,22	2	0,54
3209	CIREBON	82	3,00	9	5,49	-	-
3210	MAJALENGKA	25	0,91	7	4,27	3	0,80
3211	SUMEDANG	10	0,37	3	1,83	-	-
3212	INDRAMAYU	8	0,29	2	1,22	6	1,61

KODE WIL	KABUPATEN/ KOTA	PENGESAHAN ANAK		PENGANGKATAN ANAK		PENGAKUAN ANAK	
		N	%	N	%	N	%
3213	SUBANG	14	0,51	8	4,88	2	0,54
3214	PURWAKARTA	441	16,12	4	2,44	129	34,58
3215	KARAWANG	202	7,39	19	11,59	-	-
3216	BEKASI	297	10,86	4	2,44	-	-
3217	BANDUNG BARAT	11	0,40	5	3,05	-	-
3218	PANGANDARAN	6	0,22	1	0,61	-	-
3271	KOTA BOGOR	73	2,67	3	1,83	-	-
3272	KOTA SUKABUMI	42	1,54	3	1,83	3	0,80
3273	KOTA BANDUNG	299	10,93	13	7,93	15	4,02
3274	KOTA CIREBON	149	5,45	2	1,22	-	-
3275	KOTA BEKASI	436	15,94	13	7,93	6	1,61
3276	KOTA DEPOK	102	3,73	17	10,37	116	31,10
3277	KOTA CIMAHI	5	0,18	5	3,05	-	-
3278	KOTA TASIKMALAYA	17	0,62	2	1,22	2	0,54
3279	KOTA BANJAR	9	0,33	1	0,61	14	3,75
TOTAL		2.735	100,00	164	100,00	373	100,00

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

Berdasarkan data di atas dari 27 kabupaten/kota, tercatat total 2.735 kasus pengesahan anak, 164 kasus pengangkatan anak, dan 373 kasus pengakuan anak. Kasus pengesahan anak terbanyak tercatat di Kabupaten Purwakarta sebanyak 441 kasus, disusul Kota Bekasi sebanyak 436 kasus, dan Kota Bandung sebanyak 299 kasus. Untuk pengangkatan anak, jumlah tertinggi terdapat di Kabupaten Karawang sebanyak 19 kasus, diikuti Kota Depok sebanyak 17 kasus, dan Kabupaten Bogor sebanyak 16 kasus. Sementara itu, pengakuan anak paling banyak tercatat di Kabupaten Purwakarta sebanyak 129 kasus, disusul Kota Depok sebanyak 116 kasus, dan Kabupaten Bandung sebanyak 33 kasus.

Tingginya angka pengesahan anak menunjukkan bahwa masyarakat semakin memanfaatkan mekanisme hukum untuk memperjelas dan mengesahkan status anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pengangkatan anak yang jumlahnya lebih sedikit menunjukkan bahwa proses ini umumnya dilakukan secara lebih selektif dan harus melalui prosedur hukum yang ketat. Adapun pengakuan anak juga menjadi aspek penting dalam administrasi kependudukan karena berkaitan dengan pengakuan hubungan keperdataan anak dengan orang tuanya. Secara umum, data ini mencerminkan adanya upaya masyarakat untuk memberikan kepastian hukum dan



perlindungan hak sipil anak, meskipun persebarannya masih bervariasi antar kabupaten/kota.

5.4. Kepemilikan Surat Keterangan Orang Terlantar

Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, yang menyatakan bahwa seseorang atau sekelompok orang masuk dalam kategori orang terlantar. Orang terlantar didefinisikan sebagai individu yang berada dalam kondisi sangat memerlukan bantuan, seperti tidak memiliki tempat tinggal tetap, penghasilan, atau terlantar secara sosial dan ekonomi sehingga membutuhkan perlindungan dan intervensi dari pemerintah atau lembaga terkait.

Kepemilikan SKOT menjadi bukti administratif bahwa individu tersebut berhak menerima bantuan sosial dan perlindungan dari pemerintah. Namun demikian, saat ini kami belum memiliki data kepemilikan SKOT di Provinsi Jawa Barat. Hal ini disebabkan karena data tersebut belum tersedia atau belum tercatat dalam sistem administrasi kami. Ketiadaan data ini kemungkinan disebabkan oleh belum terintegrasinya data dari tingkat kelurahan atau desa, keterbatasan dalam proses pendataan, atau verifikasi yang masih berlangsung di instansi terkait.

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

DATA TAHUN 2025



Kepemilikan dokumen kependudukan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan. Pada tahun 2025, capaian kepemilikan dokumen kependudukan menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan telah berjalan dan terus mengalami peningkatan, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada beberapa jenis dokumen dan wilayah tertentu.



1. WAJIB KTP



38.005.011
penduduk

REKAM KTP



37.691.239
penduduk
99,17%

MEMILIKI KTP (KTP-el)



37.518.808
penduduk
98,72%

BELUM MEMILIKI KTP



172.431
penduduk
0,45%

2. KEPALA KELUARGA



17.600.237
Kepala Keluarga

MEMILIKI KARTU KELUARGA



17.345.323 dokumen
98,55%

BELUM MEMILIKI KARTU KELUARGA



254.308 dokumen
1,44%

3. JUMALA PENDUDUK USIA 0-4 TAHUN (5 TAHUN KURANG 1 HARI)



3.451.594
anak

MEMILIKI AKTA KELAHIRAN



3.069.571 anak
88,93%

BELUM MEMILIKI AKTA KELAHIRAN



382.023 anak
11,07%

4. STATUS KAWIN DI ATAS 19 TAHUN



25.212.132
penduduk

MEMILIKI AKTA PERKAWINAN



17.019.364 dokumen
67,50%

BELUM MEMILIKI AKTA PERKAWINAN



8.192.768 dokumen
32,50%

5. STATUS CERAI HIDUP DI ATAS 19 TAHUN



1.175.791
penduduk

MEMILIKI AKTA PERCERAIAN



596.778 dokumen
50,76%

BELUM MEMILIKI AKTA PERCERAIAN



579.013 dokumen
49,24%

6. AKTA KEMATIAN



400.872
dokumen diterbitkan



Dokumen kependudukan adalah hak setiap penduduk



Lengkapi dokumen kependudukan Anda



Data akurat, pelayanan berkualitas



Capaian meningkat, layanan terus ditingkatkan

BAB 6

KESIMPULAN

Perencanaan pembangunan daerah tidak dapat terlepas dari aspek kependudukan. Penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Sebagai subjek, karena para perencana, pengambil keputusan, dan pelaksana pembangunan adalah bagian dari penduduk itu sendiri. Sebagai objek, karena hasil dari pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk. Oleh karena itu, data kependudukan yang akurat menjadi syarat mutlak dalam proses perencanaan pembangunan. Kesalahan data dapat menyebabkan ketidakakuratan program, ketidaktepatan sasaran, bahkan ketidakpastian arah pembangunan.

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data kependudukan, perkembangan kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 menunjukkan dinamika yang cukup kompleks, baik dari aspek jumlah, persebaran, struktur penduduk, mobilitas, maupun kepemilikan dokumen kependudukan. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 tercatat sebanyak **52.211.020** jiwa, terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak **26.440.489** jiwa dan penduduk perempuan sebanyak **25.770.531** jiwa. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa struktur penduduk Jawa Barat masih didominasi oleh kelompok usia produktif. Penduduk usia muda (0–14 tahun) tercatat sebanyak **12.459.836** jiwa, penduduk usia produktif (15–64 tahun) sebanyak **35.899.618** jiwa, sedangkan penduduk usia tua (65 tahun ke atas) sebanyak **3.851.566** jiwa. Struktur umur tersebut memberikan potensi besar dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya pada sektor ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan pelayanan publik.

Dilihat dari karakteristik demografi, struktur umur penduduk Provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya potensi bonus demografi yang perlu dikelola secara optimal. Besarnya jumlah penduduk usia produktif menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, namun pada saat yang sama juga menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, serta penguatan keterampilan masyarakat. Sementara itu, jumlah penduduk usia muda yang masih cukup besar memerlukan dukungan melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut memerlukan perhatian melalui penyediaan layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan lingkungan yang ramah lansia. Dengan demikian, keseimbangan pembangunan antar kelompok umur menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Aspek keluarga juga menjadi bagian penting dalam melihat perkembangan kependudukan. Jumlah keluarga di Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak **17.600.237** keluarga dengan rata-rata jumlah anggota keluarga sebesar **3** jiwa per keluarga. Data ini memberikan gambaran mengenai struktur rumah tangga masyarakat dan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, serta program perlindungan keluarga. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur, jenis kelamin, status kawin, pendidikan, dan pekerjaan juga menjadi indikator penting untuk memahami kondisi sosial ekonomi keluarga di Jawa Barat.

Pada aspek kelahiran, data menunjukkan bahwa peristiwa kelahiran masih menjadi salah satu komponen penting dalam perubahan jumlah dan struktur penduduk. Jumlah kelahiran tercatat sebanyak 479.083 peristiwa. Data kelahiran tersebut tidak hanya menggambarkan pertumbuhan alami penduduk, tetapi juga menjadi dasar penting dalam perencanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pencatatan sipil, pendidikan dasar, serta program perlindungan sosial.

Dari sisi mobilitas penduduk, pergerakan penduduk dalam bentuk migrasi masuk dan migrasi keluar menunjukkan adanya dinamika perpindahan penduduk antarwilayah. Migrasi masuk merupakan perpindahan penduduk yang datang dan menetap di suatu wilayah, baik yang berasal dari kabupaten/kota lain di dalam Provinsi Jawa Barat maupun dari provinsi lain di Indonesia. Pada tahun 2025, jumlah migrasi masuk ke Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak **613.781** jiwa, yang terdiri atas migrasi masuk antar kabupaten/kota sebanyak **339.511** jiwa dan migrasi masuk antar provinsi sebanyak **274.270** jiwa. Sementara itu, migrasi keluar merupakan perpindahan penduduk yang meninggalkan wilayah tempat tinggalnya untuk menetap di wilayah lain, baik ke kabupaten/kota lain di Jawa Barat maupun ke provinsi lain. Jumlah migrasi keluar pada tahun 2025 tercatat sebanyak **553.480** jiwa, yang terdiri atas migrasi keluar antar kabupaten/kota sebanyak **355.829** jiwa dan migrasi keluar antar provinsi sebanyak **197.651** jiwa.

Tingginya arus migrasi masuk menunjukkan bahwa Jawa Barat masih menjadi daerah tujuan yang menarik karena peluang kerja, pendidikan, dan aktivitas ekonomi yang berkembang. Di sisi lain, migrasi keluar juga mencerminkan adanya mobilitas penduduk menuju wilayah lain untuk berbagai keperluan, seperti pekerjaan, pendidikan, maupun alasan keluarga. Migrasi antar kabupaten/kota menggambarkan dinamika perpindahan penduduk di dalam wilayah Provinsi Jawa Barat yang umumnya dipengaruhi oleh faktor kedekatan lokasi, akses pekerjaan, pendidikan, dan perumahan. Adapun migrasi antar provinsi menunjukkan hubungan mobilitas Jawa Barat dengan daerah lain di Indonesia, baik sebagai daerah tujuan maupun daerah asal migran.

Mobilitas penduduk ini dapat dipengaruhi oleh faktor pekerjaan, pendidikan, perkawinan, akses pelayanan, serta perkembangan kawasan ekonomi. Oleh karena itu, data mobilitas penduduk perlu dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah, pengendalian kepadatan penduduk, penyediaan sarana prasarana, dan penguatan pelayanan administrasi kependudukan.

Sementara itu, kepemilikan dokumen kependudukan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan. Pada tahun 2025, jumlah penduduk atau keluarga yang memiliki Kartu Keluarga tercatat sebanyak **17.345.323** dokumen dengan cakupan sebesar **98,55** persen. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) tercatat sebanyak **37.518.808** penduduk atau sebesar **98,77** persen dari penduduk wajib KTP. Kepemilikan akta kelahiran tercatat sebanyak **3.069.571** anak atau sebesar **88,93** persen dari jumlah anak usia 0–4 tahun (5 tahun kurang 1 hari) yang menjadi sasaran kepemilikan akta kelahiran. Selanjutnya, kepemilikan akta perkawinan tercatat sebanyak **17.019.364** dokumen atau sebesar **67,50** persen, kepemilikan akta perceraian sebanyak **596.778** dokumen atau sebesar **50,76** persen, jumlah penerbitan akta kematian tercatat sebanyak **400.872** dokumen. Secara umum, capaian kepemilikan dokumen kependudukan menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan telah berjalan dan terus mengalami peningkatan, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada beberapa jenis dokumen dan wilayah tertentu.

Kepemilikan dokumen kependudukan memiliki peran strategis karena menjadi dasar bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, jaminan sosial, layanan perbankan, pelayanan hukum, serta program pembangunan lainnya. Oleh karena itu, peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan perlu terus dilakukan melalui pelayanan reguler, pelayanan jemput bola, pemanfaatan teknologi informasi, integrasi data lintas sektor, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan.

Dengan demikian, perkembangan kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 menunjukkan bahwa data kependudukan memiliki peran penting sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah. Dinamika jumlah penduduk, struktur demografi, persebaran, mobilitas, serta kepemilikan dokumen kependudukan perlu terus dikelola secara terpadu, akurat, dan berkelanjutan. Penguatan kualitas data, peningkatan cakupan dokumen kependudukan, serta pemanfaatan data kependudukan lintas sektor menjadi langkah penting dalam



mendukung terwujudnya pelayanan publik yang efektif, perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Barat.

Sebagai penutup, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025* diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyediaan informasi kependudukan yang akurat, mutakhir, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang disajikan dalam buku ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sebagai bahan pendukung dalam perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, pelaksanaan pelayanan publik, serta evaluasi program pembangunan daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat menyadari bahwa penyusunan profil ini masih memerlukan penyempurnaan, baik dari sisi kelengkapan data, kedalaman analisis, maupun penyajian informasi. Oleh karena itu, saran, masukan, dan kerja sama dari berbagai pihak sangat diperlukan agar penyusunan profil kependudukan pada tahun-tahun berikutnya semakin berkualitas dan mampu mendukung pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

LAMPIRAN

JUMLAH WARGA NEGARA ASING

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
3201	BOGOR	1.326	6,81	591	3,04	1.917	9,85
3202	SUKABUMI	405	2,08	105	0,54	510	2,62
3203	CIANJUR	255	1,31	61	0,31	316	1,62
3204	BANDUNG	565	2,90	135	0,69	700	3,60
3205	GARUT	51	0,26	19	0,10	70	0,36
3206	TASIKMALAYA	19	0,10	7	0,04	26	0,13
3207	CIAMIS	19	0,10	1	0,01	20	0,10
3208	KUNINGAN	33	0,17	6	0,03	39	0,20
3209	CIREBON	511	2,63	147	0,76	658	3,38
3210	MAJALENGKA	357	1,83	143	0,73	500	2,57
3211	SUMEDANG	124	0,64	47	0,24	171	0,88
3212	INDRAMAYU	191	0,98	29	0,15	220	1,13
3213	SUBANG	709	3,64	122	0,63	831	4,27
3214	PURWAKARTA	299	1,54	141	0,72	440	2,26
3215	KARAWANG	1.043	5,36	145	0,75	1.188	6,11
3216	BEKASI	5.355	27,52	1.496	7,69	6.851	35,21
3217	BANDUNG BARAT	520	2,67	319	1,64	839	4,31
3218	PANGANDARAN	37	0,19	10	0,05	47	0,24
3271	KOTA BOGOR	306	1,57	134	0,69	440	2,26
3272	KOTA SUKABUMI	35	0,18	10	0,05	45	0,23
3273	KOTA BANDUNG	846	4,35	532	2,73	1.378	7,08
3274	KOTA CIREBON	119	0,61	63	0,32	182	0,94
3275	KOTA BEKASI	817	4,20	353	1,81	1.170	6,01
3276	KOTA DEPOK	517	2,66	221	1,14	738	3,79
3277	KOTA CIMAHI	95	0,49	27	0,14	122	0,63
3278	KOTA TASIKMALAYA	18	0,09	8	0,04	26	0,13
3279	KOTA BANJAR	13	0,07	1	0,01	14	0,07
TOTAL		14.585	74,96	4.873	25,04	19.458	100,00

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025

JUMLAH PENDUDUK ASING BERDASARKAN KEWARGANEGARAAN

NO	KEWARGANEGARAAN	JUMLAH
1	KOREA (THE REPUBLIC OF)	743
2	CHINA	654
3	JAPAN	382
4	INDIA	300
5	THAILAND	292
6	UNITED STATES OF AMERICA (THE)	254
7	MALAYSIA	226
8	NETHERLANDS (THE)	215
9	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (THE)	203
10	PAKISTAN	182
11	PHILIPPINES (THE)	171
12	AUSTRALIA	158
13	YEMEN	158
14	SINGAPORE	157
15	GERMANY	119
16	FRANCE	79
17	SAUDI ARABIA	77
18	NIGERIA	76
19	EGYPT	71
20	TURKEY	69
21	BANGLADESH	62
22	VIET NAM	56
23	CANADA	52
24	ITALY	42
25	PALESTINE, STATE OF	42
26	-	38
27	SRI LANKA	31
28	IRAQ	30
29	SYRIAN ARAB REPUBLIC	29
30	RUSSIAN FEDERATION (THE)	27
31	BELGIUM	25
32	SOUTH AFRICA	25
33	TIMOR-LESTE	24
34	AFGHANISTAN	22
35	ALGERIA	22



NO	KEWARGANEGARAAN	JUMLAH
36	NEW ZEALAND	22
37	SWITZERLAND	19
38	MYANMAR	17
39	SUDAN (THE)	17
40	TAIWAN (PROVINCE OF CHINA)	16
41	HONG KONG	15
42	JORDAN	15
43	SWEDEN	15
44	BRAZIL	14
45	MOROCCO	14
46	AUSTRIA	12
47	FINLAND	12
48	GHANA	12
49	SPAIN	12
50	POLAND	11
51	NEPAL	10
52	IRELAND	8
53	KUWAIT	8
54	COLOMBIA	7
55	DENMARK	7
56	KENYA	7
57	TUNISIA	7
58	UKRAINE	7
59	CZECHIA	6
60	MEXICO	6
61	OMAN	6
62	PERU	6
63	TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	6
64	UZBEKISTAN	6
65	CAMEROON	5
66	GUINEA	5
67	HUNGARY	5
68	KAZAKHSTAN	5
69	LEBANON	5
70	ROMANIA	5
71	UNITED ARAB EMIRATES (THE)	5



NO	KEWARGANEGARAAN	JUMLAH
72	ZAMBIA	5
73	BOSNIA AND HERZEGOVINA	4
74	ECUADOR	4
75	GREECE	4
76	LIBYA	4
77	MALAWI	4
78	NORWAY	4
79	PORTUGAL	4
80	SENEGAL	4
81	UGANDA	4
82	ZIMBABWE	4
83	BOTSWANA	3
84	BRUNEI DARUSSALAM	3
85	CAMBODIA	3
86	ETHIOPIA	3
87	FIJI	3
88	MADAGASCAR	3
89	MALDIVES	3
90	MALI	3
91	SERBIA	3
92	SIERRA LEONE	3
93	SLOVAKIA	3
94	SOLOMON ISLANDS	3
95	TAJIKISTAN	3
96	VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF)	3
97	ALBANIA	2
98	ARGENTINA	2
99	CHILE	2
100	CROATIA	2
101	CYPRUS	2
102	LIBERIA	2
103	LITHUANIA	2
104	LUXEMBOURG	2
105	MONGOLIA	2
106	NAMIBIA	2
107	PAPUA NEW GUINEA	2



NO	KEWARGANEGARAAN	JUMLAH
108	QATAR	2
109	RWANDA	2
110	ARMENIA	1
111	BAHAMAS (THE)	1
112	BARBADOS	1
113	BELARUS	1
114	BULGARIA	1
115	COMOROS (THE)	1
116	CÔTE D'IVOIRE	1
117	CUBA	1
118	DOMINICA	1
119	ERITREA	1
120	GRENADA	1
121	GUATEMALA	1
122	HONDURAS	1
123	ICELAND	1
124	IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	1
125	KYRGYZSTAN	1
126	LESOTHO	1
127	MAURITIUS	1
128	NAURU	1
129	PANAMA	1
130	SOMALIA	1
131	SURINAME	1
132	TURKMENISTAN	1
133	VANUATU	1
TOTAL		5.605

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2025



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat



(022) 2031044



Jl. Ciumbuleuit No.2, Kota Bandung, Jawa Barat 40131



disdukcapil.jabarprov.go.id